

**HUKUM KEWARISAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
SERTA PERSAMAAN DAN PERBEDAANNYA  
DENGAN HUKUM KEWARISAN  
SYAFI'I DAN HAZAIRIN**



**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**AHMAD ZAHARI  
B4B003046**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

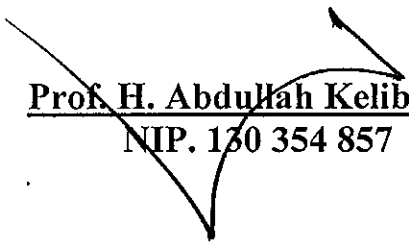
**HUKUM KEWARISAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
SERTA PERSAMAAN DAN PERBEDAANNYA  
DENGAN HUKUM KEWARISAN  
SYAFI'I DAN HAZAIRIN**

**Disusun oleh :**


**AHMAD ZAHARI  
B4B003046**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 18 Agustus 2005  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Menyetujui Pembimbing**

  
**Prof. H. Abdullah Kelib, S.H  
NIP. 130 354 857**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**

  
**H. Mulyadi, S.H., M.S  
NIP. 130 529 429**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2005

Yang membuat pernyataan



AHMAD ZAHARI, SH

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridha-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan studi dan menulis tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sesuai harapan.

Selama masa studi dan proses penulisan tesis ini, mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data berupa bahan-bahan kepustakaan serta pengolahan hasil penelitian sampai tersajinya tesis ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran dan tenaga yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSi, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Yunanto, SH., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

6. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, S.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dan penuh kesabaran telah membimbing serta mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
7. Bapak Zubaidi, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji Tesis yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan saran, masukan-masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini.
8. Ibu Ro'fah Setyowati, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji Tesis yang telah banyak memberikan saran, masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Son Haji, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji Tesis yang telah banyak memberikan saran, masukan dalam penulisan tesis ini.
10. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., sebagai Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
11. Ketua beserta Staf dan Karyawan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.
12. Pimpinan beserta Staf dan Karyawan Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Yayasan Al Hikmah dan Direktur Pembinaan Peradilan Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta.
13. Saudara-saudaraku tercinta serta rekan dan sahabat yang telah memberikan doa restu dan semangat serta dorongan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi maupun tesis ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu serta rekan-rekan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2003.

Mengingat terbatasnya waktu, biaya, serta pengalaman penulis, sudah barang tentu tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian ini adalah hasil maksimal yang dapat penulis upayakan. Untuk itu, selain memohon maaf atas keterbatasan dan kekurangannya, penulis juga memohon masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dalam rangka penyempurnaannya.

Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Agustus 2005

(AHMAD ZAHARI)

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL -----                                  | i       |
| HALAMAN PENGESAHAN -----                             | ii      |
| PERNYATAAN -----                                     | iii     |
| KATA PENGANTAR -----                                 | iv      |
| DAFTAR ISI -----                                     | vii     |
| DAFTAR LAMPIRAN -----                                | xii     |
| ABSTRAKS -----                                       | xiii    |
| ABSTRACT -----                                       | xiv     |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>                          |         |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian -----                 | 1       |
| 1.2. Perumusan Masalah -----                         | 6       |
| 1.3. Tujuan Penelitian -----                         | 7       |
| 1.4. Manfaat Penelitian -----                        | 7       |
| 1.5. Sistematika Penulisan -----                     | 8       |
| <b>BAB II    TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM</b> |         |
| 2.1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam -----          | 10      |
| 2.2. Unsur (Rukun) dan Syarat-Syarat Kewarisan ----- | 12      |
| 2.3. Sumber Hukum Kewarisan Islam -----              | 14      |
| 2.3.1. Al Qur'an -----                               | 14      |
| 2.3.2. Al Hadits -----                               | 26      |
| 2.3.3. Ijtihad -----                                 | 29      |

|   |    |
|---|----|
| 2.4. Sebab dan Penghalang Kewarisan -----                                       | 43 |
| 2.5. Azas-azas Hukum Kewarisan Islam -----                                      | 46 |
| 2.5.1. Azas Ijbari -----  | 46 |
| 2.5.2. Azas Bilateral -----   | 47 |
| 2.5.3. Azas Individual -----  | 47 |
| 2.5.4. Azas Keadilan yang Berimbang -----                                       | 47 |
| 2.5.5. Azas Akibat Kematian -----   | 48 |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN</b>  |    |
| 3.1. Ruang Lingkup -----  | 49 |
| 3.2. Metode Pendekatan -----  | 49 |
| 3.3. Spesifikasi Penelitian -----   | 51 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data -----  | 52 |
| 3.5. Metode Pengumpulan Data -----  | 54 |
| 3.6. Penyajian dan Analisa Data -----   | 55 |
| <br><b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                               |    |
| 4.1. Diskriminasi Dalam Hukum Kewarisan KHI -----                               | 56 |
| 4.1.1. Ahli Waris dan Penggolongannya -----                                     | 56 |
| 4.1.1.1. Dzawil Furudl -----  | 57 |
| 4.1.1.2. Asabah -----   | 59 |
| 4.1.1.3. Ahli Waris Pengganti -----   | 60 |
| 4.1.2. Keutamaan Antar Sesama Ahli Waris -----                                  | 62 |
| 4.1.3. Bibi Selaku Kerabat Pewaris Diwarisi Namun<br>Tidak Berhak Mewaris ----- | 64 |



|  |     |
|--|-----|
| 4.2. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut<br>Pasal 185 KHI dan Polemik dalam Pemahamannya -----                              | 67  |
| 4.2.1. Waris Pengganti Mengurangi Diskriminasi dan<br>Memberi Rasa Adil -----  | 67  |
| 4.2.2. Pengaturan Waris Pengganti dalam KHI<br>Terlalu Sempel -----  | 70  |
| 4.2.3. Waris Pengganti Menurut Pasal 185 KHI -----   | 72  |
| 4.2.4. Beda Pendapat dalam Memahami Kedudukan<br>dan Hak Waris bagi Ahli Waris Pengganti<br>Pasal 185 ayat (1) KHI -----       | 77  |
| 4.2.5. Implikasi Waris Pengganti Terhadap<br>Ahli Waris yang Lain -----  | 90  |
| 4.3. Istilah dan Dasar Hukum Pemberian Porsi Sama Besar<br>Kepada Cucu dari Anak Laki-laki dan<br>Anak Perempuan Pewaris ----- | 98  |
| 4.4. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Kewarisan<br>KHI, Syafi'i dan Hazairin Serta Rinciannya -----                        | 104 |
| 4.4.1. Hukum Kewarisan Patrilineal Syafi'i -----   | 105 |
| 4.4.1.1. Ahli Waris dan Penggolongannya -----  | 105 |
| 4.4.1.1.1. Dzawil Furudl -----   | 107 |
| 4.4.1.1.2. Asabah -----  | 109 |
| 4.4.1.1.3. Dzawil Arham -----  | 111 |
| 4.4.1.2. Hijab -----   | 118 |
| 4.4.1.2.1. Hijab Nuqshan -----   | 118 |
| 4.4.1.2.2. Hijab Hirman -----  | 118 |
| 4.4.2. Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin -----  | 122 |
| 4.4.2.1. Ahli Waris dan Penggolongannya -----  | 123 |
| 4.4.2.1.1. Dzawul Faraidl -----  | 124 |

|  |     |
|--|-----|
| 4.4.2.1.2. Dzawul Qarabat -----  | 126 |
| 4.4.2.1.3. Mawali -----  | 127 |
| 4.4.2.2. Keutamaan Antar Sesama Ahli Waris -----   | 131 |
| 4.4.2.3. Kalalah -----   | 134 |
| 4.4.3. Beberapa Masalah Dalam Pembagian Waris dan<br>Penyelesaiannya Menurut KHI, Syafi'i dan Hazairin - | 139 |
| 4.4.3.1. Cara Membagi dan Menghitung Waris -----   | 141 |
| 4.4.3.1.1. Penentuan Ahli Waris<br>dan Bagian-bagiannya -----  | 141 |
| 4.4.3.1.2. Penentuan Harta Warisan -----   | 143 |
| 4.4.3.1.3. Melaksanakan Pembagian -----  | 147 |
| 4.4.3.1.4. Contoh Perhitungan -----  | 148 |
| 4.4.3.1.5. Munasakhah -----  | 153 |
| 4.4.3.2. Masalah-masalah dalam Pembagian Waris<br>dan Penyelesaiannya -----                              | 158 |
| 4.4.3.2.1. Aul -----   | 158 |
| 4.4.3.2.2. Rad -----   | 161 |
| 4.4.3.2.3. Al Gharawain -----  | 166 |
| 4.4.3.2.4. Al Musyarakah -----   | 168 |
| 4.4.3.2.5. Kakek dan Saudara -----   | 170 |
| 4.4.3.3. Porsi Bagian Ahli Waris<br>Laki-laki dan Perempuan -----  | 175 |
| 4.4.3.4. Perdamaian dalam Pembagian Waris -----  | 186 |
| 4.4.4. Komparasi Antara Hukum Kewarisan KHI, Syafi'i,<br>dan Hazairin -----                              | 187 |

|  |            |
|--|------------|
| 4.4.4.1. Rincian Persamaan dan Perbedaan antara<br>Hukum Kewarisan KHI, Syafi'i dan Hazairin | 187        |
| 4.4.4.2. Beberapa Contoh -----   | 197        |
| 4.5. Keunggulan dan Kelemahan Hukum Kewarisan<br>KHI, Syafi'i dan Hazairin -----             | 214        |
| <b>BAB V    PENUTUP</b>  |            |
| 5.1. Kesimpulan -----  | 242        |
| 5.2. Saran -----   | 251        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>  | <b>254</b> |
| <b>LAMPIRAN -----</b>  | <b>262</b> |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran I Penelitian-Penelitian Kitab Figh Sebagai Sumber<br>Kompilasi Hukum Islam -----              | 262     |
| Lampiran II Daftar Ulama Dan Cendekiawan Sebagai Responden<br>Dalam Rangka Kompilasi Hukum Islam ----- | 264     |
| Lampiran III Pelaksanaan Wawancara Dengan Para Responden-----  | 269     |
| Lampiran IV Peserta Lokakarya Pembangunan Hukum Islam Melalui<br>Yurisprudensi -----                   | 273     |
| Lampiran V Penyusun Buku Pintar Hakim, Panitera dan Juru Sita<br>Pengadilan Agama-----                 | 276     |

## **ABSTRAKS**

### **HUKUM KEWARISAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PERSAMAAN DAN PERBEDAANNYA DENGAN HUKUM KEWARISAN SYAFI'I DAN HAZAIRIN**

**Ahmad Zahari  
B4B003046**

Kepastian hukum, keadilan, dan persamaan hak adalah pokok-pokok persoalan penting yang menjadi latar belakang dalam pengkajian terhadap tiga teori hukum kewarisan Islam di Indonesia. Tesis ini mengungkapkan permasalahan tersebut secara komparatif. Tujuan utama penelitian ini untuk mengungkapkan beberapa masalah disekitar kewarisan KHI dan membandingkannya dengan teori Syafi'i dan Hazairin.

Sesuai metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif didukung oleh yuridis historis dan yuridis komparatif maka datanya disajikan secara kualitatif dengan menggunakan analisa deskriptif dan preskriptif, yang bertitik tolak dari analisa yuridis, sistematis, dan analisa komparatif.

Dari hasil penelitian diperoleh kenyataan bahwa ketiga teori menggolongkan ahli waris atas tiga golongan, mengenal ahli waris pengganti, mengenal rad, mengenal hijab, mempertahankan porsi bagian warisan 2:1. Perbedaannya, teori Syafi'i diskriminasi dalam menentukan ahli waris, Hazairin tidak mengenal diskriminasi, dan KHI walau bercorak bilateral namun masih mengandung sifat diskriminasi. Perbedaan lain, KHI dan Syafi'i membedakan arti kalalah an Nisa ayat 11 dan 12 baik dari segi keadaan pewaris maupun peruntukannya bagi ahli waris, sedangkan Hazairin membedakannya hanya dari segi keadaan pewaris. Terhadap rad, waris pengganti, wasiat dan hibah serta beberapa hal yang lain, ketiga teori juga berbeda pendapat. Adapun keunggulan dan kelemahan masing-masing teori terletak pada perbedaan-perbedaan tersebut.

Khusus kewarisan KHI, pengaturannya yang terlalu simpel dan ragu dalam menentukan besarnya bagian ahli waris pengganti, dapat menjadi penghambat upaya memberikan keadilan dan persamaan hak kepada semua kerabat dalam perolehan warisan. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi sumber lahirnya putusan yang saling berdisparitas yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

## **ABSTRACT**

### **INHERITANCE LAW IN NATIONAL ISLAMIC LAW (KHI) AND ITS SIMILARITY AND DIFFERENCES WITH SYAFI'I AND HAZAIRIN INHERITANCE LAW**

**Ahmad Zahari  
B4B003046**

In studying Islamic law, especially inheritance law in Indonesia, there are three important issues to be considered such as the legal certainty, fairness and equality before law. This thesis will discuss those issues in comparative study. The main objective is to reveal some issues in KHI inheritance system and comparing it with inheritance system in Syafi'i and Hazairin.

This is a normative legal research based on historical legal study and comparative legal study. The research data will be compiling in qualitative method and analyzed in descriptive and prescriptive based on comparative and systematize legal analyzed method.

Those three theories had classified heir and heiress into three categories; acknowledge substitute heir, rad and hijab; and still retaining 2:1 heritage portion. These theories also had some differences such as in discrimination, Syafi'i is discriminating in appointing the heir; Hazairin is not discriminating; KHI still discriminative even has its bilateral view. KHI and Syafi'i also distinguishing the meaning of kalalah an Nisa paragraph 11 and 12 in the matters of heir's condition and its objectives; Hazairin only mention it with heir's condition. The three theories also had differences on rad; substitution heir; testament; grant and something else. Those differences are leading us to their own excellence and weakness.

KHI (National Islamic Law) is too simple and unsure in appointing heritage portion substitute; it will become barrier in fairness & equality before law to all families in inheritance. It also will create legal disparities that will increase legal uncertainty.

*Keywords: Islamic Law; Inheritance*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam sumbernya diambil dan digali dari al Qur'an, al Hadits dan Ijtihad para ahli sesuai amanat yang terkandung dalam al Qur'an Surat an Nisa ayat 59 dan Hadits Mu'az bin Jabal. Oleh karena al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, maka para ahli far'idl dalam menetapkan garis hukum tentang kewarisan pertama akan melihat pada al Qur'an, jika tidak ditemukan ketentuannya akan melihat kepada Hadits, dan jika tidak ditemukan juga maka para ahli akan menentukan sendiri garis hukumnya melalui Ijtihad.

Al Qur'an sebagai sumber hukum, ayat-ayatnya yang mengatur tentang kewarisan tidak dapat langsung diterapkan, melainkan harus dipelajari dan dipahami secara seksama ayat demi ayat yang terkait satu dengan yang lain, atau harus dipelajari dan dipahami arti dan makna kata-katanya, seperti kata "walad" dalam surat an Nisa ayat 11, atau kata "kerabat" dalam Surat an Nisa ayat 7 dan 33, Surat al Anfal ayat 75 dan al Ahzab ayat 6, atau jenis hubungan persaudaraan yang dimaksud dalam Surat an Nisa ayat 12 dan 176, atau masalah sisa harta (rad) yang belum ada pengaturannya di dalam al Qur'an dan Hadits, atau masalah kakek dan saudara dan lain-lain agar setiap orang selaku ahli waris dapat memperoleh haknya secara adil dan benar.

Dalam rangka upaya pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan tersebut, maka muncullah pendapat-pendapat yang berbeda antara para ahli fara'idl dari golongan satu (ahlussunnah) dengan golongan yang lain (Syi'ah atau dhahiri), bahkan antara para ahli fara'idl yang berada dalam satu golongan seperti antara Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan juga para murid atau pengikut-pengikutnya. Diantara pendapat-pendapat tersebut, yang populer (dianut) di Indonesia adalah pendapat Imam Syafi'i sesuai surat edaran kepala Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI tanggal 18 Februari 1958 nomor B/I/735.

Sejalan dengan upaya untuk mengadakan pembaharuan hukum Islam, Hazairin pada pertengahan tahun 50-an telah memperkenalkan teori hukum kewarisan Islam hasil ijtihadnya yang bercorak bilateral. Teori Hazairin ini sudah barang tentu berbeda dengan paham kewarisan syafi'i yang bercorak patrilineal. Ciri dari hukum kewarisan patrilineal Syafi'i adalah pertama ada diskriminasi antara kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan, dan kedua penggantian ahli waris bersifat sangat terbatas. Sedangkan ciri dari kewarisan bilateral Hazairin adalah pertama tidak ada diskriminasi antara kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan, dan kedua penggantian ahli waris tidak terbatas.

Ciri atau perbedaan lain antara keduanya adalah penafsiran terhadap QS IV (an Nisa) ayat 12 dan 176 (kalalah). Menurut Syafi'i an Nisa ayat 176 adalah perolehan hak waris untuk saudara sekandung dan seayah, sedangkan an Nisa ayat 12 perolehan hak waris untuk saudara seibu. Hazairin tidak membedakan kedua ayat tersebut menurut jenis hubungan persaudaraan. Ayat 12 untuk semua jenis



saudara (seibu, sekandung, dan seayah) dan ayat 176 juga untuk semua jenis saudara. Perbedaan antara kedua ayat ini adalah ayat 12 saat pewaris mempunyai ayah, dan ayat 176 saat pewaris tidak mempunyai ayah, dan lain-lain perbedaan.

Tindak lanjut dari upaya pembaharuan terhadap hukum kewarisan Islam ialah, pada tahun 1988 lahir kompilasi hukum Islam yang buku ke-II nya mengatur tentang kewarisan. Walau hukum kewarisan kompilasi hukum Islam tidak sama persis dengan hukum kewarisan bilateral Hazairin, namun antara keduanya ada kesamaan ciri dasarnya yaitu dalam hal penggantian, pertama tidak ada diskriminasi antara kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan, dan kedua penggantian ahli warisnya tidak terbatas. Sedangkan perbedaannya dengan kewarisan Hazairin ialah tentang penafsiran terhadap kalalah QS IV (an Nisa) ayat 12 dan 176, karena KHI mengikuti paham Syafi'i.

Dengan demikian berarti masyarakat Islam Indonesia telah mengenal atau memiliki 3 macam teori hukum kewarisan Islam, yaitu hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, hukum kewarisan bilateral Hazairin dan hukum kewarisan KHI. Diantara ketiganya, yang berlaku atau paling tidak diinstruksikan untuk dijadikan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah utamanya para Hakim di lingkungan Pengadilan Agama dan masyarakat Islam yang memerlukannya adalah hukum kewarisan KHI, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991. Namun demikian, hukum kewarisan Syafi'i disana-sini masih tetap dipergunakan, tidak saja oleh masyarakat Islam, melainkan juga oleh para Hakim di lingkungan Pengadilan Agama sendiri. Oleh karena itu, maka hukum kewarisan Syafi'i ini masih sangat relevan untuk dipelajari. Sedangkan hukum kewarisan Hazairin, walau tidak diterima oleh sebagian besar kalangan

ahli fara'idl di Indonesia, namun ada bagian-bagian dari hukum kewarisan ini yang kebenaran argumentasinya tidak dapat dibantah. Oleh karenanya dalam rangka pengkajian secara akademis teori ini masih sangat perlu dan relevan untuk dipelajari.

Mempelajari dan mengungkapkan ketiga teori hukum kewarisan Islam tersebut secara bersamaan dalam satu pembahasan adalah penting, tidak hanya sekedar usaha untuk membandingkannya satu dengan yang lain serta mencari kelemahan dan keunggulan masing-masing, tetapi juga dalam rangka pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam secara komprehensif yakni pemahaman terhadap konsep dasar hukum kewarisan Islam beserta teori-teorinya (*ius constituendum*) dan hukum kewarisan Islam yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia (*ius constitutum*).

Dan dari segi praktis, kewarisan KHI berfungsi sebagai hukum terapan, sedangkan hukum kewarisan Syafi'i dan Hazairin dapat merupakan doktrin-doktrin yang dapat dipilih guna mengisi kekosongan (*rectsvacuum*) terhadap KHI yang secara normatif belum membahas tuntas semua permasalahan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Hukum kewarisan KHI sebagai hukum kewarisan baru, ada kecenderungan Pasal-Pasalnya ditafsirkan dengan bermacam-macam penafsiran oleh para ahli, pengamat dari kalangan praktik sendiri sesuai sudut pandang masing-masing, terutama Pasal 185 yang intinya menegaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (ayat 1). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (ayat 2).

Secara redaksional isi dan makna yang terkandung dalam Pasal ini sudah jelas. Akan tetapi karena Pasal ini merupakan Pasal yang penting karena isinya dapat mewarnai hukum kewarisan KHI secara keseluruhannya, maka banyak ahli khususnya dari kalangan praktisi berusaha membuat penafsiran sendiri agar sejalan dengan paham kewarisan yang mereka anut. Sebagai contoh Raihan A. Rasyid, ia berpendapat bahwa penggantian dalam Pasal 185 ayat (1) tidak bersifat mutlak, artinya “mungkin dapat diganti dan mungkin tidak dapat diganti”, terserah pada pertimbangan hakim menurut kasus demi kasus, dan bukan menurut hukum dalam fungsi mengatur yang berlaku umum.<sup>1</sup>

Demikian pula Pasal 185 ayat (2), kalangan hakim pengadilan agama dalam Buku Pintar PTA Sulawesi Selatan berpendapat bahwa bagian untuk cucu meskipun dari anak laki-laki dan bagian untuk anak perempuan, adalah sama (1/2-1/2). Menurut mereka pemberian porsi yang sama itu berdasarkan pada Pasal 185 ayat (2).<sup>2</sup>

Penafsiran Raihan A. Rasyid terhadap Pasal 185 ayat (1) dan kalangan Hakim PA terhadap Pasal 185 ayat (2) jelas tidak sejalan dengan bunyi redaksi Pasal 185 itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat mengungkapkan persamaan dan perbedaan (membandingkan antara hukum kewarisan KHI dengan hukum kewarisan Syafi'i dan Hazairin, maka Pasal tersebut harus dikaji terlebih dahulu secara teliti dan seksama, sehingga diperoleh suatu pengertian yang dapat diterima secara umum untuk kemudian baru dijadikan sebagai pedoman dalam mengungkapkan persamaan dan perbedaan (perbandingan)nya.

<sup>1</sup> Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI (November - Desember), 1995, hal. 54-67.

<sup>2</sup> *Buku Pintar Hakim, Panitera dan Juru Sita*, PTA Sulawesi Selatan, 1998, hal. 98-99.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut, menulis dan menuangkannya ke dalam tulisan ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam Serta Persamaan dan Perbedaannya Dengan Hukum Kewarisan Syafi’i dan Hazairin”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi masalah dalam tesis ini adalah ;

1. Apakah hukum kewarisan KHI yang bercorak bilateral telah sepenuhnya menghapus diskriminasi?
2. Apakah ahli waris pengganti menurut Pasal 185 ayat (1) KHI selalu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris seperti halnya plaatsvervulling yang diatur dalam KUH Perdata, sehingga kedudukannya bersifat pasti?
3. Apakah pemberian porsi yang sama besar kepada cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan pewaris merupakan garis hukum Pasal 185 ayat (2) KHI, sehingga istilah yang digunakan dalam Buku Pintar Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama PTA Sulawesi Selatan tahun 1998, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan?
4. Bagaimanakah rincian persamaan dan perbedaan antara Hukum Kewarisan KHI, Hukum Kewarisan Syafi’i dan Hukum Kewarisan Hazairin?
5. Dimana letak keunggulan dan kelemahan teori Hukum Kewarisan KHI, Syafi’i dan Hazairin?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan apakah hukum kewarisan KHI yang bercorak bilateral telah sepenuhnya menghapus diskriminasi.
2. Untuk mengetahui secara pasti (ketegasan) kedudukan ahli waris pengganti sebagai pengganti orang tuanya yang meninggal lebih dulu daripada pewaris berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KHI.
3. Untuk mengetahui kebenaran istilah yang digunakan dalam Buku Pintar (Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama) Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan tahun 1998 dalam memberikan porsi yang sama kepada cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan pewaris yang menggunakan Pasal 185 ayat (2) KHI sebagai dasarnya.
4. Untuk mengetahui, memahami dan mengungkapkan rincian persamaan dan perbedaan antara Hukum Kewarisan KHI, Hukum Kewarisan Syafi'i dan Hukum Kewarisan Hazairin.
5. Untuk mengetahui dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan dari Hukum Kewarisan Syafi'i, Hazairin dan KHI.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, merupakan sumbangan pemikiran (kontribusi) berupa perbendaharaan dalam bentuk konsep-konsep pemikiran, pemahaman atau teori dalam khasanah ilmu hukum pada umumnya dan hukum kewarisan

Islam khususnya, terutama sekali menyangkut aspek-aspek hukum yang timbul dari masalah kewarisan dan kekeluargaan akibat kematian pewaris yang secara normatif dasar-dasar atau sumbernya telah ada dalam al Qur'an. Hadits dan Ijtihad para ahli, kemudian dikaji dan telah diformat dalam bingkai hukum kewarisan KHI, Syafi'i dan Hazairin, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan dan kajian informasi yang bersifat ilmiah guna penyempurnaannya.

2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam rangka mewujudkan keinginan atau rencana untuk menjadikan KHI sebagai hukum terapan, dan bagi para praktisi hukum yakni Hakim, pengacara di lingkungan Peradilan Agama, serta masyarakat Islam lainnya yang memerlukan, diharapkan dapat mengambil manfaat dan menjadi masukan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kewarisan, sehingga setiap orang selaku ahli waris dapat memperoleh haknya secara adil dan benar sesuai tuntutan Syari'ah.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Uraian Tentang Hasil Penelitian, dan Bab V Penutup.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam. Bab ini menguraikan dasar-dasar dan teori-teori tentang hukum kewarisan Islam pada umumnya meliputi pengertian hukum kewarisan Islam, unsur dan syarat-syarat kewarisan, sumber hukum kewarisan sebab dan penghalang kewarisan serta azas-azas hukum kewarisan Islam.

Bab III merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini, yakni penjelasan tentang ruanglingkup, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode atau teknik pengumpulan data, serta penyajian dan analisis data.

Bab IV merupakan pengungkapan tentang hasil dan pembahasan yang terdiri dari uraian mengenai diskriminasi dalam hukum kewarisan KHI. Uraian mengenai kedudukan dan hak mewaris bagi ahli waris pengganti menurut Pasal 185 ayat 1 KHI dan perbedaan pendapat dalam penafsirannya. Uraian mengenai istilah dan dasar hukum pemberian porsi sama besar kepada cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan pewaris. Uraian mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan KHI, hukum kewarisan Syafi'i dan hukum kewarisan Hazairin serta rinciannya, dan uraian mengenai keunggulan dan kelemahan ketiga teori hukum kewarisan tersebut.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

#### 2.1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti dialami oleh setiap orang, karena itu adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Namun yang menjadi permasalahan ialah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan atau tirkah. Permasalahannya ialah siapa di antara kerabat (ahli waris) yang ia tinggalkan berhak atas harta tersebut, berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya. Hal tersebut haruslah diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut dalam ilmu hukum dinamakan hukum kewarisan, yang di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah faraidl, bentuk jamak dari kata tunggal faridlah. Karena faridlah berarti suatu bagian tertentu maka faraidl dapat berarti beberapa bagian tertentu atau bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian tertentu itu diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu tadi menerima bagian tertentu untuk kasus atau dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, faraidl dapat diartikan bagian-bagian tertentu untuk orang-orang tertentu dalam kasus atau keadaan tertentu pula.

*Adapun pengertian hukum kewarisan Islam itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat pada Pasal 171a yaitu, hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan*



*siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin :<sup>1</sup>*

*Hukum kewarisan Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada Wahyu Ilahi yang terdapat dalam al Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah Arab disebut Faraidl.*

Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur *tentang* cara-cara peralihan hak milik atas harta warisan dari tangan pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan pengaturan tersebut dilakukan dengan cara menentukan siapa-siapa yang berhak mendapat warisan, berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya. Orang yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan disebut pewaris, harta yang ditinggalkan disebut harta warisan atau harta peninggalan atau tirkah, dan orang-orang yang berhak mendapatkan harta tersebut disebut ahli waris.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa ajaran kewarisan Islam berbeda dengan ajaran kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dimana menurut ajaran kewarisan Islam peralihan atau yang dialihkan hanya terbatas pada (peralihan) hak untuk menerima harta warisan, tidak diikuti dengan peralihan beban kewajiban yang ditinggal mati oleh pewaris, sedangkan menurut ajaran kewarisan KUH Perdata, para ahli waris tidak semata-mata diberi hak untuk mewarisi harta tetapi juga berkewajiban memikul beban antara lain berupa

---

<sup>1</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, halaman 3-4.

hutang yang ditinggal mati oleh pewaris, hal tersebut sejalan dengan pengertian hukum kewarisan yang dirumuskan oleh Wirjono Prodjodikoro, yakni “soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>2</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam memang ada kewajiban untuk menyelesaikan masalah hutang, belanja kematian dan lain-lain, namun penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan harta warisan yang ada, dan kewajiban tersebut pemenuhannya terbatas pada jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Jika beban kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris melebihi jumlah harta warisan, maka para ahli waris tidak berkewajiban untuk mencukupkannya. Namun jika ada ahli waris secara suka rela memenuhi kewajiban tersebut secara penuh, menurut Islam itu hanyalah merupakan kebajikan, bukan kewajiban.

## **2.2. Unsur (Rukun) dan Syarat-Syarat Kewarisan**

Pewaris (al Muwarris), ahli waris (al Waris), dan harta warisan (al Maurus) adalah tiga rukun kewarisan dalam Islam. Sedangkan syarat kewarisan adalah syarat-syarat yang ditetapkan untuk semua rukun kewarisan tersebut.

Pewaris adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang telah meninggal dunia. Syaratnya, pertama orang yang meninggal itu beragama Islam (Pasal 171 huruf b KHI), kedua mempunyai harta yang dapat diwarisi oleh para

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 13.

ahli warisnya, dan ketiga orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia baik dalam arti yang sesungguhnya (hakiki), secara yuridis (hukmi), atau berdasarkan sangkaan ahli (taqriry). Mati hakiki dapat diartikan sebagai kematian yang terjadi dengan segala sebab, nyata dan tanpa memerlukan proses pembuktian. Mati hukmy merupakan kematian yang dipersangkakan secara yuridis terhadap seseorang yang tidak diketahui secara pasti tentang mati hidupnya seperti dalam kasus seseorang dinyatakan hilang (mafqud) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya, namun dengan keputusan pengadilan ia dinyatakan telah meninggal dunia. Dan mati taqriry dapat diartikan sebagai kematian seseorang atas persangkaan yang dianggap pasti, misalnya seorang serdadu yang hilang dalam peperangan, penumpang kapal yang tenggelam, penumpang pesawat yang terjatuh dan sebagainya yang tidak diketemukan.

Ahli waris merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sejumlah orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, yakni hubungan keluarga, perkawinan atau hubungan lainnya. Syarat menjadi ahli waris adalah, pertama beragama Islam (Pasal 171 huruf c KHI), kedua ia hidup saat pewaris meninggal dunia atau jika ia meninggal lebih dahulu ada anak atau cucu sebagai penggantinya (lihat Pasal 185 ayat (1) KHI), dan ketiga tidak terhalang untuk mendapatkan warisan.

Harta warisan (al Maurus) adalah segala sesuatu yang ditinggal mati oleh pewaris, baik berupa harta benda maupun hak-hak yang menjadi milik atau kepunyaan pewaris semasa hidupnya, termasuk klaim asuransi. Namun terhadap klaim asuransi berlaku adagium *lex spesialis derogat lex generale*. Istilah lain yang juga lazim dipergunakan ialah "tirkah". Istilah ini biasanya dipergunakan

untuk harta warisan yang belum dimurnikan, yakni belum dikeluarkan hak-hak yang ada hubungannya dengan harta warisan tersebut, dan dalam KHI disebut harta peninggalan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian pewaris, ahli waris dan harta warisan dimuat dalam Pasal 171 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*
- c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*
- d. *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.*
- e. *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*

### 2.3. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sebagai bagian dari hukum Islam, hukum kewarisan Islam mempunyai sumber yang sama dengan sumber hukum Islam. Untuk itu, dengan mengacu pada al Qur'an Surat IV (an Nisa) ayat 59 dan Hadits Mu'as bin Jabal, sumber hukum kewarisan Islam itu ada tiga yaitu al Qur'an, al Hadits atau Sunnah Rasul dan Ijtihad para ahli. Dari ketiga sumber hukum inilah ketentuan-ketentuan tentang kewarisan itu digali dan dikembangkan.

#### 2.3.1. Al Qur'an

Menurut keyakinan umat Islam sebagaimana diungkapkan oleh Maurice Bucaille (1979 : 185) :<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1996 halaman 70.

*Al Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman-firman) Allah Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.*

Sebagai sumber hukum, al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia memuat kaedah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan sesuai keperluan menurut waktu, tempat serta keadaan.

Di bidang kewarisan, ayat-ayat al Qur'an ada yang memuat ketentuan yang telah jelas dan terinci mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing seperti tertuang dalam surat an Nisa ayat 11, 12 dan 176, dan ada pula ayat-ayat yang memuat ketentuan kewarisan yang bersifat umum seperti tertuang dalam surat an Nisa ayat 7 dan 33, al Anfal ayat 75, dan al Ahzab ayat 6. Ayat-ayat kewarisan yang bersifat umum selain memuat ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar adanya hak saling mewaris antara pewaris dan ahli waris, juga dijadikan sebagai dasar bagi kemungkinan adanya ahli waris lain (yang tidak disebut dalam surat an Nisa ayat 11, 12 dan 176) dari kalangan keluarga yang dalam keadaan tertentu berhak mendapat warisan. Oleh karena itu ayat-ayat tersebut perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.

Adapun ayat-ayat al Qur'an yang mengatur tentang kewarisan secara jelas dan rinci adalah sebagai berikut :

### 1. Surat an Nisa ayat 11 :

Ayat ini mengatur perolehan warisan bagi anak, ibu, dan bapak serta soal wasiat dan hutang. Tafsirnya adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

*Allah menyareatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak ; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Surat an Nisa ayat 11 ini menetapkan beberapa garis hukum yaitu :

- 1) Anak perempuan jika hanya seorang saja bagiannya seperdua harta.
- 2) Jika anak perempuan itu ada dua orang atau lebih bagiannya dua pertiga.
- 3) Jika anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan.
- 4) Ibu dan bapak bagiannya masing-masing seperenam harta jika pewaris mempunyai anak.
- 5) Jika pewaris tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka bagian Ibu sepertiga harta.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, Jakarta, 1979 halaman 116.

- 6) Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam harta.
- 7) Pembagian warisan tersebut dilakukan setelah dikeluarkan wasiat dan hutang pewaris.

## 2. Surat an Nisa ayat 12

Ayat ini mengatur perolehan warisan bagi duda, janda dan saudara-saudara serta soal wasiat dan hutang. Tafsirnya adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutang. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Menurut kalangan Ahlussunnah Wal Jama'ah, Surat an Nisa ayat 12 ini adalah perolehan warisan bagi saudara seibu disamping duda dan janda.

Garis Hukumnya adalah :

---

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 117.

- 1) Duda bagiannya seperdua harta jika pewaris tidak mempunyai anak.
- 2) Jika pewaris mempunyai anak maka bagian duda seperempat harta.
- 3) Janda bagiannya seperempat harta jika pewaris tidak mempunyai anak.
- 4) Jika pewaris mempunyai anak maka bagian janda seperdelapan harta.
- 5) Saudara (seibu) bagiannya seperenam harta jika hanya seorang saja.
- 6) Jika saudara (seibu) itu ada dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama memperoleh sepertiga harta.
- 7) Pembagian warisan tersebut dilakukan setelah dikeluarkan wasiat dan hutang pewaris.

### 3. Surat an Nisa ayat 176

Ayat ini menerangkan tentang arti kalalah dan mengatur perolehan warisan untuk saudara (sekandung atau seapak) dalam hal kalalah. Tafsirnya adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 153.



Menurut kalangan Ahlussunnah Wal Jama'ah, surat an Nisa ayat 176 ini diperuntukkan bagi saudara sekandung dan seayah, dan garis hukumnya adalah :

- 1) Saudara perempuan jika hanya seorang saja dan pewaris tidak mempunyai anak, bagiannya seperdua harta.
- 2) Jika saudara perempuan itu ada dua orang atau lebih dan pewaris tidak mempunyai anak, bagiannya dua pertiga harta.
- 3) Jika saudara perempuan itu mewaris bersama saudara laki-laki dan pewaris tidak mempunyai anak, maka mereka bersama-sama menghabiskan semua harta dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.

Ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam sama pendiriannya dengan Ahlussunnah Wal Jamaah, menafsirkan surat an Nisa ayat 12 untuk saudara seibu dan surat an Nisa ayat 176 untuk saudara sekandung dan seayah, dengan garis hukum seperti tersebut di atas. Sebaliknya ajaran kewarisan bilateral Hazairin tidak membedakan kedua ayat tersebut menurut jenis persaudaraan. An Nisa ayat 12 tidak hanya mengatur perolehan warisan saudara seibu tetapi juga saudara sekandung dan seayah, demikian pula an Nisa 176 tidak hanya mengatur perolehan warisan bagi saudara sekandung dan seayah tetapi juga saudara seibu. Menurut Hazairin, perbedaan antara kedua ayat tersebut adalah :

- 1) Surat an Nisa ayat 12 mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan, tetapi ada meninggalkan saudara beserta ayah.

- 2) Surat an Nisa ayat 176 mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan tetapi ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayah telah mati terlebih dahulu.

Menurut Hazairin, Surat an Nisa ayat 12 tafsirnya adalah sebagai berikut, yaitu :<sup>7</sup>

- a. *Bagimu seperdua dari harta peninggalan isteri-isterimu, jika bagi isteri-isterimu itu tidak ada anak;*
- b. *Bagimu seperempat dari harta peninggalan isteri-isterimu, jika bagi isteri-isterimu itu ada anak;*
- c. *Bagi isteri-isterimu sebagai janda peninggalanmu seperempat dari harta peninggalanmu, jika bagimu tidak ada anak;*
- d. *Bagi isteri-isterimu sebagai janda peninggalanmu seperdelapan dari harta peninggalanmu, jika bagimu ada anak;*
- e. *Pembagian yang dimaksud dalam IV : 12 huruf a sampai dengan d itu adalah setelah dikeluarkan wasiat atau/dan hutangmu;*
- f. *Jika seseorang, laki-laki maupun perempuan, diwarisi secara kalalah dan baginya ada seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan maka bagi saudara itu masing-masing seperenam dari harta peninggalannya;*
- g. *Jika seseorang, laki-laki maupun perempuan, diwarisi secara kalalah dan baginya ada beberapa orang saudara, semua laki-laki atau semuanya perempuan atau semuanya campuran antara laki-laki dan perempuan, maka semua saudara itu berbagi sama rata atas sepertiga bagian dari harta peninggalannya;*
- h. *Pembagian yang dimaksud dalam IV : 12 huruf f dan g itu adalah setelah dikeluarkan wasiat atau/dan hutangnya, dengan tidak boleh seorangpun mengumpat karena terasa dirugikan (ghaira mudarrin), atau dengan tidak boleh ada diskriminasi yang merugikan.*

Sedangkan surat an Nisa ayat 176 tafsirnya menurut Hazairin adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. *Atas pertanyaan mereka kepadamu. (Muhammad) jawablah bahwa penjelasan Allah mengenai orang yang mati "kalalah" ialah : "Jika seseorang, laki-laki atau perempuan, meninggal dunia dengan tidak ada baginya anak (walad)";*

<sup>7</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1982, halaman 7.

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 10.

- b. *Dan jika orang mati kalalah itu ada baginya seorang saudara perempuan maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta peninggalannya;*
- c. *Jika yang mati kalalah itu seorang saudara perempuan dan ia hanya mempunyai seorang saudara laki-laki saja, (ataupun lebih dari seorang), maka saudara laki-lakinya itu mewarisinya;*
- d. *Jika bagi yang mati kalalah itu dua orang saudara perempuan (atau lebih dari dua orang) maka bagi mereka ini duapertiga dari harta peninggalannya;*
- e. *Jika bagi yang mati kalalah itu ada beberapa saudara (ikhwatun), laki-laki maupun perempuan jenisnya, maka pembagian antara mereka ini ialah : seorang laki-laki mendapat dua kali sebanyak bagian seorang perempuan.*

Di samping ayat-ayat yang mengatur kewarisan secara jelas dan rinci, ada pula ayat-ayat al Qur'an yang hanya memuat ketentuan dasar yang bersifat umum. Ayat ini seperti telah dikemukakan di atas selain menjadi dasar bagi adanya hak saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris, juga dapat menjadi dasar bagi kemungkinan adanya ahli waris lain dari kalangan keluarga yang tidak disebut di dalam surat an Nisa ayat 11, 12, dan 176, tetapi dalam keadaan tertentu berhak mendapat warisan. Ayat-ayat tersebut adalah :

#### 4. Surat an Nisa ayat 7

Ayat ini menerangkan tentang adanya hak waris baik bagi laki-laki maupun perempuan terhadap harta warisan ibu, ayah dan kerabatnya, sedikit atau banyak menurut cara yang telah ditentukan. Tafsirnya adalah:<sup>9</sup> *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta*

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *loc. cit.*

*peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.*

## 5. Surat an Nisa ayat 33

Ayat ini menerangkan bahwa Allah menjadikan pewaris-pewaris (ahli waris) bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggal mati oleh ibu bapak dan kerabat. Tafsirnya adalah : *“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta ditinggalkan ibu Bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”*<sup>10</sup>

Ahli waris-ahli waris yang dimaksud dalam surat an Nisa ayat 33 ini menurut kalangan Ahlussunnah dan ajaran patrilineal Syafi’i adalah ahli waris-ahli waris yang disebut dalam surat an Nisa ayat 11, 12 dan 176. Sebaliknya Hazairin menjadikan ayat ini sebagai dasar bagi adanya ahli waris pengganti yang ia namakan “mawali”.

Menurut Hazairin, surat an Nisa ayat 33 tafsirnya adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. *Dan bagi setiap orang itu aku Allah telah mengadakan ahli waris (mawali) bagi harta peninggalan ibu bapak dan keluarga dekat (al aqrabun);*
- b. *Dan bagi setiap Orang itu aku Allah telah mengadakan ahli waris (mawali) bagi harta peninggalan seseorang dengan siapa kamu telah mengikat janji;*
- c. *Karena itu (atas alasan tersebut dalam IV: 33 huruf a dan b itu) maka berikanlah kepada mereka itu, yakni kepada mawali itu, bagiannya masing-masing.*

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.* halaman 122.

<sup>11</sup> Hazairin, *op. cit.* halaman 8.

## 6. Surat al Anfal ayat 75

Ayat ini menerangkan bahwa yang menjadi dasar kewarisan (waris mal waris) dalam Islam ialah hubungan keluarga, bukan hubungan persaudaraan antara sesama Muslim semata-mata seperti yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada permulaan Islam. Tafsirnya adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

*Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

## 7. Surat al Ahzab ayat 6

Ayat ini menerangkan tentang keutamaan ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga dibandingkan dengan hubungan antara sesama Muslim atau hubungan seagama dalam perolehan harta warisan. Keinginan untuk berbuat baik kepada sesama Muslim dapat dilakukan dengan jalan wasiat, bukan melalui pemberian hak untuk saling mewaris. Tafsirnya adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

*Orang-Orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewaris) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang yang Mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudara (seagama). Adalah yang demikian itu lebih tertulis dalam kitab (Allah).*

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, op. cit. halaman 274.

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 667.

Ayat-ayat al Qur'an lain yang ada kaitannya dengan masalah kewarisan langsung atau tidak langsung dapat dibaca dalam surat al Baqarah ayat 180, surat al Baqarah ayat 240, surat an Nisa ayat 8, surat an Nisa ayat 33, dan lain-lain.

Dari ayat-ayat kewarisan tersebut, Hazairin menyimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan individual bilateral. Individual indikasinya adalah :<sup>14</sup>

- a. Ada ahli waris yang berhak atas suatu bagian tertentu, dan bagian tersebut wajib diberikan kepadanya. (QS. IV : 7 dan 33).
- b. Ada bagian tertentu yang ditetapkan untuk masing-masing ahli waris, sehingga secara keseluruhannya harta warisan menjadi milik pribadi ahli waris tersebut (QS. IV : 11, 12, dan 176).

Jadi berbeda dengan sistem kewarisan kolektif, karena disini harta warisan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, dan kepada para ahli waris hanya diberikan berupa semacam hak pakai saja, seperti dapat dilihat pada masyarakat matrilineal di Minangkabau. Dan juga berbeda dengan sistem kewarisan mayorat, karena disini ada hak mayorat yakni hak tunggal anak tertua untuk mewarisi seluruh harta atau sejumlah harta pokok dari suatu keluarga, seperti dapat dilihat pada masyarakat patrilineal beralih-alih di Bali (anak laki-laki tertua) dan di tanah Semendo Sumatra Selatan (anak perempuan tertua).

---

<sup>14</sup> Hazairin, *op. cit.*, halaman 16-17.

Adapun bilateral indikasinya adalah :<sup>15</sup>

- a. Menjadikan semua anak sebagai ahli waris bagi kedua orang tuanya (QS. IV :11).

Ini adalah cerminan dari kewarisan bilateral, sebab dalam kewarisan patrilineal hanya anak laki-laki saja yang berhak menerima warisan, dan dalam kewarisan matrilineal anak mewaris dari ibunya, tidak dari ayahnya.

- b. Menjadikan ibu dan ayah sebagai ahli waris bagi anak-anaknya (QS. IV : 11).

Ini adalah cerminan dari kewarisan bilateral, sebab dalam kewarisan patrilineal anak diwarisi oleh ayahnya, dan dalam kewarisan matrilineal diwarisi oleh ibunya.

- c. Menjadikan semua saudara sebagai ahli waris bagi saudaranya yang mati punah, tidak peduli apakah saudaranya yang mati itu laki-laki atau perempuan (QS. IV : 12 dan 176). Ini adalah cerminan dari kewarisan bilateral, sebab dalam kewarisan patrilineal hanya saudara laki-laki yang berhak mewaris dan saudara itu harus pula seclan.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan sistem serupa (individual bilateral) dalam masyarakat bilateral, maka menurut Hazairin hukum kewarisan versi al Qur'an tersebut membawa beberapa hal baru, yaitu :<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 14.

- a. Mendudukan anak pewaris dan orang tua pewaris sebagai ahli waris dan serempak mewaris bersama-sama (QS. IV : 11).
- b. Dimungkinkan saudara mewaris bersama orang tua atau paling tidak bersama ibu pewaris dalam hal pewaris mati punah (QS. IV : 12 dan 176).
- c. Suami isteri saling mewaris (QS. IV : 12).
- d. Adanya ketentuan tentang faraidl, yakni bagian tertentu untuk orang-orang dalam keadaan tertentu pula.

### 2.3.2. Al Hadits atau Sunnah Rasul

*Hadits atau Sunnah Rasul adalah sumber hukum Islam kedua setelah al Qur'an, berupa perkataan (Sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah) dan sikap diam (Sunnah taqririyah atau sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al Qur'an.<sup>17</sup> Hadits atau Sunnah Rasul disatu sisi dapat merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri, dan disisi yang lain tidak merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri karena sifat gandulannya terhadap al Quran.<sup>18</sup>*

Sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri Hadits atau Sunnah Rasul berfungsi sebagai pengisi kekosongan dan membawa hukum baru, contohnya adalah hadits yang memberikan seperenam harta untuk nenek atas warisan

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 86.

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, halaman 59.



cucunya. Ketentuan ini tidak dijumpai didalam al Qur'an. Dan sebagai sumber hukum yang tidak berdiri sendiri hadits atau sunnah berfungsi sebagai penafsir dan penjelas terhadap ayat-ayat al Qur'an agar ketentuannya dapat dipahami dan direalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketentuan al Qur'an tentang kewarisan.

Adapun hadits atau sunnah yang ada hubungannya dengan hukum kewarisan antara lain adalah:

- a. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, terjemahannya adalah :<sup>19</sup>

*"Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama".*

- b. Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Jabir, terjemahannya adalah :<sup>20</sup>

*Janda Saad ibn Rabi datang kepada Rasul SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata : Ya Rasul Allah, ini ada dua orang anak perempuan Saad yang telah gugur dalam peperangan bersama anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata : Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Saad, seperdelapan untuk jandanya dan yang sisanya adalah untukmu.*

- c. Hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Surabil, terjemahannya adalah:<sup>21</sup>

*Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan*

---

<sup>19</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *op. cit.*, halaman 22.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ami' Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal 13

seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula." Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab: "Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan".

- d. Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Usman bin Husin, terjemahannya adalah:<sup>22</sup> *"dari Umran bin Husein bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: "bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya." Nabi berkata: "Kamu mendapat seperenam"*.
- e. Hadits Riwayat An Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Qubaishah bin Zueb, terjemahannya adalah:<sup>23</sup>

*Dari Qubaishah bin Zueb yang berkata: seseorang nenek mendatangi Abu Bakar yang meminta warisan dari cucunya. Berkata kepadanya Abu Bakar: "Saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam Kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunnah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini." Mugirah bin Syu'bah berkata: "Saya pernah menghadiri Nabi yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam." Berkata Abu Bakar: "Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya." Muhammad bin Masalah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka akhirnya Abu Bakar memberikan hak warisan nenek itu."*

- f. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqqas tentang batas maksimal pelaksanaan wasiat. Terjemahannya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

*Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun haji wada di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau. Wahai Rasulullah SAW aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu, aku ini orang berada sementara tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat) kan dua pertiga*

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 14

<sup>24</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal 21

*hartaku? Jangan jawab Rasul. Aku bertanya: "Sepertiga", Rasul menjawab : sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.*

- g. Hadits Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, terjemahannya adalah: *dari Abu Hurairah Nabi Muhammad bersabda bahwa Pembunuh tidak boleh mewaris.*<sup>25</sup>
- h. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Usman bin Zaid, terjemahannya adalah: *dari Usman bin Zaid, Nabi SAW bersabda," Seorang Muslim tidak mewarisi non muslim dan non muslim tidak mewarisi muslim."*<sup>26</sup>
- i. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Muhammad, terjemahannya adalah: *Seorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya diketahui dari tangis, teriakan, dan bersin.*<sup>27</sup>
- j. Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Amir al Husaini, terjemahannya adalah : *"Saudara laki-laki dari ibu adalah ahli waris bagi seseorang yang tidak ada ahli warisnya".*<sup>28</sup>

### 2.3.3. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, halaman 15

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 14

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 16

<sup>28</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *op. cit.*, halaman 23.

atau tidak ada ketentuannya di dalam al Qur'an dan sunnah Rasul.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Ahmad Hanafi ijihad ialah mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menentukan hukum. Melalui salah satu dalil syara' dengan cara-cara tertentu.<sup>30</sup>

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan ijihad adalah suatu upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada, untuk menemukan atau menetapkan garis hukum terhadap hal-hal yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al Qur'am dan Sunnah Rasul, dengan mempergunakan salah satu dalil syara' menurut cara-cara tertentu. Orang yang melakukan ijihad disebut Mujtahid.

Ijihad dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau individu yang disebut ijihad fardy, dan dapat pula dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok yang disebut ijihad jama'y. Contoh hukum-hukum hasil ijihad yang dilakukan secara individual antara lain seperti tertuang dalam kitab fiqh al Umm karangan Imam Syafi'i, dan hukum kewarisan bilateral menurut al Qur'an dan Hadits, karangan Hazairin. Oleh karena itu, jika disebut Hukum Kewarisan Syafi'i maka yang dimaksud adalah hukum kewarisan hasil ijihad Imam Syafi'i yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i yang terdapat dalam kitab al Umm (Kitab Induk) dan kitab-kitab lain yang dikarang oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya, dan khusus yang dijadikan pedoman resmi di lingkungan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sejak tahun 1958 terdiri dari (1)

---

<sup>29</sup> Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 104.

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *op. cit.*, halaman 162.

Albajuri, (2) Fatchul Mu'in, (3) Syarqowi al at tahrir, (4) Qulyubi/Mahali, (5) Fatchul wahhab dengan syarahnya, (6) Tuchfah, (7) Targhibul Usytaq, (8) Qowanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya, (9) Qowanin Sya'iyah lis sayyid sadaqah Dachlan, (10) Syamsuri fil fara'idl, (11) Buqhyatul Musytarsyidin, (12) Alfiqhu' alaa Madzahibil Arba'ah, dan (13) Mughnil Muchtaj.<sup>31</sup>

Hukum kewarisan Syafi'i pada dasarnya merupakan bagian atau termasuk dalam kelompok hukum kewarisan madzhab Sunni atau Ahlussunah wal jamaah. Namun penelitian ini dikhususkan pada hukum kewarisan Syafi'i, hal tersebut dikarenakan pertama ada perbedaan mendasar antara teori Syafi'i dengan hukum kewarisan madzhab yang lain terutama dengan teori Imam Hanafi dan Imam Hambali dalam hal kedudukan dzawil ahrum, dan kedua diantara keempat imam dari kalangan ahlussunnah tersebut, yang ditetapkan sebagai pedoman baik dalam praktek Pengadilan Agama maupun bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah teori kewarisan Syafi'i.

Hukum kewarisan Hazairin adalah hukum kewarisan hasil ijtihad Hazairin, seorang Guru Besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Hazairin, SH. Hukum kewarisan bilateral hasil ijtihadnya itu pertama kali ia ungkapkan dalam kuliah umumnya di Jakarta pada tanggal 17 Nopember 1957 yang berjudul "Hendak Kemana Hukum Islam".<sup>32</sup> Dan hukum kewarisan Islam hasil ijtihad Hazairin tersebut kemudian ditulis dalam buku-bukunya, yaitu (1) Hadits Kewarisan dan

---

<sup>31</sup> Tim Ditbinbapera, *Sejarah Pengusutan KHI di Indonesia Berbagai Pandangan terhadap KHI*, Al Hikmah, Jakarta, 1993, hal 4.

<sup>32</sup> Seminar Hukum Nasional, BPHN Dep Keh RI, Jakarta, 13 Maret 1963, hal 322.

Sistem Bilateral, (2) Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an, (3) Hukum Kekeluargaan Nasional, (4) Hendak Kemana Hukum Islam, dan (5) Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits yang pertama kali dicetak pada tahun 1958, dan terakhir cetakan ke-6 terbit pada tahun 1983 oleh Penerbit Tintamas Jakarta.

Sedangkan hukum hasil ijtihad yang dilakukan secara berkelompok (kolektif) antara lain adalah KHI yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang perwakafan. Hukum hasil ijtihad yang tertuang dalam KHI tersebut telah diterima baik oleh para alim ulama dalam Lokakarya Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988, sehingga dapat dikategorikan sebagai sumber hukum Islam yang disebut Ijma atau Ijma setempat. Oleh karena itu, jika disebut hukum kewarisan KHI maka yang dimaksud adalah hukum kewarisan hasil ijtihad kolektif ahli hukum Islam Indonesia yang dikoordinir oleh Tim Penyusun KHI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI Nomor 07/K.MA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985, dengan susunan personalianya adalah: (1) Prof. H. Bustanul Arifin (Ketua Muda Lingkungan Peradilan Agama MA) Ketua Umum, (2) H.R. Djoko Soegianto, SH (Ketua Muda Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tertulis MA) selaku Wakil I, (3) H. Zaini Dahlan, MA (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama) Wakil II, (4) H. Masrani Busran, SH (Hakim Agung MA) Pimpinan Pelaksana Proyek, (5) H. Muchtar Zarkasyi, SH (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama),

Wakil, (6) Lies Sugondo, SH (Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan MA RI), Sekretaris, (7) Drs. Marfuddin Kosasih, SH (Pejabat Departemen Agama RI), Wakil, (8) Alex Marbun (Pejabat MA) dan Drs. Kodi (Pejabat Departemen Agama) Bendahara, (9) Prof. H. Ibrahim Husein (MUI), Prof. H. MD Kholid (Hakim Agung MA), dan Wasit Aulawi, MA (Pejabat Departemen Agama), masing-masing selalu pelaksana bidang kitab-kitab/Yurisprudensi, (10) M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung MA), dan Abdul Gani Abdullah (Pejabat Departemen Agama), masing-masing selaku bidang wawancara, (11) H. Amiroeddin Noer (Hakim Agung MA) dan Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama) masing-masing selaku pelaksana bidang pengumpul dan pengolahan data.<sup>33</sup>

KHI disusun oleh Tim yang bahan/datanya dikumpulkan dengan cara atau melalui 4 (empat) jalur kegiatan penelitian yaitu:<sup>34</sup>

- Penelitian terhadap 38 buah kitab kuning yang dilakukan oleh IAIN dalam waktu 3 bulan (7 Maret – 21 Juni 1985) yaitu (1) IAIN Arraniri Banda Aceh 6 kitab, yaitu (a) Albajuri, (b) Fathul Mu'in, (c) Syarqawi 'alat Tahrier, (d) Mughnil Muhtaj, (e) Nihayah al Muhtaj, dan (f) As Syarqawi. (2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 6 kitab, yaitu (a) I'anatut Thalibien, (b) Tuhfah, (c) Targhibul Musytaq, (d) Bulghat al Salik, (e) Syamsuri fil Faraid, dan (6) Al Mudawwanah. (3) IAIN Antasari Banjarmasin 6 kitab, yaitu (a) Qalyubi/Mahalli, (b) Tahul Wahab dengan syarahnya, (c) Bidayatul Mujtahid,

---

<sup>33</sup> Tim Ditbinbapera, *op.cit*, hal 10

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 14

- (d) Al Um, (e) Bughyatul Musytarsyidien, dan (f) Aqiedah wa al Syari'ah. (4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 5 kitab, yaitu (a) Al Muhalla, (b) Al Wajiz, (c) fathul Qadier, (d) Alfiquhu'ala Madzahibil arba'ah, dan Fiqgussunnah. (5) IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 kitab, yaitu (a) Kasyaf al Qina, (b) Majmu'atu Fatawi Ibnu Taimiyah, (c) Qowanin Syai'ah lis Sayid Usman bin Yahya, (d) Al Mughni, dan (e) Al Hidayah Syarah Bidayah al Muftadi.. (6) IAIN Alauddin Ujung Pandang 5 kitab, yaitu (a) Qowanin Syar'iyah lis sayid Sudaqah Dahlan, (b) Nawab al Jalil, (c) Syarah Ibnu Abidin, (d) Al Muwattha, dan (e) Hasyiah Syamsudin Moh. Irfat Dasuki. (7) IAIN Imam Bonjol Padang 5 kitab, yaitu (a) Bada'i al Sanai, (b) Tabyin al Haqaiq, (c) Al Fatawi al Hindiyah, (d) Fath al Qadir, dan (e) Nihayah
- Wawancara, dilakukan di 10 lokasi atau wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama yaitu dengan: (1) 20 orang Ulama Banda Aceh (2) 19 orang Ulama Medan, (5) 16 orang Ulama Bandung, (6) 18 orang Ulama Surakarta, (7) 18 orang Ulama Surabaya, (8) 15 orang Ulama Banjarmasin, (9) 19 orang Ulama Ujung Pandang, dan (10) 20 orang Ulama Mataram.
  - Penelitian Yurisprudensi, dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dibukukan dalam 16 buku, yaitu (1) Himpunan Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4 buku, yang terdiri dari buku terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1979/1980, (2) Himpunan Fatwa 3 buku yang terdiri dari buku terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981, (3) Yurisprudensi Pengadilan Agama 5 buku terdiri dari buku



terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984,

(4) Law Report 4 buku terdiri dari buku terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.

- Studi Banding, dilakukan oleh Pimpinan dan Wakil Pimpinan Pelaksana Proyek yaitu H. Masrani Busran, SH dan H. Muchtar Zarkasyi, SH ke negara-negara Timur Tengah yaitu (1) Maroko 28-29 Oktober 1986 dengan (a) Direktur Institut Kehakiman Nasional, (b) Sekjen Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, (c) Penasehat Menteri Wakaf dan Urusan Islam, (d) Ketua Supreme Court, (e) Ketua Badan Kerjasama UNESCO-ALESCO, (2) Turki 1 dan 2 Nopember 1986 dengan (a) Ketua Islamic Centre, dan (b) Supreme Court yang diwakili oleh ATTORNEY GENERAL; (3) Mesir 3 dan 4 Nopember 1986 dengan (a) Rektor Al Azhar, (b) Majelis Tinggi Al Azhar, (c) Grand Sheikh Al Azhar, (d) Dekan Fakultas Dakwah Al Azhar, (e) Ketua Supreme Court, (f) Mufli Negeri, dan (d) Menteri Wakaf.

Hasil penelitian bidang kitab, yurisprudensi, wawancara, dan studi perbandingan diolah oleh Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek. Hasil rumusan tim besar dibahas dan diolah lagi dalam sebuah team yang merupakan tim inti, terdiri dari (1) Prof. H. Bustanul Arifin, SH, (2) Prof. H. MD. Kholid, SH, (3) H. Masrani Busran, SH, (4) H.M. Yahya Harahap, SH, (5) H. Zaini Dahlan, MA, (6) H.A. Wasit Aulawi, MA, (7) H. Muchtar Zarkasy, SH, (8) H. Amiroeddin Noer, SH, dan (9) Drs. H. Marfuddin Kosasih, SH.

Team Kecil setelah mengadakan rapat sebanyak 20 kali, dapat merumuskan 3 (tiga) naskah rancangan KHI yang terdiri dari (a) Hukum Perkawinan, (b) Hukum Waris, dan (c) Hukum Wakaf. Rancangan KHI ini disusun dalam kurun waktu selama 2 tahun 9 bulan, dan pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi oleh Pimpinan Proyek Pembinaan Hukum Islam diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI.<sup>35</sup>

Untuk mendengarkan pendapat atau komentar akhir ulama dan cendekiawan muslim terhadap Rancangan KHI tersebut, maka pada tanggal 2-6 Februari 1988 diselenggarakan Lokakarya Nasional bertempat di Hotel Kartika Chandra dan dihadiri oleh 124 orang wakil-wakil yang merupakan representatif dari daerah-daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya. Lokakarya tersebut dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung H. Ali Said, SH dan ditutup oleh Menteri Agama H. Munawir Sjadzali, MA.<sup>36</sup>

Pembahasan masalah rancangan KHI pada lokakarya tersebut dibagi dalam dua instansi yaitu Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Sidang komisi terdiri dari:

- a. Hukum Perkawinan, yang susunan personelnya (1) H.M. Yahya Harahap, SH (Pimpinan), (2) Drs. Marfuddin Kosasih, SH (Sekretaris), (3) KH. Abdul Halim Muhammad, SH (Nara sumber), (4) Drs. Muchtar Effendi dan H. Farchan Hisjam (Notulen), dan (5) 42 orang peserta.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 18

<sup>36</sup> *Ibid*

- b. Hukum Waris, susunan personelnya (1) H.A. Wasid Aulawi, MA (Pimpinan), (2) H. Zainal Abidin Abubakar, MA (Sekretaris), (3) K.H. Ahmad Azhar Basjir, MA (Nara sumber), (4) Drs. Nabhan Maspoetra dan Drs. H. Zufran Sabrie (Notulen), dan 42 orang anggota.
- c. Hukum Wakaf, susunan personelnya (1) H. Masrani Basran, SH (Pimpinan), (2) H.A. Gani Abdullah, SH (Sekretaris), (3) Prof. Dr. H. Rahmat Djatmika (Nara sumber), (4) Drs. Wahyu Widana dan Drs. Farid (Notulen), dan (5) 29 orang anggota.<sup>37</sup>

Masing-masing Komisi membentuk tim perumus yang terdiri dari.<sup>38</sup>

- a. Komisi A tentang Hukum Perkawinan, personilnya (1) H.M. Yahya Harahap, SH, (2) Drs. Marfuiddin Kosasih, SH, (3) KH. Abdul Halim Muhammad, SH, (4) H. Muchtar Zarkasyi, SH, (5) KH. Ali Yafie, dan (6) KH. Najib Ahyad.
- b. Komisi B, tentang Hukum Waris, personilnya (1) H.A. Wasid Aulawi, MA, (2) H. Zainal Abidin Abubakar, SH, (3) KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, (4) Prof. KH. MD. Kholid, SH, dan (5) Drs. Ersyad, SH.
- c. Komisi C, tentang Hukum Wakaf, personilnya (1) H. Masrani Basran, SH, (2) H.A. Gani Abdullah, SH, (3) Prof. Dr. H. Rachmat Djatmika, (4) Prof. KH. Ibrahim Husain, LML, dan (5) Aziz Masyhuri.

Sidang Pleno yang dihadiri oleh seluruh peserta, melakukan perbaikan umum, dan mengesahkan hasil rumusan akhir lokakarya. Kata akhir para ulama dalam sidang pleno tersebut disampaikan oleh (1) KH. Hasan Basri mewakili

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 19

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 20

MUI, (2) KH Ali Yafie mewakili NU, (3) KH. AR. Fahrudin mewakili Muhammadiyah yakni berupa pengesahan rumusan KHI buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan, dan buku III tentang Perwakafan.<sup>39</sup>

Akhirnya, dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, KHI tersebut disebarluaskan untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Peraturan atau kaedah hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang dihimpun oleh tim penyusun naskah tersebut, kemudian disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991 jo Kep. Men. Agama RI Nomor 154 tahun 1991, dinamakan Kompilasi Hukum Islam. Untuk mempertegas pemahaman terhadapnya maka perlu dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Kompilasi, Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana kedudukannya dalam tata hukum di Indonesia.

William Morris mengatakan, kata kompilasi berasal dari bahasa Latin “compile” yang dalam bahasa Inggris berarti “to heap together” atau “menghimpun menjadi satu kesatuan”.<sup>40</sup> Dengan demikian menurut M. Tahir Azhari “Kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam suatu

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> H.M. Thahir Azhari, *KHI Sebagai Alternatif*, Tim Ditbinbapera (Berbagai Pandangan terhadap KHI), Al Hikmah, Jakarta, 1993, hal 135

buku”.<sup>41</sup> Sedangkan A. Hamid S. Attamimi mengartikan kompilasi sebagai “Suatu produk berbentuk tertulis hasil karya orang lain yang disusun secara teratur”.<sup>42</sup>

Adapun yang dimaksud dengan KHI menurut M. Tahir Azhari adalah, “Suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaedah-kaedah hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap-lengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan<sup>43</sup>, sedangkan menurut kesepakatan alim ulama Indonesia KHI adalah, “rumusan tertulis Hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia”.<sup>44</sup>

Kedua pengertian KHI tersebut memang terdapat perbedaan, namun keduanya merupakan satu kesatuan, dimana yang satu (M. Tahir Ashari) melihatnya dari sudut prosedur, tata cara dan format penyusunan, sedangkan yang lain (alim ulama) melihatnya dari sudut substansinya.

Tentang kedudukan KHI dalam tata Hukum di Indonesia, para ahli berbeda pendapat. Menurut Abdul Gani Abdullah<sup>45</sup>, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis berisi law dengan potensi political power melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991<sup>46</sup>. Sebaliknya A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa, “KHI meskipun ditulis belum merupakan hukum tertulis, namun karena sistem

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Perdana Media, Jakarta, 2004, hal 33

<sup>43</sup> HM. Tahir Azhari, *Loc. cit*

<sup>44</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hal 61-62

<sup>45</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hal 61-62

<sup>46</sup> *Ibid*

hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka KHI dapat mengisi hukum umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam".<sup>47</sup>

Lepas dari perbedaan pendapat tentang apakah KHI itu hukum tertulis atau tidak tertulis, yang pasti adalah bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 1991 jo. Kep Men Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 menegaskan bahwa KHI disebarluaskan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah (dalam hal ini Pengadilan Agama) dan masyarakat Islam yang memerlukannya, guna menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, sehingga KHI berfungsi sebagai pengisi kekosongan atau melengkapi peraturan-peraturan tertulis yang telah ada seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Keputusan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang perwakafan.

Sehubungan dengan itu, H. Abdullah Kelib dengan menyitir pendapat Ismail Suny, mengatakan bahwa:<sup>48</sup>

*Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pediman, landasan dan pegangan bagi Hakim-Hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Sedang bagi masyarakat yang memerlukan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik dalam bidang Perkawinan, pembagian warisan dan kegiatan amal ibadah dan sosial kemasyarakatan dalam perwakafan, di samping peraturan perundang-undangan yang lain, terutama sumber hukum al Qur'an dan Hadits.*

Pendirian ini dipertegas oleh M. Tahir Azhari yang mengatakan bahwa:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Loc. cit*

<sup>48</sup> Abdullah Kelib, *Beberapa Catatan Efektifitas Kompilasi Hukum Waris*, (Mahfud MD, et al, Pengadilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia); UII Press, Yogyakarta, 1993, hal. 131.

<sup>49</sup> M. Tahir Azhari, *op. cit*, hal 136

*Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai Pedoman bagi Instansi Pemerintah yang menurut hemat penulis secara implisit instansi yang dimaksudkan antara lain adalah lembaga-lembaga atau badan-badan peradilan agama yang menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 memiliki kewenangan antara lain dalam bidang perkawinan, kewarisan dan pewakafan itu. Sebagai pedoman, ia tidak hanya harus diperhatikan, tetapi juga pada hemat penulis mempunyai kekuatan mengikat bagi para Hakim peradilan agama di Indonesia sejak tingkat pertama, banding sampai kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kompilasi hukum Islam merupakan pula Pedoman yang harus diperhatikan oleh dan karena itu mengikat masyarakat yang bersangkutan. Dilihat dari sudut hukum materiil, kecuali Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam ini dapat pula berfungsi sebagai hukum materiil Islam dalam bidang-bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Untuk perwakafan dapat pula disebut PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dilihat dari segi unifikasi hukum, Kompilasi Hukum Islam dapat pula berfungsi sebagai suatu kitab hukum yang mengakhiri berbagai ragam sumber hukum Islam yang selama ini berasal dari tidak kurang 13 buah kitab Fiqih dari Madzhab Syafi'i. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam tersebut maka para Hakim peradilan agama dapat dengan mudah dan sangat praktis merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Seperti diketahui membaca kitab kuning tidak semua orang dapat melakukannya. Kecuali itu pendekatan yang digunakan melalui kitab-kitab Fiqih itu mungkin sudah tidak atau kurang relevan dengan keadaan masa kini. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam dilihat dari sudut ini dapat pula dipandang sebagai satu alat rekayasa dalam pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dalam era Pembangunan Nasional.*

Khusus mengenai kewarisan, dalam KHI diatur dalam buku ke II yang terdiri dari 6 bab dengan 44 Pasal, yakni Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 171) memuat penjelasan singkat tentang kata-kata atau istilah penting yang dimuat dalam buku ke II. Bab II tentang Ahli Waris (Pasal 172 sampai dengan Pasal 175). Bab III tentang besarnya bagian ahli waris (Pasal 126 sampai dengan Pasal 191). Bab IV tentang Aul dan Rad (Pasal 192 dan 193). Bab V tentang Wasiat (Pasal 194 sampai dengan Pasal 209). Bab VI tentang Hibah (Pasal 210 sampai dengan Pasal 214).

Ketentuan kewarisan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal KHI, khususnya yang menyangkut ahli waris dan bagian-bagiannya, ada yang

merupakan tiruan langsung dari al Qur'an surat an Nisa ayat 11, 12, dan 176 seperti tertulis dalam Pasal 174, 176, 178 ayat (1), 179, 180, 181 dan 182, dan ada pula yang merupakan hasil pemikiran (ijtihad) walau sumber utamanya juga dari ayat-ayat kewarisan dalam al Qur'an yang bersifat umum ditambah dengan ajaran kewarisan (doktrin) yang telah ada seperti tertulis dalam Pasal 174, 177, 178 ayat (2) dan Pasal 185.

Dari ketiga pasal yang merupakan hasil pemikiran (Ijtihad) tersebut, yang terpenting adalah pasal 185, karena Pasal ini mewarnai hukum kewarisan KHI secara keseluruhannya. Oleh karena itu Pasal ini paling banyak disoroti oleh para ahli faraidl, dan ditafsirkan dengan bermacam-macam penafsiran. Diantara ahli faraidl tersebut adalah Roihan A. Rasyid dan Buku Pintar PTA Sulawesi Selatan.

Roihan A. Rasyid yang nama lengkapnya Dr. Roihan A. Rasyid, S.H. M.A. adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Ia juga pernah bekerja di lingkungan Peradilan Agama dan pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu di Palembang<sup>50</sup>. Pendapatnya tentang Pasal 185 KHI diungkap dalam makalah yang berjudul "Waris Pengganti dan Wasiat Wajibah", dimuat dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Nomor 23 Tahun VI 1998.

Sedangkan yang dimaksud dengan Buku Pintar, lengkapnya Buku Pintar Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama adalah sebuah buku yang disusun oleh Tim yang dibentuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi

---

<sup>50</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 14



Selatan tanggal 21 Maret 1998 yang susunan personilnya tertera dalam Lampiran V Tesis ini. Buku Pintar tersebut memuat hasil seminar yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan tanggal 9 dan 11 Mei 1998 di Hotel Delta Ujung Pandang tentang berbagai macam masalah hukum Islam, termasuk masalah dalam KHI. Di bidang kewarisan, khusus Pasal 185 KHI, Tim juga telah menyatakan pendapatnya sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang penelitian di atas.

#### **2.4. Sebab dan Penghalang Kewarisan**

Dalam hukum kewarisan Islam ada empat macam sebab seseorang mendapat warisan, yaitu hubungan keluarga, perkawinan, wala dan seagama. Hubungan keluarga yakni hubungan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah (genetik) baik dalam garis keturunan lurus kebawah (anak, cucu dan seterusnya), ke atas (ayah, kakek dan seterusnya) maupun ke samping (saudara-saudara), dan mereka saling mewaris satu sama lain menurut keutamaannya masing-masing sesuai ketetapan Allah dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, dan dalam KHI didasarkan Pasal 174, 176, 177, 178, 181, 182 dan 185. Hubungan perkawinan adalah hak saling mewaris antara suami isteri. Hak saling mewaris tersebut baru akan berakhir jika mereka telah bercerai, kecuali isteri yang masih dalam masa idah talak raj'i (Pasal 118 KHI) masih berhak mendapatkan warisan jika suaminya meninggal pada masa itu. Hak saling mewaris antara suami isteri didasarkan pada ketetapan Allah dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 12, dan dalam KHI didasarkan pada Pasal 179 dan 180. Hubungan wala adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang yang

memerdekakannya (mu'tiq atau mu'tiah). Orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya berdasarkan pada ketentuan Rasul yakni antara lain HR. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Dan hubungan seagama adalah hak saling mewaris antara sesama umat Islam yang pelaksanaannya disalurkan melalui Baitulmal. Para ahli umumnya berpendapat bahwa orang Islam baru saling mewaris antar sesamanya jika orang Islam yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris sama sekali.

Dengan mengacu pada Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 174 dan Pasal 191, dapat dikatakan bahwa KHI hanya mengenal tiga macam hubungan saja yakni hubungan kerabat, perkawinan dan hubungan seagama.

Selain itu, hukum kewarisan Islam juga mengatur hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapat warisan. Hal-hal tersebut adalah beda agama (termasuk murtad), membunuh, dan hamba sahaja, dan ketiganya merupakan penghalang terwujudnya hak saling mewaris antara pewaris dan ahli waris.

Tentang beda agama, kalangan Ahlussunnah berpendapat, terlarang bagi orang Islam mewarisi harta orang non Islam dan sebaliknya. Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan Rasul, yakni hadits riwayat Jamaah dan hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang terjemahannya adalah: *orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.*

Tentang pembunuhan, ada yang berpendapat bahwa pembunuh selaku ahli waris tetap mendapat warisan. Namun sebagian besar berpendapat bahwa pembunuh tidak mendapat warisan dari orang yang ia bunuh, kecuali jika pembunuhan itu terjadi karena ketidaksengajaan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembunuhan lantaran ingin segera mendapatkan

warisan. Pembunuh tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya didasarkan pada ketentuan Rasul yakni hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas yang terjemahannya adalah sebagai berikut : *"Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan"*.<sup>51</sup>

Tentang hamba sahaja atau perbudakan, penghalang warisan bukan karena status kemanusiannya melainkan semata-mata karena status formalnya. Perbudakan sebagai penghalang warisan didasarkan pada pendapat sebagian besar ahli, dengan dasar pemikiran sebagai berikut :<sup>52</sup>

*Seorang hamba sahaja secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus. Ahmad Muhammad al Jurjawy mengemukakan bahwa budak itu tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya itu meninggal. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai harta milik tuannya sendiri. Sebagai harta tentu tidak bisa memiliki, tetapi dimiliki, dan memiliki hanyalah yang berstatus sebagai tuannya.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam, penghalang kewarisan dijumpai pada Buku II Bab II Pasal 173 yang menyebutkan bahwa terhalangnya seorang ahli waris untuk mewarisi kerabatnya adalah apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris (b) dipersalahkan secara memfitnah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah

<sup>51</sup> Ahmad Rafiq, *op. cit.*, halaman 24.

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 32.

melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

## **2.5. Azas-Azas Hukum Kewarisan**

Hukum kewarisan Islam dibentuk atau dibangun oleh sejumlah azas yang membuat ia berbeda dengan hukum kewarisan adat maupun dengan hukum kewarisan KUH Perdata.

Menurut Amir Syarifuddin, setidaknya ada lima azas yang menunjukkan ciri-ciri dari hukum kewarisan Islam yaitu bersifat *ijbari*, *bilateral*, *individual*, *keadilan berimbang* dan *akibat kematian*.<sup>53</sup> Doktrin atau azas tersebut menurut Mohammad Daud Ali digali langsung dari *al Qur'an* dan *Sunnah*.<sup>54</sup>

### **2.5.1. Ijbari**

Azas ini mengandung makna bahwa dalam hukum kewarisan Islam peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, halaman 17.

<sup>54</sup> Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 126-129.

kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Azas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

### **2.5.2. Bilateral**

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Azas bilateral ini dapat dilihat dalam al Quran surat an Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.

### **2.5.3. Individual**

Azas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Azas individual ini dapat dilihat dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 7, 8, 33, 11, 12, dan 176.

### **2.5.4. Keadilan Yang Berimbang**

Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya,

mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya (QS. 2 : 233) menurut kemampuannya (QS. 65 : 7). Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang diperoleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta warisan manfaatnya akan sama mereka rasakan.

#### **2.5.5. Akibat Kematian**

Azas ini menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain yang disebut harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Dengan demikian, kewarisan Islam adalah kewarisan yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang disebut testamen.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1. Ruang Lingkup**

Mengingat obyek penelitian ini adalah hukum kewarisan kompilasi Hukum Islam serta persamaan dan perbedaannya dengan hukum kewarisan Syafi'i dan Hazairin, maka permasalahan pokok yang diteliti menyangkut :

- a. Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam dengan sub pokok masalahnya :
  - 1). Para kerabat pewaris yang berhak menjadi ahli waris dalam KHI
  - 2). Kedudukan dan hak mewaris ahli waris pengganti dalam KHI.
  - 3). Istilah dan dasar hukum pemberian porsi (bagian) sama besar kepada cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan pewaris.
- b. Komparasi antara Hukum Kewarisan KHI, Syafi'i dan Hazairin.
- c. Kelemahan dan keunggulan ketiga teori Hukum Kewarisan Islam (KHI, Syafi'i dan Hazairin) tersebut.

Pembahasan tentang hukum kewarisan KHI, Syafi'i dan Hazairin ini hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, penentuan mengenai harta waris dan cara membagi dan menghitung waris. Diluar masalah-masalah tersebut tidak termasuk dalam lingkup pembahasan tesis ini.

##### **3.2. Metode Pendekatan**

Karena masalah pokok dalam penelitian ini adalah Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam yang sebagian besar norma atau kaedah-kaedahnya

merupakan tiruan langsung dari ayat-ayat kewarisan dalam al Qur'an dan sebagian lagi walau merupakan hasil pemikiran (Ijtihad) tetapi juga bersumber pada ayat-ayat kewarisan dalam al Qur'an yang bersifat umum, serta membandingkan dengan hukum kewarisan Syafi'i dan Hazairin, maka pendekatannya pertama ditempuh melalui pendekatan yuridis normatif. Namun pendekatan ini juga ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif.<sup>1</sup>

Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisa berbagai materi hukum berupa kaedah atau norma-norma hukum kewarisan Islam baik yang tertuli dalam al Qur'an maupun, yang telah diformat kedalam suatu bentuk ajaran atau teori (doktrin) hukum kewarisan Islam di Indonesia, yakni Hukum Kewarisan Patrilineal Syafi'i, Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin, dan Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan yuridis historis diperlukan selain untuk memahami mengapa ada diskriminasi dalam menentukan ahli waris, perbedaan porsi bagian kewarisan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana tertuang dalam al Qur'an Surat an Nisa ayat 11, 12 dan 179, juga dimaksudkan untuk memahami sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat tempat di mana ayat-ayat kewarisan terkait diturunkan saat itu sehingga memberi corak warna pada penafsiran terhadap ayat kewarisan tersebut, dan sekaligus menjadi tolok ukur apakah penafsiran yang telah dilakukan terhadap ayat-ayat tersebut sudah pas atau masih perlu diteliti lebih lanjut, lebih cermat dan lebih seksama. Sedangkan pendekatan komparatif

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, dalam disertasinya yang berjudul *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang, 1994, hal. 61, menggunakan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif selain yuridis normatif dan yuridis empiris.



dipergunakan untuk membandingkan ketiga teori tersebut, mengungkapkan keunggulan dan kelemahannya masing-masing dengan mempergunakan Al Qur'an dan Hadits sebagai tolak ukurnya, dengan tidak mengabaikan orientasi terhadap kultur masyarakat arab tempat dimana Al Qur'an sebagai sumber utama hukum kewarisan Islam diturunkan dan kultur masyarakat Indonesia yang telah mengkristalisasi ke dalam sistem kekeluargaan masyarakat Islam Indonesia dan sebagian telah diformat kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### **3.3. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena bermaksud mengungkapkan dan menggambarkan secara jelas kaedah atau norma-norma hukum kewarisan Islam baik yang terdapat di dalam al Qur'an maupun yang telah diformat menjadi suatu ajaran dari ketiga teori hukum kewarisan Islam yang menjadi obyek atau pokok permasalahan dalam penelitian ini, mengungkap persamaan dan perbedaan, kelemahan dan keunggulannya masing-masing.

Khusus terhadap hukum kewarisan KHI, penelitian ini juga mengungkapkan dan menggambarkan secara jelas pendapat-pendapat yang berbeda-beda tentang ahli waris pengganti Pasal 185 KHI, dan kelemahan-kelemahan pendapat tersebut serta mengungkap dan menggambarkan ketidakpastian hukum, kekacauan dan tidak ada konsistensi sebagai akibatnya.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat preskriptif dan komparatif analisis, karena bermaksud memberikan alternatif pemecahannya, baik berupa penafsiran yang relatif dapat diterima maupun berupa istilah dan dasar hukum yang

dipandang relevan untuk suatu kebijakan yang perlu diambil dalam penerapan norma hukum Pasal 185 ayat (2) KHI tersebut. Komparatif karena bermaksud membandingkan antara teori kewarisan KHI disatu sisi dan Syafi'i serta hazairin disisi yang lain.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif, maka jenis dan sumber datanya adalah data sekunder.

Dalam metode penelitian, data sekunder yang berupa bahan pustaka menurut Soerjono Soekanto dan Srimamuji memiliki ciri-ciri umum antara lain :<sup>2</sup>

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready made).
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Dalam penelitian ini, data sekunder pada kategori a adalah hukum kewarisan Islam yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, data sekunder pada kategori b adalah hukum kewarisan patrilineal Syafi'i dan hukum kewarisan bilateral Hazairin, dan data sekunder pada kategori c adalah norma-norma dasar hukum kewarisan yang tertulis dalam Al Qur'an, Hadits, dan dari karya para ahli lainnya.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Kajian Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, halaman 28.

Sejalan dengan itu, Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa penelitian hukum normatif, sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder, bahan-bahannya dapat berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>3</sup>

Dengan mengacu pada pendapat Ronny Hanitijo Soemitro tersebut, maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, antara lain :

- 1). Al Qur'an
- 2). Al Hadits
- 3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5). Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6). Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kepres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI.
- 7). Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain :
  - Keputusan Nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995.
  - Keputusan Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.
  - Keputusan Nomor 327K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998.

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 98.

b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain :

- 1). Al Uum karangan Imam Syafi'i
- 2). Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an dan Hadits karangan Hazairin.
- 3). Hukum Kekeluargaan Nasional karangan Hazairin.
- 4). Buku Pintar Hakim, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama, PTA Sulawesi Selatan, 1998.
- 5). Mimbar Hukum Nomor 23 Tahun IV - 1995 Nomor 30 Tahun VII - 1997, Nomor 37 Tahun XI - 1998, Nomor 40 Tahun XI - 1998, Nomor 44 tahun X - 1999, Nomor 54 Tahun XII - 2001, dan Nomor 58 Tahun XII - 2002.
- 6). Buku-buku tentang Hukum Kewarisan Islam lainnya yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1). Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2). Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 3). Kamus Istilah Agama

### 3.5. Metode Pengumpulan data

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan datanya ditempuh dengan melakukan penelitian keputusan dan studi dokumentasi.

### 3.6. Penyajian Data dan Analisa

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif dan prekriptif, yang bertitik tolak dari analisa yuridis - sistematis, dan untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisa komparatif.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hal. 68

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Diskriminasi Dalam Hukum Kewarisan KHI**

Setidaknya ada tiga indikasi yang dapat dijadikan tolok ukur guna menentukan apakah suatu teori tentang hukum kewarisan itu diskriminasi atau tidak. Indikasi tersebut adalah (1) apakah semua kerabat diberi hak untuk mewaris atau tidak, (2) apakah semua anak atau keturunan dapat menjadi ahli waris pengganti dan bagaimana sifat penggantianannya, dan (3) seberapa jauh hak yang diberikan kepada ahli waris. Untuk itu maka hal pokok yang harus diungkap pada bagian ini adalah pertama tentang ahli waris dan penggolongannya, kedua tentang keutamaan antar sesama ahli waris (hijab), dan ketiga tentang kedudukan bibi selaku kerabat pewaris.

##### **4.1.1. Ahli Waris Dan Penggolongannya**

Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ada sebelas orang ahli waris. Yang laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami atau duda. Yang perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri atau janda. Jika ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tersebut semuanya ada, maka menurut Pasal 174 ayat (2) yang berhak mendapat warisan hanya lima orang saja, yaitu :

- a. Anak laki-laki.
- b. Anak perempuan.

- c. Ayah.
- d. Ibu.
- e. Duda atau janda.

Jika ditelaah pasal-pasal dari buku II Kompilasi Hukum Islam mengenai Kewarisan, akan diketahui bahwa hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam mengenal tiga macam ahli waris, yaitu dzawil furudl, asabah dan ahli waris pengganti. Dzawil furudl dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 182, asabah Pasal 176 dan 182 alinea kedua, dan waris pengganti Pasal 185. Jadi berbeda dengan teori Hazairin yang menggolongkan ahli waris atas dzawul faraid, dzawul qarabat dan mawali (ahli waris pengganti), dan teori Syafi'i yang membagi ahli waris atas dzawil furudl, asabah dan dzawil arham. Perbedaannya dengan teori Hazairin terletak pada perbedaan antara asabah dengan dzawul qarabat, dan perbedaannya dengan teori Syafi'i terletak pada perbedaan antara ahli waris pengganti dan dzawil arham.

#### **4.1.1.1 Dzawil Furudl**

Dzawil furudl ialah ahli waris yang mendapat bagian tertentu karena telah ditentukan oleh Pasal 176, 177, 178, 179, 180, 181 dan 182 KHI yakni seperdua, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga dan seperenam. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu tersebut adalah:

- a. Anak perempuan

Menurut Pasal 176, bagian anak perempuan adalah  $\frac{1}{2}$  harta jika hanya seorang saja,  $\frac{2}{3}$  jika ada dua orang atau lebih, dan bersama-sama menghabisi

semua harta atau semua sisa harta jika bersama dengan anak laki-laki, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.

b. Ayah.

Menurut Pasal 177, bagian ayah adalah  $\frac{1}{3}$  harta jika pewaris tidak mempunyai anak, dan  $\frac{1}{6}$  jika pewaris mempunyai anak.

c. Ibu.

Menurut Pasal 178, bagian ibu adalah  $\frac{1}{3}$  harta jika pewaris tidak mempunyai anak atau dua orang saudara atau lebih,  $\frac{1}{6}$  harta jika pewaris mempunyai anak atau dua orang saudara atau lebih, dan  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta sesudah diambil bagian duda atau janda jika bersama dengan ayah.

d. Duda.

Menurut Pasal 179, bagian duda adalah  $\frac{1}{2}$  harta jika pewaris tidak mempunyai anak, dan  $\frac{1}{4}$  harta jika pewaris mempunyai anak.

e. Janda.

Menurut Pasal 180, bagian janda adalah  $\frac{1}{4}$  harta jika pewaris tidak mempunyai anak, dan  $\frac{1}{8}$  harta jika pewaris mempunyai anak.

f. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu menurut Pasal 181, jika pewaris tidak mempunyai anak dan ayah maka bagian saudara seibu (laki-laki atau perempuan) adalah  $\frac{1}{6}$  harta jika hanya seorang saja, dan bersama-sama mendapat  $\frac{1}{3}$  harta jika ada dua orang atau lebih.

g. Saudara perempuan sekandung atau seayah.

Menurut Pasal 182, jika pewaris tidak mempunyai anak dan ayah maka bagian saudara perempuan sekandung atau seayah adalah  $\frac{1}{2}$  harta jika hanya



seorang saja,  $\frac{2}{3}$  jika ada dua orang atau lebih, dan bersama-sama menghabisi semua harta atau semua sisa harta jika bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah, dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan.

h. Kakek.

Kakek dari pihak ayah atau kakek dari pihak ibu tidak ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam berapa besar bagiannya. Untuk itu, dengan mengacu pada pasal 185 Idris Djakfar dan Taufik Yahya menempatkannya sebagai pengganti ayah atau ibu, sehingga ketentuan 177 dan 178 tentang besarnya bagian ayah atau ibu berlaku baginya. Oleh karena itu maka ia ditempatkan ke dalam kelompok ahli waris dzawil furudl.

i. Nenek.

Nenek dari ayah atau nenek dari Ibu adalah ahli waris langsung, namun KHI tidak menentukan berapa besar bagiannya. Untuk itu dengan mengacu pada pasal 185 Idris Djakfar dan Taufik Yahya menempatkannya sebagai pengganti ayah atau Ibu, sehingga ketentuan Pasal 177 dan 178 berlaku baginya. Oleh karena itu maka ia ditempatkan ke dalam kelompok ahli waris dzawil furudl.

#### 4.1.1.2 Asabah

Asabah ialah ahli waris yang oleh KHI tidak ditentukan berapa besar bagiannya atas harta warisan, namun keberadaannya sebagai ahli waris dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a. Untuk itu maka berdasarkan Pasal 176 dan Pasal 182, ia berhak menghabisi semua harta jika tidak ada ahli waris yang lain, atau semua sisa harta jika bersama dengan ahli waris dzawil furudl.

Berbeda dengan teori Syafi'i yang mengenal tiga macam asabah, yaitu asabah bin nafsi, asabah bil ghairi dan asabah ma'al ghairi, namun KHI hanya mengenal dua macam asabah saja, yaitu asabah bin nafsi dan asabah bil ghairi. Asabah ma'al ghairi tidak dikenal dalam KHI karena menurut ketentuan Pasal 182 selama pewaris mempunyai anak maka saudara tidak berhak mendapat warisan. Jadi, anak perempuan menutup hak waris bagi saudara.

Adapun yang termasuk dalam kategori asabah bin nafsi adalah :

- a. Anak laki-laki.
- b. Saudara laki-laki sekandung atau seayah.
- c. Paman.

Sedangkan asabah bil ghairi adalah :

- a. Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki.
- b. Saudara perempuan sekandung yang mewaris bersama saudara laki-laki sekandung.
- c. Saudara perempuan seayah yang mewaris bersama saudara laki-laki seayah.

#### **4.1.1.3 Ahli Waris Pengganti**

Waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga ia tampil menggantikannya. Dalam Pasal 185 dirumuskan bahwa : (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (2). Bagian bagi ahli

waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari bunyi Pasal 185 tersebut maka waris pengganti bisa menjadi ahli waris dzawil furudl jika orang tuanya yang ia gantikan berkedudukan sebagai dzawil furudl, dan bisa menjadi asabah jika orang tuanya yang ia gantikan berkedudukan sebagai asabah, dan akan memperoleh bagian yang tidak boleh melebihi bagian yang diterima oleh orang tuanya jika mereka masih hidup.

Yang termasuk dalam kategori waris pengganti antara lain adalah :

1. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, memperoleh status sebagai dzawil furudl karena ia adalah pengganti ibunya (anak perempuan) yang berkedudukan sebagai dzawil furudl.
2. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, memperoleh status sebagai asabah karena ia adalah pengganti ayahnya (anak laki-laki) yang berkedudukan sebagai asabah.
3. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan sekandung atau seayah, memperoleh status sebagai dzawil furudl karena ia adalah pengganti ibunya (saudara perempuan sekandung atau seayah) yang berkedudukan sebagai dzawil furudl.
4. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki sekandung atau seayah, memperoleh status sebagai asabah karena ia adalah pengganti ayahnya (saudara laki-laki sekandung atau seayah) yang berkedudukan sebagai asabah.

5. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara seibu, memperoleh status sebagai dzawil furudl karena ia adalah pengganti ayah atau ibunya (saudara seibu) yang berkedudukan sebagai dzawil furudl.
6. Anak laki-laki dan anak perempuan paman, memperoleh status sebagai asabah karena ia adalah pengganti ayahnya (paman pewaris) sebagai asabah.

Kakek dan nenek adalah ahli waris langsung, disebut dalam pasal 174 ayat (1) KHI, namun tidak dijelaskan berapa bagiannya. Untuk itu, oleh Idris Djakfar dan Taufik Yahya diberi bagian sebesar bagian ahli waris pengganti bagi ayah dan atau ibu.<sup>1</sup>

#### **4.1.2. Keutamaan Antar Sesama Ahli Waris**

Urutan keutamaan untuk memperoleh warisan antar sesama ahli waris, jika diperluas lingkupnya menjadi lembaga yang dikenal dengan istilah hijab yakni dinding, halangan atau rintangan yang menyebabkan seseorang tidak mendapat warisan atau berkurangnya bagian seorang ahli waris, maka akan diperoleh suatu kenyataan bahwa kewarisan Kompilasi Hukum Islam mengenal tiga macam hijab seperti yang dikenal dalam kewarisan patrilineal Syafi'i yaitu hijab nuqshan, hijab hirman bil washfi, dan hijab hirman bisy syakhshi.

##### **1. Hijab Nuqshan**

Hijab nuqshan ialah hijab yang hanya mengurangi bagian seorang ahli waris, yaitu:

---

<sup>1</sup> Idris Dhakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 64.

- a. Ayah, bagiannya berkurang dari sepertiga menjadi seperenam karena terhibab oleh anak atau waris penggantinya (Pasal 177 KHI).
- b. Ibu, bagiannya berkurang dari sepertiga menjadi seperenam karena terhibab oleh anak atau waris penggantinya atau dua saudara atau lebih atau waris penggantinya (Pasal 178 jo. Pasal 185 KHI).
- c. Duda, bagiannya berkurang dari seperdua menjadi seperempat karena terhibab oleh anak atau waris penggantinya (Pasal 179 jo. Pasal 185 KHI).
- d. Janda, bagiannya berkurang dari seperempat menjadi seperdelapan karena terhibab oleh anak atau waris penggantinya (Pasal 180 jo. pasal 185 KHI).

## 2. *Hijab Hirman bil washfi*

Hijab hirman bil washfi ialah hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapat warisan (terhalang) dikarenakan ada hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, yaitu :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris (Pasal 173 a KHI).
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (pasal 173 b KHI).
- c. Berbeda agama dengan pewaris (Pasal 171 b dan c KHI).

### 3. *Hijab hirman bisy syakhshi*

Hijab hirman bisy syakhshi ialah hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan karena ada ahli waris lain yang lebih berhak (lebih utama) dari padanya dikarenakan lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contohnya antara lain :

- a. Kakek tidak mendapat warisan karena terhibab oleh ayah (Pasal 174 ayat 2 KHI).
- b. Nenek tidak mendapat warisan karena terhibab oleh ibu (Pasal 174 ayat 2 KHI).
- c. Saudara sekandung tidak mendapat warisan karena terhibab oleh ayah, anak laki-laki atau anak perempuan (Pasal 182 KHI jo. Yurisprudensi MA).
- d. Saudara seibu tidak mendapat warisan karena terhibab oleh ayah, anak laki-laki atau anak perempuan (Pasal 181 KHI).

#### 4.1.3. **Bibi Selaku Kerabat Pewaris Diwarisi Namun Tidak Berhak Mewaris.**

Seperti telah dikemukakan pada bagian awal Bab ini, bahwa pasal 174 ayat (1), KHI menyebutkan secara rinci sejumlah orang dari kerabat pewaris yang berhak mendapat warisan menurut keutamannya, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, duda, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, janda, saudara perempuan, dan nenek. Ini berarti bibi yakni saudara perempuan ibu dan saudara perempuan ayah tidak diberi status sebagai ahli waris, walau ia adalah kerabat pewaris.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan KHI masih mengandung sifat diskriminasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Diskriminasi horizontal adalah menjadikan paman sebagai ahli waris, sedangkan bibi tidak. Diskriminasi vertikal adalah menjadikan keponakan sebagai ahli waris bagi bibinya namun bibi tidak menjadi ahli waris bagi keponakannya.

Kalau saja Pasal 174 KHI tidak merinci atau menyebutkan satu persatu siapa saja dari kerabat pewaris yang menjadi ahli waris, maka dengan berpegang pada keumuman Pasal 171 huruf c, bibi masih berpeluang untuk mendapatkan warisan, paling tidak mendahului hak Baitulmal (representasi dari hak mewaris bagi umat Islam) untuk mewaris berdasarkan Pasal 191 KHI, karena statusnya sebagai kerabat atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yang secara hukum tentu dapat dianggap sebagai ahli waris. Akan tetapi karena Pasal 174 telah menyebutkan siapa saja dari kerabat pewaris yang menjadi ahli waris, maka kerabat yang tidak disebut jelas bukan ahli waris, sehingga hak Baitulmal untuk mewaris menjadi lebih utama dibanding bibi.

Pasal 185 ayat (1) KHI tentang ahli waris pengganti juga tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak waris kepada bibi atas harta warisan keponakannya, hal tersebut karena Pasal 174 ayat (1) huruf a telah dengan tegas mencantumkan paman sebagai ahli waris langsung. Oleh karena paman adalah ahli waris langsung dari keponakannya maka sangat tidak mungkin menjadikan bibi sebagai ahli waris pengganti bagi mendiang kakek atau nenek pewaris, sebab kalau bibi dijadikan ahli waris pengganti sedangkan paman adalah ahli waris langsung akan terjadi kekacauan, karena pada dasarnya bibi dan paman adalah

bersaudara. Oleh karena itu, maka dari 41 orang ahli waris laki-laki dan perempuan yang disebut oleh Idris Djakfar dan Taufik Yahya sebagai rincian ahli waris dalam KHI berdasarkan Pasal 174 jo Pasal 185 ayat (1) KHI, bibi (baik saudara perempuan ayah maupun saudara perempuan ibu) tidak tercantum disana. Dengan demikian berarti bibi selaku kerabat pewaris diwarisi namun tidak berhak mewaris. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan hak seperti diamanatkan oleh al Qur'an surat an Nisa ayat 7 yang antara lain menyatakan bahwa "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan, ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan".

Ketidakadilan tersebut mungkin baru akan dirasakan oleh bibi tatkala keponakannya yang meninggal itu tidak mempunyai kerabat yang lain selain dirinya, sedangkan harta warisan keponakannya diwariskan kepada umat Islam lainnya melalui Baitulmal sesuai ketentuan Pasal 191 jo Pasal 174 KHI, padahal jika berpegang pada al Qur'an surat al Ahzab ayat 6, al Anfal ayat 75 seharusnya bibilah yang lebih utama, karena kedua ayat tersebut intinya menegaskan bahwa, "Orang yang mempunyai hubungan kerabat lebih berhak mewaris kerabatnya daripada orang Islam lainnya".

Mendahulukan Baitulmal dalam perolehan harta berarti menghapus hak bibi selaku kerabat untuk memperoleh warisan. Ini berarti KHI telah berlaku tidak adil karena tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak orang lain (bibi).



KHI baru akan bebas dari ketidakadilan dan sifat diskriminasi jika bibi diberi hak waris. Ini dapat dilakukan dengan cara memberinya status sebagai ahli waris, yakni merubah ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan mencantumkan bibi disana, atau dapat pula dilakukan dengan merubah ketentuan pasal 209 tentang wasiat wajibah, yakni tidak hanya diberikan kepada anak dan orang tua angkat tetapi juga kepada kerabat pewaris yang tidak mempunyai hak waris termasuk bibi seperti wasiat wajibah yang diatur dalam UU Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946 Pasal 76-79, walau tidak sama persis.

#### **4.2. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 KHI dan Polemik Dalam Pemahamannya.**

##### **4.2.1. Waris Pengganti Mengurangi Diskriminasi dan Memberi Rasa Adil**

Sebelum dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni dan Keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 Nomor 154, Pengadilan Agama di Indonesia dalam memutus dan menyelesaikan perkara kewarisan, berpedoman pada hukum kewarisan madzhab Syafi'i. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/1/735.

Dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i dikenal ada tiga macam ahli waris yaitu dzawil furudl, asabah dan dzawil arham. Dari ketiga macam ahli waris tersebut yang berhak mendapat warisan hanya dzawil furudl dan asabah saja, sedangkan dzawil arham tidak berhak mendapat warisan.

Akibat dari ketentuan tersebut, banyak kasus kewarisan yang penyelesaiannya kurang dapat diterima paling tidak oleh sebagian masyarakat Islam di Indonesia, karena dipandang tidak adil dan diskriminatif.

Sebagai contoh, jika dalam suatu kasus kewarisan ahli warisnya terdiri dari cucu yang berasal dari anak laki-laki dan cucu yang berasal dari anak perempuan, maka yang berhak mendapat warisan hanya cucu yang berasal dari anak laki-laki saja, cucu yang berasal dari anak perempuan tidak mendapat warisan karena ia adalah dzawil arham. Demikian pula jika ahli warisnya terdiri dari keponakan laki-laki dan keponakan perempuan, maka yang berhak mendapat warisan hanya keponakan laki-laki saja, keponakan perempuan tidak mendapat warisan karena ia adalah dzawil arham.

Cara pembagian yang demikian itu dipandang janggal, tidak adil dan diskriminatif, sehingga sulit diterima. Betapa tidak, karena bagi seorang paman semua anak dari saudara-saudaranya adalah keponakannya sendiri, yaitu darah daging dari saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia, tidak peduli apakah keponakannya itu berasal dari saudaranya yang laki-laki ataupun yang perempuan. Demikian pula bagi seorang kakek, semua anak dari anak-anaknya adalah cucu-cucunya sendiri, yaitu darah daging dari anak-anaknya yang telah meninggal dunia yang berarti pula darah dagingnya sendiri, tidak peduli apakah cucunya itu laki-laki atau perempuan, dan juga tidak peduli apakah cucunya itu berasal dari anaknya yang laki-laki ataupun yang perempuan.

Dengan demikian berarti semua keponakan atau semua cucu layaknya akan menempati posisi yang sama atau hak yang sama untuk mendapatkan

warisan dari harta peninggalan paman atau kakeknya, betapun kecilnya bagian yang akan mereka terima. Namun dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i tidaklah demikian. Karena bercorak patrilineal, hukum kewarisan patrilineal Syafi'i menempatkan keponakan perempuan dari saudara laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai dzawil arham, dan akibatnya mereka tidak mendapat bagian apa-apa dari harta warisan paman dan kakeknya.

Kejanggalan, kepincangan dan ketidakadilan menjadi semakin dirasa tatkala mereka berhadapan dengan kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari dzawil arham semuanya seperti cucu laki-laki dan perempuan yang berasal dari anak perempuan dan seterusnya, karena menurut kewarisan patrilineal Syafi'i harta warisan harus diserahkan kepada Baitulmal untuk diwariskan kepada umat Islam lainnya, sementara keluarga pewaris sendiri yang dzawil arham itu tidak mendapat apa-apa.

Memperhatikan ketentuan kewarisan yang dipandang tidak adil dan diskriminatif tersebut, maka dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan Pasal 185 yang ayat (1) nya menyebutkan bahwa, *"ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya"*. Anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya tersebut selanjutnya disebut sebagai ahli waris pengganti.

Dengan waris pengganti yang rumusannya seperti itu maka sanak keluarga yang semula digolongkan sebagai dzawil arham kecuali bibi tidak hanya sekedar dapat lebih diutamakan haknya untuk mendapat warisan dibandingkan dengan baitulmal, akan tetapi ia juga dapat tampil sebagai ahli waris yang berhak

mendapat warisan sekalipun ahli waris dzawil furudl dan asabah ada bersama-sama dengan mereka. Dengan demikian maka kewarisan KHI, dengan waris penggantinya telah mengurangi sifat diskriminasi yang selama ini terjadi dalam pembagian warisan, dan sekaligus telah memberikan rasa adil kepada sanak keluarga dari pewaris, kecuali bibi dan keturunannya.

#### **4.2.2. Pengaturan Waris Pengganti Dalam KHI Terlalu Sempel**

Berbeda dengan waris pengganti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur dalam sejumlah pasal, waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 185 yang terdiri dari dua ayat, yakni ayat (1) mengenai pengertian dan ruang lingkup penggantinya dan ayat (2) mengenai batas besarnya bagian bagi ahli waris pengganti.

Rumusan Pasal 185 KHI tentang waris pengganti tersebut sungguh sangat singkat dan padat, tanpa rincian yang memberi batas seberapa jauh penggantian itu dapat dilakukan. Rumusan yang singkat dan padat itu mengundang perhatian para ahli hukum Islam untuk membuat penafsiran-penafsiran sendiri yang sejalan dengan sudut pandang dan pola pikir masing-masing, yang berbeda satu dengan yang lain.

Jika penafsiran tersebut dilakukan dalam rangka pemahaman secara ilmiah, hasilnya tentu akan memberikan sumbangsih yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu faraidl di Indonesia. Sebaliknya, jika penafsiran itu dilakukan para penegak hukum (Hakim Pengadilan Agama) dalam rangka melaksanakan

pasal tersebut dalam praktek, maka penafsirannya harus dilakukan secara berhati-hati, tidak boleh keluar dari makna (bunyi) harfiah pasal tersebut, sehingga penafsiran yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain yang bermuara pada lahirnya putusan yang saling berdisparitas dapat dihindari. Dengan demikian, kepastian hukum yang menjadi ide dasar dan yang dicita-citakan oleh pemrakarsa penyusunan Kompilasi Hukum Islam benar-benar dapat diwujudkan.

Kepastian hukum dalam penerapan hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam, hendaknya harus dipandang sebagai sesuatu yang amat berharga, amat dibutuhkan, sehingga akan selalu diupayakan pemenuhannya. Sebab, ketidakpastian hukum seperti yang pernah terjadi sebelumnya telah membawa konsekwensi yang cukup besar. Konsekwensi tersebut ialah, bagi orang Islam yang taat ketidakpastian hukum akan menimbulkan keresahan dalam dirinya, dan bagi orang Islam yang kurang taat ketidakpastian hukum akan menimbulkan kecenderungan baginya untuk lari meninggalkan hukum Islam dengan cara memilih hukum lain yang lebih dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Apalagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memungkinkan untuk itu melalui pemberian hak opsi.

Oleh karenanya, melalui tulisan ini penulis mencoba menguraikan Pasal 185 KHI yang menjadi dasar bagi ahli waris pengganti, dengan maksud kiranya dapat memperjelas pemahaman terhadap pasal tersebut, sekaligus dapat dijadikan pedoman (tolok ukur) dalam mengungkap persamaan dan perbedaannya dengan hukum kewarisan Syafi'i dan Hazairin.

#### 4.2.3. Waris Pengganti Menurut Pasal 185 KHI

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti dirumuskan dalam Pasal 185, yang menyebutkan bahwa : (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Jika dipahami secara tekstual redaksi Pasal 185 tersebut, maka makna yang terkandung didalamnya adalah, pertama penggantian dalam Pasal 185 itu mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Penggantian tempat artinya, cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya itu selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya. Penggantian derajat artinya, ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan derajat anak laki-laki, ahli waris pengganti yang menggantikan anak perempuan memperoleh derajat sama dengan derajat anak perempuan dan seterusnya. Penggantian hak artinya, jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti itu mendapat warisan, maka ahli waris pengganti juga berhak mendapat warisan, dan jika orang yang digantikan itu menghijab ahli waris

yang lain maka ahli waris pengganti juga menghibab ahli waris tersebut, dan seterusnya. Tanpa batas artinya, penggantian itu berlaku bagi cucu pewaris meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain atau dua orang anak perempuan lainnya yang masih hidup. Tanpa diskriminasi artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, baik keturunan digaris laki-laki maupun keturunan digaris perempuan, kecuali yang tidak disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a. Dengan demikian, maka yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan paman, dan keturunan dari ahli waris pengganti ahli waris pengganti tersebut.

Kedua, ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang ia gantikan, artinya jika ahli waris pengganti itu menggantikan kedudukan anak laki-laki maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki, jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan tersebut, dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali bagian yang perempuan.

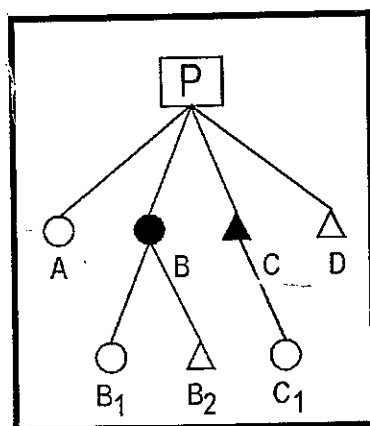
Yang dimaksud dengan sederajat dalam Pasal 185 ayat (2) adalah sederajat misalnya antara anak laki-laki dan anak laki-laki, bukan antara anak laki-laki dan anak perempuan di mana al Qur'an surat an Nisa ayat 11, KHI Pasal

176 dan 182 membedakannya. Dengan demikian, bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki tidak boleh melebihi atau tidak boleh lebih besar dari pada bagian anak laki-laki pewaris yang masih hidup, namun bisa lebih besar dari bagian anak perempuan pewaris, tergantung posisi kasusnya seperti apa.

Mencermati kalimat tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti dalam Pasal 185 ayat (2), ada ahli hukum yang berpendapat bahwa bagian ahli waris pengganti bisa lebih kecil dari bagian ahli waris yang ia gantikan. Pendapat ini memang ada benarnya, namun jika diikuti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, karena tidak ada patokan pasti yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan berapa besar bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti. Oleh karena itu, yang tepat adalah memberikan bagian kepada ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang ia gantikan.

Untuk memahaminya secara lebih jelas, berikut ini akan dikemukakan sebuah contoh :

**Gambar I**





Pada gambar I tersebut diketahui bahwa pewaris mempunyai 4 orang anak, yaitu A (anak laki-laki), B (anak laki-laki), C (anak perempuan), dan D (anak perempuan). B meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu B1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki) dan B2 (cucu perempuan dari anak laki-laki), C juga telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu C1 (cucu laki-laki dari anak perempuan). Dari kasus tersebut, maka A mendapat  $\frac{2}{6}$  atau  $\frac{6}{18}$  bagian, B1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{4}{18}$  bagian, B2 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{2}{18}$  bagian, C1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{3}{18}$  bagian, dan D mendapat  $\frac{3}{18}$  bagian.

Dengan demikian maka ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI ini banyak kesamaannya dengan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain Pasal 841-847, persamaannya adalah :

1. Adanya kematian orang yang diganti mendahului kematian pewaris.
2. Yang digantikan adalah tempat, derajat dan hak-hak tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.
3. Yang dapat menggantikan adalah anak dari anak atau cucu dan seterusnya ke bawah serta anak-anak dari keturunan keluarga digaris ke samping.

Hukum kewarisan patrilineal Syafi'i dalam arti yang sesungguhnya tidak mengenal ahli waris pengganti. Cucu dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i memang dapat menjadi ahli waris yang berhak memperoleh warisan, tetapi tidak untuk menggantikan tempat, derajat dan hak-hak orang tuanya yang meninggal

lebih dahulu dari pada pewaris, melainkan untuk dan atas namanya sendiri dengan menempati tempat, derajat dan hak-hak yang berbeda dengan tempat, derajat dan hak-hak orang tuanya sebagai ahli waris jika masih hidup. Selain itu, sifatnya diskriminatif dan terbatas. Yang dimaksud dengan diskriminatif ialah bahwa, yang dapat menjadi ahli waris hanya terbatas pada cucu yang berasal dari anak laki-laki, cucu yang berasal dari anak perempuan tidak berhak mendapat warisan karena mereka digolongkan sebagai dzawil arham. Dan yang dimaksudkan dengan terbatas ialah cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan mendapat warisan jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, dan cucu perempuan dari anak laki-laki baru akan mendapat warisan jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua orang anak perempuan pewaris yang masih hidup.

Jika kasus kewarisan pada gambar I di atas, dihitung menurut hukum kewarisan Syafi'i maka yang berhak mendapat warisan hanya A dan D, yakni A mendapat  $\frac{2}{3}$  dan D  $\frac{1}{3}$ . B1 dan B2 tidak mendapat warisan karena terhibab oleh A, sedangkan C1 tidak mendapat warisan karena ia adalah dzawil arham.

Memperhatikan ketentuan yang diskriminatif dan terbatas itu, maka Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Pasal 76-79, menyediakan lembaga khusus untuk cucu-cucu yang tersingkir atau tersisihkan dari perolehan harta warisan baik karena kedudukannya sebagai dzawil arham maupun karena terhibab oleh anak laki-laki. Lembaga tersebut dikenal dengan nama wasiat wajibah. Dengan wasiat wajibah tersebut maka cucu-cucu tadi akan mendapatkan harta dari warisan kakeknya. Hanya saja, antara wasiat wajibah menurut undang-

undang wasiat Mesir dengan ahli waris pengganti selain terdapat persamaan juga terdapat perbedaan yang prinsip. Persamaannya adalah :

1. Adanya kematian orang yang diganti mendahului kematian pewaris.
2. Bagian orang yang menggantikan tidak lebih besar dari pada orang yang diganti.

Sedangkan perbedaannya adalah :

1. Dalam wasiat wajibah yang diganti ialah hak menerima bagian orang tuanya dengan batasan tidak boleh melebihi sepertiga harta, sedangkan dalam ahli waris pengganti yang digantikan adalah tempat, derajat dan hak-hak, serta tidak dibatasi atas sepertiga harta.
2. Dalam wasiat wajibah yang dapat menggantikan hanya cucu laki-laki maupun perempuan, baik yang berasal dari anak laki-laki maupun yang berasal dari anak perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sedangkan dalam ahli waris pengganti, yang dapat menggantikan adalah:
  - a. Cucu dan seterusnya kebawah.
  - b. Anak-anak keturunan keluarga di garis ke samping seperti keponakan dan saudara sepupu, dan seterusnya ke bawah.

#### **4.2.4. Beda Pendapat dalam Memahami Kedudukan dan Hak Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI.**

Seperti telah dikemukakan di atas, Pasal 185 KHI dirumuskan secara singkat dan padat, tanpa rincian yang memberi batas seberapa jauh penggantian

itu dapat dilakukan. Dengan demikian berarti penggantian dimaksud adalah penggantian dalam arti luas, yakni penggantian tempat, derajat dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Namun ada ahli hukum yang cenderung menafsirkannya secara sempit dengan membuat batasan-batasan tertentu yang menjadi ruang lingkup pengantiannya. Diantara ahli hukum tersebut adalah Roihan A. Rasyid.

*Menurut Roihan A. Rasyid<sup>2</sup> dalam Pasal 185 KHI itu ada yang namanya pengganti ahli waris dan ada yang namanya ahli waris pengganti. Pengganti ahli waris ialah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan, namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris (sama dengan plaatsvervulling dan wasiat wajibah), misalnya pewaris meninggalkan anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, disini cucu adalah pengganti ahli waris. Ahli waris pengganti ialah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu maka ia menjadi ahli waris, dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris, misalnya pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.*

*Selanjutnya ia mengusulkan agar Pasal 185 di dasarkan minimal pada 3 pertimbangan, yaitu :*

---

<sup>2</sup> Roihan A. Rasyid, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, Mimbar Hukum Nomor 23 Tahun VI Nopember-Desember 1995, hal 54-67.

- a. *Berlaku tidaknya konsep pengganti ahli waris harus berdasarkan atas pertimbangan Hakim, menurut kasus demi kasus, dan ini sudah tercakup dalam kata dapat pada Pasal 185 ayat (1).*
- b. *Bila pengganti ahli waris tersebut hanya berhadapan dengan ahli waris sederajat dengan yang digantikannya, artinya hanya antar anak dan cucu (garis keturunan ke bawah) saja, maka perlu ada pembatasan bagi pengganti ahli waris dan ini sudah tercakup dalam ayat (2) Pasal 185.*
- c. *Bila yang tersebut pada point 2 di atas bersangkutan pula dengan ahli waris yang lain, misalnya ayah, ibu, isteri/suami, atau saudara, atau sejenis itu, yang akan menjadi kurang bagiannya karena masuknya pengganti ahli waris, maka pengganti ahli waris tidak berlaku kecuali ada izin/ persetujuan dari ahli waris lain yang bagiannya akan berkurang itu.*

*Mengenai kata dapat yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) KHI menurut Roihan A. Rasyid tidaklah bersifat mutlak (selalu dapat diganti), tetapi yang dimaksud adalah “mungkin dapat diganti” dan “mungkin tidak dapat diganti”, terserah pada pertimbangan hakim menurut kasus demi kasus, dan bukan menurut hukum dalam fungsi mengatur yang berlaku umum.*

Terhadap pendapat tersebut dapat dikemukakan tanggapan, pertama orang akan cenderung berpendapat bahwa hukum waris KHI itu tidak adil dan diskriminatif. Bagi masyarakat Islam yang sudah biasa menganut sistem keturunan yang patrilineal tentu akan menerimanya dengan senang hati, tetapi bagi masyarakat Islam yang menganut sistem keturunan yang bilateral apalagi yang matrilineal yang merupakan mayoritas masyarakat Islam Indonesia, akan cenderung meninggalkan hukum kewarisan KHI, dan memilih hukum kewarisan

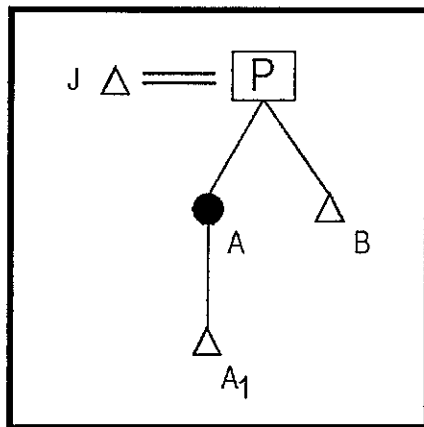
adat atau KUH Perdata yang dipandang lebih adil dan tidak diskriminatif, apalagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memungkinkan untuk itu melalui hak opsi.

Kedua, jika penentuan dapat tidaknya ahli waris pengganti menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta bersama dengan anak pewaris yang masih hidup, digantungkan pada pertimbangan hakim, maka hal ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada suatu ketika hakim mungkin akan mempertimbangkan bahwa ahli waris pengganti yang bersangkutan dapat menempati posisi orang tuanya, dan di lain waktu oleh hakim yang sama atau oleh hakim yang lain) mungkin pula akan mempertimbangkan, bahwa ahli waris pengganti tersebut tidak dapat menggantikan atau menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris untuk kasus yang sama atau serupa. Demikian pula jika penentuannya digantungkan pada izin atau persetujuan ahli waris yang bagiannya menjadi berkurang dengan adanya ahli waris pengganti, inipun akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada suatu ketika ahli waris tersebut mungkin akan mengizinkan atau menyetujui, dan dilain waktu untuk kasus yang serupa, ahli waris lain yang terkait tidak mengizinkan atau tidak menyetujuinya, jika ini yang terjadi maka hakim-hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus yang berhubungan dengan ahli waris pengganti ini akan terjebak dengan putusan-putusan yang saling berdisparitas, dan akibatnya kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pemrakarsa penyusunan KHI akan semakin jauh dari jangkauan.

Selain itu, tampilnya cucu sebagai ahli waris yang mewarisi harta bersama dengan anak perempuan pewaris, atau ibu pewaris, atau janda atau duda

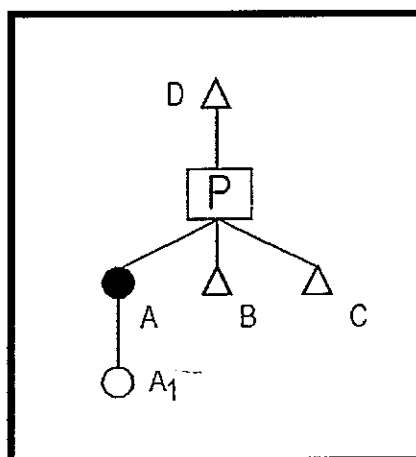
bukanlah merupakan hal yang baru sama sekali. Kalangan Ahlussunnah khususnya hukum kewarisan Syafi'i selama ini juga telah mengenalnya. Hanya saja sifatnya yang diskriminatif dan terbatas. Sebagai contoh :

**Gambar II**



Pada gambar II, ahli waris terdiri dari J (janda), A<sub>1</sub> (cucu perempuan dari anak laki-laki) dan B (anak perempuan). Menurut hukum kewarisan Syafi'i, J (janda) mendapat  $\frac{3}{24}$  atau  $\frac{12}{96}$  bagian, A<sub>1</sub> (dzawil furudl) mendapat  $\frac{21}{96}$  ( $\frac{4}{24} + \frac{5}{96}$ ), dan B (dzawil furudl) mendapat  $\frac{63}{96}$  ( $\frac{12}{24} + \frac{15}{96}$ ).

**Gambar III**



Pada gambar III, ahli waris terdiri dari D (ibu), B (anak perempuan), C (anak perempuan) dan A1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki). Menurut hukum kewarisan Syafi'i, D mendapat  $1/6$ . B mendapat  $2/6$  ( $1/2 \times 4/6$ ), C mendapat  $2/6$  ( $1/2 \times 4/6$ ) dan A1(asabah) mendapat  $1/6$ .

Jadi, tampilnya cucu sebagai ahli waris dzawil furudl atau asabah yang mewarisi harta bersama dengan anak perempuan, atau ibu, atau janda/duda sudah sejak lama berlaku. Dan tampilnya cucu tadi tidak didasarkan pada pertimbangan hakim atau belas kasihan dari ahli waris lain yang ada, melainkan didasarkan pada ketentuan hukum yang bersifat mengatur.

Ketiga, pendapat Roihan A. Rasyid tersebut diatas dapat dikatakan menyimpang dari redaksi pasal 185 KHI. Oleh karena itu, jika pendapat ini diterima, maka Pasal 185 harus dirubah dulu redaksinya, disesuaikan dengan maksud dan keinginan tersebut, setelah itu barulah dapat dijadikan sebagai tolok ukur bersama atau acuan bersama.

Keempat, penulis sependapat dengan Roihan A. Rasyid yang mengatakan kata "dapat" dalam Pasal 185 KHI itu tidak bersifat mutlak. Namun dapat tidaknya ahli waris pengganti menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris pengganti, menurut penulis, tidak tergantung pada pertimbangan hakim atau belas kasihan (dengan izin atau persetujuan) ahli waris lain, melainkan terserah atau tergantung pada ahli waris pengganti itu sendiri, apakah ia akan menempati posisi yang telah disediakan untuknya itu atau tidak. Jika ia mau menempati posisinya tidak boleh ada yang mencegah atau melarangnya, dan jika ia tidak mau maka tidak boleh atau tidak ada yang dapat memaksanya.



Ahli hukum lain dari kalangan praktisi (Hakim PA) yang ikut memberikan pendapatnya ialah Syaifuddin. Yang perlu ditelaah dari pendapat Syaifuddin ini ialah mengenai Pasal 185 ayat (2). Ia berpendapat bahwa, kata sederajat dalam Pasal 185 ayat (2) KHI adalah sederajat dalam konteks kekerabatan atau hubungan darah antara orang-orang yang berasal dari satu jihat. Misalnya si A mempunyai tiga orang anak yaitu B (lk), C (pr) dan D (lk). Dalam kasus ini B, C dan D adalah sederajat, karena mereka dihubungkan oleh orang yang sama yaitu A. Atau dengan kata lain, yang dimaksud sederajat dengan ahli waris yang diganti itu adalah orang yang mempunyai jihat kekerabatan yang sama dan dihubungkan oleh orang yang sama pula. Dengan pemahaman ini maka ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki bagiannya tidak boleh lebih besar dari pada bagian anak perempuan pewaris yang masih hidup, karena derajat anak laki-laki pewaris yang digantikan oleh ahli waris pengganti menurut Syaifuddin sama dengan derajat anak perempuan pewaris yang masih hidup tersebut.<sup>3</sup>

Dengan berpegang pada pemahaman tersebut, Syaifuddin mengemukakan beberapa contoh cara pembagiannya yakni :<sup>4</sup>

- a. Jika ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan kandung, satu orang anak laki-laki kandung, dan satu orang cucu laki-laki kandung dari anak laki-laki. Terhadap kasus ini, penyelesaiannya menurut Syaifuddin ada dua alternatif, yakni pertama anak perempuan mendapat  $\frac{4}{15}$  atau  $\frac{3}{15} + \frac{1}{15}$

---

<sup>3</sup> Syaifuddin, *Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Hukum No. 58 Tahun ke XIII 2002, hal. 50-53.

<sup>4</sup> *Ibid.*

(rad), anak laki-laki mendapat  $\frac{8}{15}$  atau  $\frac{6}{15} + \frac{2}{15}$  (rad), dan cucu laki-laki dari anak laki-laki (waris pengganti) mendapat  $\frac{3}{15}$ . Jadi pada alternatif pertama ini harta dibagi menjadi 5 bagian, kepada ahli waris pengganti diberi bagian sebesar bagian anak perempuan, dan sisanya 1 (satu) bagian dibagi secara rad antara anak laki-laki dan anak perempuan, sedangkan ahli waris pengganti tidak mendapat bagian dari rad tersebut. Kedua, harta tetap dibagi menjadi 5 bagian, kepada anak perempuan diberi satu bagian, anak laki-laki dua bagian dan kepada cucu selaku waris pengganti diberi satu bagian, sedangkan sisanya (rad) dibagikan lagi kepada mereka bertiga sesuai forsi bagian masing-masing, sehingga dengan demikian anak perempuan mendapat  $\frac{5}{20}$  ( $\frac{1}{5} + \frac{1}{20}$  atau  $\frac{1}{5} + \text{rad}$ ), anak laki-laki mendapat  $\frac{10}{20}$  ( $\frac{2}{5} + \frac{2}{20}$  atau  $\frac{2}{5} + \text{rad}$ ), dan ahli waris pengganti (cucu) mendapat  $\frac{5}{20}$  ( $\frac{1}{5} + \frac{1}{20}$  atau  $\frac{1}{5} + \text{rad}$ ).

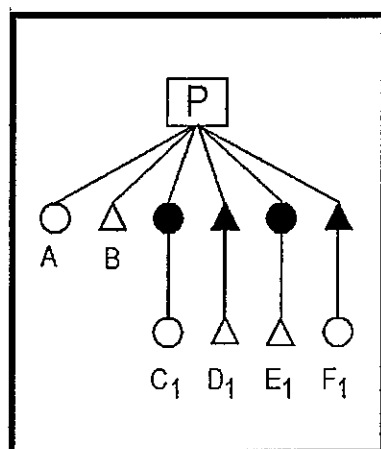
- b. Jika ahli warisnya terdiri dari seorang isteri, seorang anak laki-laki kandung, dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung. Dari kasus tersebut maka isteri mendapat  $\frac{1}{8}$ , dan sisanya dibagi sama rata antara anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dengan demikian maka bagian isteri adalah  $\frac{2}{16}$ , anak laki-laki  $\frac{7}{16}$  dan cucu laki-laki selaku ahli waris pengganti mendapat  $\frac{7}{16}$ . Perhitungan ini memperlihatkan bahwa bagian ahli waris pengganti lebih besar dari pada bagian isteri selaku ahli waris langsung, hal ini menurut Syaifuddin dapat dibenarkan karena isteri tidak satu derajat dengan orang tua dari ahli waris pengganti tersebut, dikarenakan orang tua

dari ahli waris pengganti mempunyai hubungan darah dengan pewaris, sedangkan isteri hubungan perkawinan.

- c. Jika ahli warisnya terdiri dari seorang suami, seorang saudara laki-laki kandung, dan seorang anak laki-laki dari saudara perempuan kandung. Terhadap kasus tersebut pembagiannya adalah, suami mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{3}{6}$ , sisanya untuk saudara laki-laki  $\frac{2}{6}$ , dan anak laki-laki dari saudara perempuan selaku ahli waris pengganti mendapat  $\frac{1}{6}$ .

Terhadap pendapat Syaifuddin tersebut dapat dikemukakan tanggapan, pertama jika penyelesaian kasus pada contoh satu (a) diikuti akan terjadi kekacauan dan tidak konsisten dalam penerapan ketentuan tentang forsi bagian kewarisan dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan. Contohnya dapat dilihat pada kasus berikut ini.

**Gambar IV**



Kasus pada gambar IV ini ahli waris terdiri dari A (anak laki-laki), B (anak perempuan), C1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki selaku waris pengganti), D1 (cucu perempuan dari anak perempuan selaku waris pengganti), E1 (cucu

perempuan dari anak laki-laki selaku waris pengganti) dan F1 (cucu laki-laki dari anak perempuan selaku waris pengganti).

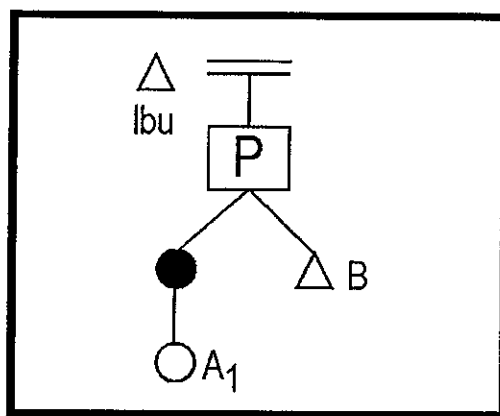
Kasus ini jika dihitung menurut versi Syaifuddin hasilnya adalah A (anak laki-laki) mendapat  $\frac{18}{63}$  ( $\frac{14}{63} + \frac{4}{63}$ ) atau  $\frac{2}{9} + \frac{4}{63}$  (rad), B (anak perempuan) mendapat  $\frac{9}{63}$  ( $\frac{7}{63} + \frac{2}{63}$ ) atau  $\frac{1}{9} + \frac{2}{63}$  (rad), C1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki selaku waris pengganti) mendapat  $\frac{9}{63}$  ( $\frac{7}{63} + \frac{2}{63}$ ) atau  $\frac{1}{9} + \frac{2}{63}$  (rad), D1 (cucu perempuan dari anak perempuan selaku waris pengganti) mendapat  $\frac{9}{63}$  ( $\frac{7}{63} + \frac{2}{63}$ ) atau  $\frac{1}{9} + \frac{2}{63}$  (rad), E1 (cucu perempuan dari anak laki-laki selaku waris pengganti) mendapat  $\frac{9}{63}$  ( $\frac{7}{63} + \frac{2}{63}$ ) atau  $\frac{1}{9} + \frac{2}{63}$  (rad), dan F1 (cucu laki-laki dari anak perempuan selaku waris pengganti) mendapat  $\frac{9}{63}$  ( $\frac{7}{63} + \frac{2}{63}$ ) atau  $\frac{1}{9} + \frac{2}{63}$  (rad).

Dari hasil perhitungan pada kasus gambar IV tersebut terlihat bahwa, bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki (C1 dan E1) sama besarnya dengan bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak perempuan (D1 dan F1), dan juga bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki selaku ahli waris pengganti (C1) sama besarnya dengan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki selaku ahli waris pengganti (E1). Ini jelas menunjukkan kekacauan dan ketidakkonsistenan dalam penyelesaian kasus kewarisan khusus dalam penerapan porsi bagian kewarisan dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan Pasal 176 dan 182 KHI.

Kedua, jika kasus pada contoh dua (b) terdiri dari ibu (bukan isteri) yang menurut versi Syaifuddin sederajat karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau dengan orang tua dari ahli waris pengganti bersama seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka perhitungannya akan menjadi lain karena menurut versi Syaifuddin bagian seorang cucu selaku ahli

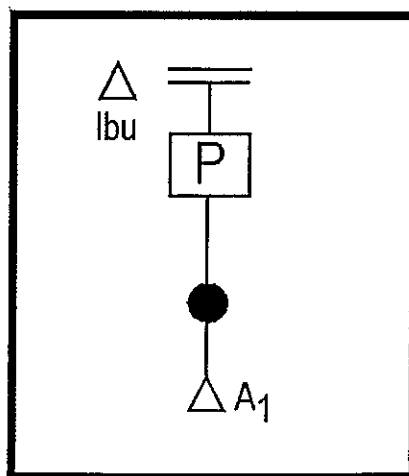
waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki tidak boleh lebih besar dari pada bagian ibu pewaris. Ini jelas tidak atau sulit diterima, karena dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i saja dimungkinkan seorang cucu (dzawil furudl atau asabah) mendapat bagian lebih besar dari pada bagian ibu. Contohnya dapat dilihat pada kasus berikut ini.

**Gambar V**



Kasus pada gambar V ahli warisnya terdiri dari Ibu, B (anak perempuan) dan A1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki). Menurut hukum kewarisan Syafi'i Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ , B mendapat  $\frac{3}{6}$  dan A1 selaku asabah mendapat  $\frac{2}{6}$ .

**Gambar VI**



Kasus pada gambar VI ahli waris terdiri dari Ibu, dan A1 (cucu perempuan dari anak laki-laki). Menurut hukum kewarisan Syafi'i Ibu mendapat  $\frac{6}{24}$  ( $\frac{4}{24} + \frac{2}{24}$  (rad)), sedangkan cucu perempuan (selaku dzawil furudl) mendapat  $\frac{18}{24}$  ( $\frac{12}{24} + \frac{6}{24}$ ) atau  $\frac{3}{6} + \frac{6}{24}$  (rad).

Dari kedua contoh kasus tersebut jelas bahwa bagian cucu baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari anak laki-laki selaku asabah atau dzawil furudl lebih besar dari pada bagian Ibu. Kalau dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i bagian cucu bisa lebih besar dari pada bagian ibu, mengapa dalam Kompilasi Hukum Islam bagian cucu yang berasal dari anak laki-laki tidak boleh lebih besar dari pada bagian ibu.

Oleh karena itu maka teori atau pemahaman Syaifuddin terhadap Pasal 185 ayat (2), di mana pengertian sederajat dipahami dalam konteks hubungan darah atau kerabat sulit diterima dan dipertanggung jawabkan. Yang mungkin dapat diterima atau dipertanggung jawabkan ialah bahwa pengertian sederajat itu harus dipahami dalam konteks perolehan hak waris, sehingga hasil pemahamannya ialah bahwa, bagian seorang ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki tidak boleh lebih besar dari pada bagian anak laki-laki pewaris, karena anak laki-laki yang digantikan oleh ahli waris tersebut sederajat dengan anak laki-laki pewaris yang masih hidup namun bisa lebih besar dari pada bagian anak perempuan pewaris yang masih hidup, karena anak laki-laki yang digantikan oleh ahli waris pengganti lebih besar derajatnya dari pada anak perempuan pewaris (sesuai ketentuan Pasal 176 dan 182 KHI dan al Qur'an Surat an nisa ayat 11 dan 176) yaitu dua berbanding satu, dan juga bisa lebih besar dari

pada bagian Ibu atau Ayah pewaris (vide Pasal 177 dan 178 jo. Pasal 176 dan 185 KHI dan al Qur'an Surat an Nisa ayat 11 jo ayat 176)

Ketiga, penulis sependapat dengan penyelesaian kasus pada contoh tiga (c), dimana bagian seorang ahli waris pengganti yang menggantikan saudara perempuan adalah separoh lebih kecil bagiannya dari pada bagian saudara laki-laki pewaris yang masih hidup, karena itu adalah bagian maksimal yang dapat diterima oleh Ibunya jika masih hidup, dan pengertian penggantian menurut Pasal 185 ayat (1) KHI tidak hanya terbatas pada penggantian dalam garis keturunan ke bawah, tetapi juga keturunan dalam garis ke samping.

Berbeda dengan Raihan A Rasyid dan Syaifuddin, Imran (Hakim PA Bangil) dalam tulisannya yang berjudul "Mempersempit Ruang Lingkup Penafsiran Pasal 185 KHI" mengemukakan, agar pengantiannya menurut Pasal 185 ayat (1) dibatasi hanya pada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Dengan pembatasan ini maka anak paman kalau bersama dengan paman, anak saudara kalau bersama dengan saudara, anak saudara sepupu kalau bersama dengan saudara sepupu adalah bukan ahli waris pengganti.<sup>5</sup>

Sebagai konsekuensi dari pembatasan tersebut, maka menurut Imran AM, dalam kasus kewarisan dimana ahli warisnya disamping ada paman juga ada anak paman yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, demikian juga disamping ada saudara, ada pula anak saudara yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka dalam kasus ini tidak dapat diterapkan Pasal 185 KHI, tapi harus kembali kepada hukum faraidh Madzhab

---

<sup>5</sup> Imron AM, *Mempersempit Ruang Lingkup Penafsiran Pasal 185 KHI*, Mimbar Hukum No. 54 Tahun XII, 2001, hal 30.

Sunni, dimana anak saudara terhibab hirman oleh saudara laki-laki, anak paman terhibab hirman oleh paman dan seterusnya.<sup>6</sup>

Dari usulan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya Imran AM menafsirkan redaksi Pasal 185 ayat (1) KHI, sama dengan penafsiran yang penulis kemukakan di atas, dimana lingkup penggantinya tidak hanya terbatas pada penggantian dalam garis keturunan ke bawah yakni cucu sebagai pengganti anak pewaris tetapi juga pada garis ke samping yakni keponakan sebagai pengganti saudara pewaris, dan saudara sepupu sebagai pengganti paman pewaris. Dan tampilnya ahli waris tersebut sebagai pengganti orang tuanya tidak memerlukan izin atau persetujuan dari ahli waris lain yang haknya akan menjadi berkurang dengan tampilnya ahli waris pengganti tersebut, atau dengan pertimbangan hakim seperti apa yang dikemukakan oleh Roihan A. Rasyid.

Mengenai usulan itu sendiri, jika masih dalam batas wacana, kiranya perlu untuk dipertimbangkan. Namun jika dimaksudkan untuk serta merta diterapkan, maka demi kepastian hukum harus ada petunjuk atau surat edaran dari Mahkamah Agung yang menjelaskan mengenai hal tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta masyarakat Islam lainnya.

#### **4.2.5. Implikasi Waris Pengganti Terhadap Ahli Waris Yang Lain**

Adanya ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KHI, akan membawa implikasi baik terhadap jumlah ahli waris maupun terhadap

---

<sup>6</sup> *Ibid.*



keberadaan ahli waris yang lain beserta besarnya bagian yang sedianya mereka terima.

Mengenai jumlah ahli waris, Pasal 174 ayat (1) hanya menyebutkan ada 11 orang ahli waris, yakni yang laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, dan yang perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan janda. Jika ahli waris-ahli waris tersebut ditelaah lebih lanjut, dan dihubungkan dengan keberadaan ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI, maka jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya mencapai 41 orang. Yang laki-laki ada 22 orang, yaitu:<sup>7</sup>

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
3. Cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
4. Ayah.
5. Kakek dari ayah.
6. Kakek dari ibu.
7. Saudara laki-laki sekandung.
8. Saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki seibu.
10. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
11. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung.
12. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
13. Anak laki-laki saudara perempuan seayah.

---

<sup>7</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *op. cit.*, hal. 50-60.

14. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu.
15. Anak laki-laki saudara perempuan seibu.
16. Paman sekandung.
17. Paman seayah.
18. Paman seibu.
19. Anak laki-laki paman sekandung.
20. Anak laki-laki paman seayah.
21. Anak laki-laki paman seibu.
22. Suami atau duda.

Ahli waris perempuan ada 19 orang, terdiri dari :

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
3. Cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
4. Ibu.
5. Nenek dari ayah.
6. Nenek dari ibu.
7. Saudara perempuan sekandung.
8. Saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan seibu.
10. Anak perempuan saudara perempuan sekandung.
11. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung.
12. Anak perempuan saudara perempuan seayah.
13. Anak perempuan saudara laki-laki seayah.

14. Anak perempuan saudara perempuan seibu.
15. Anak perempuan saudara laki-laki seibu.
16. Anak perempuan paman sekandung.
17. Anak perempuan paman seayah.
18. Anak perempuan paman seibu.
19. Isteri atau janda.

Jika ahli waris laki-laki dan perempuan yang 41 orang itu semuanya ada, maka yang mendapat warisan hanya 5 orang saja yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan duda atau janda.

Terhadap ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1), kehadiran ahli waris pengganti akan membawa implikasi sebagai berikut :

#### ***1. Terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan***

Terhadap anak laki-laki, kehadiran ahli waris pengganti akan mengurangi bagian yang akan ia terima, besar kecilnya pengurangan itu tergantung pada kedudukan siapa yang digantikan oleh ahli waris pengganti itu dan berapa jumlah ahli waris yang akan digantikan. Jika yang diganti adalah kedudukan anak perempuan, dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak laki-laki dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak perempuan, maka bagian anak laki-laki akan berkurang dari satu bagian penuh menjadi  $\frac{2}{3}$  bagian, karena  $\frac{1}{3}$  bagian diberikan kepada ahli waris pengganti. Jika yang digantikan adalah kedudukan anak laki-laki, dan ahli warisnya terdiri satu orang anak laki-laki dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak laki-laki dan satu anak perempuan,

maka bagian anak laki-laki akan berkurang dari satu bagian penuh menjadi  $\frac{2}{5}$  bagian, karena  $\frac{3}{5}$  bagian diberikan kepada ahli waris pengganti, yaitu  $\frac{1}{5}$  kepada pengganti anak perempuan dan  $\frac{2}{5}$  kepada pengganti anak laki-laki. Dan seterusnya.

Terhadap anak perempuan, kehadiran ahli waris pengganti selain mengurangi bagian yang akan dia terima juga dapat merubah statusnya dari dzawil furudl menjadi asabah bil ghairi, tergantung kedudukan siapa yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut. Jika yang digantikan adalah kedudukan anak perempuan, dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan dua orang anak perempuan, maka bagian anak perempuan berkurang dari satu bagian penuh ( $\frac{1}{2}$  tambah rad) menjadi  $\frac{3}{9}$  bagian ( $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$ ), karena  $\frac{6}{9}$  bagian diberikan kepada ahli waris pengganti yang masing-masing mendapat  $\frac{3}{9}$  bagian. Jika yang digantikan adalah kedudukan anak laki-laki, dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak laki-laki, maka kehadiran ahli waris pengganti pertama merubah status anak perempuan tersebut dari dzawil furudl menjadi asabah bil ghairi, dan kedua mengurangi bagiannya dari satu bagian penuh ( $\frac{1}{2}$  tambah rad) menjadi  $\frac{1}{3}$  bagian, karena  $\frac{2}{3}$  bagian diberikan kepada ahli waris pengganti. Dan seterusnya.

## **2. Terhadap Ayah, Ibu, Duda dan Janda**

Ayah, ibu, duda dan janda bagiannya sudah ditentukan dalam Pasal 177, 178, 179 dan 180 KHI, yaitu :

1. Ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak mempunyai anak, bila ada anak, ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian (Pasal 177).
2. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian (Pasal 178).
3. Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian (Pasal 179).
4. Janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian (pasal 180).

Dihubungkan dengan ahli waris pengganti menurut Pasal 185, maka Pasal 177, 178, 179, dan 180 harus dibaca menjadi :

1. Ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, bila ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian (Pasal 177 jo. Pasal 185).
2. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, atau dua saudara atau lebih atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan dua orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak atau dua saudara atau lebih atau ahli waris pengganti

yang menggantikan kedudukan dua orang saudara atau lebih, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian (Pasal 178 jo. Pasal 185).

3. Duda mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, maka duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian (Pasal 179 jo. Pasal 185).
4. Janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang mengganti kedudukan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian (Pasal 180 jo. Pasal 185).

Dengan demikian, kehadiran ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya akan mengurangi bagian ayah, ibu, duda atau janda dari  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$ , dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$  dan dari  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$ .

Kehadiran cucu dari anak laki-laki sebagai dzawil furudl atau asabah, mengurangi bagian ayah, ibu, duda dan janda, sejak lama telah diterima sebagai suatu ketentuan hukum. Namun kehadiran cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti mengurangi bagian ayah, ibu, duda dan janda, masih ada yang memperdebatkannya. Demikian pula kehadiran anak perempuan saudara laki-laki atau anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, mengurangi bagian ibu. Namun lepas dari adanya perdebatan tersebut, selama Pasal 185 redaksinya masih seperti itu, maka implikasi dan

konsekuensi yang demikian tetap harus dapat diterima sebagaimana masyarakat Islam menerima KHI sebagai suatu kesepakatan.

### 3. *Terhadap Saudara*

Jika Pasal 185 ayat (1) dihubungkan dengan pasal 181 dan 182 KHI, maka kehadiran cucu sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya akan menutup hak waris bagi saudara. Kehadiran cucu laki-laki dari anak laki-laki menutup hak waris bagi saudara, sudah sejak lama diterima dan berlaku sebagai suatu ketentuan hukum. Namun kehadiran cucu perempuan dari anak laki-laki, serta cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan, menutup hak waris bagi saudara masih banyak diperdebatkan.

Perdebatan atau perbedaan pendapat mengenai hal ini, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perbedaan pendapat mengenai bisa tidaknya anak perempuan menghijab saudara. Ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa anak perempuan tidak bisa menghijab saudara, berpegang pada pendirian bahwa kata “walad” dalam al Qur’an surat an Nisa ayat 12 dan 176, pengertiannya hanya terbatas pada anak laki-laki saja dan tidak mencakup anak perempuan sejalan dengan pendapat mayoritas Ulama. Sebaliknya, ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa anak perempuan bisa menghijab saudara seperti dimaksud dalam Pasal 181 KHI, berpegang pada pendirian bahwa kata “walad” pengertiannya tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja, tetapi mencakup pula anak perempuan sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas.

Lepas dari perbedaan pendapat tersebut, Mahkamah Agung RI melalui 3 keputusannya yaitu keputusan nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, keputusan nomor 184/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dan keputusan nomor 327K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 menetapkan bahwa, anak perempuan seperti halnya anak laki-laki dapat menghibab saudara. Dalam keputusannya Nomor 86K/AG/1994 tanggal 10 Juli 1995, Mahkamah Agung berpendapat bahwa, *“selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup atau terhijab”*.

Dengan demikian maka, kehadiran ahli waris pengganti (cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, serta cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan) tidak hanya sekedar untuk mendapatkan warisan, tetapi menggantikan kedudukan orang tuanya menghibab saudara sesuai Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 181 dan 182 KHI, sehingga jika di dalam suatu kasus kewarisan ada ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak pewaris dan ada saudara, maka yang berhak mendapat warisan hanya ahli waris pengganti saja, dan saudara tidak mendapat apa-apa karena terhijab oleh ahli waris pengganti tersebut.

#### **4.3. Istilah dan Dasar Hukum Pemberian Porsi Sama Besar Kepada Cucu dari Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Pewaris.**

Diakui atau tidak, Pasal 185 KHI tentang waris pengganti juga mengandung suatu kelemahan. Kelemahan pasal tersebut tampak jika dalam suatu



kasus kewarisan waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki hanya satu orang (apalagi jika ia perempuan), mewaris bersama anak perempuan pewaris. Disini akan diperoleh suatu kenyataan dimana bagian waris pengganti lebih besar dari pada bagian anak perempuan, yaitu waris pengganti (cucu) mendapat  $\frac{2}{3}$ , sedangkan anak perempuan mendapat  $\frac{1}{3}$ . Terhadap hasil pembagian yang demikian, ada ahli yang merasa keberatan sehingga enggan menerimanya.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dapat diambil suatu kebijakan, yakni jika cucu dari anak laki-laki (waris pengganti) hanya satu orang dan mewaris bersama anak perempuan, untuk menghindari jangan sampai bagian cucu lebih besar dari bagian anak perempuan, dalam kasus ini menurut M. Yahya Harahap<sup>8</sup> dapat diberikan bagian sama besarnya kepada cucu dan anak perempuan, yakni masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian. Namun menurut hemat penulis, pembagian yang demikian harus dipandang sebagai suatu penyimpangan, bukan merupakan garis hukum Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI, sebab garis hukum Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI adalah bagian waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada bagian anak perempuan atau bagian waris pengganti yang menggantikan anak perempuan.

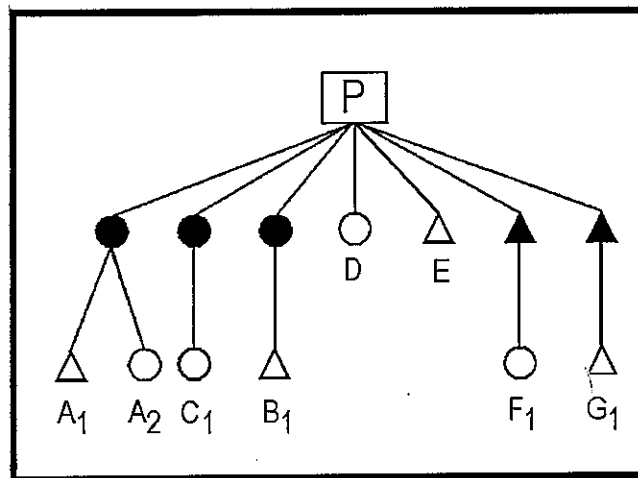
Dalam buku Pintar Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan bulan Mei 1998, dikatakan bahwa *"pembagian untuk cucu (meskipun dari anak laki-laki) adalah  $\frac{1}{2}$  dan anak perempuan  $\frac{1}{2}$  adalah berdasarkan atas ketentuan Pasal 185*

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dikutip dari Mahfud MD, *et al*, *Peradilan Agama dan KHI*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hal. 95.

ayat (2) KHP".<sup>9</sup> Hal ini dapat dimaklumi, karena Pasal 185 ayat (2) KHI hanya menentukan batas maksimal bagian waris pengganti, yakni tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Untuk itu, kepada waris pengganti dapat diberikan bagian yang lebih kecil dari pada bagian ahli waris yang ia gantikan. Namun perlu diingat, penggunaan kata "berdasarkan" seperti tertera dalam buku pintar tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebab kata tersebut akan mengindikasikan bahwa, pemberian bagian kepada waris pengganti bagian yang lebih kecil dari pada bagian ahli waris yang ia gantikan, dalam kasus pada contoh di atas adalah merupakan garis hukum Pasal 185 KHI. Jika paham ini diikuti maka penerapan pasal tersebut untuk kasus-kasus yang lain akan menimbulkan kekacauan dan keruwetan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kasus kewarisan berikut ini.

**Gambar VII :**



<sup>9</sup> Buku Pintar Hakim, *Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama*, PTA Sulawesi Selatan, 1998, hal. 98-99.

Dalam kasus ini, ahli waris terdiri dari A1 (cucu perempuan) dan A2 (cucu laki-laki) adalah waris pengganti bagi A (anak laki-laki), B1 (cucu perempuan) adalah waris pengganti bagi B (anak laki-laki), C1 (Cucu laki-laki) adalah waris pengganti dari C (anak laki-laki), D (anak laki-laki yang masih hidup), E (anak perempuan yang masih hidup), F1 (cucu laki-laki) adalah waris pengganti bagi F (anak perempuan), dan G1 (cucu perempuan) adalah waris pengganti bagi G (anak perempuan).

Jika dalam kasus ini kepada cucu (waris pengganti dari anak laki-laki) diberikan bagian sama besarnya dengan bagian anak perempuan, yang berarti waris pengganti mendapat bagian lebih kecil dari pada bagian ahli waris yang ia gantikan, maka akan ditemukan kekacauan dan keruwetan. Kekacauannya terletak pada eksistensi ketentuan dua berbanding satu antara anak atau cucu laki-laki dan perempuan sesuai Pasal 176 dan 182 jo Pasal 185 KHI, sedangkan keruwetannya terletak pada berapa besar bagian yang akan diberikan kepada waris pengganti dari A, samakah besarnya dengan bagian yang akan diberikan kepada waris pengganti dari B, C, F, dan G. Jika kepada waris pengganti dari A diberikan bagian sebesar dua porsi, maka akan diperoleh kenyataan bahwa A2 (cucu dari anak laki-laki) mendapat bagian lebih besar dari bagian anak perempuan.

Untuk lebih jelasnya, kasus kewarisan pada gambar VII diatas berikut ini akan dihitung dalam tiga alternatif pembagian, yaitu :

#### **Alternatif I**

A1 mendapat  $2/27$  ( $1/3 \times 2/9$ )

A2 mendapat  $4/27$  ( $2/3 \times 2/9$ )

B1 mendapat  $3/27$

C1 mendapat  $3/27$

D mendapat  $6/27$

E mendapat  $3/27$

F1 mendapat  $3/27$

G1 mendapat  $3/27$

Jumlah :  $2/27 + 4/27 + 3/27 + 3/27 + 6/27 + 3/27 + 3/27 + 3/27 = 27/27$ .

Terhadap pembagian pada alternatif I ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni, pertama porsi bagian dua berbanding satu hanya diterapkan pada A (anak laki-laki pewaris yang sudah mati) dan D (anak laki-laki pewaris yang masih hidup), sedangkan terhadap B dan C (anak laki-laki pewaris yang sudah mati) porsi bagian dua berbanding satu tidak diterapkan karena ia hanya mempunyai seorang anak sebagai waris pengganti. Kedua, A2 (cucu dari anak laki-laki) sebagai waris pengganti mendapat bagian  $4/27$ , jadi lebih besar dari pada bagian anak perempuan yaitu  $3/27$ . Dengan demikian jelas bahwa, dalam pembagian tersebut selain telah terjadi kekacauan dalam penerapan ketentuan porsi bagian dua berbanding satu, juga tidak sejalan dengan patokan yang diberikan oleh buku pintar, yakni bagian cucu tidak lebih besar dari bagian anak perempuan.

### **Alternatif II**

A1 mendapat  $2/18$  ( $1/2 \times 2/9$ )

A2 mendapat  $2/18$  ( $1/2 \times 2/9$ )

B1 mendapat  $2/18$

C1 mendapat  $2/18$

D mendapat  $4/18$

E mendapat  $2/18$

F1 mendapat  $2/18$

G1 mendapat  $2/18$

Jumlah :  $2/18 + 2/18 + 2/18 + 2/18 + 4/18 + 2/18 + 2/18 + 2/18 = 18/18$ .

Terhadap pembagian pada alternatif II ini, dapat dikemukakan bahwa bagian cucu selaku waris pengganti dari anak laki-laki adalah sama atau tidak lebih besar dari pada bagian anak perempuan, namun porsi dua berbanding satu hanya diterapkan terhadap A (anak laki-laki pewaris yang sudah mati) dan D (anak laki-laki pewaris yang masih hidup), namun tidak diterapkan pada B dan C (anak laki-laki pewaris yang sudah mati) serta pada cucu-cucu selaku waris pengganti. Dengan demikian, dalam pembagian pada alternatif II inipun juga telah terjadi kekacauan dalam arti tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan porsi bagian dua berbanding satu.

### **Alternatif III**

A1 mendapat  $1/24$  ( $1/3 \times 1/8$ )

A2 mendapat  $2/24$  ( $2/3 \times 1/8$ )

B1 mendapat  $3/24$

C1 mendapat  $3/24$

D mendapat  $6/24$

E mendapat  $3/24$

F1 mendapat  $3/24$

G1 mendapat  $3/24$

Jumlah :  $1/24 + 2/24 + 3/24 + 3/24 + 6/24 + 3/24 + 3/24 + 3/24 = 24/24$ .

Dalam pembagian pada alternatif III ini, bagian cucu selaku waris pengganti dari anak laki-laki adalah sama atau tidak lebih besar dari pada bagian anak perempuan, namun dapat dikatakan tidak konsisten, karena porsi dua berbanding satu hanya diterapkan pada D (anak laki-laki yang masih hidup) serta A1 dan A2 (waris pengganti dari A), namun tidak diterapkan pada B (anak laki-laki pewaris yang sudah mati) atau waris penggantinya yaitu B1 dan C (anak laki-laki pewaris yang sudah mati) atau waris penggantinya yaitu C1.

Oleh karena itu, seharusnya kata atau rumusan yang dipergunakan dalam buku pintar Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan tersebut adalah bahwa, *"pembagian warisan seperdua-seperdua antara cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan tidak menyalahi ketentuan pasal 185 ayat (2) KHI, bukan berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (2) KHI"*. Sedangkan dasar hukumnya adalah kemaslahatan atau muslahat mursalah atau istihshan, bukan pasal 185 ayat (2) KHI.

#### **4.4. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Kewarisan KHI, Syafi'i dan Hazairin serta Rinciannya.**

Untuk dapat mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara ketiga teori hukum kewarisan Islam tersebut secara lebih baik dan akurat, maka selain hukum kewarisan KHI, pokok-pokok hukum kewarisan Syafi'i dan Hazairin juga harus diungkap terlebih dahulu.

#### **4.4.1. Hukum Kewarisan Patrilineal Syafi'i**

Hal pokok yang akan diungkapkan pada bagian ini adalah (1) siapa saja yang menjadi ahli waris, (2) bagaimana penggolongan masing-masing ahli waris tersebut, dan (3) pada saat kapan mereka berhak mendapat warisan. Permasalahan (1) dan (2) diungkap dalam sub tentang ahli waris dan penggolongannya, dan permasalahan (3) diungkap dalam sub tentang hijab.

##### **4.4.1.1 Ahli Waris dan Penggolongannya.**

Dalam hukum kewarisan Syafi'i, ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga dan perkawinan dengan pewaris jumlahnya ada 23 orang, 14 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Ahli waris tersebut yang laki-laki terdiri dari :

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara laki-laki sekandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Saudara laki-laki seibu.
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 10) Paman yang sekandung dengan ayah.
- 11) Paman yang seayah dengan ayah.
- 12) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.
- 13) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- 14) Suami atau duda.

Jika ahli waris laki-laki yang empat belas orang itu semuanya ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya tiga orang saja yaitu ayah, anak laki-laki, dan suami atau duda.

Ahli waris perempuan terdiri dari :

- 1) Anak perempuan.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah melalui garis laki-laki.
- 3) Ibu.
- 4) Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Nenek dari pihak ayah.
- 6) Saudara perempuan sekandung.
- 7) Saudara perempuan seayah.
- 8) Saudara perempuan seibu.
- 9) Isteri atau janda.

Jika ahli waris perempuan yang sembilan orang itu semuanya ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya lima orang saja yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan sekandung, isteri atau janda. Dan jika ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yang dua puluh tiga orang itu semuanya ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya lima orang saja yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ibu, ayah, dan duda atau janda.

Hukum kewarisan patrilineal Syafi'i selanjutnya membagi ahli waris atas tiga golongan yaitu dzawil furudl, asabah dan dzawil arham.



#### 4.4.1.1.1. Dzawil Furudl

Dzawil furudl ialah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yakni seperdua, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga dan seperenam. Adapun ahli waris yang mendapat seperdua terdiri dari :

- a) Anak perempuan tunggal (QS. an Nisa ayat 11).
- b) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki (Qiyas).
- c) Saudara perempuan tunggal yang sekandung (QS. an Nisa ayat 176).
- d) Saudara perempuan tunggal yang seayah jika yang sekandung tidak ada (QS. an Nisa ayat 176).
- e) Suami atau duda jika isterinya yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki (QS. an Nisa ayat 12).

Ahli waris yang mendapat seperempat terdiri dari:

- a) Suami atau duda jika isterinya yang meninggal itu ada mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki (QS. an Nisa ayat 12).
- b) Isteri atau janda jika suaminya yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki (QS. an Nisa ayat 12).

Ahli waris yang mendapat seperdelapan hanya satu orang saja yaitu isteri atau janda jika suaminya yang meninggal itu ada mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki (QS. an Nisa ayat 12).

Ahli waris yang mendapat duapertiga terdiri dari:

- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika anak laki-laki tidak ada (QS. an Nisa ayat : 11).
- b) Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika anak perempuan tidak ada (Qiyas).

- c) Dua orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung (QS. an Nisa ayat 176).
- d) Dua orang saudara perempuan atau lebih yang seayah, jika yang sekandung tidak ada (QS. an Nisa ayat 176).

Ahli waris yang mendapat sepertiga terdiri dari :

- a) Ibu jika anaknya yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki, atau saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan yang sekandung, seayah atau seibu (QS. an Nisa ayat 11).
- b) Dua orang saudara atau lebih yang seibu (QS. an Nisa ayat 12).

Ahli waris yang mendapat seperenam terdiri dari :

- a) Ibu jika anaknya yang meninggal itu ada mempunyai anak, atau cucu baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki, atau saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan yang sekandung, seayah atau seibu (QS. an Nisa ayat 11).
- b) Ayah jika anaknya yang meninggal itu ada mempunyai anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki (QS. an Nisa ayat 11);
- c) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah) jika anaknya yang meninggal itu tidak mempunyai ibu (HR. Zaid).
- d) Cucu perempuan seorang atau lebih dari anak laki-laki, jika pewaris mempunyai satu orang anak perempuan (HR. Bukhari).
- e) Kakek dari pihak ayah jika pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki sedangkan ayahnya tidak ada (Ijma' Ulama).

- f) Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan (QS. An Nisa ayat 12).
- g) Seorang atau lebih saudara perempuan seayah jika pewaris mempunyai seorang saudara perempuan sekandung (Ijma' Ulama).

#### 4.4.1.1.2. Asabah

Asabah ialah ahli waris yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya, namun ia berhak menghabisi semua harta jika mewaris seorang diri, atau semua sisa harta jika mewaris bersama dengan ahli waris dzawil furudl. Hukum kewarisan patrilineal Syafi'i mengenal tiga macam asabah, yaitu asabah bin nafsi, asabah bilghairi dan asabah ma'al ghairi. Asabah bin nafsi adalah ahli waris (laki-laki) yang sejak semula berkedudukan sebagai asabah. Asabah bin nafsi ini terdiri dari :

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- c) Ayah.
- d) Kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.
- e) Saudara laki-laki sekandung.
- f) Saudara laki-laki seayah.
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- i) Paman yang sekandung dengan ayah.
- j) Paman yang seayah dengan ayah.
- k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.
- l) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

Asabah bil ghairi adalah ahli waris (perempuan) yang semula berkedudukan sebagai dzawil furudl, kemudian berubah status menjadi asabah karena tertarik oleh saudaranya yang laki-laki, sehingga ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan bersama-sama menjadi asabah, dan mereka berhak menghabisi semua harta atau semua sisa harta dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali bagian yang perempuan. Ahli waris yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a) Anak perempuan menjadi asabah karena tertarik oleh anak laki-laki.
- b) Cucu perempuan menjadi asabah kerana tertarik oleh cucu laki-laki.
- c) Saudara perempuan sekandung menjadi asabah karena tertarik oleh saudara laki-laki yang sekandung.
- d) Saudara perempuan seayah menjadi asabah karena tertarik oleh saudara laki-laki seayah.

Asabah ma'al ghairi adalah ahli waris (perempuan) yang semula berkedudukan sebagai dzawil furudl, kemudian berubah status menjadi asabah karena mewarisi harta bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pewaris. Ahli waris yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- a) Saudara perempuan sekandung jika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan pewaris.
- b) Saudara perempuan seayah jika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan pewaris.

#### 4.4.1.1.3. Dzawil Arham

Dzawil arham ialah keluarga pewaris yang tidak termasuk dalam kelompok ahli waris dzawil furudl dan asabah. Menurut Abdullah Siddik<sup>10</sup> dzawil arham itu meliputi semua anggota keluarga laki-laki dan perempuan di garis ibu dan semua anggota keluarga perempuan di garis bapak. Dengan demikian, ahli waris yang termasuk dalam kategori ini adalah:<sup>11</sup>

- a) Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan.
- b) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- c) Kakek dari pihak ibu.
- d) Nenek dari pihak kakek (ibu dari nenek).
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung, seayah atau seibu.
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- g) Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.
- h) Saudara perempuan ayah dan saudara perempuan kakek.
- i) Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu dengan ayah.
- j) Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu dengan kakek.
- k) Saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu.
- l) Anak perempuan paman dari pihak ibu.
- m) Turunan dari dzawil arham-dzawil arham tersebut.

---

<sup>10</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Widjaya, Jakarta, 1984, hal. 121.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, hal. 34.

Hak kewarisan bagi dzawil arham tidak disinggung di dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 11, 12, 176. Namun sebagai keluarga mereka berhak mewarisi harta pewaris selama ahli waris yang disebut dalam surat an Nisa ayat 11, 12, dan 176 tidak ada. Hak kewarisan bagi dzawil arham dapat ditemukan dasarnya di dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 7, surat al Anfal ayat 75, al Ahzab ayat 6, dan diperkuat oleh sejumlah hadits. Dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa, *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu ayah dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu ayah dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"*. Ayat ini selain menerangkan tentang hak anak baik laki-laki maupun perempuan terhadap harta peninggalan orang tuanya, juga menerangkan tentang adanya hak bagian untuk kerabat terhadap harta peninggalan kerabatnya. Karena dzawil arham termasuk kerabat, maka dengan predikat ini mereka berhak mendapat bagian dari harta warisan.

Hak dzawil arham untuk mewarisi saat di mana ahli waris dzawil furudl dan asabah tidak ada, lebih utama dibandingkan hak umat Islam lainnya yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris. Hal tersebut dinyatakan dalam al Qur'an surat al Anfal ayat 75 yang terjemahannya adalah *"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada) yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"*.

Lebih tegas lagi dinyatakan di dalam surat al Ahzab ayat 6 yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

*Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewaris) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang yang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu lebih tertulis dalam kitab (Allah).*

Kedua ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga lebih utama mewarisi harta keluarganya dibandingkan dengan orang-orang Islam lainnya. Keinginan untuk berbuat baik antar sesama Islam dapat dilakukan dengan jalan wasiat, bukan melalui pemberian hak untuk saling mewaris.

Kebiasaan untuk saling mewaris antar sesama Islam, yakni antara orang-orang Muhajirin dan Anshar pada permulaan Islam telah di hapus oleh al Qur'an surat al Ahzab ayat 6 dan an Nisa ayat 7. M. Ali as Shabuni<sup>12</sup> mengatakan, Ayat ini (an Nisa ayat 7) menghapus hukum kewarisan yang berlaku pada permulaan Islam, dimana kewarisan didasarkan pada hubungan perwalian dan hubungan persaudaraan dalam agama atau disebabkan hijrah dan pertolongan kaum Anshar terhadap kaum Muhajirin. Syari'at telah menetapkan kewarisan kerabat dan menyampingkan orang lain sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat kewarisan. Bahkan oleh ayat ini ditetapkan kewarisan bagi semua kerabat tanpa diskriminasi dan secara gamblang merupakan dalil bagi kewarisan dzawil arham.

Di kalangan ahli faraidl baik golongan sahabat maupun para imam madzhab terdapat perbedaan pendapat. Sebagian menolak kewarisan bagi dzawil arham dan sebagian mengakuinya. Yang menolak kewarisan bagi dzawil arham

---

<sup>12</sup> M. Ali as Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syare'at Islam*, Diponegoro, Bandung, 1988, hal. 204.

antara lain Zaid bin Tsabit, Said bin Musayyad, Saad bin Bair, Sufyan as Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'i, al Auza'i, dan Ibnu Hazm. Menurut golongan ini, dzawil arham tidak berhak mendapat warisan. Apabila ahli waris dzawil furudl dan asabah tidak ada maka warisan di wariskan kepada umat Islam melalui Baitulmal. Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh golongan ini adalah :<sup>13</sup>

- a) Pada dasarnya kewarisan didasarkan pada nash syara' yang qath'i baik dari al Qur'an maupun Sunnah Rasul. Dari kedua nash tersebut tidak didapati ketentuan yang menunjukkan adanya hak waris bagi dzawil arham. Dengan demikian kewarisan bagi dzawil arham tidak didasarkan pada nash dan dalil, dan hal itu adalah batil.
- b) Nabi Muhammad pernah ditanya tentang kewarisan saudara perempuan ayah yaitu Ammah dan saudara perempuan ibu yaitu Khalah (dzawil arham). Beliau menjawab, mereka berdua tidak mendapat apa-apa dari warisan. Jika kedua dzawil arham itu tidak mendapat apa-apa dari harta warisan maka dzawil arham selain mereka juga tidak berhak mewaris.
- c) Jika harta warisan diserahkan kepada Baitulmal, manfaat dan faedahnya sangat besar dan menjadi milik bersama seluruh umat Islam. Kalau diberikan kepada dzawil arham manfaat dan faedahnya hanya sedikit, karena hanya dinikmati oleh yang bersangkutan saja, pada hal menurut kaedah fiqih kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan khusus.

Golongan yang mengakui kewarisan bagi dzawil arham antara lain adalah 4 orang khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali), Ibnu

---

<sup>13</sup> Muhamma Ali as Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syare'at Islam*, Diponegoro, Bandung, 1988, hal. 203-206.



Abbas, Ibnu Mas'ud, Muazd bin Jabal, Syuraih al Qadhi, Ibnu Sirin, Atha dan Mujahid, Imam Abu Hanafiah, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad bin Abi Laila, Ishak bin Rahawaih, dan para fuqaha pengikut setia madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Golongan ini berpendapat bahwa dzawil arham berhak mendapat warisan apabila ahli waris dzawil furudl dan asabah tidak ada. Hak waris bagi dzawil arham lebih utama dibandingkan dengan hak umat Islam lainnya. Argumentasi yang dikemukakan oleh golongan ini adalah :<sup>14</sup>

- a) Makna keluarga (ulul arham) dalam al Qur'an surat al Anfal ayat 75 itu pengertiannya bersifat umum, meliputi semua keluarga baik yang tergolong dzawil furudl dan asabah maupun di luar keduanya. Dan setiap keluarga lebih berhak mewarisi warisan keluarganya dari pada orang lain
- b) Rangkaian kalimat yang berbunyi sebagian kerabat itu lebih utama mewarisi harta sebagian kerabatnya yang lain menurut ketetapan Allah, tidak boleh ditafsirkan dengan cara menyingkirkan dzawil arham dari pengertian kerabat secara umum. Mengambil suatu ketetapan dari suatu nash hendaklah bersumber dari pengertian umum yang terkandung dalam lafadz nash itu sendiri, bukan dari motif-motif yang khusus sesuai dengan kaedah ushul fiqh.
- c) Al Qur'an surat an Nisa ayat 7 menegaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan mendapat bagian dari harta peninggalan keluarga dan kerabat mereka. Maksud ayat ini dengan jelas ditujukan kepada kerabat, dan bagi mereka ada bagian dari harta warisan sedikit atau banyak. Dzawil arham secara ittifaq termasuk kerabat, maka dengan predikat ini mereka berhak

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

memperoleh harta. Disamping itu ayat ini menghapus hukum kewarisan pada permulaan Islam, di mana hak kewarisan didasarkan pada hubungan perwalian dan hubungan persaudaraan antar sesama Islam.

- d) Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad SAW perihal harta warisan dari Sahl bin Hunaif yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali saudara laki-laki ibu yang bernama Khal. Nabi menjawab Khal menjadi ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris dzawil furudl dan asabah. Hadits ini merupakan dalil berhaknya dzawil arham menerima warisan.
- e) Dalam hadits yang lain diceritakan bahwa seorang laki-laki bernama Tsabit bin ad Dahdah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan seorangpun ahli waris dzawil furudl dan asabah, kecuali seorang anak laki-laki dari saudaranya yang perempuan yang bernama Abu Lubabah bin Abdur Mundzir. Kepada Qais bin Ashim Nabi Muhammad bersabda, berikan harta warisan kepadanya (kepada Lubabah) : hadits ini merupakan dasar bagi kewarisan dzawil arham.

Dari sudut logika mereka mengemukakan alasan bahwa hubungan dzawil arham dengan pewaris lebih dekat dan lebih utama dibandingkan hubungan Baitulmal dengan pewaris, karena antara dzawil arham dengan pewaris terdapat dua macam hubungan yaitu hubungan keluarga dan hubungan seagama, sedangkan antara Baitulmal dengan pewaris hanya terdapat satu macam hubungan saja yaitu hubungan seagama.

Dari kedua pendapat tersebut yang kuat menurut Muhammad Abdurrahim al Kisyka ialah pendapat yang mengakui hak kewarisan bagi dzawil arham, karena alasan-alasan yang mereka kemukakan berlandaskan pada keumuman al Qur'an, dikuatkan oleh sunnah dan praktek khulafaur rasyidin.<sup>15</sup>

Di Indonesia meskipun pengaruh madzhab Syafi'i sangat besar dan kuat, namun para ahli faraidl baik kalangan ulama maupun sarjana mengakui dzawil arham sebagai ahli waris yang berhak mewaris selama tidak ada ahli waris dzawil furudl dan asabah. Itu dapat dibuktikan dari hampir semua buku-buku tentang faraidl baik yang dikarang langsung oleh ahli faraidl Indonesia maupun berupa saduran atau terjemahan dari bahasa Arab yang diterbitkan di Indonesia, semuanya mengakui dzawil arham sebagai ahli waris. Hal tersebut tidaklah mengherankan, karena selain pendapat tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat juga dipandang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang dalam hal kewarisan cenderung kearah sistem kewarisan bilateral.

Hazairin tidak hanya sekedar mengakui dzawil arham sebagai ahli waris, malah mengangkatnya menjadi mawali (ahli waris pengganti). Dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, maka dzawil arham berhak mewaris bersama ahli waris dzawil furudl dan asabah. Dalam Kompilasi Hukum Islam konsep Hazairin tentang mawali atau ahli waris pengganti diterima walau dengan rumusan yang berbeda. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan pasal 185 KHI tersebut.

---

<sup>15</sup> Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, Al Ma'arif, Bandung, 1981, hal. 355.

#### **4.4.1.2 Hijab**

Hijab ialah dinding, halangan atau rintangan yang menyebabkan seseorang tidak mendapat warisan atau berkurangnya bagian dari seorang ahli waris. Hijab ada dua macam, yaitu Hijab Nuqshan dan Hijab Hirman.

##### **4.4.1.2.1. Hijab Nuqshan**

Hijab Nuqshan ialah hijab yang hanya mengurangi bagian dari seorang ahli waris. Yang termasuk dalam hijab nuqshan ini adalah :

- a) Ibu, bagiannya berkurang dari sepertiga menjadi seperenam karena terhibab oleh anak, atau cucu, atau dua orang saudara atau lebih.
- b) Duda, bagiannya berkurang dari seperdua menjadi seperempat karena terhibab oleh anak atau cucu dari anak laki-laki pewaris.
- c) Janda, bagiannya berkurang dari seperempat menjadi seperdelapan karena terhibab oleh anak atau cucu dari anak laki-laki pewaris.

##### **4.4.1.2.2. Hijab Hirman**

Hijab hirman ialah hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan sama sekali. Hijab hirman selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Hirman bil washfi, yaitu hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan karena ada hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu seperti membunuh, beda agama, dan lain-lain.
- b) Hirman bisy syakhshi, yaitu hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan karena ada ahli waris lain yang lebih berhak dari

padanya disebabkan lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Ahli waris yang terhibab dalam hibab hirman ini adalah :<sup>16</sup>

- (1) Kakek, tidak mendapat warisan karena terhibab oleh ayah.
- (2) Nenek, tidak mendapat warisan karena terhibab oleh ibu.
- (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat warisan karena terhibab oleh anak laki-laki.
- (4) Cucu perempuan dari anak laki-laki, tidak mendapat warisan karena terhibab oleh :
  - (a) anak laki-laki, atau;
  - (b) dua orang anak perempuan
- (5) Saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung, tidak mendapat warisan karena terhibab oleh :
  - (a) Anak laki-laki.
  - (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (c) Ayah.
- (6) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, tidak mendapat warisan karena terhibab oleh:
  - (a) Anak laki-laki.
  - (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (c) Ayah.
  - (d) Saudara laki-laki sekandung.
- (7) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, tidak mendapat warisan karena terhibab oleh:

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, hal. 31.

- (a) anak (laki-laki dan anak perempuan).
  - (b) cucu (laki-laki dan cucu perempuan).
  - (c) Ayah.
  - (d) Kakek.
- (8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, tidak mendapat warisan karena terhibab oleh:
- (a) Anak laki-laki.
  - (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (c) Ayah.
  - (d) Kakek.
  - (e) Saudara laki-laki sekandung.
  - (f) Saudara laki-laki seayah.
- (9) Anak laki-laki seayah tidak mendapat warisan karena terhibab oleh :
- (a) Anak laki-laki.
  - (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (c) Ayah.
  - (d) kakek.
  - (e) Saudara laki-laki sekandung.
  - (f) Saudara laki-laki seayah.
  - (g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- (10) Paman sekandung dengan ayah, tidak mendapat warisan karena terhibab oleh :
- (a) Anak laki-laki.
  - (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.

- (c) Ayah.
- (d) Kakek.
- (e) Saudara laki-laki sekandung.
- (f) Saudara laki-laki seayah.
- (g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- (h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

(11) Paman seayah dengan ayah, tidak mendapat warisan karena terhijab oleh :

- (a) Anak laki-laki.
- (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- (c) Ayah.
- (d) Kakek.
- (e) Saudara laki-laki sekandung.
- (f) Saudara laki-laki seayah.
- (g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- (h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- (i) Paman yang sekandung dengan ayah.

(12) Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah, tidak mendapat warisan karena terhijab oleh :

- (a) Anak laki-laki.
- (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- (c) Ayah.
- (d) Kakek.
- (e) Saudara laki-laki sekandung.

- (f) Saudara laki-laki seayah.
  - (g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
  - (h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
  - (i) Paman yang sekandung dengan ayah.
  - (j) Paman yang seayah dengan ayah.
- (13) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah tidak mendapat warisan karena terhibab oleh :
- (a) Anak laki-laki.
  - (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (c) Ayah.
  - (d) Kakek.
  - (e) Saudara laki-laki sekandung.
  - (f) Saudara laki-laki seayah.
  - (g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
  - (h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
  - (i) Paman sekandung dengan ayah.
  - (j) Paman seayah dengan ayah.
  - (k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.

#### **4.4.2. Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin**

Hal pokok yang dibahas dalam teori Hazairin adalah (1) ahli waris dan penggolongannya, (2) keutamaan antar para ahli waris, (3) kalalah, (4) sisa bagi, dan (5) wasiat. Pada bagian ini yang akan diungkap terbatas pada masalah (1), (2) dan (3). Masalah (4) dan (5) akan diungkap pada bagian lain.



#### 4.4.2.1 Ahli Waris dan Penggolongannya

Menurut teori ini, dalam al Qur'an ada ahli waris karena sepertalian darah dan ada ahli waris di luar sepertalian darah. Mereka adalah :<sup>17</sup>

- 1) Anak dan mawali untuk mendiang anak (an Nisa ayat 11 jo ayat 33)
- 2) Orang tua (an Nisa ayat 11)
- 3) Saudara dan mawali untuk mendiang saudara (an Nisa ayat 12, ayat 176 dan ayat 33)
- 4) Datuk dan nenek dan mawali untuk mendiang datuk dan nenek.
- 5) Janda (an Nisa ayat 12)
- 6) Duda (an Nisa ayat 12)
- 7) Tolan halif atau mawali untuk tolan halif (an Nisa ayat 33).

Nomor satu sampai dengan nomor empat adalah mereka yang sepertalian darah, sedangkan nomor lima sampai dengan tujuh adalah mereka yang di luar sepertalian darah. Tolan halif atau tolan seperjanjian menurut Hazairin adalah "orang yang tidak mempunyai keluarga lagi, yang telah mengikat janji untuk meninggalkan sebagian atau seluruh harta bendanya setelah ia mati kepada seseorang, yang diwajibkannya mengurus kematian dan menyelesaikan utang-utangnya serta memeliharanya selama hari tuanya".<sup>18</sup>

Ahli waris menurut al Qur'an itu oleh Hazairin selanjutnya dibagi atau digolongkan menjadi tiga golongan yaitu<sup>19</sup> dzawul fara'idl, dzawul qarabat, dan mawali.

<sup>17</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1962, hal. 33.

<sup>18</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1983, hal. 27.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 18.

#### 4.4.2.1.1. Dzawul Fara'idl

Dzawul fara'idl ialah ahli waris yang dalam keadaan tertentu memperoleh bagian tertentu. Menurut teori bilateral, mereka adalah :<sup>20</sup>

- a) Anak perempuan
- b) Ibu
- c) Ayah dalam hal ada anak
- d) Duda
- e) Janda
- f) Saudara laki-laki dalam hal kalalah
- g) Saudara perempuan yang bergabung dengan saudara laki-laki dalam hal kalalah.
- h) Saudara perempuan dalam hal kalalah.

Di antara ahli waris dzawul fara'idl tersebut, ada yang tetap atau selalu menjadi dzawul fara'idl seperti ibu, duda atau janda, sedangkan yang lainnya ada kalanya tidak menjadi dzawul fara'idl seperti anak perempuan, ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Hazairin lebih lanjut merinci ahli waris dzawul fara'idl atas :<sup>21</sup>

- a) Anak perempuan, dalam hal pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau mawali untuk mendiang anak laki-laki; bagiannya :
  - (1)  $\frac{1}{2}$  jika hanya seorang dan
  - (2)  $\frac{2}{3}$  jika lebih dari seorang (termasuk anak perempuan yang mati berketurunan)

---

<sup>20</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 72-73.

<sup>21</sup> Hazairin, *op. cit.*, hal. 33-34.

b) Ayah, bagiannya :

(1)  $\frac{1}{6}$  jika pewaris mempunyai keturunan.

c) Ibu, bagiannya :

(1)  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak berketurunan dan tidak mempunyai saudara atau keturunan saudaranya; atau jika pewaris hanya mempunyai seorang saudara yang masih hidup dan saudara yang lainnya mati punah; atau jika pewaris hanya mempunyai seorang saudara yang masih hidup ataupun telah mati tetapi mempunyai keturunan.

(2)  $\frac{1}{6}$  jika pewaris mempunyai keturunan atau jika pewaris tidak berketurunan(mati punah) tetapi meninggalkan saudara-saudara atau keturunan mendiang saudara-saudaranya; atau meninggalkan seorang saudara dan keturunan mendiang saudaranya.

d) Saudara (laki-laki atau perempuan, termasuk mendiang saudara yang berketurunan) bagiannya :

(1)  $\frac{1}{6}$  jika hanya seorang;

(2)  $\frac{1}{3}$  untuk mereka bersama jika lebih dari seorang

e) Saudara perempuan (termasuk mendiang saudara perempuan yang mempunyai keturunan). Jika pewaris tidak berketurunan, tidak ada ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan saudara laki-lakinya, dengan tidak membedakan antara saudara kandung (termasuk seayah) dan saudara tiri, bagiannya :

(1)  $\frac{1}{2}$  jika hanya seorang

(2)  $\frac{2}{3}$  untuk mereka bersama.

- f) Duda, bagiannya;
  - (1)  $\frac{1}{2}$  jika pewaris tidak berketurunan
  - (2)  $\frac{1}{4}$  jika pewaris mempunyai keturunan.
- g) Janda, bagiannya :
  - (1)  $\frac{1}{4}$  jika pewaris tidak berketurunan
  - (2)  $\frac{1}{8}$  jika pewaris mempunyai keturunan

Jika janda tersebut ada lebih dari seorang, maka bagian tersebut adalah untuk mereka bersama.

#### 4.4.2.1.2. Dzawul Qarabat

Dzawul Qarabat ialah ahli waris yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya, oleh karena itu ia berhak memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris yang lain, dan memperoleh semua sisa harta jika bersama dengan ahli waris dzawul fara'id, mereka adalah :<sup>22</sup>

- a) Anak laki-laki
- b) Anak perempuan bersama anak laki-laki, atau bersama keturunan anak laki-laki.
- c) Ayah, jika pewaris tidak berketurunan di luar kalalah.
- d) Saudara laki-laki dalam hal kalalah. (an Nisa ayat 176)
- e) Saudara perempuan bersama saudara laki-laki atau keturunan saudara laki-laki dalam hal kalalah. (an Nisa ayat 176)
- f) Kakek dan nenek (an Nisa ayat 33)

---

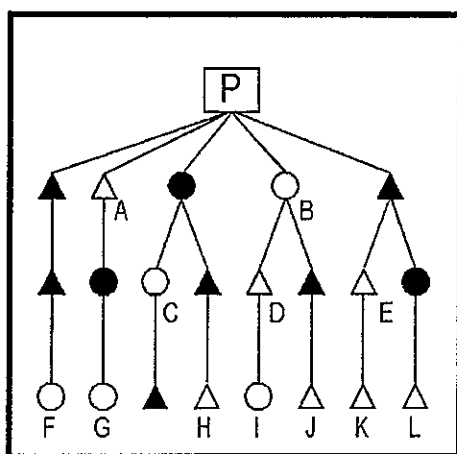
<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 34.

Di antara ahli waris dzawul qarabat tersebut, ada yang tetap atau selalu menjadi dzawul qarabat seperti anak laki-laki, sedangkan yang lainnya ada kalanya menjadi dzawul fara'id seperti anak perempuan jika tidak didampingi anak laki-laki, ayah jika pewaris mempunyai keturunan, saudara laki-laki, dan saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah (pewaris tidak berketurunan).

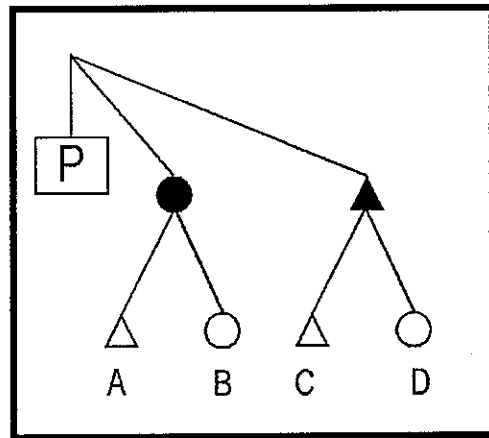
#### 4.4.2.1.3. Mawali

Mawali ialah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris. Mawali dapat diartikan ahli waris yang mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan oleh anaknya. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

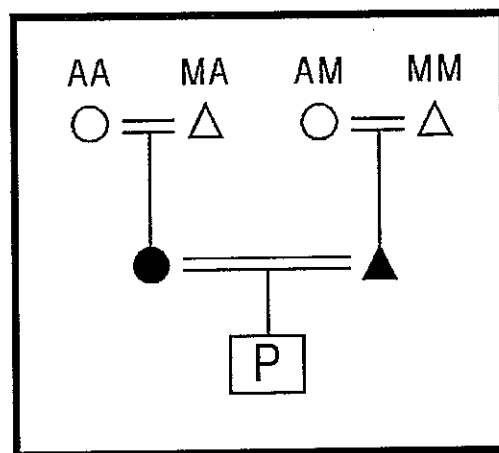
**Gambar I**



Gambar I adalah contoh mawali bagi mendiang anak, yang terdiri dari F (mawali bagi mendiang anak perempuan), C dan H (mawali bagi mendiang anak laki-laki), E dan L (mawali bagi mendiang anak perempuan) yang mewaris bersama anak laki-laki dan anak perempuan pewaris yang masih hidup.

*Gambar II*

Gambar II adalah contoh mawali bagi mendiang saudara pewaris, yang terdiri dari A dan B (mawali bagi mendiang saudara laki-laki), C dan D (mawali bagi mendiang saudara perempuan).

*Gambar III*

Gambar III adalah contoh mawali bagi mendiang orang tua pewaris, yang terdiri dari AA dan MA (mawali bagi mendiang ayah pewaris), AM dan MM (mawali bagi mendiang ibu pewaris).<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Hazairin, *op. cit.*, hal. 37-41.



Dengan mempergunakan gambar I tersebut sebagai contoh, maka bagian mawali dapat diketahui secara jelas, yaitu :

A (anak perempuan)  $1/7$  atau  $9/63$

B (anak laki-laki)  $2/7$  atau  $18/63$

F (mawali tunggal)  $1/7$  atau  $9/63$

C (mawali)  $4/21$  ( $2/3 \times 2/7$ ) atau  $12/63$

H (mawali)  $2/21$  ( $1/3 \times 2/7$ ) atau  $6/63$

E (mawali)  $1/21$  ( $1/3 \times 1/7$ ) atau  $3/63$

L (mawali)  $2/21$  atau  $6/63$

Jumlah :  $9/63 + 18/63 + 9/63 + 12/63 + 6/63 + 3/63 + 6/63 = 63/63$

### ***Gambar II***

A  $2/9$  ( $1/3 \times 2/3$ )

B  $4/9$  ( $2/3 \times 2/3$ )

C  $1/9$  ( $1/3 \times 1/3$ )

D  $2/9$  ( $2/3 \times 1/3$ )

### ***Gambar III***

AA  $4/9$  ( $2/3 \times 2/3$ )

MA  $2/9$  ( $1/3 \times 2/3$ )

AM  $2/9$  ( $2/3 \times 1/3$ )

MM  $1/9$  ( $1/3 \times 1/3$ )

### ***Gambar IV***

AM  $2/9$  ( $1/3 \times 2/3$ ) atau  $8/36$

MA  $2/9$  ( $2/3 \times 1/3$ ) atau  $8/36$



A  $1/36$  ( $1/4 \times 1/3 \times 1/3$ )

B  $1/18$  ( $1/2 \times 1/3 \times 1/3$ ) atau  $2/36$

C  $1/36$  ( $1/4 \times 1/3 \times 1/3$ )

D  $4/9$  ( $2/3 \times 2/3$ ) atau  $16/36$

Jumlah :  $36/36$

Kasus pada gambar IV tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin, tidak hanya keponakan yang dapat atau berhak mewaris bibinya, tetapi bibi dapat atau berhak mewarisi keponakannya, walau ada batasan-batasannya, misal dalam hal keponakan selaku pewaris tidak mempunyai anak atau mawalinya dan juga tidak mempunyai ayah dan mak.

Dalam hukum kewarisan KHI hal tersebut tidak dimungkinkan, dan dalam hukum kewarisan Syafi'i baru mungkin jika tidak ada Baitul Mal yang teratur.

#### **4.4.2.2 Keutamaan Antar Sesama Ahli Waris**

Dalam suatu kasus kewarisan, ada kalanya ahli waris yang ada banyak sekali jumlahnya, dan menurut sistem hukum kewarisan mereka tidak mungkin semuanya sekaligus mewaris bersama-sama. Untuk itulah diperlukan rumusan atau pengaturan mengenai urutan keutamaan untuk mewaris antar para ahli waris tersebut, sehingga dapat diketahui di antara mereka mana yang harus didahulukan dan mana yang mesti menunggu di belakang.

Pengaturan atau penyelesaian mengenai masalah ini oleh Hazairin dilakukan dengan cara merumuskan kelompok keutamaan, yakni suatu garis

hukum yang menentukan perikutan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga si pewaris, dalam arti golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain, dengan akibat bahwa sesuatu golongan belum boleh dimasukkan dalam perhitungan jika masih ada golongan yang lebih utama.

Adapun kelompok keutamaan tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Keutamaan pertama :

- (a) Anak-anak, laki-laki dan perempuan, atau sebagai dzawul fara'id atau sebagai dzawul qarabat, beserta mawali bagi mendiang-mendiang anak laki - laki atau perempuan (IV : 11 a, b, c jo. IV : 33 a) ;
- (b) Orang tua (ayah dan mak) sebagai dzawul fara'id (IV :11d) ;
- (c) Janda atau duda sebagai dzawul fara'id (IV: 12).

(2) Keutamaan Kedua :

- (a) Saudara, laki-laki dan perempuan, atau sebagai dzawul fara'id atau sebagai dzawul qarabat, beserta mawali bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal kalalah (IV ; 12 f dan IV : 176 jo. IV :33 a) ;
- (b) Emak sebagai dzawul fara'id (IV : 11 f dan IV 12 f, g dan IV : 176) ;
- (c) Ayah sebagai dzawul qarabat dalam hal kalalah (IV : 12 f, g) ;
- (d) Janda atau duda sebagai dzawul fara'id (IV: 12).

(3) Keutamaan Ketiga :

- (a) Mak sebagai dzawul fara'id (IV : 11e) ;
- (b) Ayah sebagai dzawul qarabat (IV : 11 e) ;
- (c) Janda atau duda sebagai dzawul fara'id (IV: 12).

(4) Keutamaan Keempat :

- (a) Janda atau duda sebagai dzawul fara'id (IV: 12) ;
- (b) Mawali untuk mak (IV : 11 e) ;
- (c) Mawali bagi ayah (IV :11 e)

Inti dari penentu adanya kelompok keutamaan pertama ialah adanya anak atau mawalnya. Ahli waris lain seperti ayah, ibu, duda, janda boleh ada dan boleh tidak ada. Inti dari penentu keutamaan kedua ialah tidak adanya anak, namun ada saudara atau mawalnya. Ahli waris lain seperti ayah, ibu, janda atau duda boleh ada dan boleh tidak ada. Inti dari penentu keutamaan ketiga ialah tidak ada anak dan saudara atau mawalnya, namun ada ibu atau ayah atau keduanya, sedangkan inti atau penentu adanya kelompok keutamaan keempat ialah adanya janda atau duda.

Menurut sistem ini, penempatan orang-orang dalam kelompok keutamaan ialah untuk menentukan bahwa mereka yang sekelompok berhak berkonkurensi, artinya yang satu tidak boleh menyingkirkan yang lain. Selanjutnya, jika telah ada kepastian siapa-siapa yang termasuk dalam satu kelompok keutamaan, maka mereka berhak menyingkirkan orang-orang dari lain kelompok yang kurang keutamaannya. Dalam hubungan ini, Sajuti Thalib<sup>25</sup> mengatakan bahwa setiap kelompok keutamaan, baik keutamaan pertama, kedua, ketiga maupun keempat dirumuskan dengan penuh, artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan

---

<sup>25</sup> Sajuti Thalib, *op. cit.*, hal. 88.

yang tinggi karena kelompok keutamaan yang lebih rendah itu tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi.

#### 4.4.2.3 Kalalah

Kalalah ialah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang anakpun, atau dengan kata lain, keadaan seseorang yang mati punah artinya mati dengan tidak berketurunan secara bilateral, namun ia diwarisi oleh saudara-saudaranya.

Dasar hukum kewarisan bagi saudara dijumpai dalam al Qur'an Surat an Nisa ayat 12 dan 176. Berbeda dengan kewarisan KHI dan kewarisan patrilineal Syafi'i serta kalangan ahlussunnah umumnya yang membedakan kedua ayat tersebut, yakni ayat 12 untuk saudara seibu sedangkan ayat 176 untuk saudara sekandung dan seayah, Hazairin tidak membedakan antara kedua ayat tersebut melalui penjenisan hubungan persaudaraan (sekandung atau seibu atau seayah) antara pewaris dan ahli waris, sehingga ayat 12 berlaku untuk semua hubungan persaudaraan, demikian pula ayat 176 juga berlaku untuk semua hubungan persaudaraan. Perbedaan pembagian warisan dalam kedua ayat tersebut menurut Hazairin harus dicari sebabnya dari hal yang lain, bukan dari penjenisan hubungan persaudaraan. Sebab dari hal yang lain dimaksud adalah, pada ayat 176 Allah mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan tetapi ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayahnya telah mati terlebih dahulu (ibu boleh ada dan boleh tidak ada), dan pada ayat 12 f, g, h, Allah mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan, tetapi ada meninggalkan saudara beserta ayah.

Dengan demikian maka dalam waktu yang bersamaan semua saudara (sejenis atau tidak) dapat diperhitungkan dalam perolehan warisan sehingga juga tidak ada tutup menutup antar saudara sekandung dengan seayah.

Adapun tafsir lengkap kedua ayat tersebut menurut Hazairin adalah :<sup>26</sup>

**IV : 12.**

- (a) Bagimu seperdua dari harta peninggalan isteri-isterimu, jika bagi isteri-isterimu itu tidak ada anak;
- (b) Bagimu seperempat dari harta peninggalan isteri-isterimu, jika bagi isteri-isterimu itu ada anak;
- (c) Bagi isteri-isterimu sebagai janda peninggalanmu seperempat dari harta peninggalanmu, jika bagimu tidak ada anak;
- (d) Bagi isteri-isterimu sebagai janda peninggalanmu seperdelapan dari harta peninggalanmu, jika bagimu ada anak ;

**IV : 12.**

- (e) Pembagian yang dimaksud dalam IV : 12 huruf a sampai d itu adalah setelah dikeluarkan wasiat atau/dan hutangmu ;

**IV : 12.**

- (f) Jika seseorang, laki-laki maupun perempuan, diwarisi secara kalalah dan baginya ada seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan maka bagi saudara itu masing-masing seperenam dari harta peninggalannya;
- (g) Jika seseorang, laki-laki maupun perempuan, diwarisi secara kalalah dan baginya ada beberapa orang saudara, semuanya laki-laki atau semuanya

---

<sup>26</sup> Hazairin, *op. cit.*, hal. 7-9.

perempuan atau semuanya campuran antara laki-laki dan perempuan, maka semua saudara itu berbagi sama rata atas sepertiga bagian dari harta peninggalannya ;

**IV : 12.**

- (h) Pembagian yang dimaksud dalam IV : 12 huruf f dan g itu adalah setelah dikeluarkan wasiat atau/ dan hutangnya, dengan tidak boleh seorangpun mengumpat karena terasa dirugikan (ghaira mudarrin), atau dengan tidak boleh ada diskriminasi yang merugikan.

**IV : 176.**

- (a) Atas pertanyaan mereka kepadamu (Muhammad) jawablah bahwa penjelasan Allah mengenai orang yang mati “kalalah” ialah : “Jika seseorang, laki-laki atau perempuan, meninggal dunia dengan tidak ada baginya anak (walad)”.

**IV : 176.**

- (b) Dan jika orang yang mati kalalah itu ada baginya seorang saudara perempuan maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta peninggalannya;

**IV : 176.**

- (c) Dan jika yang mati kalalah itu seorang saudara perempuan dan ia hanya mempunyai seorang saudara laki-laki saja, (ataupun lebih dari seorang), maka saudara laki-lakinya itu mewarisinya ;

**IV : 176.**

- (d) Jika bagi yang mati kalalah itu ada dua orang saudara perempuan ( atau lebih dari dua orang) maka bagi mereka ini duapertiga dari harta peninggalannya ;

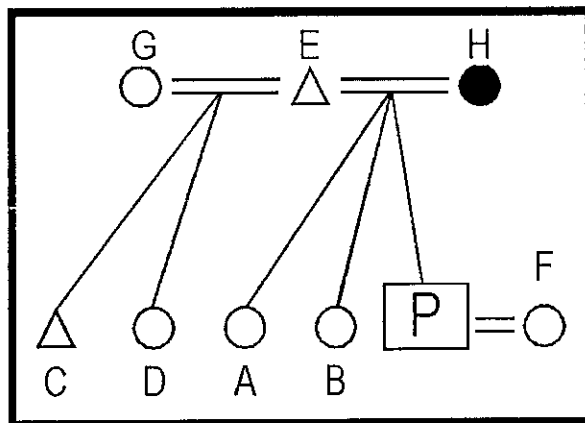
**IV : 176.**

- (e) Jika bagi yang mati kalalah itu ada beberapa saudara (ikhwatun), baik laki-laki maupun perempuan jenisnya, maka pembagian antara mereka ini ialah : seorang laki-laki mendapat dua kali sebanyak bagian seorang perempuan.

Dengan penafsiran ini maka tidak ada perbedaan antara saudara yang satu (sekandung atau seapak) dengan saudara yang lain (seibu). Ketentuan kewarisan pada ayat 12 tidak hanya berlaku atas saudara seibu tetapi juga berlaku untuk saudara sekandung dan seayah, demikian pula ayat 176 tidak hanya berlaku untuk saudara sekandung dan seayah tapi juga untuk saudara seibu. Semua jenis persaudaraan adalah sama yaitu saudara-saudara pewaris, sehingga akan tunduk di bawah satu ketentuan yang sama yaitu QS. IV : 12 saat pewaris mempunyai ayah, dan QS. 176 saat pewaris tidak mempunyai ayah.

Sebagai contoh berikut ini akan dikemukakan sebuah kasus tentang warisan yang ahli warisnya terdiri dari duda, ibu, dua orang saudara laki-laki sekandung, dan dua orang saudara seibu (laki-laki bersama perempuan) seperti terlihat pada gambar V. Semua jenis persaudaraan adalah sama yakni saudara-saudara pewaris, sehingga akan tunduk di bawah satu kesatuan yang sama yakni QS. IV : 12 saat pewaris mempunyai ayah, dan QS. IV : 176 saat pewaris tidak mempunyai ayah.

Gambar V



Dengan penafsiran tersebut di atas maka penyelesaian kasusnya adalah ; F (duda)  $\frac{3}{6}$  atau  $\frac{21}{42}$ , E (ibu)  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{7}{42}$ , A (saudara laki-laki sekandung)  $\frac{4}{42}$  ( $\frac{2}{7} \times \frac{2}{6}$ ), B (saudara laki-laki sekandung)  $\frac{4}{42}$  ( $\frac{2}{7} \times \frac{2}{6}$ ), C (saudara perempuan seibu)  $\frac{2}{42}$  ( $\frac{1}{7} \times \frac{2}{6}$ ), dan D (saudara laki-laki seibu)  $\frac{4}{42}$  ( $\frac{2}{7} \times \frac{2}{6}$ ) =  $\frac{42}{42}$ . H tidak mendapat warisan karena ia telah meninggal terlebih dahulu, sedangkan G tidak mendapat warisan karena ia tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris. Disini terlihat bahwa semua saudara yakni sekandung (A dan B) seibu (C dan D) tunduk dibawah ketentuan yang sama yakni QS IV :176

Jika hubungan persaudaraan antara pewaris dan ahli waris diadakan pemisahan (diantara sekandung, seayah, seibu), di mana saudara sekandung dan seayah ditundukkan pada QS IV: 176, sedangkan saudara seibu ditundukkan pada QS IV : 12 sesuai paham (penafsiran) kewarisan Kompilasi Hukum Islam, patrilineal Syafi'i dan kalangan Ahlussunnah lainnya, maka akan diperoleh suatu kenyataan bahwa 2 saudara laki-laki sekandung akan tersingkir dalam arti tidak mendapatkan bagian warisan karena statusnya sebagai asabah atau dzawil qarabat, sedangkan 2 saudara seibu masing-masing mendapat  $\frac{2}{12}$  atau  $\frac{1}{6}$ .



Sajuti Thalib<sup>27</sup> yang mendukung teori Hazairin dalam menafsirkan QS. IV : 12 dan 176 tersebut di atas, mengemukakan argumentasi bahwa QS. IV : 12 diturunkan lebih awal atau lebih dahulu, yakni pada awal tahun ke 4 Hijriyah, sedangkan QS. IV : 176 diturunkan kemudian yakni pada tahun ke 5 Hijriyah. Kalau ayat 12 diperuntukkan bagi saudara seibu dan ayat 176 diperuntukkan bagi saudara seayah sesuai paham kewarisan KHI, Syafi'iyah dan Ahlussunnah umumnya, maka akan timbul ketidakwajaran yaitu pengaturan atas saudara seibu setahun bahkan ada yang mengatakan dua tahun lebih dahulu dari pengaturan atas perolehan saudara sekandung dan saudara seayah. Padahal keadaan di tanah Arab yang patrilineal justru menghasilkan lebih banyak orang bersaudara sekandung dan seayah, dibandingkan dengan orang yang bersaudara satu ibu (seibu). Kalau memang Allah hendak memisah-misahkan turunnya ketentuan itu tentulah yang umum (kandung) yang lebih dahulu diatur, kemudian diatur yang kurang jumlahnya yaitu saudara seayah dan kemudian baru yang hampir-hampir tidak ada yakni saudara seibu.

#### **4.4.3. Beberapa Masalah Dalam Pembagian Waris dan Penyelesaiannya Menurut KHI, Syafi'i dan Hazairin**

Ketentuan kewarisan yang diatur dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 11, 12 dan 176 pada dasarnya merupakan ketentuan yang bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penerapannya untuk kasus-kasus tertentu tidak jarang menimbulkan permasalahan, misalnya jumlah bagian dari para ahli waris lebih besar atau lebih kecil dari asal masalah, atau ada ahli waris utama yang berkedudukan sebagai

---

<sup>27</sup> Sajuti Thalib, *op. cit.*, hal. 146-147

asabah tidak kebagian harta karena telah terbagi habis di antara ahli waris dzawil furudl. Masalah-masalah tersebut dikenal dengan masalah aul, rad, gharawain dan musyarakah. Selain itu, masih ada masalah-masalah lain, diantaranya masalah kakek dan saudara yang dikenal dengan istilah al Jad, atau al Akdariyah, dan sebagainya.

Al Qur'an dan hadits tidak memberikan petunjuk tentang masalah-masalah tersebut, sehingga penyelesaiannya oleh para sahabat ahli fara'idl seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Usman bin 'Affan, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan lain-lain diselesaikan dengan cara ijtihad. Para sahabat itu ternyata tidak selalu sepaham dalam menyelesaikan masalah-masalah kewarisan tersebut. Dari sini muncul pendapat yang berbeda-beda dan pendapat-pendapat itu diikuti oleh masing-masing fuqaha ahli fara'idl, baik dari kalangan ahlussunnah seperti Imam Hanafi dan para murid serta pengikutnya, Imam Malik dan para murid serta pengikutnya, Imam Syafi'i dan para murid serta para pengikutnya, maupun kalangan syi'ah.

Penyelesaian masalah-masalah tadi selanjutnya akan diungkap/dianalisa dalam tiga teori hukum kewarisan yaitu KHI, Syafi'i dan Hazairin.

Namun karena masalah aul, rad, gharawain, musyarakah serta kakek dan saudara baru ada atau timbul pada saat pembagian warisan dilakukan, maka sebelum masalah-masalah tersebut dibahas, harus dijelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana cara membagi dan menghitung waris dalam hukum kewarisan Islam. Dengan demikian maka pokok-pokok permasalahan yang akan diungkap pada sub ini meliputi (1) cara membagi dan menghitung waris, (2) masalah-

masalah dalam pembagian waris dan penyelesaiannya, (3) porsi bagian ahli waris laki-laki dan perempuan, dan (4) perdamaian dalam pembagian waris.

#### **4.4.3.1 Cara Membagi dan Menghitung Waris**

Menghitung dan menyelesaikan pembagian warisan dilakukan dengan cara, pertama menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing, kedua menentukan atau memurnikan harta warisan, dan ketiga melaksanakan pembagiannya.

##### **4.4.3.1.1. Penentuan Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya**

Untuk dapat menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing, pertama harus dilihat ketentuan tentang hijab dan mahjub guna menentukan apakah ahli waris-ahli waris yang ada itu berhak mendapat warisan (tidak terhibab). Jika tidak terhibab atau dengan kata lain berhak mendapat warisan, maka perlu dilihat pula kedudukan atau statusnya sebagai apa (dzawil furudl atau asabah), jika dzawil furudl maka harus dilihat berapa besar bagian yang telah ditetapkan untuknya.

Setelah bagian masing-masing ahli waris dzawil furudl diketahui, kemudian tentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPT) yang akan dipergunakan sebagai patokan dari jumlah harta. Kelipatan Persekutuan Terkecil dalam hukum kewarisan Islam disebut asal masalah yakni asal masalah 2, asal masalah 3, asal masalah 4, asal masalah 6, asal masalah 8, asal masalah 12 dan asal masalah 24. Asal masalah berapa yang akan dipergunakan tergantung pada

bagian atau kombinasi bagian dari masing-masing ahli waris dzawil furudl yang ada. Misalnya, ahli waris terdiri dari ibu dan duda. Menurut ketentuan, ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  sedangkan duda mendapat  $\frac{1}{2}$ , untuk itu asal masalah yang digunakan adalah 6, karena 6 dapat dibagi dengan angka  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{6}$ .

Bagian dari masing-masing ahli waris dzawil furudl yang telah diketahui itu selanjutnya dikalikan dengan asal masalahnya, sehingga diketahui berapa besar bagiannya atas harta warisan yang sudah dimurnikan. Setelah bagian masing-masing ahli waris dzawil furudl diketahui jumlahnya, dan berikan terlebih dahulu kepada mereka, sisanya baru untuk asabah.

Mengenai asabah, jika ia hanya seorang saja, maka semua sisa harta diberikan kepadanya, jika ada dua orang atau lebih derajatnya sama maka mereka akan berbagi sama rata atas sisa harta tersebut, dan jika derajat mereka tidak sama misalnya antara anak laki-laki dan anak perempuan yang bagiannya dua berbanding satu, maka sisa harta akan dibagi menurut perbandingan tersebut.

Dalam memberikan sisa bagi kepada para asabah, terkadang ditemukan angka pecahan yang tidak pas atau tidak bulat, misalnya sisa harta hanya 2 (dua) sedangkan jumlah bagian untuk asabah 3 (tiga) atau sebaliknya. Untuk itu asal masalahnya harus diluruskan, dan pelurusan tersebut dalam hukum kewarisan Islam disebut “tashhih”, yakni memecah atau menambah kelipatan asal masalah. Sebagai contoh, ahli waris terdiri dari ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Sebagai dzawil furudl ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian. Untuk itu asal masalah yang digunakan adalah 6. Dari asal masalah 6, ibu mendapat 1 (satu) bagian dan sisanya 5 (lima) bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan selaku asabah.

Sesuai ketentuan, anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian, jumlahnya menjadi 3 (tiga) bagian. Angka 3 jelas tidak pas dibagi dengan angka 5, untuk itu harus diluruskan yakni ditambah kelipatannya menjadi 15 sehingga anak laki-laki mendapat 10 bagian dan anak perempuan mendapat 5 bagian, dan ibu mendapat 3 bagian. Dengan demikian, telah terjadi perubahan asal masalah, yaitu dari 6 menjadi 18.

#### **4.4.3.1.2. Penentuan (Memurnikan) Harta Warisan**

Sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya menurut pembagian yang telah ditetapkan, harta warisan atau dalam kompilasi hukum Islam disebut harta peninggalan harus dimurnikan terlebih dahulu, dengan cara mengeluarkan segala hak yang ada sangkut pautnya dengan harta tersebut. Hak-hak tersebut adalah harta bersama suami istri, zakat, biaya perawatan selama pewaris sakit hingga meninggal dunia, belanja kematian, hutang dan wasiat.

##### **a) Harta Bersama**

Harta yang ditinggal mati oleh pewaris mungkin merupakan harta yang ia peroleh selama ia berada dalam ikatan perkawinan dengan isteri atau suaminya, mungkin pula merupakan harta yang ia peroleh secara pribadi melalui warisan atau hibah, atau harta miliknya pribadi yang sudah ada sebelum ia melangsungkan perkawinan dengan isteri atau suaminya yang disebut harta bawaan. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjadi harta

milik bersama suami isteri yang bersangkutan, dan jika perkawinan putus karena kematian maka menurut pasal 96 ayat (1) KHI separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dengan demikian, terhadap harta bersama hanya seperdua yang dapat diwarisi oleh para ahli waris, dan seperduanya lagi harus dikeluarkan karena itu sudah menjadi milik suami atau isteri yang masih hidup. Sedangkan harta yang diperoleh pewaris melalui hibah atau warisan atau harta bawaan, sepenuhnya merupakan milik pribadi pewaris sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 87 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga secara keseluruhan harta tersebut dapat diwarisi oleh para ahli warisnya.

**b) Zakat**

Jika harta warisan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya (haul dan nisab), maka kewajiban zakat haruslah ditunaikan terlebih dahulu sebelum dibagi-bagikan kepada para ahli waris.

**c) Biaya Perawatan dan Belanja Kematian**

Yang dimaksud dengan biaya perawatan ialah segala biaya yang telah atau masih akan dikeluarkan selama pewaris sakit hingga meninggal dunia, sedangkan yang dimaksud dengan belanja kematian ialah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan fardhu kifayah seperti biaya memandikan jenazah, menggali tanah untuk liang lahat dan menguburkannya. Biaya-biaya ini harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta warisan tersebut sebelum dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Penyelenggaraan fardhu kifayah ini harus dilakukan sehemat dan sesederhana mungkin guna menghindari cara-cara yang dapat menzalimi harta anak yatim.

#### d) Pelunasan Hutang

Sebelum harta warisan dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, hutang-hutang pewaris harus dibayarkan terlebih dahulu dengan harta warisan tersebut. Kewajiban membayar hutang hanya terbatas pada jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Jika ternyata, hutang pewaris lebih besar dari pada harta warisan yang ditinggalkan, maka pihak keluarga selaku ahli waris tidak berkewajiban untuk mencukupkan pelunasan hutangnya. Namun jika pihak keluarga secara suka rela ingin melunasinya secara keseluruhan maka itu adalah suatu kebajikan, bukan kewajiban. (Pasal 175 ayat (2) KHI)

Sehubungan dengan hutang tersebut, Moh. Anwar mengemukakan sebagai berikut :<sup>28</sup>

*Para fuqaha membedakan hutang itu menjadi dua, yaitu hutang-hutang kepada Allah seperti nadzar, haji termasuk juga zakat, dan sebagainya, dan hutang-hutang sesama manusia. Hutang macam kedua ini dibedakan antara hutang yang ada sangkut pautnya dengan harta tirkah seperti gadai, barang yang sudah dibeli oleh si mati semasa hidupnya, dan macam kedua ialah hutang yang lepas artinya tidak ada sangkut pautnya dengan tirkah, seperti hutang mahar, hutang tanpa gadai dan sebagainya. Hutang-hutang kepada Allah, menurut madzhab Hanafi, dianggap gugur dengan kematiannya itu, sebab hutang-hutang kepada Allah itu merupakan ibadah yang untuk melaksanakannya diperlukan niat. Oleh karena itu selama si mati tidak berwasiat untuk keperluan tersebut, maka ahli waris tidak wajib membayar tanggungannya kepada Allah sehingga si mati dalam keadaan berdosa. Tetapi kalau si mati berwasiat agar melunasi / membayar tanggungan tersebut, maka ahli waris harus melaksanakan wasiatnya dengan menggunakan maksimal sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi lebih dahulu pengeluaran untuk menyelenggarakan jenazah.*

*Para ulama mazhab lain berpendapat bahwa hutang kepada Allah tidak gugur dengan kematiannya, karena hutang-hutang itu menyangkut harta benda yang untuk melaksanakan kewajiban itu tidak diperlukan niat dari*

---

<sup>28</sup> Moh. Anwar, *Fara'idul Hukum Kewarisan Islam dan Masalah-masalahnya*, Al Ikhlas, Surabaya, 1982, hal. 15.

*orang yang terkena kewajiban. Bagi ulama yang mewajibkan membayar hutang kepada Allah mereka berbeda pendapat tentang manakah yang harus didahulukan dibayarnya hutang kepada Allah ataukah hutang kepada sesama manusia. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hutang kepada Allah harus didahulukan. Sedangkan Imam Malik berpendapat hutang kepada manusia harus diutamakan karena manusialah yang memerlukan menerima pembayaran hutang itu. Para ulama Hanbaliyah membedakan antara hutang yang berkait dan hutang yang terlepas dengan harta tirkah. Hutang yang berkait dengan tirkah harus lebih didahulukan dibandingkan dengan hutang kepada Allah, sedangkan hutang yang terlepas dipandang sederajat dengan hutang-hutang kepada Allah.*

#### e) Wasiat

Wasiat adalah pesan pewaris saat ia masih hidup bahwa ia memberikan sebagian hartanya kepada orang atau badan tertentu, dan pemberian tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Menurut KHI Pasal 195 ayat (1), wasiat dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Sehubungan dengan wasiat ini, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Besarnya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta. Untuk itu, jika pewaris terlanjur memberikan wasiat lebih dari sepertiga, maka wasiat tersebut hanya dapat dilaksanakan jika semua ahli waris menyetujuinya (Pasal 195 ayat 2 KHI).
- b. Wasiat diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan pewaris. Untuk itu, jika pewaris terlanjur memberikan wasiat kepada mereka yang sudah mempunyai hak waris seperti anak,



suami atau isteri, maka wasiat yang demikian ini hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris (Pasal 195 ayat 3 KHI).

Mengenai anak dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari pewaris, Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan (2) menyediakan lembaga khusus baginya, yakni wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh melebihi sepertiga harta. Wasiat wajibah ini adanya bukan karena inisiatif (pesan) pewaris, melainkan hanya ketentuan di dalam KHI semata. Adanya ketentuan tersebut memberikan hak pada anak dan orang tua angkat tadi untuk menuntut pemenuhannya.

Dalam kaitannya dengan harta warisan yang akan dibagi, jika pewaris ada meninggalkan wasiat maka wasiat atau wasiat wajibah tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu, setelah itu baru harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya.

#### **4.4.3.1.3. Melaksanakan Pembagian**

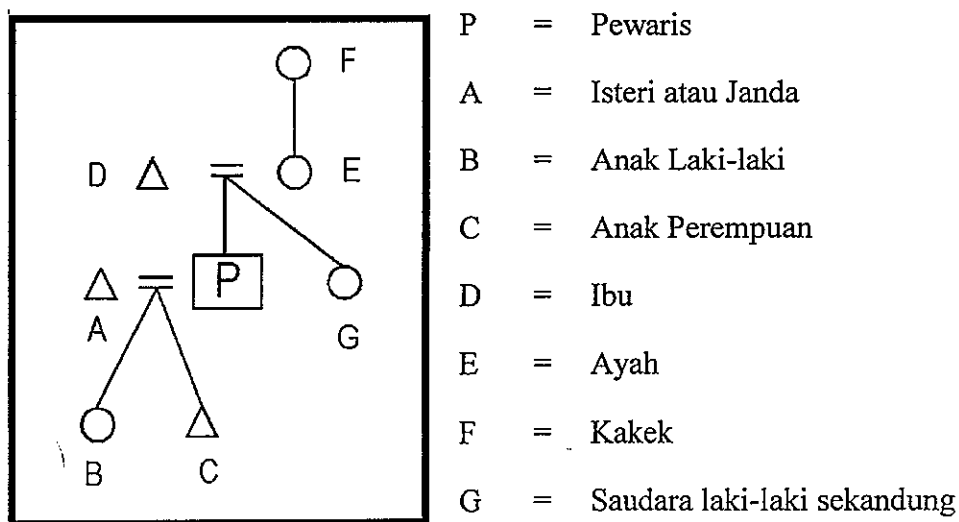
Melaksanakan pembagian berarti memberikan atau menyerahkan kepada para ahli waris apa yang menjadi haknya atas harta warisan berdasarkan pembagian atau perhitungan yang telah ditetapkan. Sebab itu, masalah ini berhubungan langsung dengan soal eksekusi. Mengenai eksekusi, sangat tergantung pada macam apa harta warisan yang ditinggalkan itu. Apakah ia berupa sejumlah uang, atau berupa harta benda yang jenis dan nilainya tidak sama. Jika harta warisan tersebut berupa sejumlah uang, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan eksekusi riil. Yakni uang tersebut langsung dibagi-

bagikan kepada para ahli waris yang berhak menurut porsi bagian masing-masing. Tetapi, jika harta warisan tersebut berupa benda yang tidak satu jenis dengan nilai jual yang berbeda, maka eksekusinya dilakukan dengan cara menjual barang-barang tersebut di muka umum atau yang disebut dengan *executorial verkoop* (penjualan lelang). Hasil dari penjualannya yang berupa uang baru dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya menurut porsi bagian masing-masing sesuai pembagian yang telah ditetapkan.

#### 4.4.3.1.4. Contoh Perhitungan

Berikut ini akan dikemukakan contoh perhitungan warisan. Dengan contoh ini diharapkan agar pembagian waris dalam hukum kewarisan Islam dapat diketahui secara lebih jelas. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

**Gambar I :**



Uraian kasusnya adalah : Tuan Hamid (P) meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa uang Rp 250.000.000,00. Harta tersebut adalah harta bawaan. Kerabat atau ahli waris tuan Hamid yang masih hidup

saat ia meninggal dunia adalah seperti tertera pada gambar I di atas. Selain meninggalkan harta, pewaris (Tuan Hamid) juga meninggalkan hutang sebesar Rp 33.000.000,00, dan belanja kematian Rp 1.000.000,00. Tuan Hamid sebelum meninggal juga ada membuat wasiat. Dalam wasiat tersebut ditegaskan bahwa ia memberikan sepertiga hartanya kepada Madrasah dan Panti Asuhan Tunas Harapan Pontianak.

Penyelesaiannya adalah, pertama memurnikan harta warisan tersebut. Caranya adalah dengan mengeluarkan hutang, belanja kematian dan wasiat sebagai berikut :

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Harta .....  | Rp. 250.000.000,00,        |
| Hutang .....   | Rp. 33.000.000,00,         |
| Belanja kematian .....                                       | Rp. 1.000.000,00,          |
| Sisa besar .....   | Rp. 216.000.000,00,        |
| Wasiat $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 216.000.000,00$ ..... | <u>Rp. 72.000.000,00,</u>  |
| Jumlah harta yang menjadi hak ahli waris adalah ...          | <u>Rp. 144.000.000,00,</u> |

Kedua, menentukan siapa yang berhak mendapat warisan dan berapa besar bagiannya, dan siapa yang tidak berhak mendapat warisan karena terhibab. Dari kasus tersebut, yang berhak mendapat warisan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{A (isteri)} \quad \frac{1}{8} \times 24 \quad (\text{asal masalah}) &= \frac{3}{24} \times 3 \\
 &(\text{tashhih}) = \frac{9}{72} \\
 \text{D (ibu)} \quad \frac{1}{6} \times 24 \quad (\text{asal masalah}) &= \frac{4}{24} \times 3 \\
 &(\text{tashhih}) = \frac{12}{72} \\
 \text{E (ayah)} \quad \frac{1}{6} \times 24 \quad (\text{asal masalah}) &= \frac{4}{24} \times 3 \\
 &(\text{tashhih}) = \frac{12}{72}
 \end{aligned}$$

Jumlah =  $\frac{11}{24}$  atau  $\frac{33}{72}$ , dan sisanya  $\frac{13}{24}$  atau  $\frac{39}{72}$  untuk asabah, yaitu :

$$B \text{ (anak lk)} \quad 2/3 \times 13/24 = 26/72$$

$$C \text{ (anak pr)} \quad 1/3 \times 13/24 = 13/72$$

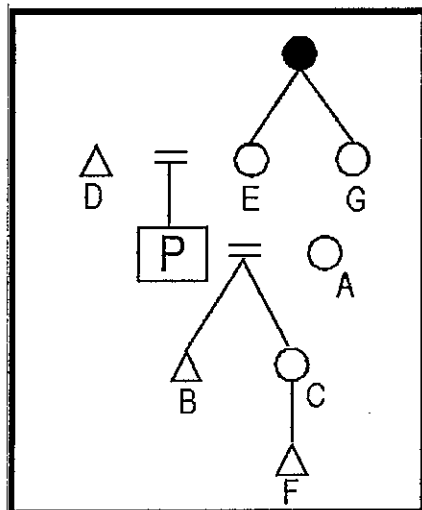
$$\text{Total jumlah} = 9/72 + 12/72 + 12/72 + 26/72 + 13/72 = 72/72$$

F dan G tidak mendapat warisan. F tidak mendapat warisan karena terhibab oleh E, sedangkan G tidak mendapat warisan karena terhibab oleh B, C dan E.

Selanjutnya, bagian masing-masing ahli waris tersebut dikalikan dengan jumlah harta setelah dikurangi hutang, belanja kematian dan wasiat, yaitu :

|        |   |  |   |     |                       |
|--------|---|--|---|-----|-----------------------|
| A      | = | $9/72 \times \text{Rp } 144.000.000,00$  | = | Rp. | 18.000.000,00         |
| D      | = | $12/72 \times \text{Rp } 144.000.000,00$ | = | Rp. | 24.000.000,00         |
| E      | = | $12/72 \times \text{Rp } 144.000.000,00$ | = | Rp. | 24.000.000,00         |
| B      | = | $26/72 \times \text{Rp } 144.000.000,00$ | = | Rp  | 52.000.000,00         |
| C      | = | $13/72 \times \text{Rp } 144.000.000,00$ | = | Rp. | 26.000.000,00         |
| Jumlah |   |  | = | Rp  | <u>144.000.000,00</u> |

**Gambar II :**



**Keterangan :**

- P = Pewaris.
- A = Suami atau Duda.
- B = Anak Perempuan.
- C = Anak Laki-laki.
- D = Ibu.
- E = Ayah.
- F = Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- G = Paman sekandung dengan Ayah.
- = Kakek pewaris yang sudah mati

Uraian kasusnya adalah : Ny. Fatimah (P) meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar Rp. 240.000.000,00. Harta tersebut adalah harta yang ia peroleh selama berada dalam ikatan perkawinan dengan suaminya (A). kerabat atau ahli waris Ny. Fatimah yang masih hidup saat ia meninggal dunia adalah seperti tertera pada Gambar II diatas. Selain meninggalkan harta, pewaris (Ny. Fatimah) juga meninggalkan hutang sebesar Rp.11.000.000,00, belanja kematian sebesar Rp 1.000.000,00 dan wasiat sebanyak sepertiga harta.

Penyelesaiannya adalah, pertama memurnikan harta warisan tersebut. Caranya adalah dengan mengeluarkan bagian dari harta bersama, hutang, belanja kematian dan wasiat terlebih dahulu dengan perhitungan sebagai berikut:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Harta .....  | Rp. 240.000.000,00        |
| Bagian dari harta bersama untuk A $1/2 \times$ harta ..... | Rp. 120.000.000,00        |
| Hutang .....   | Rp. 11.000.000,00         |
| Belanja kematian .....                                     | Rp. 1.000.000,00          |
| Sisa .....   | Rp. 108.000.000,00        |
| Wasiat $1/3 \times$ Rp108.000.000,00 .....                 | <u>Rp. 36.000.000,00</u>  |
| Jumlah   | <u>Rp. 72.000.000,00.</u> |

Kedua, menentukan siapa yang berhak mendapat warisan dan berapa besar bagiannya, dan siapa yang tidak berhak mendapat warisan karena terhijab.

Dari kasus tersebut, yang berhak mendapat warisan adalah :

$$\begin{aligned} \text{A (suami)} \quad 1/4 \times 12 \quad (\text{asal masalah}) &= 3/12 \times 3 \\ (\text{tashhih}) &= 9/36. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D (Ibu)} \quad 1/6 \times 12 \quad (\text{asal masalah}) &= 2/12 \times 3 \\ (\text{tashhih}) &= 6/36. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{E (Ayah)} \quad 1/6 \times 12 \quad (\text{asal masalah}) &= 2/12 \times 3 \\ (\text{tashhih}) &= 6/36. \end{aligned}$$

Jumlah =  $7/12$  atau  $21/36$ , dan sisanya  $5/12$  atau  $15/36$  untuk asabah, yaitu :

$$\text{B (anak pr)} \quad 1/3 \times 5/12 = 5/36$$

$$\text{C (anak lk)} \quad 2/3 \times 5/12 = 10/36$$

$$\text{Total jumlah} = 9/36 + 6/36 + 6/36 + 5/36 + 10/36 = 36/36$$

F tidak mendapat warisan karena terhibab oleh C, sedangkan G tidak mendapat warisan karena terhibab oleh E dan C.

Selanjutnya, bagian masing-masing ahli waris tersebut dikalikan dengan jumlah harta setelah dikurangi bagian dari harta bersama, hutang, belanja kematian dan wasiat, yaitu :

$$\text{A} = 9/36 \times \text{Rp } 72.000.000,00 = \text{Rp } 18.000.000,00$$

$$\text{D} = 6/36 \times \text{Rp } 72.000.000,00 = \text{Rp. } 12.000.000,00$$

$$\text{E} = 6/36 \times \text{Rp } 72.000.000,00 = \text{Rp } 12.000.000,00$$

$$\text{B} = 5/36 \times \text{Rp } 72.000.000,00 = \text{Rp } 10.000.000,00$$

$$\text{C} = 10/36 \times \text{Rp } 72.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 20.000.000,00}$$

$$\text{Jumlah} = \underline{\underline{\text{Rp } 72.000.000,00}}$$

Sehubungan dengan penyelesaian kasus tersebut, ada dua hal yang harus dicermati, yaitu pertama hutang dalam kaitannya dengan harta bersama, dan kedua hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 211 KHI).

Mengenai hutang dalam kaitannya dengan harta bersama akan terasa lebih adil jika hutang terlebih dahulu dikeluarkan sebelum bagian dari harta

bersama untuk suami isteri yang hidup terlama diberikan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa, jika harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka hutang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri selama perkawinan harus menjadi tanggungan bersama pula.

Tentang hibah orang tua kepada anaknya, Pasal 211 KHI menegaskan bahwa hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Redaksi Pasal ini menunjukkan bahwa ketentuan itu bersifat imperatif, artinya tidak mutlak, sehingga boleh diikuti jika semua ahli waris menghendaki dan dapat pula diabaikan jika tidak dikehendaki. Dalam hal para ahli waris sepakat untuk melaksanakan Pasal 211 KHI tersebut maka jumlah harta warisan bersih (mauruts) yang jumlahnya Rp. 144.000.000,- pada kasus pertama, dan Rp. 72.000.000,- pada kasus kedua, harus ditambahkan terlebih dahulu dengan total keseluruhan hibah atau hibah-hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, setelah itu baru dibagikan kepada ahli waris sesuai Porsi bagiannya masing-masing. Bagi anak yang telah mendapat hibah, bagian kewarisan yang menjadi haknya harus dikurangi dengan hibah yang telah ia terima.

#### **4.4.3.1.5. Munasakhah**

Di kalangan masyarakat Islam, lazim terjadi dimana pembagian warisan tidak dilaksanakan seketika melainkan beberapa lama setelah pewaris meninggal dunia atau bahkan ada yang berlarut-larut sampai lama sekali, sehingga selama dalam masa menanti saat diadakannya pembagian ada diantara ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia. Untuk itu, pada saat pembagian dilaksanakan maka bagian ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut kemudian dipindahkan

kepada ahli waris (lain) yang berhak menerimanya. Ahli waris (lain) yang berhak menerima pemindahan pembagian kewarisan tersebut bisa ahli waris yang mewaris bersamanya bisa ahli waris yang lain sama sekali, atau bisa juga gabungan keduanya. Pemindahan bagian sebagian ahli waris tersebut dalam hukum kewarisan Islam dinamakan “Munasakhah”, yakni “memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada ahli waris (lain) yang berhak menerimanya karena adanya kematian sebelum pembagian warisan dilaksanakan”.

Sebagai contoh, Tuan Ali meninggal dunia pada tahun 1999 meninggalkan sejumlah harta. Ahli waris Tuan Ali yang masih hidup saat ia meninggal dunia adalah seorang istri yang bernama Aminah, seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad, dan seorang anak perempuan yang bernama Ramlah. Sebelum harta warisan peninggalan Tuan Ali dibagi, pada tahun 2002 anak perempuannya (Ramlah) meninggal dunia, dan Ramlah sendiri mempunyai seorang suami yang bernama Rauf. Oleh karena Ramlah meninggal dunia sebelum ia menerima bagiannya dari harta warisan ayahnya Tuan Ali, maka bagian atau hak kewarisannya tersebut dipindahkan kepada ahli waris-ahli waris lain yang berhak menerimanya, yaitu Rauf (duda/suami) Ahmad (saudara laki-laki kandung), dan Aminah Ibu.

Untuk mengetahui bagian masing-masing maka kasus tersebut harus dihitung melalui dua tahap perhitungan. Perhitungan pertama untuk kematian Tuan Ali pada tahun 1999, hasilnya adalah Aminah (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$ . Ramlah (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{24}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8}$ ), dan Ahmad (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{24}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8}$ ). Perhitungan kedua untuk kematian Ramlah pada



tahun 2002, hasilnya adalah Aminah (ibu) mendapat  $7/144$  [ $1/6 \times 7/24$ ], Ahmad (saudara laki-laki kandung) mendapat  $14/144$  ( $2/6 \times 7/24$ ), dan Rauf (suami/duda) mendapat  $21/144$  ( $3/6 \times 7/24$ ). Dari dua tahap perhitungan tersebut, dapat diperoleh hasil akhirnya yaitu Aminah mendapat  $25/144$  ( $3/24 + 7/144 = 18/144 + 7/144$ ), Ahmad mendapat  $98/144$  ( $14/24 + 14/144 = 84/144 + 14/144$ ), dan Rauf mendapat  $21/144$  ( $3/6 \times 7/14$ ).

Dari perhitungan tersebut tampak bahwa pada pembagian pertama ahli waris berbagi atas harta warisan peninggalan Tuan Ali yang meninggal dunia pada tahun 1999 dengan mempergunakan asal masalah 8, sedangkan pada perhitungan kedua ahli waris berbagi atas bagian kewarisan yang ditinggal mati oleh Ramlah sebanyak  $7/14$  bagian (dari harta warisan Tuan Ali) dengan mempergunakan asal masalah 6, atau dengan kata lain bagian kewarisan yang menjadi hak ramlah dipindahkan kepada Aminah, Ahmad dan Rauf karena Ramlah telah meninggal sebelum harta warisan Tuan Ali dibagikan. Karena dalam penyelesaian kasus ini terdapat perpaduan antara dua masalah, yaitu asal masalah 8 dan asal masalah 6, maka perpaduan dua asal masalah tersebut dalam hukum kewarisan Islam dinamakan “al Jami’ah”.

Dalam munasakhah juga ada kemungkinan ahli waris yang berhak menerima pemindahan hak kewarisan dari ahli waris yang meninggal dunia sebelum pembagian dilaksanakan semuanya adalah ahli waris lain sama sekali, atau mungkin pula semuanya adalah ahli waris yang mewaris bersama dengannya (ahli waris pewaris yang telah meninggal dunia). Kemungkinan pertama dapat terjadi pada kasus warisan yang ahli warisnya terdiri dari Ali (anak laki-laki),

Titin (anak perempuan) dan Juli (anak perempuan). Sebelum harta waris dibagi, Titin meninggal lebih dahulu, untuk itu bagian Titin ( $\frac{1}{4}$  bagian) dipindahkan kepada Ali dan Juli, sehingga bagian Ali seluruhnya menjadi  $\frac{8}{12}$  ( $\frac{2}{4} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$ ), dan bagian Juli seluruhnya menjadi  $\frac{4}{12}$  ( $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ ). Dan kemungkinan kedua dapat terjadi pada kasus warisan yang ahli warisnya terdiri dari Anton (anak laki-laki) dan Susi (anak perempuan). Sebelum harta warisan dibagi, Susi meninggal lebih dahulu dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Santo (anak laki-laki) dan Nety (anak perempuan). Untuk itu, bagian Susi ( $\frac{1}{3}$  bagian) dipindahkan kepada Santo yang mendapatkan bagian sebesar  $\frac{2}{9}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3}$ ) dan Nety mendapat  $\frac{1}{9}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$ ), sedangkan Anton sendiri memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{6}{9}$  bagian.

Para ahli *fara'id* dalam menyelesaikan masalah *munasakhah* menempuh dua cara, yaitu pertama *mentashhihkan* asal masalah pewaris pertama dan memberikan bagian-bagian setiap ahli waris dari masalah yang sudah *tashhih*, dan kedua *mentashhihkan* asal masalah pewaris yang kedua dan membandingkan bagian-bagian pada masing-masing ahli wais dari *tashhih* yang pertama dengan *tashhih* yang kedua. Dalam membandingkan bagian-bagian pada *tashhih* pertama dengan bagian-bagian pada *tashhih* kedua ditemukan tiga macam hal yang disebut *Mumatsalah*, *muwafaqah*, dan *Mubayanah*.<sup>29</sup>

Fatchur Rahman<sup>30</sup> mengemukakan tiga contoh untuk ketiga jenis *munasakhah* tersebut, yakni *mumatsalah* terjadi pada kasus pewarisan yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan paman. Sebelum harta dibagi suami menyusul

<sup>29</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al Ma'aruf, Bandung, 1981, hal. 163

<sup>30</sup> *Ibid.*

mati dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari tiga orang anak laki-laki. Untuk itu, bagian suami ( $\frac{3}{6}$  bagian) diwarisi oleh ketiga orang anak laki-lakinya tersebut yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{2}{6}$  bagian (tashhih), sedangkan ibu mendapat  $\frac{2}{6}$  dan paman mendapat  $\frac{1}{6}$ . Kasus ini disebut mumat salah karena bagian-bagian dalam tashhih pertama langsung dapat dinisbatkan dengan saham-saham tashhih kedua. Muwafaqah dapat terjadi pada kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan paman. Sebelum harta dibagi suami menyusul mati dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari enam orang anak laki-laki. Untuk itu, bagian suami ( $\frac{3}{6}$  bagian) diwarisi oleh keenam orang anak laki-lakinya tersebut yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{2}{12}$  bagian (tashhih), sedangkan ibu mendapat  $\frac{4}{12}$  dan paman mendapat  $\frac{2}{12}$ . Kasus ini disebut muwafaqah karena bagian-bagian anak laki-laki yang diwarisinya dari ayahnya (suami) yakni tiga bagian tidak dapat dibagi-bagikan kepada mereka tanpa angka pecahan (Tawafuq), sebab wafqinya yakni 2 digunakan untuk mengkalikan asal masalah yang pertama sehingga menjadi 12, dengan demikian asal masalah tersebut keduanya sudah tashhih, dan kasusnya telah dapat diselesaikan. Dan mubayanah dapat terjadi pada kasus kewarisan yang ahli warisnya tersiri dari suami, ibu dan paman. Sebelum harta dibagi suami menyusul mati dengan meninggalkan sepuluh anak laki-laki. Untuk itu, bagian suami  $\frac{3}{6}$  bagian diwarisi oleh atau dipindahkan kepada sepuluh orang anak laki-laki tersebut yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{10}$  atau  $\frac{3}{60}$  bagian, sedangkan ibu mendapat  $\frac{20}{60}$  dan paman mendapat  $\frac{10}{60}$  bagian. Kasus ini disebut mubayanah karena jumlah anak laki-laki (adadurruus) yang sepuluh orang tersebut dijadikan asal masalah dalam tashhih yang kedua, kemudian tashhih yang kedua ini dipergunakan untuk

mengkalikan asal masalah yang sudah tashhih, sehingga bagian-bagian para ahli waris dapat diselesaikan perhitungannya.

#### **4.4.3.2 Masalah-masalah Dalam Pembagian Waris dan Penyelesaiannya.**

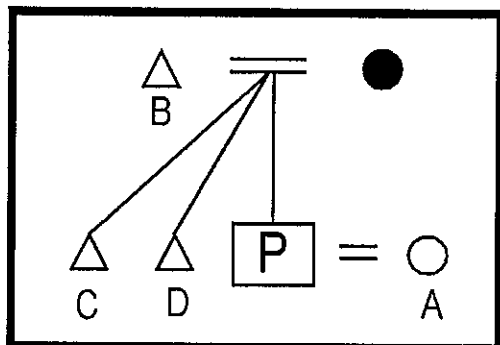
Masalah-masalah yang akan diungkap pada bagian ini terbatas pada masalah aul, rad, gharawain, musyarakah, serta kakek dan saudara.

##### **4.4.3.2.1. Aul**

Aul artinya bertambah. Maksudnya adalah suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari asal masalah yang ditetapkan, agar terjadi kesesuaian maka asal masalahnya harus dirubah atau ditambah sehingga jumlahnya menjadi sama. Pada dasarnya aul merupakan cara yang ditempuh untuk mengurangi bagian dari masing-masing ahli waris secara merata menurut perbandingan besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris. Caranya adalah dengan menambah besar asal masalahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, aul diatur dalam Pasal 192. Pasal tersebut menegaskan bahwa, apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris dzawil furudl menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Asal masalah yang dirubah atau ditambah dalam masalah aul terbatas pada asal masalah 6, 12 dan 24. Asal masalah 6 dirubah menjadi 7, 8, 9 dan 10. Asal masalah 12 dirubah menjadi 13, 15 dan 17. Dan asal masalah 24 dirubah menjadi 27. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

**Gambar I :***Keterangan :*

P = Pewaris

A = Suami atau duda.

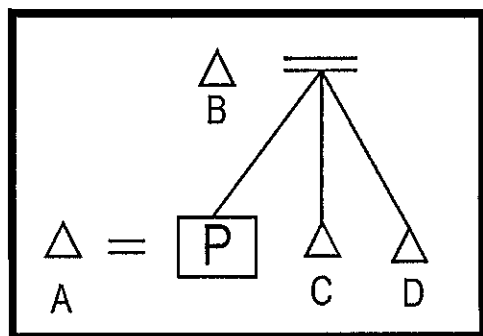
B = Ibu.

C = Saudara perempuan sekandung.

D = Saudara perempuan sekandung.

= Ayah Pewaris yang sudah mati.

Menurut ketentuannya, sebagai dzawil furudl suami mendapat  $\frac{1}{2} \times 6$  (asal masalah) =  $\frac{3}{6}$ , ibu  $\frac{1}{6} \times 6$  (asal masalah) =  $\frac{1}{6}$ , dan saudara perempuan sekandung  $\frac{2}{3} \times 6$  (asal masalah) =  $\frac{4}{6}$ . Jumlah bagian untuk ahli waris dzawil furudl seluruhnya ada 8 bagian, sedangkan asal masalahnya hanya 6 sehingga terdapat kekurangan yaitu 2 bagian. Untuk itu, asal masalahnya dirubah atau ditambah dari 6 menjadi 8. Dengan demikian maka A (suami) mendapat bagian  $\frac{3}{8} + B$  (ibu)  $\frac{1}{8} + C$  (sdr pr)  $\frac{2}{8} + D$  (sdr pr)  $\frac{2}{8} = \frac{8}{8}$ .

**Gambar II :***Keterangan :*

P = Pewaris.

A = Isteri atau Janda.

B = Ibu.

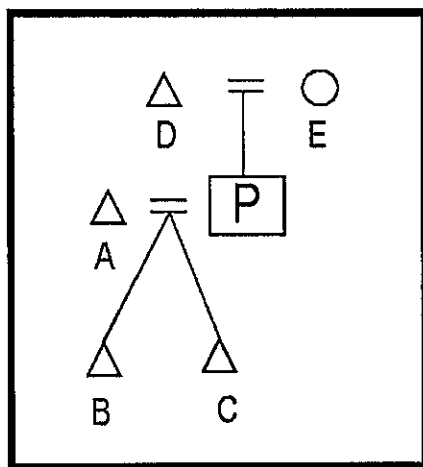
C = Saudara perempuan sekandung.

D = Saudara perempuan sekandung.

Menurut ketentuannya, sebagai dzawil furudl A (isteri) mendapat  $\frac{1}{4} \times 12$  (asal masalah) =  $\frac{3}{12}$ , B (ibu)  $\frac{1}{6} \times 12$  (asal masalah) =  $\frac{2}{12}$ , C dan D (sdr Pr)

$\frac{2}{3} \times 12$  (asal masalah) =  $\frac{8}{12}$ , sehingga terdapat kekurangan yaitu 1 bagian. Untuk itu asal masalahnya dirubah atau ditambah dari 12 menjadi 13. Dengan demikian A (Isteri) mendapat  $\frac{3}{13} + B$  (ibu)  $\frac{2}{13} + C$  dan D (sdr pr)  $\frac{8}{13}$  =  $\frac{13}{13}$

**Gambar III :**



*Keterangan :*

- P = Pewaris
- A = Isteri atau Janda.
- B = Anak Perempuan.
- C = Anak Perempuan.
- D = Ibu.
- E = Ayah.

Menurut ketentuannya, sebagai dzawil furudl A (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 24$  (asal masalah) =  $\frac{3}{24}$ , B dan C (anak perempuan)  $\frac{2}{3} \times 24$  (asal masalah) =  $\frac{16}{24}$ , D (ibu)  $\frac{1}{6} \times 24$  (asal masalah) =  $\frac{4}{24}$ , dan E (ayah)  $\frac{1}{6} \times 24$  (asal masalah) =  $\frac{4}{24}$ . Jumlah bagian untuk semua ahli waris 27, sedangkan asal masalahnya 24 sehingga terdapat kekurangan yaitu 3 bagian. Untuk itu, asal masalahnya ditambah atau dirubah dari 24 menjadi 27. Dengan demikian A (isteri) mendapat bagian sebesar  $\frac{3}{27} + B$  dan C (anak perempuan)  $\frac{16}{27} + D$  (ibu)  $\frac{4}{27} + E$  (Ayah)  $\frac{4}{27} = \frac{27}{27}$ .

Terhadap kasus aul ini, menurut teori Hazairin penyelesaiannya dilakukan dengan cara melihat status ahli waris yang bersangkutan dalam kelompok keutamaannya. Misalnya ayah, jika kasus aul itu melibatkan dirinya

sebagai dzawul qarabat, ada kemungkinan ia akan tersingkir dari haknya untuk mendapatkan warisan jika semua harta sudah terbagi habis diantara para ahli waris dzawul faraidl, misalnya pada kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari 2 orang saudara atau lebih, duda, ibu dan ayah, di sini ayah tidak mendapat bagian karena harta sudah terbagi habis yaitu  $1/3 + 1/2 + 1/6 = 1$ . Hal tersebut dikarenakan Hazairin konsisten menerapkan ketentuan kewarisan sebagaimana diatur dalam al Qur'an surat an Nisa 11, 12 dan 176. Menurut Hazairin, ketentuan aul hanya mungkin diterapkan untuk ayah jika ia berada dalam kelompok keutamaan pertama, karena disitu ayah berkedudukan sebagai dzawul faraidl. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pernyataan Hazairin<sup>24</sup> yang memuji kecerdasan Khalifah Ali dalam menyelesaikan kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari 1 orang anak perempuan, ayah, ibu dan duda dengan cara aul dari masalah 12 menjadi 13, sehingga masing-masing ahli waris mendapat  $6/13 + 2/13 + 2/13 + 3/13 = 13/13$ . Dengan demikian maka untuk kasus ketiga dapat diselesaikan dengan cara aul karena semua ahli waris termasuk ayah berkedudukan sebagai dzawul faraidl.

#### 4.4.3.2.2. Rad

Rad artinya mengembalikan. Maksudnya adalah suatu keadaan di mana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan, sehingga setelah semua ahli waris mengambil bagiannya masing-masing masih terdapat sisa harta. Sisa harta tersebut selanjutnya dikembalikan atau dibagikan kembali kepada ahli waris - ahli waris tersebut menurut cara yang telah ditentukan. Rad hanya dapat terjadi jika diantara ahli waris yang ada, tidak

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

ada asabah sebagai ahli waris yang berhak menghabiskan semua harta. Di kalangan ahli faraidl terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa-siapa saja yang berhak atas rad (sisir kecil harta warisan). Perbedaan pendapat tersebut diungkap oleh Idris Djakfar dan Taufik Yahya sebagai berikut :<sup>32</sup>

*Pertama, mayoritas ulama yang mula-mula dikemukakan Ali bin Abi Thalib dan diikuti Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, madzhab Maliki, Syafiiyah, Syiah Zaidiyah dan Imamiyah yang mengemukakan bahwa rad hanya bisa dilaksanakan terbatas pada ahli waris menurut hubungan darah, sedangkan duda atau janda tidak dapat menerima pengembalian harta karena hanya berdasar hubungan perkawinan.*

*Kedua, pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa rad dapat dilakukan pada semua ahli waris yang ada, baik menurut hubungan darah maupun ahli waris menurut hubungan perkawinan berdasarkan perbandingan bagian mereka masing-masing. Pertimbangannya dari segi logika pembagian warisan janda atau duda dalam masalah aul bagian mereka ikut dikurangi, maka apabila terdapat kelebihan harta sudah sepantasnya diberi hak menerima kelebihan tersebut.*

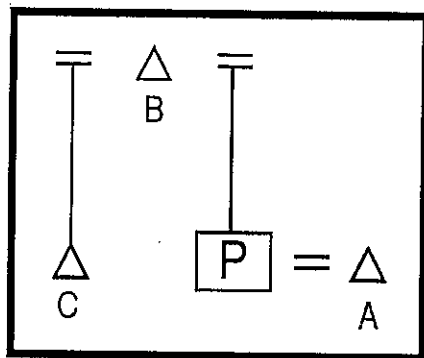
Dalam Kompilasi Hukum Islam, rad diatur dalam Pasal 193. Menurut Pasal 193 KHI, *apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furudl menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.* Mencermati bunyi pasal tersebut maka penulis cenderung mengatakan bahwa, Kompilasi Hukum Islam memilih mengikuti pendapat Usman bin Affan yang tidak membedakan apakah ahli waris tersebut ahli waris menurut hubungan darah atau hubungan perkawinan. Dan pendirian ini lebih dapat diterima baik dari sudut logika maupun dari sudut keadilan. Adapun contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *op. cit.*, hal. 80.



Gambar VI :



Keterangan :

P = Pewaris.

A = Isteri.

B = Ibu.

C = Saudara seibu.

Kasus pada gambar IV ini jika dihitung berdasarkan pendapat mayoritas ulama dan kewarisan patrilineal Syafi'i, hasilnya adalah :

A (isteri) mendapat  $\frac{3}{12}$  atau  $\frac{9}{36}$ .

B (Ibu)  $\frac{18}{36}$  ( $\frac{4}{12} + \frac{6}{36}$ ).

C (sdr seibu)  $\frac{9}{36}$  ( $\frac{2}{12} + \frac{3}{36}$ ).

Jumlah :  $\frac{9}{36} + \frac{18}{36} + \frac{9}{36} = \frac{36}{36}$ .

Dari perhitungan ini tampak bahwa rad hanya diberikan kepada B (ibu) dan C (sdr seibu). Sebaliknya jika dihitung menurut pendapat Usman bin Affan dan KHI, hasilnya adalah :

A (isteri)  $\frac{36}{108}$  ( $\frac{3}{12} + \frac{9}{108}$ ) atau  $\frac{3}{9}$ .

B (ibu)  $\frac{48}{108}$  ( $\frac{4}{12} + \frac{12}{108}$ ) atau  $\frac{4}{9}$ .

C (sdr seibu)  $\frac{24}{108}$  ( $\frac{2}{12} + \frac{6}{108}$ ) atau  $\frac{2}{9}$ .

Jumlah :  $\frac{36}{108} + \frac{48}{108} + \frac{24}{108} = \frac{108}{108}$  atau  $\frac{9}{9}$ .

Dari perhitungan ini tampak bahwa rad diberikan kepada semua ahli waris, termasuk isteri.

Selanjutnya, jika ahli waris dzawil furudl hanya satu orang saja, maka semua sisa harta (rad) diberikan kepadanya. Jika ahli waris ada dua orang atau lebih yang derajatnya sama, maka sisa harta dibagi sama rata. Dan jika ahli warisnya ada dua orang atau lebih yang derajatnya tidak sama, maka sisa harta dibagi menurut besar kecilnya porsi bagian masing-masing seperti terlihat pada contoh di atas.

Dalam hukum kewarisan bilateral Hazairin, soal rad pembicaraannya tidak dapat dilepaskan dengan pembicaraan mengenai kelompok keutamaan antar para ahli waris. Menurut sistem ini,<sup>33</sup> kemungkinan adanya rad terdapat dalam kelompok keutamaan pertama, kedua dan ketiga, jika tidak ada dzawul qarabat.

Dengan mengecualikan janda atau duda (karena mereka adalah ahli waris yang tidak mempunyai hubungan kerabat), maka dalam kelompok keutamaan pertama yang menghadapi rad hanya dzawul fara'id bersama-sama dengan mawali dari anak perempuan yang dzawul fara'id, dalam kelompok keutamaan kedua yang menghadapi rad hanya dzawul fara'id bersama dengan mawali untuk saudara yang dzawil fara'id, dan dalam kelompok keutamaan ketiga rad hanya dihadapi oleh ibu sebagai dzawul fara'id.

Adapun rincian orang-orangnya adalah, pada kelompok keutamaan pertama jika hanya ada seorang anak perempuan atau mawalinya, ayah dan mak, kelompok keutamaan kedua (kalalah IV : 176) jika hanya ada seorang saudara perempuan dan ibu, dan kelompok keutamaan ketiga jika hanya ada ibu saja.

---

<sup>33</sup> Hazairin, *op.cit.*, hal. 46-49

Dengan berpedoman pada QS. IV : 11 maka untuk kelompok keutamaan pertama, rad dibagikan sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Jika ahli warisnya hanya anak perempuan atau mawalnya, maka rad sepenuhnya menjadi milik anak perempuan tersebut atau mawalnya dengan ketentuan untuk mawali laki-laki mendapat dua kali bagian mawali perempuan yang sama kedudukannya dalam jurai.
2. Jika ahli warisnya seorang anak perempuan atau mawalnya bersama ibu atau ayah, maka rad dibagikan kepada mereka berdasarkan angka fara'id bagi anak perempuan dan orang tua sesuai QS. IV : 11 yakni untuk satu orang anak perempuan atau mawalnya mendapat  $\frac{3}{4}$  sedangkan ayah atau mak mendapat  $\frac{1}{4}$  dan jika berbagi dengan mak beserta ayah sekaligus, maka bagian anak atau mawalnya  $\frac{3}{5}$ , ayah  $\frac{1}{5}$  dan mak  $\frac{1}{5}$ .
3. Jika ada dua orang atau lebih anak perempuan atau mawalnya, maka semua anak atau mawalnya mendapat  $\frac{4}{5}$  dan ayah atau mak mendapat  $\frac{1}{5}$ .

Untuk keutamaan kedua mengenai kalalah QS. IV : 176 maka rad tidak menimbulkan masalah lagi karena berdasarkan QS. IV : 11 ibu lebih dekat dibanding saudara maka hanya ibu yang mendapatkan semua sisa harta, saudara atau mawalnya baru akan memperoleh sisa harta jika ibu tidak ada, dan untuk mawali laki-laki dan perempuan yang sama kedudukannya dalam satu jurai akan berbagi menurut porsi dua berbanding satu.

Untuk keutamaan ketiga, karena hanya ibu yang menghadapi rad, maka seluruh sisa harta dengan sendirinya menjadi kepunyaan ibu.

---

<sup>34</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1993, hal. 48.

Untuk keutamaan kedua mengenai kalalah QS. IV : 12 dan keutamaan ketiga, jika ayah masih hidup, karena ia adalah dzawul qarabat maka rad berubah menjadi sisa kecil, dan sisa kecil tersebut keseluruhannya menjadi hak ayah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jika kasus rad pada gambar I di atas dihitung berdasarkan kewarisan Hazairin maka haslilnya adalah :

A (isteri) mendapat  $3/12$

B (ibu)  $7/12$  ( $2/12 + 5/12$ )

C (saudara seibu)  $2/12$

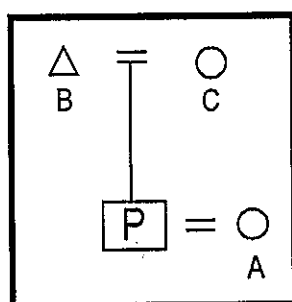
Jumlah :  $3/12 + 7/12 = 12/12$ .

#### 4.4.3.2.3. Al Gharawain

Al Gharawain ialah suatu keadaan di mana ahli waris terdiri dari suami atau duda, ibu dan ayah. Menurut ketentuan umum, ibu mendapat sepertiga ( $1/3$ ) dari harta jika pewaris tidak mempunyai anak atau cucu, atau dua saudara atau lebih. Namun dalam kasus ini, kepada ibu hanya diberikan sepertiga ( $1/3$ ) dari sisa harta setelah dikurangi bagian janda atau duda. Pembagian yang demikian jelas menyimpang dari ketentuan umum yang ada.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh sebagai berikut :

**Gambar V :**



Menurut ketentuan umum :

A (suami) mendapat  $1/2 \times 6 = 3/6$ .

B (ibu)  $1/3 \times 6 = 2/6$

C (ayah) sebagai asabah mendapat sisa yaitu  $1/6$

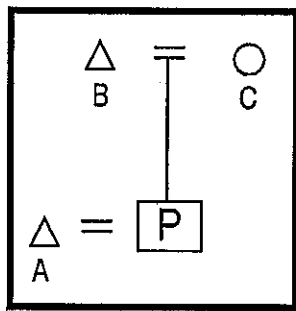
Dalam masalah gharawain pembagiannya adalah :

A (suami) mendapat  $\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$

B (ibu)  $\frac{1}{3} \times 3$  (sisa) = 1 atau  $1/6$

C (ayah) sebagai asabah mendapat sisa yaitu  $2/6$ .

**Gambar VI :**



Menurut ketentuan umum :

A (isteri) mendapat  $\frac{1}{4} \times 12 = 3/12$

B (ibu)  $\frac{1}{3} \times 12 = 4/12$

C (ayah) sebagai asabah mendapat sisa yaitu  $5/12$

Dalam masalah gharawain pembagiannya adalah :

A (isteri) mendapat  $\frac{1}{4} \times 12 = 3/12$

B (ibu)  $\frac{1}{3} \times 9 = 3/12$

C (ayah) sebagai asabah mendapat sisa yaitu  $6/12$

Dari contoh perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa, inti dari masalah gharawain adalah selain untuk mencegah jangan sampai bagian ibu lebih besar dari pada bagian ayah, dan sekaligus untuk tetap mempertahankan agar porsi bagian ibu dan ayah tetap satu berbanding dua.

Masalah gharawain ini pertama kali dikemukakan oleh Umar bin Khattab, kemudian diikuti atau disetujui oleh mayoritas ulama dan keempat Imam madzhab. Sebaliknya Ibnu Abbas tetap memberikan kepada ibu sepertiga ( $1/3$ ) bagian dari harta warisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah gharawain diatur dalam Pasal 178 ayat (2). Menurut pasal tersebut, *"Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah"*. Mencermati bunyi (teks) Pasal 178 ayat (2) ini jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam memilih mengikuti pendapat umar bin Khattab.

Dalam masalah gharawain yakni masalah kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari janda, Ibu dan Ayah atau duda, ibu dan ayah, oleh Hazairin penyelesaiannya langsung mengacu pada QS. IV : 11, yakni memberikan kepada ibu  $\frac{1}{3}$  dari harta, dan sisa kecilnya diberikan kepada ayah, sehingga duda mendapat  $\frac{3}{6}$ , ibu  $\frac{2}{6}$  dan ayah  $\frac{1}{6}$ .

Seperti pada kasus aul pada kelompok keutamaan pertama dan kedua, untuk kasus gharawain inipun Hazairin tetap berpegang pada ketentuan umum kewarisan seperti telah ditetapkan oleh an Nisa ayat 11 dan 12, yakni memberikan kepada ibu  $\frac{1}{3}$  dari harta, walau konsekuensinya bagian yang diterima ibu menjadi lebih besar dari bagian yang diterima oleh ayah. Argumentasi yang ia kemukakan adalah bahwa al Qur'an tidak memberi prioritas diantara sesama dzawul faraidl.<sup>35</sup>

#### 4.4.3.2.4. Al Musyarakah

Al Musyarakah ialah suatu kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari suami atau duda, ibu, dua orang saudara seibu, dan dua orang saudara laki-laki sekandung. Jika kasus ini dibagi berdasarkan ketentuan umum, akan

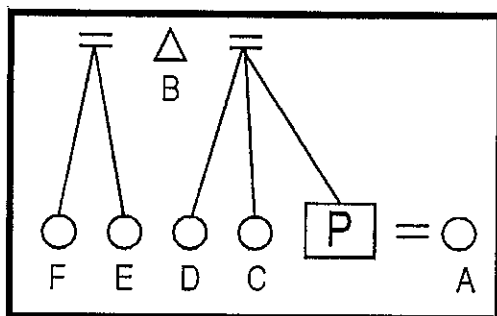
---

<sup>35</sup> *Ibid.*

diperoleh kenyataan dimana dua saudara laki-laki sekandung yang berkedudukan sebagai asabah tidak mendapat bagian apa-apa. Bukan karena terhijab, tetapi karena harta sudah terbagi habis.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada contoh sebagai berikut :

**Gambar VII :**



Menurut ketentuan umum :

A (suami) mendapat  $\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$

B (ibu)  $\frac{1}{6} \times 6 = 1/6$

E dan F (saudara seibu)  $\frac{1}{3} \times 6 = 2/6$ .

C dan D (sdr lk sekandung) tidak mendapat apa-apa.

Dalam masalah al Musyarakah pembagiannya adalah :

A (suami) mendapat  $\frac{1}{2} \times 6 = 3/6$

B (ibu)  $\frac{1}{6} \times 6 = 1/6$

C, D, E dan F (sdr. seibu dan sdr. lk. sekandung) berbagi sama rata atas  $\frac{1}{3} \times 6 = 2/6$ , atau masing-masing mendapat  $\frac{2}{24}$  bagian.

Dari perhitungan tersebut jelas bahwa saudara laki-laki sekandung yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris dibanding saudara seibu tidak mendapat apa-apa. Kenyataan ini dirasa sangat janggal bahkan tidak adil. Untuk mengatasi kejanggalan dan ketidakadilan tersebut, maka dilakukan pembagian yang menyimpang dari ketentuan umum yang ada, yakni menggabungkan semua saudara yang ada dan memberikan kepada mereka bagian yang sama besarnya.

Pembagian yang menyimpang ini merupakan cara yang ditempuh oleh Zaid bin Tsabit, Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, kemudian dianut oleh

Malik bin Anas, Syafi'i, Sofyan Ats Tsauri dan ahli hukum lainnya. Sebaliknya Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab dan Abu Musa al Asy'ari tetap tidak memberikan bagian apa-apa kepada saudara laki-laki sekandung. Pendapat ini dianut oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Daud dan fuqaha lainnya.<sup>36</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ada satu Pasalpun yang menyinggung soal al musyarakah. Ini berarti, KHI sepenuhnya menyerahkan kepada masyarakat Islam Indonesia sendiri untuk memilih mengikuti pendapat mana dari dua pendapat tersebut yang mereka anggap lebih adil.

Dalam hukum kewarisan bilateral Hazairin, soal al Musyarakah ini tidak menimbulkan permasalahan apa-apa, karena seperti diketahui bahwa Hazairin tidak membedakan QS.IV 12 dan 176 menurut jenis hubungan persaudaraan (sekandung, seibu atau seayah). Bedanya hanya terletak pada ada tidaknya ayah. IV : 176 dalam hal tidak ada ayah, sedangkan IV : 12 dalam hal ada ayah. Dengan demikian, dalam perkara al Musyarakah ini oleh Hazairin langsung diterapkan QS. IV : 176, sehingga semua saudara yang ada (sekandung dan seibu versi Syafi'i ) akan mendapat bagian yang sama besarnya yaitu  $\frac{2}{24}$  ( $\frac{1}{4} \times \frac{2}{6}$ ).

#### 4.4.3.2.5. Kakek dan Saudara

Para ahli faraidl baik kalangan sahabat, ulama dan ahli hukum sepakat bahwa kakek terhibab oleh ayah. Jika tidak ada ayah maka kakek tampil menggantikan ayah. Namun para ahli tersebut berbeda pendapat apakah kakek

---

<sup>36</sup> Moh. Anwar, *op. cit.*, hal. 113-114.



menggantikan kedudukan ayah hanya sekedar mendapatkan warisan, atau sekaligus menggantikan kedudukan ayah dalam hal menghibah saudara. Yang dimaksud saudara disini adalah saudara sekandung atau seayah.

Abu Bakar, Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lain berpendapat bahwa "kakek itu sama seperti ayah". Ini berarti kakek menghibah saudara. Untuk itu, jika diantara ahli waris itu ada kakek dan ada saudara maka yang berhak mendapat warisan hanya kakek saja, saudara tidak mendapat warisan. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah. Sebaliknya, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa, kakek jika mewaris bersama saudara, maka keduanya sama-sama mendapat warisan. Pendapat ini dianut oleh Imam syafi'i. Malik dan Ahmad bin Hanbal".<sup>37</sup>

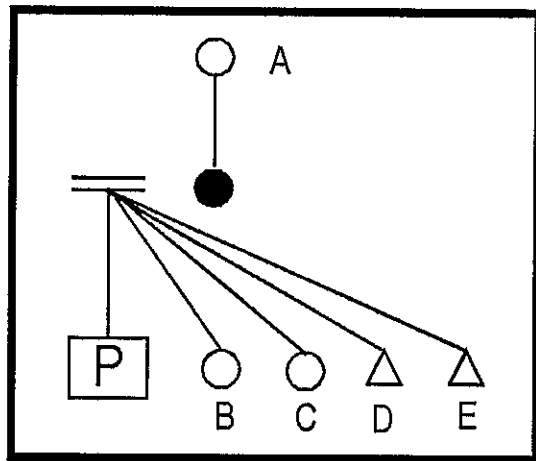
Mengenai cara pembagiannya, para ahli faraidl yang berpendapat bahwa kakek dan saudara sama-sama mendapat warisan, tidak sepakat tentang berapa bagian masing-masing. Untuk itu ditemukan beberapa alternatif dalam perhitungannya. Alternatif tersebut ialah jika ahli waris hanya terdiri dari kakek dan saudara saja, maka kakek dapat memilih salah satu dari dua cara yang menguntungkan baginya, yaitu berbagi sama rata atau mengambil sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari harta.

Sebagai contoh, ahli waris terdiri dari kakek, dua saudara laki-laki sekandung dan dua saudara perempuan sekandung seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

---

<sup>37</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1976, hal. 342.

Gambar VIII :



Dari kasus yang tertera pada gambar VIII ini, jika kakek memilih berbagi sama rata maka bagian masing-masing adalah :

A (kakek) mendapat  $\frac{2}{8}$

B (sdr. lk. skd)  $\frac{2}{8}$

C (sdr. lk. skd)  $\frac{2}{8}$

D (sdr. pr. skd)  $\frac{1}{8}$ .

E (sdr. pr. skd)  $\frac{1}{8}$ .

Namun kakek akan memilih  $\frac{1}{3}$  dari harta, karena lebih banyak dan lebih menguntungkan baginya. Perhitungannya adalah :

A (kakek) mendapat  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{6}{18}$

B (sdr.lk.kd)  $\frac{4}{18}$  ( $\frac{2}{6} \times \frac{2}{3}$ )

C (sdr.lk.kd)  $\frac{4}{18}$  ( $\frac{2}{6} \times \frac{2}{3}$ )

D (sdr.pr.kd)  $\frac{2}{18}$  ( $\frac{1}{6} \times \frac{2}{3}$ )

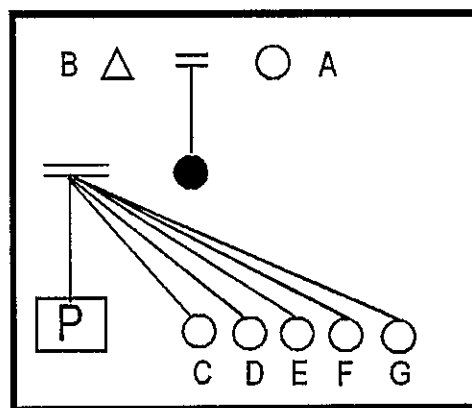
E (srd.pr.kd)  $\frac{2}{18}$  ( $\frac{1}{6} \times \frac{2}{3}$ ).

Jika selain kakek dan saudara ada ahli waris yang lain, maka kakek dapat memilih salah satu dari tiga cara yang menguntungkan baginya, yaitu:

1. Berbagi sama rata (muqasamah).
2. Seperenam ( $1/6$ ) dari harta.
3. Sepertiga ( $1/3$ ) dari sisa harta.

Sebagai contoh, ahli waris terdiri dari nenek, kakek, dan lima orang saudara laki-laki sekandung seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar IX :**



Dari kasus tersebut maka kakek akan memilih  $1/3$  dari sisa sesudah dikurangi bagian nenek, karena  $1/3$  dari sisa tersebut lebih banyak dan lebih menguntungkan baginya dari pada memilih  $1/6$  dari harta atau berbagi sama rata.

Perhitungannya adalah :

B (nenek) mendapat  $1/6 \times 6 = 1/6$  atau  $3/18$

A (kakek)  $1/3 \times 5/6 = 5/18$

C (sdr.lk.kd)  $1/5 \times 10/18 = 2/18$

D (sdr.lk.kd)  $1/5 \times 10/18 = 2/18$

$$E \text{ (sdr.lk.kd)} \quad 1/5 \times 10/18 = 2/18$$

$$F \text{ (sdr.lk.kd)} \quad 1/5 \times 10/18 = 2/18$$

$$G \text{ (sdr.lk.kd)} \quad 1/5 \times 10/18 = 2/18$$

Dalam Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin,<sup>38</sup> kakek (dan juga nenek) ditempatkan sebagai ahli waris langsung dengan mendapat bagian seperti bagian mawali bagi ayah dan mak pewaris. Namun demikian mereka baru berhak mendapat warisan jika pewaris tidak ada anak atau mawalinya, tidak ada ayah, tidak ada mak dan tidak ada saudara, karena didalam urutan keutamaan untuk memperoleh warisan, kakek (dan juga nenek) menempati urutan keutamaan yang terakhir (keempat). Dengan demikian tidak ada alasan untuk memberikan kedudukan yang istimewa kepada kakek jika mewaris bersama dengan saudara.

Untuk itu, jika kasus pada gambar VIII dan IX di atas dihitung menurut sistem ini maka hasilnya adalah, pada gambar VIII B mendapat 2/6, C 2/6, D 1/6, E 1/6, dan kakek nihil. Untuk gambar IX C mendapat 1/5, D 1/5, E 1/5, F 1/5, G 1/5 dan kakek nihil.

Argumentasi yang dikemukakan oleh Hazairin adalah bahwa al Qur'an (an Nisa 12 dan 176) menempatkan saudara sebagai ahli waris langsung seperti halnya anak dan ayah. Oleh karena itu, jika kakek boleh mewaris bersama dengan anak atau bersama dengan saudara, maka itu berarti kakek menjadi mawali bagi ayah, sedangkan dalam kelompok keutamaan kedua dan ketiga bagi ayah tidak ada mawali.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hazairin, *op. cit.*, hal. 148-151

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 139.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah kakek dan saudara masih harus dikaji lebih lanjut, mengingat masih belum jelasnya posisi kakek disana. Ada penulis yang menempatkan kakek sebagai ahli waris pengganti, yang akan menggantikan kedudukan ayah jika ayah tidak ada. Sekiranya pendapat ini diterima, maka masalah kakek dan saudara dianggap sudah ada penyelesaiannya karena KHI dipandang memilih pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas yang menolak hak waris bagi saudara karena ia terhibab oleh kakek. Namun jika dicermati secara seksama redaksi Pasal 185 KHI, maka pendapat tersebut masih harus dipelajari lebih lanjut, karena menurut Pasal 185 KHI penggantinya hanya berlaku untuk keluarga dalam garis keturunan lurus kebawah, yaitu anak dan keturunannya, bukan untuk garis keturunan lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dan seterusnya ke atas.

Karena di dalam KHI masalah kakek dan saudara belum ada aturannya yang jelas, maka penyelesaian masalah ini akan tetap mengacu pada doktrin yang ada.

#### **4.4.3.3 Porsi Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan**

Bagian kewarisan untuk sejumlah ahli waris telah ditentukan dengan tegas oleh al Qur'an, yakni surat an Nisa ayat 11 antara lain untuk anak laki-laki dan anak perempuan, an Nisa ayat 12 antara lain untuk duda atau janda, dan an Nisa ayat 176 untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ayat-ayat tersebut menetapkan, bagian untuk ahli waris laki-laki termasuk duda sebesar dua kali bagian ahli waris perempuan termasuk janda.

Selama ini, yang selalu menjadi topik pembicaraan adalah porsi bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan porsi bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan, demikian pula perbedaan porsi bagian duda dan janda hampir tidak pernah dipersoalkan. Hal tersebut mungkin karena perbedaan porsi bagian anak laki-laki dan anak perempuan dianggap sebagai representasinya. Oleh karena itu, pembahasan dalam tesis ini juga terbatas pada perbedaan porsi bagian kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan saja.

Perbedaan porsi bagian kewarisan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan itu pada dasarnya dimaksudkan agar pendistribusian harta warisan dapat dilakukan secara adil dan berimbang, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Laki-laki mendapat dua kali lebih besar dari bagian perempuan dikarenakan laki-laki harus memikul beban kewajiban baik terhadap dirinya pribadi maupun terhadap keluarganya, sesuai amanat yang tertulis dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 233, surat an Nisa ayat 35, dan surat at Thalaq ayat 7, sehingga harta warisan yang ia terima mungkin akan habis dipergunakan untuk keperluan tersebut. Perempuan mendapat separuh lebih kecil dari bagian laki-laki karena perempuan jika ia telah berkeluarga semua keperluan hidupnya telah ada yang menanggung yakni suaminya, sehingga harta warisan yang ia terima akan utuh untuk selamanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Abdullah Kelib, dalam makalahnya yang berjudul *Hukum Waris Islam dan Masalahnya* mengemukakan pendapatnya yaitu:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abdullah Kelib, *Hukum Waris Islam dan Masalahnya*, Majalah Kampus Sultan Agung Semarang Nomor 4 Tahun II Nopember, 1990, hal. 8.

*Kalau kita melihat ketentuan dalam surat an Nisa 11 beserta penjelasannya maka kita akan mendapatkan suatu penegasan bahwa perbedaan bagian warisan tersebut didasarkan kepada kewajiban laki-laki yang lebih berat dibanding kewajiban seorang perempuan. Misalnya kewajiban memberi nafkah, kewajiban membayar mahar pada waktu menikah. Lebih lanjut jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ayat 34 surat yang sama kita akan mendapatkan pernyataan Allah yang menetapkan kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya bagi perempuan.*

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa:<sup>41</sup>

*Adanya perbedaan penerimaan bagian dari harta warisan itu sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan ketetapan Allah yang menentukan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya kepada kaum wanita. Sebagai pemimpin laki-laki harus bertanggung jawab atas nafkah dan memberikan perlindungan kepada keluarganya dan harus bisa memberikan rasa aman dan tentram. Di lain pihak, kewajiban seorang wanita tidak seberat kaum laki-laki, ia tidak mempunyai kewajiban nafkah terhadap keluarganya, dia masih diberi kekuatan haknya atas mahar dan masih banyak keistimewaan-keistimewaan lainnya yang tidak mungkin dipunyai kaum laki-laki. Oleh karena itu adalah wajar, logis dan dapat dikatakan sesuai dengan rasa keadilan jika seorang laki-laki mendapatkan bagian warisan dua kali bagian wanita. Sebab Hukum Islam mengajarkan bahwa besar kecilnya bagian warisan antara lain ditentukan oleh besar kecilnya tanggung jawab masing-masing ahli waris.*

Muhammad Ali ash Shabuni mengemukakan beberapa pertimbangan mengapa al Qur'an memberikan bagian yang lebih besar kepada ahli waris laki-laki. Pertimbangan tersebut antara lain adalah:<sup>42</sup>

1. *Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.*
2. *Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk*

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>42</sup> Muhammad Ali ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, diterjemahkan oleh A.M. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 19.

*memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.*

3. *Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.*
4. *Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.*
5. *Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.*

Namun keadaan berubah, sebagian kaum perempuan tidak lagi berjuang hanya untuk mengurus anak dan menata rumah tangga, tetapi telah pula berperan serta menopang kehidupan keluarga/rumah tangga dalam arti aktif mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga tersebut, baik itu dilakukannya secara sukarela maupun karena terpaksa oleh tuntutan keadaan. Makin lama peran perempuan makin besar dalam kehidupan keluarganya tersebut, bahkan mampu mengalahkan peran laki-laki (suaminya). Dari sini muncul ide untuk memperjuangkan persamaan porsi bagian kewarisan antara laki-laki dan perempuan yakni 1:1. Di Indonesia, ide tersebut pertama kali digagas oleh Munawir Sjadzali dalam ceramahnya yang berjudul Reaktualisasi Ajaran Islam. M. Yahya Harahap, dalam menyitir pendapat Munawir Sjadzali, mengatakan, “bahwa ketentuan al Qur’an yang membedakan besarnya bagian anak laki-laki dengan anak perempuan tidak lagi sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat,



ketentuan itu bersifat diskriminatif, oleh karena itu masyarakat menilainya tidak adil.<sup>43</sup>

Ide tersebut walau ditentang keras oleh para ulama dan ahli hukum Islam, namun tidak sedikit pula yang mendukungnya. Bahkan dukungan tersebut terus mengalir melalui tulisan-tulisan hingga saat ini.

Namun demikian, Hukum Kewarisan Syafi'i, Hukum Kewarisan Hazairin, Hukum Kewarisan KHI yang lahir kemudian tetap mempertahankan asas keadilan berimbang (2:1) tersebut dalam perolehan warisan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dibaca ketentuannya dalam Pasal 176, Pasal 179 jo 180, dan Pasal 182 KHI.

Pada saat penyusunannya memang ada keinginan untuk melakukan terobosan terhadap Qur'an surat an Nisa ayat 11 tersebut, namun para ulama menolak keras hal tersebut.<sup>44</sup>

Pendirian untuk tetap mempertahankan porsi bagian kewarisan dua berbanding satu sesuai ketentuan al Qur'an surat an Nisa ayat 11 menurut hemat penulis sangat tepat dan relevan paling tidak untuk saat sekarang, karena ketentuan tersebut illat hukumnya masih ada, yakni tertulis dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang dimaksud dengan illat hukum adalah "keadaan yang mempengaruhi ada atau tidak adanya suatu hukum".<sup>45</sup> Keadaan yang mempengaruhi ada tidaknya

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi*, dikutip dari buku Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988, hal. 124.

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 139.

<sup>45</sup> Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hal. 41.

hukum tersebut adalah laki-laki sebagai kepala keluarga menanggung beban pembiayaan, nafkah dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, karena itu ia diberi bagian kewarisan yang lebih besar dari bagian perempuan.

Dalam buku pintar Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama, PTA Sulawesi Selatan tahun 1998 dikatakan bahwa, “an Nisa 11 tidak hanya dapat dilihat dari sudut sumbernya atau dari sudut pemahamannya yang pasti (quth’i), tetapi jika dikaji lebih jauh dalalahnya dapat menjadi tidak pasti (dhani). Sebab dari sudut penafsiran etimologi, lafaz “lidzdzakarin” dapat dipahami bahwa ayat tersebut berbicara tentang seorang laki-laki ditinjau dari segi tanggung jawabnya, bukan dari segi jenis kelaminnya.<sup>46</sup>

Dalam hukum Islam, perubahan terhadap suatu ketentuan hukum biasanya didahului dengan adanya perubahan atas illat hukum itu sendiri, sejalan dengan kaedah Figh yang mengatakan bahwa hukum berputar di sekitar illatnya. Ada illat ada hukum, tidak ada illat tidak ada hukum<sup>47</sup>.

Dalam konstruksi metodologi hukum Islam illat hukum salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perubahan hukum dalam konteks perubahan masyarakat. Karimatul Ummah, yang menyitir pendapat Ahmad Azhar Basyir, mengatakan,<sup>48</sup> tidak mungkin ada aturan hukum yang tidak dibarengi dengan illatnya.

---

<sup>46</sup> Buku Pintar Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama, PTA Sulawesi Selatan, *op. cit.*, hal. 92.

<sup>47</sup> Asjmuni A. Rachman, dikutip oleh Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hal. 130.

<sup>48</sup> Karimatul Ummah, *Pengembangan Konstruksi Metodologi Islam bagi Perubahan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum (Ius Quia Iustum), Nomor 25 Vol. 11 UII Yogyakarta, 2004, hal. 117.

Oleh karena illat hukum tersebut masih ada atau belum berubah, dimana kaum laki-laki sebagai suami atau kepala keluarga<sup>49</sup> oleh Undang-Undang Perkawinan dibebani kewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya,<sup>50</sup> dan jika terjadi perceraian Undang-Undang Perkawinan membebaskan pula kepada kaum laki-laki untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Selain itu, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri<sup>51</sup> maka ketentuan tentang porsi bagian kewarisan 2:1 masih relevan untuk dipertahankan.

Memang ada sejumlah kaum perempuan yang secara riil berperan aktif mencari nafkah guna menopang kehidupan keluarganya. Dan hal tersebut ia lakukan karena tuntutan ekonomi memang mengharuskannya. Akan tetapi, itu bukanlah merupakan representasi dari kehidupan keluarga seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Yang merupakan representasi dari kehidupan seluruh keluarga masyarakat Islam di Indonesia adalah apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas.

Meskipun demikian, tuntutan untuk mendapatkan bagian sama (1:1) dalam perolehan hak waris terus disuarakan walau tuntutan itu bersifat mendua, yakni menuntut bagian yang sama atas harta warisan, namun tidak menuntut penghapusan atau perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang

---

<sup>49</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>50</sup> Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>51</sup> Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang membebankan segala macam kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga kepada kaum laki-laki.

Adanya kontinuitas dari tuntutan persamaan porsi bagian kewarisan tersebut adalah merupakan suatu realita. Di sisi yang lain, kalangan ulama dan ahli hukum Islam juga tetap mempertahankan pendiriannya. Oleh karena itu, Ichtiyanto SA menyatakan bahwa “di masa yang akan datang bagian kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan tetap ada dua pendapat yang berbeda.”<sup>52</sup>

Kedua pendapat tersebut tetap dipertahankan oleh masing-masing pendukungnya dengan berbagai argumentasi. Argumentasi yang mereka ajukan tidak hanya terbatas pada segi peranan dan aktivitas (tanggung jawab) terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 34, surat al Baqarah ayat 233 dan surat at Thalaq ayat 7, tetapi juga dari segi pengkajian terhadap dasar hukumnya yaitu al Qur'an surat an Nisa ayat 11.

Kalangan yang tetap mempertahankan porsi bagian kewarisan 2:1 pada dasarnya berpegang pada pendirian bahwa ayat-ayat al Qur'an yang qath'i tidak dapat dinasakh kecuali oleh Allah sendiri. An Nisa ayat 11 tergolong sebagai ayat yang qath'i karena itu tidak dapat dirubah walau dengan alasan sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman.<sup>53</sup>

Sedangkan pihak yang menuntut perubahan berpendapat bahwa an Nisa ayat 11 tidak sepenuhnya bersifat qath'i. Menurut M. Yahya Harahap, “rumusan surat an Nisa ayat 11 masih bisa dibedah dengan jalan memisahkan kaedah

<sup>52</sup> Mimbar Hukum No. 27 Tahun VII/1996, hal. 49.

<sup>53</sup> Kamaludin Marzuki, *Jangan Sampai Energi Terbuang Percuma*, dikutip dari buku Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, 1988, hal. 119.

normatif dengan urusan hudud. Kaedah normatif menetapkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk mendapatkan warisan. Kaedah ini bersifat universal dan bahkan abadi, karena itu tidak boleh ada ketentuan yang meniadakan hak anak perempuan untuk mendapatkan warisan. Akan tetapi mengenai besarnya bagian anak laki-laki dan anak perempuan yang ditetapkan dalam ayat tersebut bukan yang bernilai normatif, tetapi bernilai hudud atau had. Ketentuan 2:1 merupakan batas minimal bagian seorang wanita yang tidak boleh dilanggar. Sebaliknya, ayat tersebut tidak menentukan batas maksimal, atas dasar itu dapat dibuat ketentuan yang menetapkan bagian anak perempuan sebanding dengan bagian anak laki-laki.<sup>54</sup> Oleh karena itu, Kassim Ahmad berpendapat ayat Mufassar (terinci) tidak qath'i, dan yang qath'i adalah yang Mujmal.<sup>55</sup>

Dalam Buku Pintar Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama, PTA Sulawesi Selatan diterima dua pemikiran. Kedua pemikiran (pendirian) tersebut dengan argumentasi bahwa, "ketentuan 2:1 (lidz dzakari) dalam an Nisa ayat 11 itu adalah qath'i baik dalalahnya (pemahamannya pasti dan penerapannya mutlak) maupun wurudnya (sumbernya pasti). Dilihat dari sisi ini maka tidak ada pilihan lain kecuali menaatinya. Namun jika ayat tersebut dikaji lebih jauh, dalalahnya dapat menjadi dzanni (tidak pasti) karena ayat tersebut menyebutkan "lidz dzakari", bukan "lir rajuli", maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 161.

<sup>55</sup> Amir Mu'allim dan Usdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal. 93.

cenderung berbicara tentang seorang laki-laki ditinjau dari sisi tanggung jawabnya, bukan dari sisi jenis kelaminnya.<sup>56</sup>

Perbedaan pendapat tentang an Nisa ayat 11 dan ayat-ayat mufassar (terinci) lainnya yang sejenis bukanlah merupakan hal yang baru, tetapi sejak dulu sudah diperdebatkan, atau paling tidak sudah diketahui ada dua pendapat yang berbeda, yakni antara mayoritas ahli Ushul Figh di satu sisi dengan Kassim Ahmad di sisi yang lain. Mayoritas ahli Ushul Figh berpegang pada pendirian bahwa, "Ayat-ayat mufassar dan muhkam harus dipegang sebagai dasar konstitutif hukum Syar'i. Sebaliknya, Kassim Ahmad berpendapat justru ayat-ayat mufassar yang terinci itu dipahami hanya sebagai contoh penerapan sejaman yang boleh saja berubah. Ia mengatakan bahwa terhadap an Nisa ayat 11 yang menerangkan wanita dan pria mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat mereka merupakan prinsip umum, sedangkan ayat yang menerangkan bagian wanita separuh bagian pria dipahami sebagai contoh penerapan pada waktu itu. Selain didasarkan pada penafsiran etimologi dengan alur pemahaman mafhum mukhalafah (*argumentum in contrario*) tersebut, pembenaran terhadap tuntutan persamaan porsi dimaksud oleh Buku Pintar juga didasarkan pada "rasa keadilan yang timbul dan berkembang dari hati nurani setiap orang".<sup>57</sup>

Adanya dua pemikiran dalam Buku Pintar tersebut merupakan indikasi bahwa ramalan Ichtiyanto mengenai hal itu memang cukup beralasan. Akan tetapi, tetap mempertahankan dalam arti mengakomodir kedua pendapat tersebut dalam

---

<sup>56</sup> Buku Pintar, *op.cit.*

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 93.

satu perumusan Undang-Undang tentang KHI bukanlah merupakan suatu solusi, dan walaupun dapat dianggap sebagai solusi, maka solusi tersebut tentu bukan merupakan solusi yang baik. Penyusunan rancangan KHI yang akan datang harus mampu merumuskan ketentuan tentang porsi bagian kewarisan laki-laki dan perempuan secara jelas dan tegas, walau dalam bentuk hasil kompromi, misalnya (1) dua berbanding satu merupakan garis hukum, dan satu berbanding satu hanya merupakan pengecualian, atau (2) satu berbanding satu merupakan garis hukum, dan dua berbanding satu merupakan pengecualian.

Untuk ketentuan pengecualian tersebut, hanya dapat diterapkan jika ada permintaan dari ahli waris yang bersangkutan dengan cara mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara pembagian warisan tersebut. Hanya saja gugatan atau permohonan itu mungkin bisa dikabulkan jika terdapat cukup alasan atau memenuhi rasa keadilan, dan ditolak jika tidak terdapat cukup alasan atau tidak memenuhi rasa keadilan.

Oleh karenanya adalah sangat relevan Buku Pintar Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama PTA Sulawesi Selatan Tahun 1998 memberikan peluang untuk hal tersebut sebagai respon terhadap tuntutan perolehan hak yang sama dalam pembagian warisan dimana KHI tetap mempertahankan porsi 2:1. Dalam Buku Pintar tersebut dikatakan bahwa pada saat keadilan yang ideal tidak diberlakukan karena adanya kondisi yang tidak ideal, penafsiran yang paling

mendekati keadilan ideal tersebut ialah keadilan distributif yakni pembagian yang dhahirnya seimbang.<sup>58</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa:<sup>59</sup>

*Kalau putusan Hakim menentukan lain yakni dalam pembagian waris karena sesuatu pertimbangan tidak diberlakukan ketentuan dua berbanding satu untuk anak laki-laki dan anak perempuan, maka berapa berbanding berapa, apakah satu berbanding satu atau sebaliknya, perempuan memperoleh dua bagian sedangkan laki-laki memperoleh satu bagian.*

Adapun alternatif kedua yang ditawarkan di atas hanya dapat diterima jika ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan ilat hukum atas an Nisa ayat 11 telah dihapuskan atau berubah.

#### 4.4.3.4 Perdamaian Dalam Pembagian Waris

Hukum kewarisan Islam baik yang diatur dalam al Qur'an maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya bersifat mengatur (regelen), tidak bersifat mutlak (dwingend), artinya para pihak diperbolehkan untuk membagi warisan dengan cara menyimpang dari apa yang telah ditentukan baik oleh al Qur'an surat an Nisa ayat 11, 12 dan 176, atau Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 KHI, sepanjang penyimpangan tersebut merupakan kehendak bersama masing-masing ahli waris, setelah mereka mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing. Misalnya, Ali mengetahui dan menyadari bahwa al Qur'an dan KHI telah menetapkan bagiannya sebesar dua kali bagian adiknya yang perempuan atas

---

<sup>58</sup> Buku Pintar Hakim, Panitera & Juru Sita PA, PTA Sulawesi Selatan, *op. cit.*, hal. 93.

<sup>59</sup> *Ibid.*



harta warisan peninggalan ayah atau ibunya. Namun karena ia ingin menolong atau meringankan beban hidup adik perempuannya, maka ia rela untuk berbagi rata dengan adik perempuannya itu. Inilah yang dimaksud dengan kesepakatan untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KHI.

Kesepakatan untuk melakukan perdamaian tersebut, tidak dapat dipahami dalam konteks hak opsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum angka 2 alinea keenam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena hak opsi adalah hak untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan, sedangkan perdamaian adalah kesepakatan untuk membagi waris dengan cara menyimpang dari ketentuan yang telah ada.

#### **4.4.4. Komparasi Antara Hukum Kewarisan KHI, Syafi'i dan Hazairin.**

##### **4.4.4.1 Rincian Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Kewarisan KHI, Syafi'i dan Hazairin.**

Persamaan dan perbedaan antara Hukum Kewarisan KHI, Syafi'i dan Hazairin dapat diungkap dalam beberapa hal, yaitu pertama tentang penentuan ahli waris, penggolongan dan besarnya hak waris laki-laki dan perempuan, kedua kedudukan dan hak waris bagi ayah dalam hal pewaris tidak mempunyai anak atau saudara, ketiga penafsiran terhadap ayat-ayat tentang kalalah, keempat tentang hijab dan mahjub, kelima tentang aul, rad, gharawain, musyarakah, kakek dan saudara, keenam tentang nenek, paman dan bibi, dan ketujuh tentang wasiat dan hibah.

Pertama dalam hal penentuan ahli waris, penggolongan dan besarnya hak waris laki-laki dan perempuan. Tentang penentuan ahli waris, teori Syafi'i bercorak patrilineal, sehingga mengandung sifat diskriminatif dan terbatas baik dalam menentukan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris maupun dalam hal penggantian ahli warisnya. Hazairin bercorak bilateral, sehingga tidak ada diskriminasi dan juga tidak terbatas baik dalam menentukan ahli waris maupun dalam hal penggantinya. Sedangkan KHI, walau bercorak bilateral namun masih mengandung sifat diskriminasi dalam menentukan ahli waris. Hanya saja, dalam hal penggantian berbeda dengan teori Syafi'i, karena tidak mengandung sifat diskriminatif dan terbatas. Tentang penggolongan ahli waris, ketiga teori tersebut sama-sama menggolongkan ahli waris atas tiga golongan, yakni Syafi'i (1) dzawil furudl, (2) asabah, dan (3) dzawil arham, Hazairin (1) dzawul fara'idh, (2) dzawul qarabat, dan (3) mawali, KHI (1) dzawil furudl, (2) asabah, dan (3) ahli waris pengganti. Perbedaan antara teori Syafi'i dan Hazairin di sini terletak pada (a) perbedaan antara asabah dengan dzawul qarabat, sebab asabah menurut Syafi'i terbatas pada sejumlah kerabat tertentu di luar dzawil furudl dan dzawil arham, sedangkan dzawul qarabat menurut Hazairin meliputi semua kerabat selain dzawul faraidl kecuali mereka yang tertutup oleh orang tuanya yang disebut dengan istilah atau digolongkan sebagai ulul qurba, (b) perbedaan antara dzawil arham dengan mawali. Perbedaan antara teori Hazairin dan KHI terletak pada perbedaan antara dzawul qarabat dengan asabah, sedangkan antara mawali dengan ahli waris pengganti pada dasarnya sama, walau tidak sama persis. Perbedaan antara Syafi'i dan KHI terletak pada perbedaan antara dzawil arham dan ahli

waris pengganti. Selain itu, khusus tentang asabah teori Syafi'i mengenal asabah ma'al ghairi, dalam teori Hazairin dan KHI asabah jenis ini tidak mungkin ada karena mereka terhibab oleh anak perempuan dan cucu perempuan. Tentang besarnya hak waris laki-laki dan perempuan, ketiga teori ini sama-sama mempertahankan porsi bagian kewarisan dua berbanding satu antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Kedua kedudukan dan hak waris bagi ayah dalam hal pewaris tidak mempunyai anak atau saudara, KHI (Pasal 177) memberikan bagian kepada ayah  $\frac{1}{3}$  harta. Dalam teori Syafi'i dan Hazairin kedudukan dan hak waris ayah tidak pasti. Menurut Syafi'i, di sini umumnya ayah ditempatkan sebagai asabah, namun ada kalanya (untuk kasus-kasus tertentu) ayah ditempatkan sebagai dzawil furudl, atau bahkan dzawil furudl sekaligus asabah, dengan demikian berarti kedudukan ayah bersifat tidak tetap. Sedangkan Hazairin menempatkan ayah sebagai dzawil qarabat baik saat berada pada keutamaan kedua maupun ketiga.

Ketiga dalam hal penafsiran terhadap ayat-ayat kalalah dalam surat an Nisa ayat 12 dan 176. Syafi'i dan KHI mengartikan kata kalalah pada kedua ayat tersebut berbeda satu dengan yang lain, baik dari sisi keadaan pewaris maupun dari sisi peruntukannya bagi para ahli waris. Dari sisi keadaan pewaris, ayat 12 diartikan pewaris mati dengan tidak mempunyai ayah dan anak namun diwarisi oleh saudara, sedangkan ayat 176 diartikan pewaris mati dengan tidak mempunyai anak (ayah tidak disebut). Dari sisi peruntukannya, ayat 12 diperuntukkan bagi saudara seibu, sedangkan ayat 176 diperuntukkan bagi saudara sekandung atau saudara seayah. Sebaliknya Hazairin mengartikan kalalah pada kedua ayat

tersebut sama yakni pewaris mati tidak mempunyai anak namun diwarisi oleh saudara, dan keduanya diperuntukkan bagi semua saudara, yakni sekandung, seayah, dan seibu. Hazairin membedakan kedua ayat tersebut hanya dari sisi keadaan pewaris, yakni ayat 12 saat pewaris masih mempunyai ayah, sedangkan ayat 176 saat pewaris sudah tidak lagi mempunyai ayah.

Keempat dalam hal hijab dan mahjub. Disini ketiga teori tersebut sama-sama mengenal hijab dan mahjub, bedanya, (1) menurut teori Syafi'i anak laki-laki bisa menghijab cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris yang lain, dalam teori Hazairin dan KHI hal tersebut tidak mungkin karena cucu adalah ahli waris pengganti atau mawali bagi mendiang orang tuanya, (2) menurut teori Syafi'i dua anak perempuan bisa menghijab cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, dalam teori Hazairin dan KHI hal tersebut tidak mungkin karena cucu perempuan tersebut adalah ahli waris pengganti atau mawali bagi mendiang orang tuanya, (3) menurut teori Hazairin dan KHI, anak perempuan menghijab saudara pewaris (Pasal 181 dan Pasal 182 KHI jo. Yurisprudensi yaitu keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 86k/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995<sup>60</sup>, dalam teori Syafi'i hal tersebut tidak mungkin, (4) menurut Hazairin dan KHI cucu perempuan atau cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti atau mawali menghijab saudara-saudara pewaris (Pasal 181 dan 182 KHI jo. Pasal 185 KHI jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86k/AG/1994 tanggal 10 Juli 1995), dalam teori Syafi'i hal tersebut tidak mungkin, (5) menurut teori

---

<sup>60</sup> Rachmat Syafi'i, *Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Kewarisan Saudara Knadung dengan Anak Perempuan*, Mimbar Hukum No 44 Th X 1999, Gitbinbapera, Departemen Agama, Jakarta, hal. 5.

Hazairin, anak dan atau saudara pewaris menghijab kakek dan nenek pewaris, dalam teori Syafi'i kakek dan nenek hanya terhijab oleh ayah dan ibu, tidak oleh anak apalagi saudara. Jika ibu tidak ada menurut Syafi'i nenek berkedudukan sebagai dzawil furudl, dan jika ayah tidak ada kakek berkedudukan sebagai dzawil furudl jika ada anak dan atau saudara, dan sebagai asabah jika tidak ada anak dan atau saudara. Dalam KHI, tidak ada penjelasan mengenai hal ini, namun dengan berpegang pada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 86k/AG/1994 tanggal 10 Juli 1995, dapat diketahui bahwa kakek hanya terhijab oleh ayah dan atau anak (laki-laki atau perempuan), sedangkan nenek hanya terhijab oleh ibu dan atau anak.

Kelima dalam hal yang berhubungan dengan aul, rad, gharawain, musyarakah, kakek dan saudara. Tentang aul, Syafi'i dan KHI sama-sama menggunakan aul sebagai solusi dalam hal terjadi jumlah faraidl (bagian para ahli waris) melebihi angka satu, dalam arti lebih besar dari asal masalahnya, sehingga ayah selalu mendapat warisan. Berbeda dengan Hazairin yang tidak menggunakan aul untuk ayah yang berkedudukan sebagai dzawul qarabat pada kelompok keutamaan dua dan tiga, sehingga ada kemungkinan ayah tidak mendapat warisan.

Tentang rad, Syafi'i dan Hazairin sama-sama memberikan rad hanya kepada ahli waris yang mempunyai hubungan darah, konsekuensinya adalah bahwa duda atau janda tidak diberi hak atas rad. Berbeda dengan KHI yang memberikan rad kepada semua ahli waris Dzawil furudl. Di luar konteks janda atau duda, perbedaan antara Hazairin di satu sisi dengan Syafi'i dan KHI di sisi

yang lain tampak pada beberapa hal, yaitu (1) untuk keutamaan pertama menurut teori Hazairin, anak perempuan dan ibu berhak atas rad jika mewaris bersama ayah, dalam teori Syafi'i dan KHI hal tersebut tidak mungkin, karena ayah yang berkedudukan ganda (dzawil furudl sekaligus asabah) akan menghabiskan semua sisa harta, (2) untuk keutamaan kedua, menurut teori Hazairin, ibu yang mewaris bersama saudara (an Nisa 176) akan memperoleh semua sisa harta selain furudlnya sendiri, hal ini dikarenakan kedudukan ibu lebih utama dibanding saudara, dalam teori Syafi'i dan KHI ibu dan saudara sama-sama berhak atas sisa harta (rad) dan akan berbagi secara berimbang menurut besar kecilnya bagian masing-masing.

Tentang gharawain, Syafi'i dan KHI sama-sama memberikan kepada ibu  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta setelah dikurangi bagian duda atau janda, dengan maksud agar bagian ayah selaku asabah tidak lebih kecil dari bagian ibu. Berbeda dengan Hazairin yang tidak mengenal gharawain dalam teorinya sehingga kepada ibu tetap diberikan  $\frac{1}{3}$  dari harta.

Tentang al Musyarakah, teori Syafi'i walau mempunyai penafsiran yang berbeda dengan Hazairin tentang arti kalalah pada an Nisa ayat 12 dan 176, namun ia mengikuti paham Umar bin Khattab dalam menyelesaikan kasus ini, yaitu menggabungkan 2 saudara seibu dengan 2 saudara sekandung dan selanjutnya mereka berbagi sama rata atas  $\frac{1}{6}$  harta dalam hal mewaris bersama ibu dan duda. Ini berarti telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum an Nisa 12 dan 176 menurut versi Syafi'i dan ahlussunnah, sehingga pembagiannya sama dengan pembagian dalam teori Hazairin, yakni memberikan hak waris

kepada saudara sekandung walau tidak sama persis karena Syafi'i tetap mempergunakan an Nisa ayat 12 sebagai acuan, sedangkan Hazairin menggunakan ayat 176 sebagai dasarnya. Dalam KHI, hal tersebut tidak diatur.

Tentang kakek dan saudara, teori Syafi'i memberikan kedudukan yang lebih utama kepada kakek jika mewaris bersama saudara. Keutamaan atau prioritas itu tampak (1) jika yang mewaris hanya kakek dan saudara saja, maka kakek dapat memilih salah satu dari dua alternatif bagian yang lebih menguntungkan untuknya yaitu berbagi sama rata atau mengambil  $\frac{1}{3}$  dari harta, dan (2) jika selain kakek dan saudara ada ahli waris yang lain, maka kakek dapat memilih salah satu dari tiga alternatif bagian yang menguntungkan untuknya yaitu (a) berbagi sama rata, (b)  $\frac{1}{6}$  dari harta, dan (c)  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta. Dalam teori Hazairin, kakek ditempatkan sebagai ahli waris langsung dengan mendapat bagian seperti bagian mawali bagi ayah dan mak pewaris. Namun demikian mereka baru berhak mendapat warisan jika pewaris tidak mempunyai anak atau mawalinya, tidak ada orang tua (ayah atau mak), dan tidak ada saudara atau mawalinya, karena di dalam kelompok keutamaan, kakek menempati kelompok keutamaan terakhir (keempat)<sup>61</sup>. Dengan demikian tidak ada alasan untuk memberikan kedudukan yang istimewa kepada kakek jika mewaris bersama dengan saudara. Dalam KHI, keberadaan kakek sebagai ahli waris langsung disebut dalam Pasal 174 ayat (1). Namun tidak dijelaskan apakah sebagai dzawil furudl atau asabah, karena itu Idris Djakfar dan Taufik Yahya menempatkannya sebagai ahli waris

---

<sup>61</sup> Hazairin, *op. cit.*, hal. 138.

pengganti dan memperoleh bagian sama dengan bagian ayah (kakek dari ayah) atau sama dengan bagian ibu (kakek dari ibu).<sup>62</sup>

Keenam dalam hal yang berhubungan dengan nenek, bibi dan paman. Tentang nenek, Syafi'i menempatkannya sebagai dzawil furudl, dan memperoleh 1/6 harta jika pewaris tidak mempunyai ibu. Namun Hazairin menempatkan nenek sebagai ahli waris langsung dengan mendapat bagian seperti bagian mawali bagi ayah dan mak pewaris, bukan sebagai dzawul faraidl. Menurut Hazairin, pemberian 1/6 kepada nenek oleh hadits-hadits tersebut hanya sebagai tu'mah, bukan sebagai faraidl.<sup>63</sup> Dalam KHI tidak ada penjelasan tentang hal ini, namun jika diikuti paham Idris Djakfar dan Taufik Yahya, maka kedudukan nenek dalam KHI sama dengan kedudukan nenek dalam teori Hazairin.

Tentang bibi, dalam teori Syafi'i bibi digolongkan sebagai dzawil arham sehingga tidak berhak mewaris selama ada baitulmal, demikian pula dalam KHI, karena bibi tidak tercantum dalam pasal 174 ayat (1). Namun dalam teori Hazairin bibi dimungkinkan untuk mendapat warisan dalam kedudukannya sebagai mawali<sup>64</sup> jika tidak terhibab.

Tentang paman, Syafi'i dan KHI menempatkannya sebagai asabah, sehingga berhak atas semua harta jika tidak ada ahli waris yang lain, semua sisa harta jika mewaris bersama ahli waris dzawil furudl dan tidak ada ahli waris yang menghibabnya. Dalam teori Hazairin paman dimungkinkan mendapat warisan sebagai mawali jika tidak terhibab oleh ahli waris yang lain.

---

<sup>62</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 64.

<sup>63</sup> Hazairin, *op. cit.*, hal. 142.

<sup>64</sup> Hazairin, *op. cit.*, hal. 41.



Ketujuh dalam hal yang berhubungan dengan wasiat dan hibah. Tentang wasiat, teori Syafi'i dan KHI sama-sama berpendapat bahwa wasiat pada dasarnya diberikan atau diperuntukkan kepada mereka yang tidak mempunyai hak waris, atau kepada ahli waris yang mempunyai hak waris namun tidak mendapatkannya karena terhibah atau karena harta sudah terbagi habis oleh ahli waris yang berhak atasnya, dengan batasan tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  harta. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris, demikian pula wasiat yang melebihi batas maksimal hanya berlaku jika ahli waris menyetujui (Pasal 194 ayat (1) jo. 195 ayat (2) dan (3) KHI).

Perbedaan antara teori Syafi'i dan KHI dalam masalah wasiat terletak pada lembaga wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI. Melalui lembaga ini KHI memberikan bagian kepada anak dan orang tua angkat maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan pewaris. Ketentuan ini tidak dikenal oleh teori Syafi'i.

Wasiat wajibah sebenarnya merupakan terobosan atau cara lain untuk memberikan bagian kepada mereka yang tidak mempunyai hak waris. Dalam Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Pasal 76-79, Wasiat Wajibah diberikan kepada cucu yang tidak mendapat bagian warisan baik karena kedudukannya sebagai dzawil arham maupun karena terhibah oleh ahli waris yang lain. Dikatakan cara lain karena pewaris semasa hidupnya sama sekali tidak pernah berwasiat. Namun atas kekuatan Undang-Undang atau ketentuan KHI wasiat tersebut menjadi ada. Lembaga Wasiat Wajibah ini pada dasarnya penting dan diperlukan guna mengatasi hal-hal atau keadaan-keadaan khusus yang terjadi untuk kasus-kasus kewarisan tertentu, yang menyentuh rasa keadilan seperti telah disinggung pada uraian terdahulu.

Perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dengan wasiat wajibah dalam Undang-Undang Wasiat Mesir adalah antara lain dari segi peruntukannya, yaitu hanya kepada anak dan orang tua angkat, tidak kepada cucu atau kerabat pewaris.

Hazairin mempunyai pendirian yang berbeda dengan Syafi'i dan KHI, walau sama-sama membatasi besarnya wasiat yang dapat diberikan yakni maksimal  $\frac{1}{3}$  harta, tetapi Hazairin membolehkan berwasiat kepada para ahli waris yang sudah mempunyai hak waris, bahkan diwajibkan, yakni kepada orang tua dan kerabat dengan merujuk pada al Qur'an surat al Baqarah ayat 180, dan janda atau duda dengan merujuk pada al Baqarah ayat 240. Hal tersebut dikarenakan ia tidak mengakui adanya nasikh dan mansukh antara ayat-ayat al Qur'an.

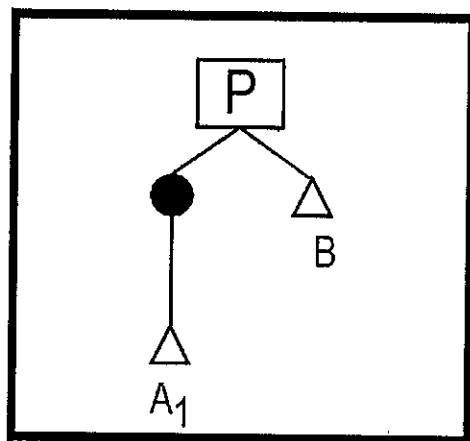
Tentang hibah, Syafi'i dan Hazairin memandangnya sebagai hal yang terpisah dengan masalah kewarisan, karena pemberian dalam bentuk hibah ini sudah terjadi dan langsung berakhir/terselesaikan pada saat pemberinya masih hidup, dan saat itu harta benda yang menjadi obyek hibah masih sepenuhnya merupakan hak milik dan kewenangan pribadinya serta secara eksplisit tidak/belum ada sangkut pautnya dengan masalah kewarisan.

Namun KHI menentukan dua hal yang berbeda dari apa yang pada umumnya berlaku khususnya pada teori Syafi'i, yaitu pertama membatasi besarnya hibah maksimal  $\frac{1}{3}$  harta, dan kedua hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan.

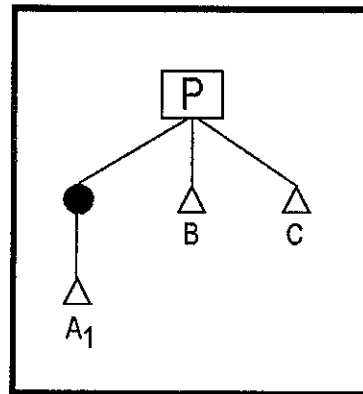
#### 4.4.4.2 Beberapa Contoh

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan secara lebih jelas dan konkrit antara kewarisan KHI, patrilineal Syafi'i dan bilateral Hazairin berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh perhitungan/pembagiannya.

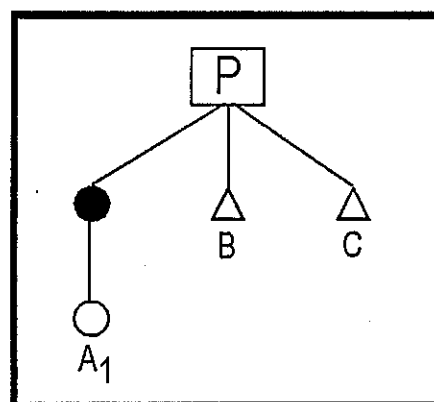
**Gambar I**



Pada Gambar I, ahli waris terdiri dari A1 (cucu perempuan dari anak laki-laki) dan B (anak perempuan). Menurut kewarisan patrilineal Syafi'i, A1 (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{6}{24}$  (ditambah dengan rad) dan B (dzawil furudl) mendapat  $\frac{3}{6}$  atau  $\frac{18}{24}$  (ditambah dengan rad). Dalam KHI ada dua versi, yaitu menurut garis hukumnya A1 (waris pengganti) mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dan B (asabah bil ghairi) mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, dan menurut Buku Pintar PTA Sulawesi Selatan 1998 A1 mendapat  $\frac{1}{2}$  dan B mendapat  $\frac{1}{2}$ . Menurut Hazairin A1 (mawali bagi mendiang anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{3}$  dan B (dzawul qarabat) mendapat  $\frac{1}{3}$ .

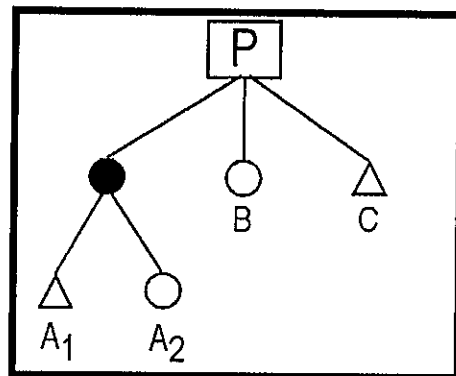
**Gambar II**

Pada gambar II, ahli waris terdiri dari A1 (cucu perempuan dari anak laki-laki), B (anak perempuan) dan C (anak perempuan). Menurut kewarisan patrilineal Syafi'i, B (dzawil furudl) mendapat  $\frac{3}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ) dan C (dzawil furudl) mendapat  $\frac{3}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ). A1 (dzawil furudl) tidak mendapat apa-apa karena terhibab oleh B dan C (dua anak perempuan). Menurut kewarisan bilateral Hazairin, A1 (mawali) mendapat  $\frac{2}{4}$ , B (dzawul qarabat) mendapat  $\frac{1}{4}$  dan C (dzawul qarabat) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. Dalam KHI ada dua versi yaitu menurut garis hukumnya A1 (waris pengganti) mendapat  $\frac{2}{4}$ , B (asabah bil ghairi) mendapat  $\frac{1}{4}$  dan C (asabah bil ghairi) mendapat  $\frac{1}{4}$ , dan menurut Buku Pintar PTA Sulsel 1998 A1 mendapat  $\frac{1}{3}$ , B  $\frac{1}{3}$  dan C  $\frac{1}{3}$ .

**Gambar III**

Pada Gambar III, ahli waris terdiri dari A1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki), B (anak perempuan) dan C (anak perempuan). Menurut kewarisan patrilineal Syafi'i, B (dzawil furudl) mendapat  $\frac{2}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}$ ), C (dzawil furudl) mendapat  $\frac{2}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}$ ), dan sisanya yaitu  $\frac{2}{6}$  untuk A1 selaku asabah. Menurut kewarisan bilateral Hazairin, A1 (mawali) mendapat  $\frac{2}{4}$ , B (dzawul qarabat) mendapat  $\frac{1}{4}$  dan C (dzawul qarabat) mendapat  $\frac{1}{4}$ . Dan dalam KHI ada dua versi, yaitu menurut garis hukumnya A1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{2}{4}$ , B (asabah bil ghairi) mendapat  $\frac{1}{4}$  dan C (asabah bil ghairi) mendapat  $\frac{1}{4}$ , dan menurut Buku Pintar PTA Sulsel 1998 A1 mendapat  $\frac{1}{3}$ , B  $\frac{1}{3}$ , dan C  $\frac{1}{3}$ .

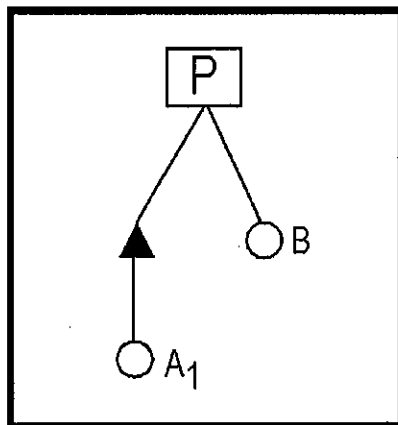
**Gambar IV**



Pada gambar IV, ahli waris terdiri dari A1 (cucu perempuan dari anak laki-laki), A2 (cucu laki-laki dari anak laki-laki), B (anak laki-laki) dan C (anak perempuan). Menurut kewarisan patrilineal Syafi'i, B (asabah) mendapat  $\frac{2}{3}$ , C (asabah bil ghairi) mendapat  $\frac{1}{3}$ , A1 dan A2 tidak mendapat apa-apa karena terhibab oleh B. Menurut kewarisan bilateral Hazairin dan KHI A1 (ahli waris pengganti atau mawali) mendapat  $\frac{2}{15}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5}$ ), A2 (ahli waris pengganti atau

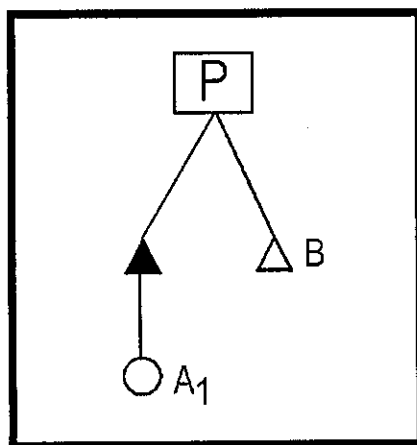
mawali) mendapat  $\frac{4}{15}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{2}{5}$ ), B (asabah atau dzawul qarabat) mendapat  $\frac{2}{5}$  atau  $\frac{6}{15}$ , dan C (asabah atau dzawul qarabat) mendapat  $\frac{1}{5}$  atau  $\frac{3}{15}$ .

**Gambar V**



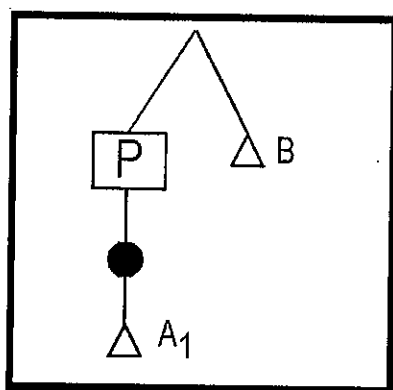
Pada gambar V, ahli waris terdiri dari A1 (cucu laki-laki dari anak perempuan) dan B (anak laki-laki). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, B selaku asabah mendapat seluruh harta. A1 tidak mendapat apa-apa karena ia adalah dzawil arham. Menurut Hazairin dan KHI, A1 (mawali atau ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{1}{3}$  dan B (asabah atau dzawul qarabat) mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian.

**Gambar VI**



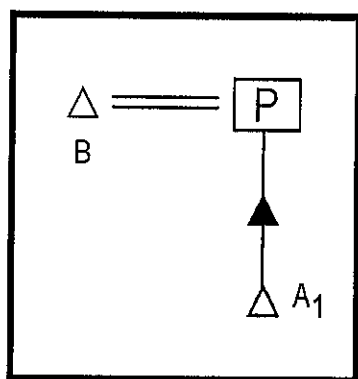
Pada gambar VI, ahli waris terdiri dari A1 (cucu laki-laki dari anak perempuan) dan B (anak perempuan). Menurut kewarisan patrilineal Syafi'i, B (dzawil furudl) mendapat seluruh harta ( $\frac{1}{2}$  tambah rad). A1 tidak mendapat apa-apa karena ia adalah dzawil arham. Menurut Hazairin dan KHI, A1 (mawali atau ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{3}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ) dan B (dzawil furudl / fara'id) mendapat  $\frac{3}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ).

**Gambar VII**



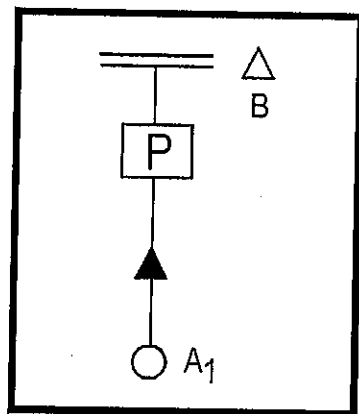
Pada gambar VII, ahli waris terdiri dari A1 (cucu perempuan dari anak laki-laki) dan B (saudara perempuan sekandung). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, A1 (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{2}$  dan B (asabah ma'al ghairi) mendapat  $\frac{1}{2}$ . Menurut Hazairin dan KHI, A1 (mawali atau ahli waris pengganti) mendapat seluruh harta. B tidak mendapat apa-apa karena terhibab oleh A1.

**Gambar VIII**



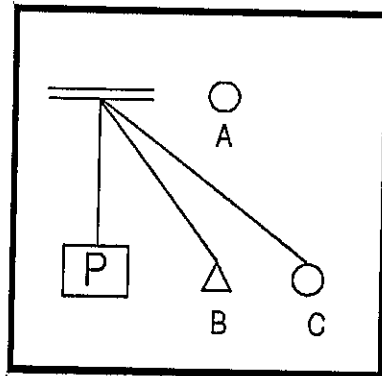
Pada gambar VIII, ahli waris terdiri dari A1 (cucu perempuan dari anak perempuan) dan B (janda). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, B (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{4}$  sisanya yaitu  $\frac{3}{4}$  bagian diserahkan kepada Baitulmal. A1 tidak mendapat apa-apa karena ia adalah dzawil arham. Menurut Hazairin, B (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{3}{12}$  bagian, A1 (mawali) mendapat  $\frac{9}{12}$  ( $\frac{1}{2} + \frac{3}{12}$ ) atau  $\frac{1}{2} + \text{rad}$ . Menurut KHI, B (dzawil furudl) mendapat  $\frac{8}{40}$  ( $\frac{1}{8} + \frac{3}{40}$  atau  $\frac{1}{8} + \text{rad}$ ), dan A1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{32}{40}$  ( $\frac{4}{8} + \frac{12}{40}$ ) atau  $\frac{1}{2} + \text{rad}$ .

**Gambar IX**

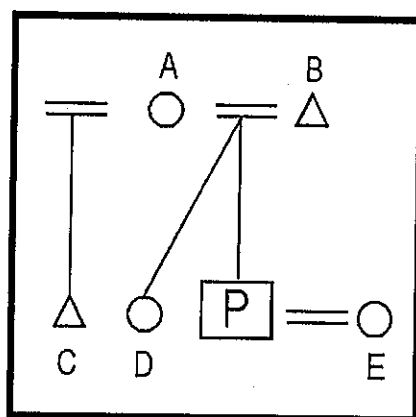


Pada gambar IX, ahli waris terdiri dari A1 (cucu laki-laki dari anak perempuan) dan B (ibu). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, B (dzawil furudl) mendapat seluruh harta ( $\frac{1}{3}$  tambah rad), A1 tidak mendapat apa-apa karena ia adalah dzawil arham. Menurut Hazairin dan KHI, B (dzawil furudl) mendapat  $\frac{6}{24}$  ( $\frac{1}{6} + \frac{2}{24}$  atau  $\frac{1}{6} + \text{rad}$ ) dan A1 (mawali atau ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{18}{24}$  ( $\frac{1}{2} + \frac{6}{24}$  atau  $\frac{1}{2}$  tambah rad).



**Gambar X**

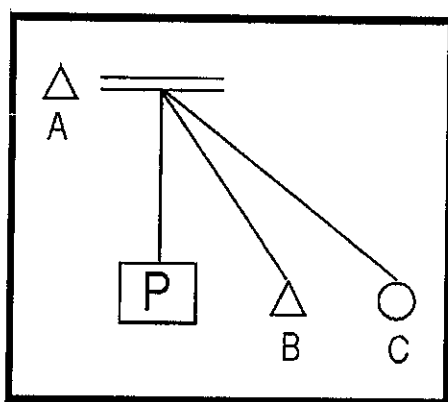
Pada gambar X, ahli waris terdiri dari A (ayah), B (saudara perempuan kandung) dan C (saudara laki-laki sekandung). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i dan KHI, A (asabah) mendapat seluruh harta, B dan C (asabah bil ghairi) tidak mendapat apa-apa karena terhibab oleh A. Menurut Hazairin, B (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ), C (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ), dan A (dzawul qarabat) mendapat seluruh sisa harta yaitu  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{4}{6}$  bagian.

**Gambar XI**

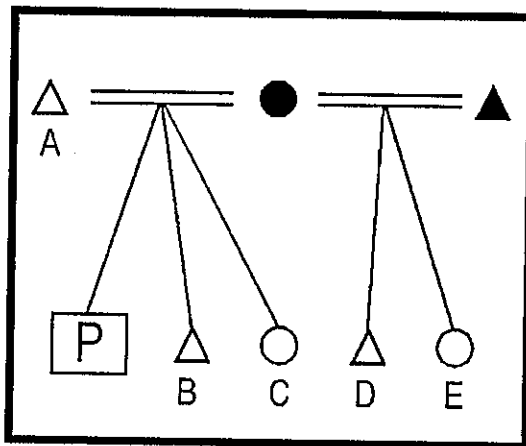
Pada Gambar XI, ahli waris terdiri dari A (Ayah), B (Ibu), C (saudara perempuan seayah), D (saudara laki-laki sekandung), dan E (duda). Menurut

hukum kewarisan patrilineal Syafi'i dan KHI, A (asabah) mendapat  $\frac{2}{6}$ , B (dzawul furudl) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$  dari sisa, E (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{3}{6}$  bagian. C dan D tidak mendapat apa-apa karena terhibab oleh A. Menurut Hazairin, E (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{3}{6}$ , B (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian, C (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ), D (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ), dan A (dzawul qarabat) tidak mendapat apa-apa karena semua harta sudah terbagi habis.

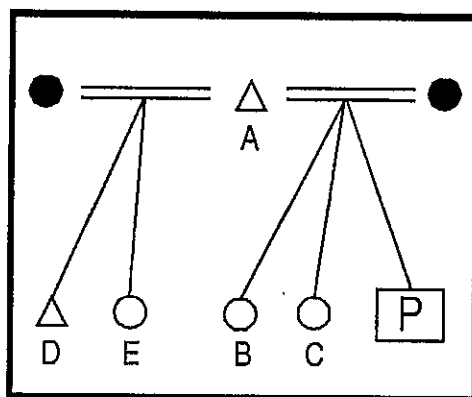
**Gambar XII**



Pada gambar XII, ahli waris terdiri dari A (ibu), B (saudara perempuan sekandung), dan C (saudara laki-laki sekandung). Menurut Syafi'i dan KHI, A (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{3}{18}$ , B (asabah bil ghairi) mendapat  $\frac{5}{18}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{5}{6}$ ) dan C (asabah bil ghairi) mendapat  $\frac{10}{18}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{5}{6}$ ) bagian. Menurut Hazairin, A (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{3}{18}$ , B (dzawul qarabat) mendapat  $\frac{5}{18}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{5}{6}$ ) dan C (dzawul qarabat) mendapat  $\frac{10}{18}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{5}{6}$ ) bagian.

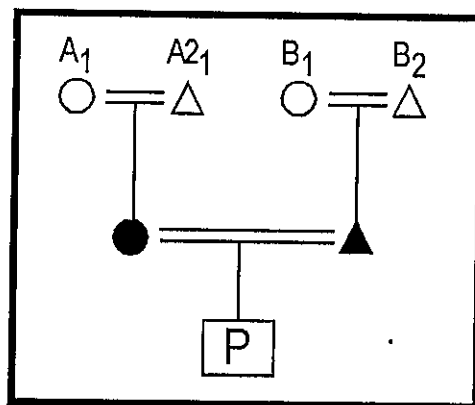
**Gambar XIII**

Pada gambar XIII, ahli waris terdiri dari A (ibu), B (saudara perempuan sekandung), C (saudara laki-laki sekandung), D (saudara perempuan seayah) dan E (saudara laki-laki seayah). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i dan KHI, A (dzawil furudl) mendapat  $1/6$  atau  $3/18$ , B (asabah bil ghairi) mendapat  $5/18$  ( $1/3 \times 5/6$ ) dan C (asabah bil ghairi) mendapat  $10/18$  ( $2/3 \times 5/6$ ). D dan E tidak mendapat apa-apa karena terhibab oleh C. Menurut Hazairin, A (dzawul fara'id) mendapat  $1/6$  atau  $6/36$ , B (dzawul qarabat) mendapat  $5/36$  ( $1/6 \times 5/6$ ), C (dzawul qarabat) mendapat  $10/36$  ( $2/6 \times 5/6$ ), D (dzawul qarabat) mendapat  $5/36$  ( $1/6 \times 5/6$ ) dan E (dzawul qarabat) mendapat  $10/36$  ( $2/6 \times 5/6$ ) bagian.

**Gambar XIV**

Pada gambar XIV, ahli waris terdiri dari A (ibu), B (saudara laki-laki sekandung), C (saudara laki-laki sekandung), D (saudara perempuan seibu), dan E (saudara laki-laki seibu). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i dan KHI, A (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{2}{12}$ , D (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ) atau  $\frac{2}{12}$ , E (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{6}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ) atau  $\frac{2}{12}$ , B (asabah) mendapat  $\frac{3}{12}$  ( $\frac{1}{2} \times \text{sisanya}$ ) dan C (asabah) mendapat  $\frac{3}{12}$  ( $\frac{1}{2} \times \text{sisanya}$ ). Menurut Hazairin, A (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{7}{42}$ , B (dzawul qarabat) mendapat  $\frac{10}{42}$  ( $\frac{2}{7} \times \frac{5}{6}$ ), C (dzawul qarabat) mendapat  $\frac{10}{42}$  ( $\frac{2}{7} \times \frac{5}{6}$ ), D (dzawul qarabat) mendapat  $\frac{10}{42}$  ( $\frac{2}{7} \times \frac{5}{6}$ ), dan E (dzawul qarabat) mendapat  $\frac{5}{42}$  ( $\frac{1}{7} \times \frac{5}{6}$ ) bagian.

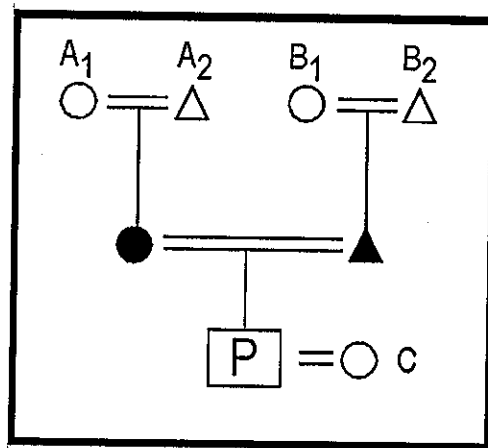
**Gambar XV**



Pada gambar XV, ahli waris terdiri dari A1 (kakek dari pihak ayah), A2 (nenek dari pihak ayah), B1 (kakek dari pihak ibu), dan B2 (nenek dari pihak ibu). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, A2 (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{12}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$ ), B2 (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{12}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$ ), A1 (asabah) mendapat  $\frac{5}{6}$  atau  $\frac{10}{12}$  bagian. B1 tidak mendapat apa-apa karena ia adalah dzawil arham. Dalam KHI tidak ada penjelasan mengenai hal ini. Namun jika Pasal 185 berlaku

baginya maka mereka akan memperoleh status sebagai ahli waris pengganti, sehingga pembagiannya adalah A1 mendapat  $\frac{2}{6}$  atau  $\frac{2}{3} \times (\frac{2}{6} + \frac{1}{6})$ , A2 mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3} \times (\frac{2}{6} + \frac{1}{6})$ , B1 mendapat  $\frac{2}{6}$  atau  $(\frac{2}{6} + \frac{1}{6})$  dan B2 mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3} \times (\frac{2}{6} + \frac{1}{6})$ . Menurut Hazairin, A1 (mawali) mendapat  $\frac{4}{9}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$ ), A2 (mawali) mendapat  $\frac{2}{9}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$ ), B1 (mawali) mendapat  $\frac{2}{9}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3}$ ) dan B2 (mawali) mendapat  $\frac{1}{9}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$ ).

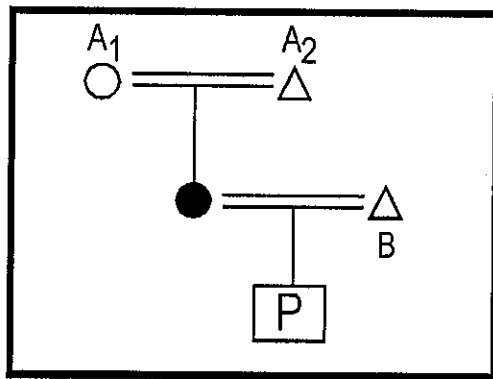
**Gambar XVI**



Pada Gambar XVI, ahli waris terdiri dari A1 (kakek dari pihak ayah), A2 (nenek dari pihak ayah), B1 (kakek dari pihak ibu), B2 (nenek dari pihak ibu) dan C (duda). Menurut hukum kewarisan Syafi'i, C (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{6}{12}$ , A2 (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{12}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$ ), B2 (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{12}$  ( $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$ ), A1 (asabah) mendapat  $\frac{4}{12}$ . B1 tidak mendapat apa-apa karena ia adalah dzawil arham. Menurut Hazairin, C (dzawul fara'id) mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{9}{18}$ , A1(mawali) mendapat  $\frac{2}{18}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{6}$ ), A2 (mawali) mendapat  $\frac{1}{18}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{6}$ ), B1 (mawali) mendapat  $\frac{2}{9}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3}$ ) atau  $\frac{4}{18}$ , dan B2 (mawali) mendapat  $\frac{1}{9}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$ ) atau  $\frac{2}{18}$ . Dalam KHI, jika Pasal 177 ayat (2) dan 178 ayat (2) jo.

Pasal 185 ayat (1) berlaku baginya, maka A1 (ahli waris pengganti) mendapat  $4/18$  ( $2/3 \times 2/6$ ), A2 (ahli waris pengganti) mendapat  $2/18$  ( $1/3 \times 2/6$ ), B1 (ahli waris pengganti) mendapat  $2/18$  ( $2/3 \times 1/6$ ), dan B2 (ahli waris pengganti) mendapat  $1/18$  ( $1/3 \times 1/6$ ), sedangkan C (dzawil furudl) mendapat  $1/2$  atau  $9/18$ .

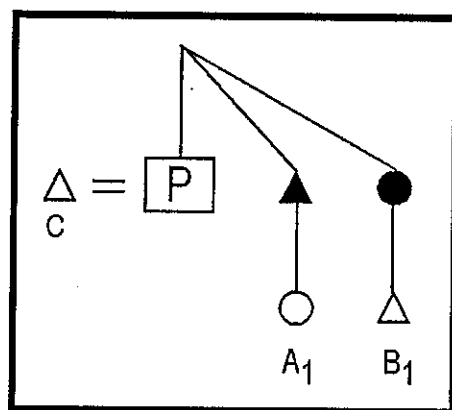
**Gambar XVII**



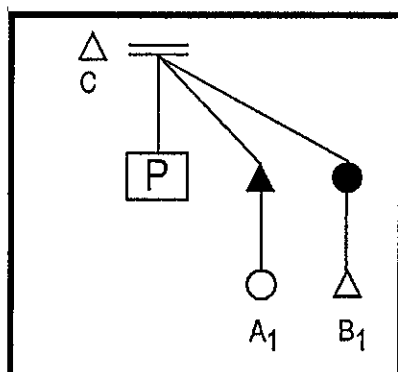
Pada Gambar XVII, ahli waris terdiri dari A1 (kakek dari pihak ayah), A2 (nenek dari pihak ayah), dan B (ibu). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, B (dzawil furudl) mendapat  $1/3$ , sisanya yaitu  $2/3$  untuk A1 selaku asabah. A2 (dzawil furudl) tidak mendapat apa-apa karena terhibab oleh B. Menurut Hazairin, B (dzawil fara'id) mendapat seluruh harta ( $1/3 + \text{rad}$ ), A1 dan A2 tidak mendapat apa-apa, karena pada kelompok keutamaan ketiga untuk ayah selaku dzawul qarabat tidak diadakan mawali. Dalam KHI, jika Pasal 177 jo. Pasal 185 berlaku baginya, maka alternatif pertama A1 (waris pengganti) mendapat  $6/18$  ( $2/3 \times 1/3 + \text{rad} = 2/9 + 2/18$ ), A2 (waris pengganti) mendapat  $3/18$  ( $1/3 \times 1/3 + \text{rad} = 1/9 + 1/18$ ), dan B (dzawil furudl) mendapat ( $1/3 + \text{rad} = 3/9 + 3/18$ ).

Alternatif kedua A1 dan A2 hanya mendapatkan seluruh bagian ayah selaku dzawil furudl tanpa rad, sehingga A1 (ahli waris pengganti) mendapat  $2/9$  ( $2/3 \times 1/3$ ), A2 (ahli waris pengganti) mendapat  $1/9$  ( $1/3 \times 1/3$ ), dan B (dzawil furudl) mendapat  $6/9$  ( $1/3 + \text{rad}$ ). Alternatif ketiga A1 dan A2 akan mendapat seluruh bagian ayah selaku asabah, sehingga A1 (ahli waris pengganti) mendapat  $4/9$  ( $2/3 \times 2/3$ ), A2 (ahli waris pengganti) mendapat  $2/9$  ( $1/3 \times 2/3$ ), dan B (dzawil furudl) mendapat  $1/3$  atau  $3/9$ .

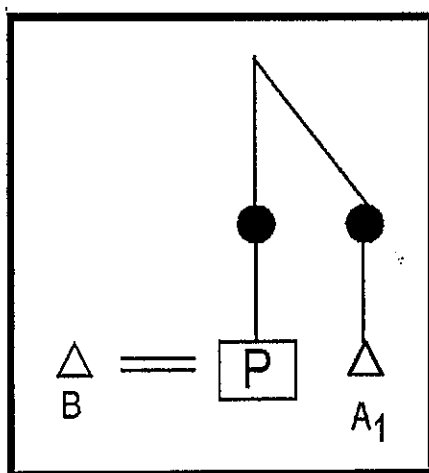
**Gambar XVIII**



Pada gambar XVIII, ahli waris terdiri dari, A1 (keponakan laki-laki dari saudara perempuan sekandung), B1 (keponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung), dan C (janda). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, C (dzawil furudl) mendapat  $1/4$  bagian, sisanya yaitu  $3/4$  bagian diserahkan kepada Baitulmal. A1 dan A2 tidak mendapat apa-apa karena mereka adalah dzawil arham. Menurut Hazairin dan KHI, C (dzawul fara'id) mendapat  $1/4$  atau  $3/12$ , A1 (mawali atau ahli waris pengganti) mendapat  $3/12$  dan B1 (mawali atau ahli waris pengganti) mendapat  $6/12$ .

**Gambar XIX**

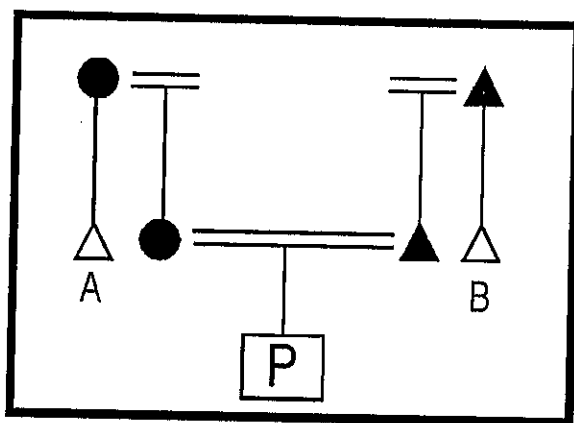
Pada gambar XIX, ahli waris terdiri dari A1 (keponakan laki-laki dari saudara perempuan sekandung), B1 (keponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung), dan C (ibu). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, C (dzawil furudl) mendapat seluruh harta ( $\frac{1}{3}$  tambah rad), A1 dan B1 tidak mendapat apa-apa karena mereka adalah dzawil arham. Menurut Hazairin dan KHI, C (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{3}{18}$ , A1 (mawali atau ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{5}{18}$  dan B1 (mawali atau ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{10}{18}$ .

**Gambar XX**



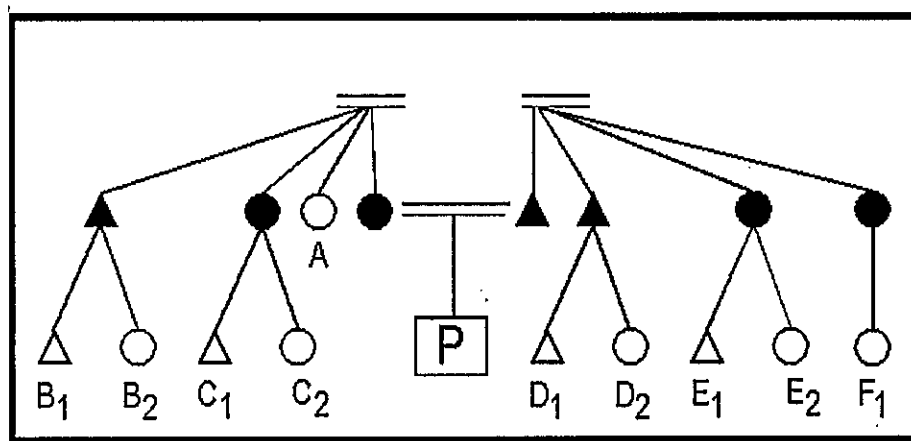
Pada gambar XX, ahli waris terdiri dari A1 (saudara sepupu perempuan dari paman yang sekandung dengan ayah), dan B (janda). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, B (dzawil furudl) mendapat  $\frac{1}{4}$ , dan sisanya  $\frac{3}{4}$  diserahkan kepada Baitulmal. A1 tidak mendapat apa-apa karena ia adalah dzawil arham. Menurut Hazirin dan KHI, B (dzawil fara'id) mendapat  $\frac{1}{4}$ , dan sisanya  $\frac{3}{4}$  bagian untuk A1 selaku mawali atau ahli waris pengganti.

*Gambar XXI*



Pada gambar XXI, ahli waris terdiri dari A (bibi yang berasal dari kakek pewaris dari pihak ayah), dan B (bibi yang berasal dari nenek pewaris dari pihak ibu). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i dan KHI, seluruh harta diserahkan kepada Baitulmal. Bibi tidak mendapat apa-apa karena ia adalah dzawil arham atau kerabat yang tidak diberi status sebagai ahli waris. Menurut Hazairin, A (mawali dari ayah) selaku dzawul qarabat mendapat  $\frac{2}{3}$  dan B (mawali dari ibu) selaku dzawul fara'idl mendapat  $\frac{1}{3}$ .

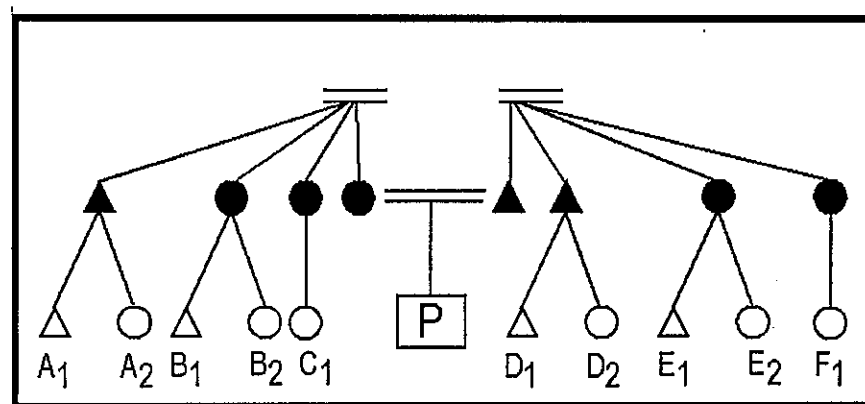
Gambar XXII



Pada gambar XXII, ahli waris terdiri dari A (paman dari pihak ayah), B1 (saudara sepupu perempuan dari bibi pihak ayah), B2 (saudara sepupu laki-laki dari bibi pihak ayah), C1 (saudara sepupu perempuan dari paman pihak ayah), C2 (saudara sepupu laki-laki dari paman pihak ayah), D1 (saudara sepupu perempuan dari bibi pihak ibu), D2 (saudara sepupu laki-laki dari bibi pihak ibu), E1 (saudara sepupu perempuan dari paman pihak ibu), E2 (saudara sepupu laki-laki dari paman pihak ibu), dan F1 (saudara sepupu laki-laki dari paman pihak ibu). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, A (asabah) mendapatkan seluruh harta, C2 (asabah) tidak mendapat bagian karena terhibab oleh A, B1, B2, C1, D1, D2, E1, E2, dan F1 tidak mendapat warisan karena mereka adalah dzawil arham. Menurut Hazairin, A (mawali) mendapat  $\frac{4}{15}$  ( $\frac{2}{5} \times \frac{2}{3}$ ) atau  $\frac{12}{45}$ , B1 (mawali) mendapat  $\frac{2}{45}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times \frac{2}{3}$ ), B2 (mawali) mendapat  $\frac{4}{45}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} \times \frac{2}{3}$ ), C1 (mawali) mendapat  $\frac{4}{45}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{3}$ ), C2 (mawali) mendapat  $\frac{8}{45}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{3}$ ), D1 (mawali) mendapat  $\frac{1}{45}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{3}$ ), D2 (mawali) mendapat  $\frac{2}{45}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{3}$ ), E1 (mawali) mendapat  $\frac{2}{45}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{3}$ ), E2 (mawali)

mendapat  $\frac{4}{45}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{3}$ ), dan F1 (mawali) mendapat  $\frac{2}{15}$  ( $\frac{2}{5} \times \frac{1}{3}$ ) atau  $\frac{6}{45}$ . Menurut KHI, A (asabah) mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{3}{12}$ , C1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{1}{12}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ ), C2 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{2}{12}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$ ), E1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{1}{12}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ ), E2 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{2}{12}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$ ), dan F1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{3}{12}$ . B1, B2, D1 dan D 2 tidak mendapat apa-apa karena mereka adalah ahli waris pengganti dari bibi, yakni kerabat pewaris yang tidak diberi status sebagai ahli waris.

**Gambar XXIII**



Pada gambar XXIII, ahli waris terdiri dari A1 (saudara sepupu perempuan pewaris dari bibi pihak ayah), A2 (saudara sepupu laki-laki pewaris dari bibi pihak ayah), B1 (saudara sepupu perempuan pewaris dari paman pihak ayah), B2 (saudara sepupu laki-laki pewaris dari paman pihak ayah), C1 (saudara sepupu laki-laki pewaris dari paman pihak ayah), D1 (saudara sepupu perempuan pewaris dari bibi pihak ibu), D2 (saudara sepupu laki-laki pewaris dari bibi pihak ibu), E1 (saudara sepupu perempuan pewaris dari paman pihak ibu), E2 (saudara

sepupu laki-laki pewaris dari paman pihak ibu), dan F1 (saudara sepupu laki-laki pewaris dari paman pihak ibu). Menurut hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, B2 (asabah) mendapat  $\frac{1}{2}$ , dan C1 (asabah) mendapat  $\frac{1}{2}$ . A1, A2, B1, D1, D2, E1, E2, dan F1 tidak mendapat apa-apa karena mereka adalah dzawil arham. Menurut Hazairin, A1 (mawali) mendapat  $\frac{2}{45}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times \frac{2}{3}$ ), A2 (mawali) mendapat  $\frac{4}{45}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} \times \frac{2}{3}$ ), B1 (mawali) mendapat  $\frac{4}{45}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{3}$ ), B2 (mawali) mendapat  $\frac{8}{45}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{3}$ ), C1 (mawali) mendapat  $\frac{4}{15}$  ( $\frac{2}{5} \times \frac{2}{3}$ ) atau  $\frac{12}{45}$ , D1 (mawali) mendapat  $\frac{1}{45}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{3}$ ), D2 (mawali) mendapat  $\frac{2}{45}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{3}$ ), E1 (mawali) mendapat  $\frac{2}{45}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{3}$ ), E2 (mawali) mendapat  $\frac{4}{45}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{3}$ ), dan F1 (mawali) mendapat  $\frac{2}{15}$  ( $\frac{2}{5} \times \frac{1}{3}$ ) atau  $\frac{6}{45}$ . Menurut KHI, B1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{1}{12}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ ), B2 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{2}{12}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$ ), C1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{3}{12}$ , E1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{1}{12}$  ( $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ ), E2 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{2}{12}$  ( $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$ ), dan F1 (ahli waris pengganti) mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{3}{12}$ . A1, A2, D1 dan D2 tidak mendapat apa-apa karena mereka adalah ahli waris pengganti dari bibi, yakni kerabat pewaris yang tidak diberi status sebagai ahli waris.

#### 4.5. Keunggulan dan Kelemahan Kewarisan KHI, Syafi'i dan Hazairin

Keunggulan dan kelemahan ketiga teori hukum kewarisan tersebut akan dibahas/dianalisa dalam konteks hubungannya pertama dengan pemberian hak saling mewaris antara para ahli waris, kedua kedudukan dan hak waris ayah, ketiga penafsiran terhadap arti kalalah dalam an Nisa ayat 12 dan 176, keempat

penentuan siapa yang berhak atas sisa bagi (rad) dan gharawain, kelima kemungkinan anak perempuan atau cucu perempuan menghajab saudara pewaris, dan keenam Wasiat dan Hibah.

### 1. Hak Saling Mewaris

Adanya hak saling mewaris antara pewaris dan ahli waris ditentukan sendiri oleh al Qur'an surat an Nisa ayat 7. Di sini ditegaskan tentang hak anak (laki-laki/perempuan) untuk mewarisi harta ibu bapaknya dan hak kerabat untuk mewarisi harta kerabatnya. An Nisa ayat 7 ini harus dibaca dalam konteks hubungannya dengan ayat yang lain, yakni ayat 11, 12 dan 176 dan ketiga ayat ini menunjukkan bahwa hak waris yang diberikan kepada ahli waris tersebut bersifat timbal balik, yakni anak mewarisi ibu bapaknya dan sebaliknya ibu bapak mewarisi anak-anaknya, saudara saling mewarisi satu dengan yang lain, demikian pula kerabat juga saling mewarisi secara timbal balik, dengan tidak mengenal diskriminasi antara kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. Hak kerabat untuk mewarisi harta kerabatnya selain didasarkan pada an Nisa ayat 7, juga dapat dipahami dari ayat-ayat kewarisan yang lain, yakni an Nisa ayat 33, al Ahzab ayat 6 dan al Anfal ayat 75.

Keunggulan dan kelemahan ketiga teori hukum kewarisan Islam tersebut mulai tampak saat menentukan hak waris bagi saudara dan para kerabat.

Tentang kerabat, kelemahan hukum kewarisan Syafi'i ialah penentuan ahli warisnya bersifat diskriminasi dan terbatas. Diskriminasi seperti telah dikemukakan di atas adalah hanya kerabat laki-laki atau kerabat yang berasal dari

keturunan laki-laki yang berhak mewaris. Padahal jika dibaca redaksi an Nisa ayat 7 dan 33, diskriminasi itu seharusnya tidak ada. Sumber adanya diskriminasi dalam penentuan Ahli Waris dari teori Syafi'i (Ahlussunnah) menurut Amir Syarifuddin berasal dari kata Aulad yang ada dalam ayat 11, merupakan bentuk jamak yang dapat berarti beberapa orang anak dalam garis yang sama (horizontal) dan dapat pula berarti beberapa tingkat anak (garis vertikal). Kata aulad oleh Ulama Ahlussunnah penggunaannya kemudian diperluas kepada walad al aulad (cucu) dalam penempatannya dilakukan secara diskriminatif, sehingga dalam menentukan hak waris kata walad oleh mereka hanya diperuntukkan bagi anak dari anak laki-laki dan tidak kepada anak dari anak perempuan. Cucu (anak dari anak) perempuan juga mereka akui sebagai orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris seperti halnya cucu dari anak laki-laki, tetapi ditempatkan sebagai dzawil arham sehingga tidak berhak mewaris.<sup>56</sup>

Amir Syarifuddin lebih lanjut mengatakan bahwa.<sup>57</sup>

*Sulit mencari argumen rasional dalam literatur yang ada mengapa ulama Ahli Sunnah membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal penerusan haknya kepada anak-anaknya. Padahal, Allah sendiri tidak membedakan keduanya kecuali dalam kadar penerimaan. Meskipun budaya yang berlaku di Arab waktu itu membedakan dengan jelas laki-laki dan perempuan, ternyata Allah telah mengubah budaya diskriminatif tersebut dengan menetapkan anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki. Pendapat Ahlussunnah dalam membedakan keturunan anak laki-laki dari anak perempuan itu jelas menunjukkan sisa adat jahiliyah yang belum terkikis dari pemikiran para ulama Ahli Sunnah. Adat jahiliyah yang dimaksud adalah pengakuan garis kerabat itu hanya dari pihak laki-laki atau patrilineal sebagaimana tergambar dari sepotong syair Arab yang berbunyi: "Anak-anak kita itu adalah anak-anak dari anak laki-laki kita dan anak perempuan kita; sedangkan anak-anak dari anak perempuan kita*

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Predana Media, Jakarta, 2004, hal 67

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 68.

*adalah anak dari laki-laki pihak yang jauh." Menurut paham mereka yang menganut sistem patrilinei anak dari anak perempuan itu adalah anak orang lain yang sudah berada di luar lingkungan kerabat. Karena harta warisan turun kepada kerabat sedangkan anak-anak dari anak perempuan bukan lagi berada dalam lingkaran kerabat maka dia tidak mendapat warisan.*

Ulama Syi'ah menurut Amir Syarifuddin, "walau dari segi adat dan budaya juga bangsa Arab yang asalnya berpaham patrilineal, namun mereka dapat menempatkan pertimbangan syara' di atas pertimbangan adat. Oleh karena itu ulama Syi'ah berpendapat bahwa cucu atau keturunan dari anak perempuan adalah ahli waris yang sah sebagai zulfurudh seperti halnya keturunan dari anak laki-laki". Argumentasi yang mereka kemukakan adalah bahwa Allah telah menyamakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam mendapatkan hak, lalu mengapa manusia mendiskriminasikan anak keturunan mereka."<sup>67</sup>

Paham ulama Syi'ah ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas yang dikutip oleh Mahkamah Agung R.I. dalam keputusannya Nomor 86K/AG/1994 tanggal 10 Juli 1995, yang menegaskan bahwa pengertian walad pada ayat 12 dan 176 surat an Nisa mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan."<sup>68</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diskriminasi dalam penentuan ahli waris tersebut bersumber pada akar budaya masyarakat Arab yang tercermin dari sistem kekeluargaan mereka yang patrilineal, bukan dari al-Qur'an. Al-Qur'an dengan ayat-ayat kewarisan tersebut bermaksud hendak menghapus sistem kekeluargaan patrilineal (suatu sistem yang menunjukkan dominasi kaum laki-laki dalam segala halnya termasuk dalam perolehan hak waris), dan membangun sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental. Sistem ini menurut Abdullah

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Mimbar Hukum Nomor 44 tahun X 1999 hal. 1.

Sidik sesuai dengan perkembangan terakhir masyarakat dunia yang teratur.<sup>69</sup>

Dalam hubungan ini Hazairin menyatakan bahwa:<sup>70</sup>

*Jika al Qur'an dipelajari dengan berdasarkan ilmu tentang pelbagai bentuk kemasyarakatan, yakni tentang pelbagai jenis sistem kekeluargaan, tentang pelbagai jenis garis keturunan, tentang pelbagai macam larangan-larangan perkawinan, maka ayat-ayat Qur'an di lapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang dilateral.*

Dengan demikian berarti hukum yang dibawa oleh al Qur'an (khususnya tentang kewarisan, perkawinan dan kekeluargaan) merupakan *social engineering* bagi masyarakat Arab khususnya dan masyarakat Islam umumnya.

Indonesia sendiri menurut Ichtijanto SA cenderung menuju kearah sistem kekeluargaan yang bilateral. Hal tersebut terbukti dari yurisprudensi.<sup>71</sup> Tentang kewarisan, dalam Keputusan Badan Perencana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional tanggal 20 Mei 1962 Pasal 12 huruf f dikatakan bahwa "hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan dimungkinkan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya."<sup>72</sup> Ketentuan ini sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Rancangan Hukum Kewarisan Nasional butir ke-6 yang menegaskan bahwa "Peraturan fara'id untuk orang Islam diakui sebagai variasi di dalam sistem kewarisan parental individual."<sup>73</sup> Oleh karena itu, hukum kewarisan yang didasarkan pada sistem kekeluargaan yang patrilineal dipandang sudah tidak relevan lagi.

---

<sup>69</sup> Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas, Jakarta, 1968, hal. 26.

<sup>70</sup> Hazairin, *op.cit*, hal. 13.

<sup>71</sup> Ichtijanto SA, *op.cit*, hal 47.

<sup>72</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1962, hal. 10.

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 16.



Adanya diskriminasi tersebut membawa konsekuensi tersingkirnya sebagian kerabat oleh kerabat lainnya, padahal diantara para kerabat tersebut derajat atau posisinya sama yakni sama-sama cucu, atau sama-sama saudara, atau sama-sama keponakan, atau sama-sama saudara dari ayah atau ibu pewaris. Dan yang lebih memprihatinkan ialah ada kalanya orang yang seharusnya menjadi ahli waris karena mempunyai hubungan kerabat (darah) namun tersingkir oleh mereka yang sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga (dalam hal harta diwariskan kepada Baitulmal). Ini jelas tidak sejalan dengan amanat dan jiwa al Qur'an surat an Nisa ayat 7, 33, al Ahzab ayat 6 dan al Anfal ayat 75.

Namun patut disadari bahwa Syafi'i menetapkan garis hukum seperti itu bukan tanpa dasar dan argumentasi. Dasar dan argumentasinya seperti dikemukakan oleh kalangan Ahlussunnah yang menolak hak waris dzawil arham adalah, "pertama kewarisan pada prinsipnya didasarkan pada nash Syara' (Qur'an atau Hadits) yang qath'i, di luar itu adalah batil, kedua Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa saudara perempuan ayah dan saudara perempuan ibu tidak mendapat warisan, dan ketiga jika harta warisan diserahkan kepada Baitulmal, manfaat dan faedahnya sangat besar dan menjadi milik bersama seluruh umat Islam, sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus."<sup>74</sup>

Kecenderungan untuk lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorang atau kelompok orang selaku ahli waris ini dapat dipandang

---

<sup>74</sup> M. Ali As Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Diponegoro, Bandung, 1988, hal. 202.

sebagai nilai lebih (keunggulan) teori Syafi'i dibanding Hazairin dan KHI yang sedikit agak individualis. Selain itu, teori Syafi'i ini sangat sesuai dengan sistem kekeluargaan masyarakat Arab yang berlaku saat itu.

Adapun yang dimaksud dengan terbatas adalah, dalam hal pewaris mempunyai anak laki-laki yang masih hidup maka cucu-cucu dari anak laki-laki pewaris yang lain tidak mendapat warisan karena harta atau sisa harta seluruhnya diwariskan kepada anak laki-laki pewaris tersebut. Jadi, hak waris cucu-cucu dibatasi oleh kehadiran anak laki-laki. Tidak diketahui mengapa anak laki-laki harus membatasi/menghilangkan hak waris anak-anak dari anak pewaris yang lain. Padahal cucu-cucu pewaris ini, jika ayahnya yang meninggal itu masih hidup akan memperoleh dalam arti ikut menikmati warisan dari harta peninggalan kakeknya dan kemudian jika orang tuanya itu meninggal kelak hartanya akan jatuh ke tangan atau akan menjadi hak dari cucu-cucu tadi, bukan jatuh ke tangan anak pewaris yang masih hidup. Untuk itu, mestinya anak pewaris yang masih hidup hanya bisa menutup hak waris dari anaknya sendiri terhadap harta warisan kakeknya, yaitu orang tua ayahnya dikarenakan ayah tersebut masih hidup, sedangkan cucu-cucu yang lain ayahnya sudah mati, sehingga tidak ada lagi yang membatasi hubungan antara dia dengan kakeknya tersebut.

Akan tetapi, jika dihubungkan dengan sifatnya yang diskriminatif, yakni hanya anak laki-laki saja yang menutup hak waris cucu-cucu yang berasal dari anak-anak pewaris yang lain, sedangkan anak perempuan tidak, maka dapat diduga bahwa mungkin sekali hal tersebut dikaitkan dengan kewajiban anak laki-laki tersebut terhadap cucu-cucu tadi dalam hal perwalian, dimana ia bertanggung

jawab terhadap cucu-cucu itu dalam segala halnya sampai mereka telah dewasa (jika laki-laki) atau sudah berkeluarga (jika perempuan). Jika ini yang menjadi alasan, kelemahannya adalah bahwa masalah perwalian (paman terhadap keponakannya) seharusnya tidak sampai menghapus hak waris dari cucu-cucu tersebut. Seyogyanya perwalian hanya diarahkan pada kewajiban untuk mengurus harta warisan yang mereka peroleh dari warisan kakeknya tersebut, agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemeliharaan dan biaya hidup mereka, jadi bukan untuk menghapus hak waris.

Hazairin dan KHI dalam menentukan ahli waris berorientasi pada sistem kekeluargaan yang bilateral, jadi tidak ada masalah yang berhubungan dengan diskriminasi dalam menentukan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam perolehan warisan benar-benar dapat terwujud, dan juga tidak mengenal pembatasan dalam penggantian ahli waris, sehingga keadilan dan kemaslahatan antar kerabat dalam perolehan harta warisan benar-benar dapat terwujud, dan ini dapat dipandang sebagai nilai lebih dari teori Hazairin dan KHI. Hanya saja, kelemahan KHI dibanding Hazairin adalah pertama tidak mencantumkan bibi sebagai ahli waris, yang berarti tidak memberikan kesempatan kepada bibi untuk memperoleh warisan dari keponakannya, sehingga sifat diskriminasinya tetap masih ada, kedua pengaturan ahli waris pengganti terlalu simpel dan umum (hanya dalam 1 pasal), sehingga membuka peluang untuk ditafsirkan berbeda dengan makna yang sesungguhnya, dan berpotensi melahirkan putusan yang saling berdisparitas, dan ketiga setengah hati (ragu-ragu) dalam menentukan besarnya bagian ahli waris pengganti.

Seharusnya, Pasal 185 ayat (2) rumusannya adalah “bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang ia gantikan”, seperti halnya mawali dalam hukum kewarisan Hazairin, jadi bukan hanya sekedar menentukan batas maksimalnya saja yaitu “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Sebab kata sederajat membuka peluang timbulnya interpretasi yang berbeda-beda, yang juga bermuara pada lahirnya putusan yang saling berdisparitas. Walau konsekuensinya bagian cucu dari anak laki-laki dimungkinkan lebih besar dari bagian anak perempuan pewaris, dan ini dapat dipandang sebagai titik lemah dari kewarisan Hazairin, sehingga banyak yang keberatan.

## **2. Kedudukan dan Hak Waris Ayah**

Mengenai kedudukan dan hak waris ayah dalam hal pewaris tidak mempunyai anak atau saudara, keunggulan KHI di sini ialah ada kepastian tentang kedudukan ayah yakni sebagai dzawil furudl dengan memperoleh bagian  $\frac{1}{3}$  harta sesuai ketentuan Pasal 177 KHI. Kelemahannya ialah tidak ada uraian/penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana jika ayah hanya mewaris bersama ibu, apakah ia akan berbagi lagi atas  $\frac{1}{3}$  sisa harta, atau semua sisa harta menjadi miliknya sendiri jika ia diperkenankan juga menempati kedudukan sebagai asabah selain sebagai dzawil faraidl. Dalam teori Syafi'i, di sini ayah akan meenempati kedudukan yang bervariasi, yakni sebagai dzawil furudl dalam hal bagian kewarisan melebihi angka satu (aul), sebagai asabah jika harta warisan mencukupi untuk itu, dan sebagai dzawil faraidl sekaligus asabah jika bersama cucu

perempuan dari anak laki-laki. Keunggulan teori Syafi'i di sini ialah ada jaminan kepastian bahwa ayah pasti akan mendapat hak waris, dan kelemahannya adalah bahwa posisi atau kedudukan ayah tidak pasti atau tidak menentu. Sedangkan Hazairin menempatkan ayah sebagai dzawul qarabat. Keunggulannya adalah kedudukan ayah bersifat pasti baik pada keutamaan kedua maupun ketiga. Kelemahannya ialah tidak ada jaminan kepastian tentang hak waris bagi ayah sesuai sifat kedudukannya sebagai dzawul qarabat.

### 3. Arti Kalalah

Dalam surat an Nisa ayat 12 dan 176 yang mengatur perolehan hak waris bagi saudara terdapat kata "kalalah". Syafi'i dan kalangan ahlussunnah yang kemudian diikuti oleh KHI, mengartikan kata kalalah tersebut berbeda satu dengan yang lain, baik dari sisi keadaan pewaris maupun dari sisi peruntukannya bagi para ahli waris. Dari sisi keadaan pewaris, ayat 12 diartikan pewaris mati dengan tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai anak namun diwarisi oleh saudara, sedangkan ayat 176 diartikan pewaris mati dengan tidak mempunyai anak (ayah tidak disebut). Dari sisi peruntukannya, ayat 12 diperuntukkan bagi saudara seibu, sedangkan ayat 176 diperuntukkan bagi saudara sekandung atau seayah. Sebaliknya Hazairin mengartikan kalalah pada kedua ayat tersebut sama, yaitu pewaris mati tidak mempunyai anak namun diwarisi oleh saudara, dan diperuntukkan bagi semua saudara yakni sekandung, seayah, dan seibu. Hazairin membedakan kedua ayat tersebut hanya dari sisi keadaan pewaris, yakni ayat 12

saat pewaris masih mempunyai ayah, sedangkan ayat 176 saat pewaris sudah tidak lagi mempunyai ayah.

M. Quraish Shihab walau pendiriannya sama dengan mayoritas ulama ahli tafsir, namun ia sendiri mengakui ada pendapat yang berbeda-beda mengenai arti kalalah. Ia mengatakan ada yang memahaminya dalam arti pewaris mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, ada yang memahaminya dalam arti pewaris mati tanpa meninggalkan ayah saja, dan ada pula yang memahaminya dalam arti tanpa meninggalkan anak saja. Selain itu ada juga yang memahami ayat tersebut hanya melihat dari sudut pewaris atau keadaan pewaris, dan ada pula yang melihat dari sudut ahli waris<sup>75</sup>.

Untuk dapat menganalisa/mengungkap keunggulan dan kelemahan masing-masing teori tersebut, maka terlebih dahulu harus dikemukakan arti hakiki dari kata kalalah pada kedua ayat tersebut, yakni arti yang tidak dipengaruhi oleh faktor atau kondisi lain yang membentuk atau mewarnainya.

Sajuti Thalib menafsirkan an Nisa ayat 12 sebagai berikut:<sup>76</sup>

*Dan bagi kamu (kamu-kamu) laki-laki seperdua dari harta peninggalan isteri-isteri kamu (kamu-kamu) kalau mereka tidak mempunyai anak (walad), maka jika ada bagi mereka itu anak (walad) maka bagi kamu (kamu-kamu) seperempat dari harta peninggalan mereka, sesudah pengeluaran wasiat yang diwasiatkannya atau hutang; dan bagi mereka seperempat dari harta peninggalan kamu kalau tidak ada bagi kamu anak (walad), maka jika ada bagi kamu anak (walad) maka bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalan kamu, sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang; dan jika ada seorang laki-laki diwarisi secara penuh (kalalah) atau seorang perempuan, sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka setiap mereka itu memperoleh seperenam, maka jika ada mereka itu lebih banyak daripada demikian maka mereka*

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2000, hal. 349.

<sup>76</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 19.

*bersekutu (syurakaa') untuk sepertiga, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang, pengeluaran yang tidak mendatangkan kemudharatan (kesempitan), demikianlah ketentuan Allah; dan Allah itu mengetahui lagi penyantun.*

Sedangkan ayat 176 menurut Sajuti Thalib, tafsir atau terjemahannya adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

*Mereka minta fatwa kepada engkau; katakanlah, hai Muhammad, Allahlah yang memberi fatwa kepada kamu mengenai hal kalalah itu, jika seseorang manusia celaka tidak ada baginya walad, dan baginya ada seseorang saudara perempuan maka bagi saudara perempuan itu seperdua harta peninggalannya, dan saudara laki-laki itulah yang akan mewarisi saudara perempuannya kalau tidak ada bagi saudara perempuan itu walad; maka jika ada saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya duapertiga harta peninggalan, dan jika ada mereka itu saudara-saudara yang terdiri dari laki-laki dan perempuan maka bagi yang seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan; Allah menerangkan hal tersebut kepada kamu agar kamu jangan tersesat, dan Allah itu mengetahui segala sesuatunya.*

Tafsir atau terjemahan yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib tersebut pada dasarnya sama atau tidak berbeda dengan tafsir atau terjemahan yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus. Menurut Mahmud Yunus, an Nisa ayat 12 terjemahannya adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

*Jika seorang laki-laki diwarisi sebagai kalalah (orang punah) atau seorang perempuan dan baginya ada saudara laki-laki atau perempuan maka untuk tiap-tiap seorang di antara keduanya, 1/6. Kalau mereka itu (saudara-saudara) lebih banyak daripada itu (seorang), maka mereka berserikat pada 1/3 . . .*

Sedangkan an Nisa ayat 176 menurut Mahmud Yunus terjemahannya adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

*Katakanlah, Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah (orang punah). Kalau seorang manusia telah meninggal, tidak ada baginya anak dan baginya*

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 32.

<sup>78</sup> Mahmud Yunus, *Pembahasan Umum Seminar Hukum Waris Nasional*, BPGH-Dep Keh RI, Jakarta, 1963, hal. 286.

<sup>79</sup> *Ibid*.

*ada saudara perempuan, maka untuknya  $\frac{1}{2}$  dari peninggalan saudara laki-laki juga mewarisi saudara perempuan jika tak ada anak bagi saudara perempuan itu. Kalau saudara perempuan itu dua orang, maka untuknya  $\frac{2}{3}$  dari peninggalan. Kalau ada beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.*

Mahmud Yunus lebih lanjut mengatakan bahwa dalam ayat 12 tidak disebut ayah masih hidup atau sudah mati.<sup>80</sup> Jadi sama halnya dengan ayat 176. Dengan demikian maka kata *kalalah* pada kedua ayat tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu pewaris mati dengan tidak meninggalkan anak, tetapi diwarisi oleh saudaranya.

Untuk memahami lebih lanjut arti dan makna *kalalah* pada kedua ayat tersebut secara lebih jelas, maka harus dipelajari sejarah atau latar belakang historis diturunkannya kedua ayat *kalalah* itu. Dari kedua ayat tersebut yang pertama kali diturunkan adalah ayat 12, bersamaan dengan ayat 11, yakni pada awal tahun ke-4 atau tepatnya beberapa waktu sesudah terjadinya perang Uhud yakni pada tanggal 15 Syawal tahun ke-3 Hijriah.<sup>81</sup>

Ada dua riwayat yang menceritakan latar belakang turunnya ayat 12, yaitu Hadits Saad bin Rabi dan Hadits Abdurrahman (saudara Hussain bin Tsabit). Dalam Hadits Saad diceritakan bahwa Saad meninggal dunia saat menyertai Nabi Muhammad dalam perang Uhud, meninggalkan janda dan dua orang anak perempuan dan seluruh harta Saad diambil oleh Jabir (saudara laki-laki Saad). Hal tersebut dilaporkan oleh janda Saad kepada Nabi maka turunlah ayat 11 dan 12.<sup>82</sup> Dan dalam Hadist Abdurrahman diceritakan bahwa Abdurrahman meninggal

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Sajuti Thalib, *op.cit.*, hal. 46.

<sup>82</sup> Qomaruddin Sholeh, et al, *Asbabun Nuzul*, Diponegoro, Bandung, 1984, hal. 124.



dunia dengan meninggalkan janda (Ummu Kuhhah) dan 5 orang putri, kemudian datanglah keluarga suaminya mengambil harta bendanya, dan hal tersebut oleh Ummu Kuhhah diadukan kepada Nabi, maka turunlah an Nisa ayat 11 yang menegaskan hak waris bagi anak-anak perempuan tersebut, dan ayat 12 yang menegaskan hak waris untuk isteri.<sup>83</sup>

An Nisa 176 turun pada awal tahun ke-5 Hijrah.<sup>84</sup> Ada beberapa Hadits yang menceritakan tentang latar belakang sejarah turunnya ayat ini, salah satu diantaranya adalah:<sup>85</sup>

*Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah SAW menengok Jabir yang sedang sakit, berkatalah Jabir: "Ya Rasulullah, Bolehkah saya berwasiat memberikan sepertiga hartaku untuk saudara-saudaraku (yang wanita)". Sabda Rasulullah: "Baik". Ia berkata lagi: "Kalau setengahnya?" Jawab Rasul: "Baik pula". Kemudian Rasulullah pulang. Dan tiada lama kemudian beliau datang lagi ke rumah Jabir sambil bersabda: "Aku kira kau tidak akan mati karena penyakitmu ini dan Allah telah menurunkan ayat kepadaku yang menjelaskan pembagian waris bagi saudara-saudara wanita yaitu sebesar dua pertiga (tsulutsain).*

Dalam Hadist yang lain diceritakan sebagai berikut:<sup>86</sup>

*Diriwayatkan oleh Al Nassa'i dari Abi Al Zubair dari Jabir berkata Jabir: Saya mendapat sakit, maka datang Rasulullah SAW kepadaku lalu aku berkata: Ya Rasulullah, saya ingin mewasiatkan sepertiga (hartaku) kepada saudara-saudara perempuanku; berkata Rasulullah: Baik; aku berkata lagi: dengan setengah; berkata Rasulullah: baik; kemudian Rasulullah keluar (sebentar) lalu masuk (kembali) ke tempat Jabir, dan Rasulullah berkata: saya tidak melihat bahwa engkau akan meninggal karena sakitmu (ini), bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan (ayat Al Qur'an) dan menjelaskan mengenai harta (warisan) untuk saudara-saudara perempuanmu itu, mereka mendapat dua pertiga.*

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Sajuti Thalib, *op. cit.*

<sup>85</sup> Qomaruddin Saleh, *op. cit.*, hal. 169.

<sup>86</sup> Sajuti Thalib, *op. cit.*, hal. 49.

Dari kedua Hadits tersebut dapat dipahami bahwa kata kalalah pertama dimuat dalam ayat 12, dan saat itu kalalah diartikan pewaris mati tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai anak namun diwarisi oleh saudara atau saudara-saudaranya. Satu atau dua tahun kemudian, Allah menurunkan an Nisa ayat 176, dan disitu tercantum lagi kata “kalalah”. Namun pada ayat 176 ada kalimat yang berbunyi, “Jika mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang kalalah, katakanlah bahwa Allah memberi fatwa tentang arti kalalah yaitu orang yang mati dengan tidak ada baginya anak namun diwarisi saudaranya”.

Dicantulkannya kalimat seperti itu dalam ayat 176 harus diduga bahwa Allah menolak arti kalalah seperti yang dipahami terhadap an Nisa ayat 12 saat itu, dan memberikan arti kallaah yang hakiki melalui ayat 176. Untuk itu, seyogyanya kalalah dalam ayat 12 diartikan sama dengan kalalah dalam ayat 176. Sebab kalau saja kalalah dalam ayat 12 sudah ditafsirkan secara benar, atau dengan kata lain jika Allah menyetujui arti kalalah seperti yang ditafsirkan oleh para ahli terhadap ayat 12, tentu di dalam ayat 176 Allah tidak lagi memberikan fatwaNya tentang arti kalalah.

Oleh karena itu adalah kurang pas jika kata “kalalah” dalam ayat 12 dipahami/diartikan berbeda dengan kalalah dalam ayat 176 baik mengenai keadaan pewaris maupun peruntukannya bagi para ahli waris. Perbedaan antara kedua ayat tersebut memang ada, tetapi bukan terletak pada arti kalalahnya melainkan terletak pada perbedaan bagian (*furudl*) yang ditetapkan untuk para saudara tersebut sebagai ahli waris. Dalam ayat 12 tidak dibedakan antara saudara laki-laki dan perempuan, dan mereka akan mendapat  $\frac{1}{6}$  jika hanya seorang dan

berbagi dalam  $\frac{1}{3}$  jika ada 2 orang atau lebih, sedangkan pada ayat 176 ada perbedaan bagian yang ditetapkan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yakni 2:1. Lengkapnya adalah, jika saudara itu perempuan hanya 1 orang bagiannya  $\frac{1}{2}$ , jika ada 2 orang atau lebih mereka berbagi atas  $\frac{2}{3}$  bagian, dan jika mereka terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan maka bagian saudara laki-laki 2 kali bagian saudara perempuan.

Dengan demikian berarti kalalah dalam ayat 12 dan kalalah dalam ayat 176 pada dasarnya mempunyai arti yang sama, yaitu pewaris mati tidak mempunyai anak namun diwarisi oleh saudaranya. Akan tetapi substansi atau isinya berbeda seperti apa yang telah dikemukakan di atas. Oleh karena substansinya berbeda maka lingkup penerapan atau peruntukannya juga berbeda, yakni ayat 12 seyogyanya diterapkan pada saat pewaris masih mempunyai ayah (ibu boleh ada dan boleh tidak ada), sedangkan ayat 176 diterapkan saat pewaris sudah tidak mempunyai ayah.

Cara penerapan yang demikian sangat sejalan dengan garis hukum an Nisa ayat 11 yang menetapkan bahwa ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  jika pewaris tidak meninggalkan anak namun mempunyai beberapa saudara. Sebagai contoh, jika pewaris mempunyai lebih dari 2 orang saudara, ibu, dan ayah, maka perhitungannya adalah ibu  $\frac{1}{6}$ , 2 saudara atau lebih  $\frac{1}{3}$ , sisanya 3 bagian untuk ayah selaku asabah. Dan bagian ayah juga tidak kurang dari  $\frac{1}{3}$  jika pewaris hanya mempunyai seorang saudara. Perhitungannya adalah ibu  $\frac{1}{3}$  ( $\frac{2}{6}$ ), ayah selaku dzawil furudl mendapat  $\frac{1}{3}$  ( $\frac{2}{6}$ ), saudara  $\frac{1}{6}$ , dan sisanya  $\frac{1}{6}$  bagian diberikan lagi kepada ayah selaku asabah. Dengan pembagian ini, bagian yang

ditetapkan untuk ayah dan ibu sama sekali tidak terlanggar, dalam arti tidak berkurang dengan hadirnya saudara yang berkunkuren dengan ayah. Dengan demikian ayat 12 cocok diterapkan saat pewaris mempunyai ayah.

Adapun ayat 176 tidak cocok diterapkan saat ayah pewaris masih hidup kecuali dengan menyingkirkan hak waris saudara, karena bagian yang ditetapkan untuk saudara yang sedemikian itu tidak memungkinkan bagi saudara untuk berkunkuren dengan ayah, sebab ada kemungkinan keberadaan saudara akan merugikan ayah, apalagi jika saudara itu perempuan. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari ibu, seorang saudara perempuan, dan ayah, perhitungannya adalah ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{2}{6}$ , seorang saudara perempuan  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{3}{6}$ , ayah mendapat sisa yaitu  $\frac{1}{6}$ , sehingga lebih kecil dari bagian ibu apalagi saudara, atau jika diselesaikan dengan cara aul akibatnya bagian ayah berkurang dari  $\frac{2}{6}$  menjadi  $\frac{2}{7}$ . Ini jelas merugikan ayah. Demikian pula jika saudara-saudara tersebut laki-laki dan jumlahnya lebih dari seorang, hal ini dapat menimbulkan kekacauan dalam penerapan an Nisa ayat 11 dalam arti apakah bagian ayah disamakan dengan bagian saudara laki-laki. Oleh karena itu an Nisa ayat 176 tidak cocok diterapkan dalam hal ayah masih hidup, dan pewaris mempunyai saudara. Cara untuk memberikan hak waris kepada saudara dalam hal ini hanyalah dengan menerapkan ayat 12 jika ayah masih hidup, sehingga saudara dimungkinkan untuk berkunkuren dengan ayah. Di sini tidak dibedakan apakah saudara itu sekandung, atau seayah, atau seibu saja.

Paham inilah yang dianut/diterapkan oleh Hazairin, hanya saja kelemahan teori Hazairin adalah:

Pertama tidak diterima oleh kalangan ulama ahli faraidl antara lain karena (1) ada kesan bahwa ia mengartikan an Nisa ayat 12 pewaris mempunyai ayah, dan ayat 176 pewaris tidak mempunyai ayah, dan (2) bertentangan dengan Ijma.

Kedua ada kemungkinan saudara selaku dzawil furudl pada an Nisa ayat 12 mendapat warisan sedangkan ayah tidak mendapatkan warisan, ini dapat dilihat pada kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari duda, 2 orang saudara, ibu dan ayah. Sesuai ketentuan an Nisa ayat 11 dan 12, maka duda mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{3}{6}$ , ibu  $\frac{1}{6}$ , 2 orang saudara mendapat  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{2}{6}$ , jumlah  $\frac{6}{6}=1$ . Ayah selaku asabah tidak mendapat apa-apa, karena semua harta sudah terbagi habis. Sebenarnya kelemahan seperti ini tidak hanya dialami atau terjadi pada teori Hazairin, tetapi juga terjadi pada teori Syafi'i dan Ahlussunnah pada umumnya yang diikuti oleh KHI, seperti pada kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari janda, 2 orang anak perempuan, ibu dan ayah. Kasus ini jika diselesaikan berdasarkan ketentuan an Nisa ayat 11 dan 12 maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{3}{24}$ , 2 orang anak perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{16}{24}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{4}{24}$ , jumlah  $\frac{23}{24}$ , dan ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{4}{24}$ , jumlah  $\frac{27}{24}$ , jumlah bagian dari ahli waris melebihi asal masalah atau dengan kata lain harta warisan tidak cukup untuk memenuhi bagian dari semua ahli waris. Atau pada kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari duda, ibu, 2 saudara perempuan kandung (an Nisa ayat 176), 2 saudara seibu (an Nisa ayat 12). Jika kasus ini dihitung berdasarkan an Nisa 11, 12 dan 176 versi Syafi'i dan KHI maka duda mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{3}{6}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ , 2 orang saudara perempuan kandung  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{4}{6}$ , 2 orang saudara seibu mendapat  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{2}{6}$ , dan jumlahnya  $\frac{10}{6}$ , jadi lebih besar dari asal masalah.

Penyelesaian kedua kasus pada contoh tersebut oleh Syafi'i dan KHI dilakukan dengan aul, yaitu suatu jenis penyimpangan terhadap ketentuan umum kewarisan sebagaimana diatur dalam an Nisa ayat 11, 12 dan 176. Di sini, kasus yang pertama diselesaikan dengan cara merubah asal masalah dari 24 menjadi 27 untuk itu semua bagian ahli waris dzawil furudl dikurangi sehingga bagian janda dari  $\frac{3}{24}$  menjadi  $\frac{3}{27}$ , 2 anak perempuan dari  $\frac{16}{24}$  menjadi  $\frac{16}{27}$ , ibu dari  $\frac{4}{24}$  menjadi  $\frac{4}{27}$ , dan ayah  $\frac{4}{24}$  menjadi  $\frac{4}{27}$ . Sedangkan kasus kedua penyelesaiannya adalah mengubah asal masalah 6 menjadi 10, sehingga bagian duda berkurang dari  $\frac{3}{6}$  menjadi  $\frac{3}{10}$ , ibu dari  $\frac{1}{6}$  menjadi  $\frac{1}{10}$ , 2 orang saudara perempuan sekandung dari  $\frac{4}{6}$  menjadi  $\frac{4}{10}$ , dan 2 orang saudara seibu dari  $\frac{2}{6}$  menjadi  $\frac{2}{10}$ . Pembagian yang dilakukan dengan cara menyimpang dari ketentuan umum (aul) ini menurut Fatchur Rahman<sup>87</sup>, pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah mendapat persetujuan dari Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Sajuti Thalib<sup>88</sup>, adalah Ali bin Abi Thalib.

Adanya ketentuan tentang aul ini dapat dipandang sebagai nilai lebih (keunggulan) dari teori Syafi'i dan KHI, dan sekaligus merupakan kelemahan dari teori Hazairin yang tidak menerapkan aul untuk ayah jika berkedudukan sebagai asabah pada keutamaan kedua, sehingga dapat tersingkir oleh keberadaan saudara jika harta warisan telah terbagi habis oleh ahli waris dzawil furudl.<sup>89</sup> Karena bagaimanapun juga, ayah selaku kerabat terdekat, sama dekatnya dengan ibu,

<sup>87</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1981, hal. 409.

<sup>88</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 102.

<sup>89</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1982, hal. 55.

berdasarkan an Nisa ayat 7 dan 8 seharusnya diberi bagian dari harta warisan tersebut. Berbeda halnya dengan KUH Perdata yang menempatkan orang tua (ibu dan ayah) sebagai ahli waris golongan II, wajar tidak mendapat warisan selama ahli waris golongan I (anak dan janda/duda) masih ada.

Teori Hazairin tidak menerapkan aul (bagi ayah selaku dzawul qarabat) bukan berarti ia mengabaikan arti keberadaan ayah, yang jika teorinya tentang an Nisa ayat 11, 12 dan 176 diterapkan secara konsisten akan menimbulkan akibat dimana ayah tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan anaknya karena semua harta sudah terbagi habis diantara ahli waris dzawil furudl. Namun ia mempunyai cara lain yakni melalui wasiat seperti diamanatkan dalam al Baqarah ayat 180 yang mewajibkan kepada seseorang untuk berwasiat menjelang kematiannya kepada ayah, ibu dan keluarga dekatnya dengan cara yang patut. Kelemahan teori ini adalah (1) menurut mayoritas ulama ahli tafsir dan ahli faraidl ayat ini telah dihapus oleh ayat-ayat kewarisan. Hanya saja Hazairin tetap berpendirian bahwa ayat-ayat al Qur'an tidak saling menghapus satu dengan yang lain karena Qur'an pada dasarnya tidak mengenal nasikh dan mansukh, (2) lembaga wasiat tidak secara pasti dapat memberikan jaminan bahwa ahli waris yang tidak mendapat bagian akan selalu dapat memperolehnya melalui wasiat berdasarkan al Baqarah 180, atau al Baqarah 240, karena lazim terjadi pewaris ketika hidupnya lupa membuat wasiat. Prediksi inilah yang mendorong lahirnya lembaga wasiat wajibah antara lain di Mesir. KHI juga mengenal wasiat wajibah, tetapi tidak ditujukan kepada kerabat melainkan kepada anak dan orang tua angkat, dalam kasus seperti ini maka ayah terpaksa harus menerima nasibnya.

Ketiga tidak ada perbedaan dalam perolehan hak waris antara saudara sekandung di satu sisi dengan saudara seayah atau seibu di sisi yang lain. Hal ini jelas merugikan saudara sekandung, karena saudara sekandung lebih dekat hubungannya dengan pewaris daripada saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu KUH Perdata membedakan ketiga jenis hubungan persaudaraan tersebut, dan memberikan kedudukan yang lebih baik kepada saudara sekandung, sehingga hak warisnya lebih besar daripada saudara seayah/seibu (Pasal 857). Dalam pemahaman teori Syafi'i dan KHI terhadap an Nisa ayat 12 dan 176, saudara sekandung hanya lebih diutamakan daripada saudara seayah, sehingga keberadaannya menutup hak waris saudara seayah tersebut, namun tidak terhadap saudara seibu. Dan terhadap saudara seibu ini walau porsi untuk saudara kandung mungkin lebih besar, tetapi ada kalanya saudara sekandung tidak kebagian harta warisan saat mewaris bersama saudara seibu yang disertai ahli waris-ahli waris dzawil furudl lainnya.

Syafi'i dan KHI yang mengikuti paham Ahlussunah tidak memberikan hak waris kepada saudara jika pewaris mati tidak berketurunan tetapi ayahnya masih hidup. Selanjutnya teori ini membedakan kedua ayat tersebut baik dari sisi keadaan pewaris maupun dari sisi peruntukannya bagi ahli-ahli waris sebagaimana telah dikemukakan di atas. Kelemahan teori Syafi'i dan KHI ini pertama dari sudut bahasa, yakni, dalam arti hakiki pada kedua ayat tersebut tidak terdapat kata sekandung, seayah, atau seibu, sehingga tidak ada perbedaan jenis hubungan persaudaraan dari kedua ayat tersebut, dan juga tidak terdapat kata atau kalimat yang menerangkan tentang ayah pewaris masih hidup atau sudah mati. Dengan



demikian penafsirannya bersifat majasi (tidak yang sebenarnya). Penafsiran yang majasi tersebut menurut Hazairin<sup>90</sup> berasal dari paham Ali, kemudian menurut al Qurthuby dan Rasjid Rida telah disepakati (Ijma) oleh ulama dan para sahabat.<sup>91</sup> Kedua, dari sudut isi (substansi) teori Syafi'i dan KHI ini mengandung kelemahan baik secara sosiologis, filosofis maupun dari sudut logika yuridisnya karena: (1) tidak relevan dengan sistem kekeluargaan yang berlaku karena masyarakat Arab yang pada waktu itu dikenal sebagai masyarakat dengan sistem keturunan yang patrilineal. Dalam masyarakat patrilineal saudara seibu jarang ditemui, yang terbanyak adalah saudara sekandung dan seayah. Di sisi yang lain ayat 12 yang diperuntukkan bagi saudara seibu diturunkan lebih dahulu dari pada ayat 176 yang diperuntukkan bagi saudara sekandung dan seayah. Jadi sangat tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Islam pada saat itu, Paham dari teori ini baru dipandang relevan jika ayat 176 diturunkan lebih dahulu daripada ayat 12, namun ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah atau asbabun nuzulnya; (2) dalam kasus-kasus tertentu bertentangan dengan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat pada kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari ibu, duda, 2 saudara seibu dan 2 saudara laki-laki sekandung. Jika dihitung menurut teori ini 2 saudara laki-laki sekandung tidak mendapat waris karena harta sudah terbagi habis, sedangkan saudara seibu mendapat 2/6 bagian. Ini jelas sangat janggal dan juga tidak adil, karena betapapun juga saudara kandung lebih dekat hubungannya dengan pewaris daripada saudara seibu. Teori Syafi'i menyadari betul akan hal ini, untuk itu

---

<sup>90</sup> Hazairin, *Seminar Hukum Waris Nasional*, op. cit, hal. 343.

<sup>91</sup> Mahmud Yunus, *op. cit*, hal. 289.

dalam penerapannya dilakukan penyimpangan dengan cara menggabungkan saudara sekandung dan seibu tersebut dan mereka akan berbagi sama rata atas 2/6 bagian. Penyimpangan ini dapat dibenarkan berdasarkan istihsan. Kelemahannya adalah bahwa teori ini dipandang tidak konsisten dengan penafsiran mereka sendiri. Dalam KHI tidak ada satu pasalpun yang menyinggung soal ini, namun dapat diduga mereka akan mengikuti doktrin Syafi'i; (3) adanya fatwa dari Allah tentang arti kalalah dalam ayat 176 dapat merupakan indikasi bahwa ada yang merasa tidak puas dengan arti kalalah pada ayat 12 seperti yang dipahami saat itu, dan bertanya kepada Rasul tentang arti kalalah yang sebenarnya, dari pertanyaan itulah maka diturunkan ayat 176.<sup>92</sup> Jika riwayat ini benar, maka tentu sangat tidak logis arti kalalah dalam ayat 176 dibedakan dengan arti kalalah dalam ayat 12 seperti yang dipahami oleh Syafi'i dan KHI. Ini merupakan sisi lemah yang paling nyata dari teori ini, dan sekaligus merupakan nilai lebih (keunggulan) dari teori Hazairin yang menentukan sebaliknya.

#### 4. Rad dan Gharawain

Tentang sisa kecil harta warisan (rad), kelemahan teori Syafi'i adalah tidak memberikan kepada duda atau janda sisa harta yang dinamakan rad. Ini jelas tidak adil, sebab jika harta warisan tidak cukup karena bagian dari sejumlah ahli waris yang telah ditentukan lebih besar daripada harta warisannya seperti yang terjadi pada kasus aul, hak duda atau janda ikut dikurangi guna mencukupkan bagian ahli waris-ahli waris tersebut, tetapi saat harta warisan lebih besar daripada

---

<sup>92</sup> Sajuti Thalib, *op. cit.*

bagian ahli waris yang ada sehingga ada sisanya, duda atau janda tidak ikut menikmatinya, karena sisa bagi (rad) tersebut hanya diberikan kepada ahli waris dzawil furudl yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Berbeda dengan Hazairin, yang tidak mengatur secara khusus mengenai aul dalam teorinya.

Tentang gharawain, kelemahan teori Syafi'i dan KHI adalah memberikan kepada ibu  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta setelah dikurangi bagian duda atau janda, ini jelas bertentangan dengan ketentuan umum kewarisan sebagaimana ditentukan dalam an Nisa 11 yang menentukan bahwa bagian ibu adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta, bukan  $\frac{1}{3}$  dari sisa. Namun kelemahan ini sekaligus dapat dipandang sebagai nilai lebih dari teori Syafi'i dan KHI karena tetap konsisten mempertahankan prinsip dua berbanding satu dalam perolehan warisan antara ahli waris laki-laki (ayah) dan ahli waris perempuan (ibu). Dalam kasus gharawain, jika ketentuan umum an Nisa ayat 11 dilaksanakan sesuai ketentuannya, maka akan diperoleh kenyataan bahwa bagian ayah akan lebih kecil daripada bagian ibu.

Hazairin tetap konsisten melaksanakan ketentuan umum an Nisa ayat 11. Ini dapat dipandang sebagai nilai lebih teori Hazairin, praktik Khalifah Umar tidak diberlakukan, walau terpaksa harus tidak konsisten pada prinsip dua berbanding satu. Ini dapat dipandang sebagai titik lemah dari teori Hazairin.

##### **5. Anak perempuan atau cucu perempuan menutup hak waris saudara**

Berbeda dengan paham Syafi'i yang berpendirian bahwa kata walad dalam surat an Nisa ayat 12 dan 176 pengertiannya hanya terbatas pada anak laki-laki sejalan dengan pendapat mayoritas Ulama, sebaliknya Hazairin dan KHI

(Pasal 181) berpendapat bahwa anak perempuan bisa menghibab karena berpendapat bahwa kata walad pengertiannya tidak hanya terbatas pada anak laki-laki, tetapi mencakup pula anak perempuan sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas. Teori Hazairin dan KHI ini sejalan dengan pendirian MA RI yang tampak dari tiga putusannya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sebagai konsekuensinya maka cucu yang berasal dari anak perempuan dapat pula menutup hak waris bagi saudara (Pasal 185 ayat 11) jis Pasal 181 atau 182 KHI).

Keunggulan teori ini adalah bahwa dengan tertutupnya hak waris saudara maka bagian untuk anak perempuan dan cucu dari anak perempuan menjadi lebih banyak, dan dengan bagian warisan yang banyak itu diasumsikan mereka akan memperoleh bekal hidup yang relatif lebih memadai karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada kekurangan sejalan dengan HR Saad bin Abi Waqqash. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa teori ini bertentangan dengan HR Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad tentang janda Saad bin Rabi dan Hadits tentang janda Abdurrahman tersebut di atas, karena pada kedua Hadits itu Nabi memberikan kepada saudara bagian atas harta warisan saudaranya pada hal pewaris mempunyai anak perempuan, namun demikian hal ini masih dapat ditelaah dari dua sisi, yaitu pertama jika memang benar-benar terjadi pertentangan, maka menurut kaedah Fiqh hal tersebut dapat dibenarkan jika dilakukan dalam rangka mewujudkan kepentingan atau kemaslahatan yang lebih besar, yakni persamaan hak dan menghapus diskriminasi dalam penerapan an Nisa ayat 11 antara anak laki-laki dan anak perempuan, sesuai paham yang dianut selama ini.

Dan bagi kalangan Syiah meninggalkan atau mengesampingkan hadits dalam rangka menerapkan ketentuan kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat kewarisan, merupakan hal biasa. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa Syiah tidak menggunakan hadits yang memerintahkan untuk membagi habis harta warisan dikalangan ahli waris, furudl (bagian) kepada laki-laki yang terdekat dalam garis laki-laki, karena jika hadits ini digunakan akan merugikan cucu.<sup>93</sup>

Hadits dimaksud adalah HSR Bukhari dari Ibnu Abbas yang terjemahannya adalah: berikanlah bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.<sup>94</sup>

Kedua hukum Islam dalam menetapkan sesuatu kaedah atau norma lazimnya dilakukan secara bertahap, seperti hal larangan terhadap riba, khamar, dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan warisan, Komaruddin Shaleh et al menyatakan, bahwa orang Jahiliyah sebelum turun ayat kewarisan tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa,<sup>95</sup> sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi seorang saudara mengambil warisan saudaranya jika saudaranya itu mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki yang telah dewasa. Kebiasaan yang sudah sedemikian kuatnya itu tidak mungkin serta merta dihapus atau diubah secara spontan, melainkan harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan ketegangan. Dalam rangka itulah maka Rasul tetap memberikan bagian kepada saudara atas sisa harta sesudah dikurangi bagian anak perempuan menurut an Nisa 11 dan janda menurut an Nisa 12. Dalam

---

<sup>93</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 70-71.

<sup>94</sup> *Ibid*, hal 11 dan 12

<sup>95</sup> Qomaruddin Shaleh, *op. cit*, hal. 124.

hubungan ini, Hazairin berpendapat bahwa, “pemberian sisa kepada saudara waktu itu dapat diartikan tu'mah untuk keluarga dekat yang dalam kasus yang bersangkutan tidak mendapat bagian warisan sebagaimana dikehendaki oleh an Nisa ayat 8”<sup>96</sup>.

Selain itu harus disadari pula bahwa saat itu belum ada Ijtihad yang mengatur tentang pembagian sisa kecil harta setelah ahli waris mengambil bagiannya seperti pada kasus janda Saad dan janda Abdurrahman, menurut Hazairin al Qur'an sendiri tidak memberikan sesuatu garis hukum khusus atas sisa bagi itu<sup>97</sup>, sedangkan anak laki-laki yang berhak mewarisi harta sesuai an Nisa ayat 11, dan ayat 176 yang memberi hak kepada saudara atas sisa harta belum ada, atas dasar itulah maka Nabi memberikan sisa harta tersebut kepada saudara, sehingga dilihat dari sudut ini teori Hazairin dan KHI dapat diterima, walau tampak bertentangan dengan kedua Hadits tersebut.

## 6. Wasiat dan Hibah

Tentang wasiat, nilai lebih (keunggulan) KHI dibanding Syafi'i dan Hazairin adalah bahwa KHI mengenal wasiat wajibah, yakni wasiat yang adanya karena UU atau karena ketentuan KHI itu sendiri, bukan karena kehendak atau inisiatif dari pewaris semasa hidupnya. Melalui wasiat wajibah ini maka anak dan orang tua angkat yang tidak mempunyai hak waris dapat menikmati harta warisan pewaris. Kelemahan wasiat wajibah dalam teori KHI adalah hanya diperuntukkan

---

<sup>96</sup> Sajuti Thalib, *loc. cit*, hal. 46.

<sup>97</sup> Hazairin, *op. cit*, hal. 46.

kepada anak dan orang tua angkat, tidak kepada kerabat yang tidak mempunyai hak waris seperti bibi dan keturunannya.

Tentang hibah, nilai lebih (keunggulan) KHI dibanding Syafi'i dan Hazairin, pertama KHI membatasi besarnya hibah yakni maksimal  $\frac{1}{3}$  harta, karena pembatasan ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap ahli waris dari tindakan pewaris menghibahkan semua atau sebagian besar hartanya kepada orang-orang yang ia kehendaki dengan maksud agar harta tersebut kelak tidak diwarisi oleh para ahli waris yang tidak ia sukai, kelemahannya adalah lembaga ini bertentangan dengan otoritas bertindak seseorang terhadap harta pribadinya. Kedua, hibah orang tua kepada anak-anaknya diperhitungkan sebagai warisan. Ini dapat dipandang sebagai nilai lebih (keunggulan) KHI, karena lembaga ini dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan antara sesama anak pewaris dalam memperoleh manfaat dari harta warisan orang tuanya. Namun kelemahannya (1) tidak dijelaskan pemberian seperti apakah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan, apakah segala macam pemberian, (2) lembaga ini dapat menimbulkan kesan atau asumsi bahwa seakan-akan kewarisan itu dapat dilakukan saat pewaris masih hidup melalui lembaga ini, jika asumsi ini diterima, hal tersebut jelas dapat dipandang bertentangan dengan azas kewarisan ada karena adanya kematian, (3) jika pemberian orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan akan dapat menimbulkan akibat budaya saling memberi antar orang tua dan anak sebagai wujud tolong menolong dan kasih sayang akan menjadi hilang. Sebab seperti diketahui perolehan harta melalui pewarisan bersifat yuridis, sedangkan perolehan hak melalui hibah sifatnya tolong menolong dan kasih sayang antara pemberi dengan yang diberi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka sebagai penutup akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan KHI yang bercorak bilateral, telah berusaha menghapus atau menghilangkan diskriminasi dalam penentuan ahli waris melalui waris pengganti, namun secara keseluruhan, masih mengandung sifat diskriminasi karena tidak mencantumkan bibi sebagai ahli waris.
2. Sepanjang tidak ada penghalang kewarisan, ahli waris pengganti Pasal 185 KHI selalu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya selaku ahli waris dengan segala hak dan konsekuensinya seperti *plaatsvervulling* yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian maka kedudukannya bersifat pasti.
3. Pemberian porsi bagian sama besar kepada cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan pewaris sebagaimana dimaksud dalam Buku Pintar Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama PTA Sulawesi Selatan, seyogyanya dipandang sebagai penyimpangan, bukan penerapan garis hukum Pasal 185 ayat (2) KHI. Oleh karenanya, penggunaan istilah “berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KHI” dianggap tidak tepat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu, istilah yang seyogyanya dipergunakan adalah “Tidak menyalahi ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI”.



4. Persamaan dan perbedaan antara teori KHI, Syafi'i, dan Hazairin, dapat dirinci dalam beberapa hal pokok yaitu:
  - a. Penentuan ahli waris, KHI diskriminatif dalam menentukan ahli waris. Teori Syafi'i diskriminasi baik dalam menentukan ahli waris maupun penggantinya. Sedangkan Hazairin tidak mengenal diskriminasi dan pembatasan.
  - b. Penggolongan ahli waris, ketiga teori sama-sama menggolongkan ahli waris atas tiga golongan, yaitu KHI dzawil furudl, asabah dan ahli waris pengganti, Syafi'i dzawil furudl, asabah dan dzawil arham, dan Hazairin dzawul faraidl, dzawul qarabat dan mawali. Perbedaan antara KHI dan Hazairin terletak pada perbedaan antara dzawul qarabat dan asabah. Perbedaan antara KHI dan Syafi'i terletak pada perbedaan antara dzawil arham dan ahli waris pengganti. Perbedaan antara teori Syafi'i dan Hazairin terletak pada (1) perbedaan antara asabah dengan dzawul qarabat, karena asabah terbatas pada sejumlah kerabat tertentu di luar dzawil furudl dan dzawil arham, sedangkan dzawil qarabat meliputi semua kerabat selain dzawul faraidl, kecuali mereka yang tertutup oleh orang tuanya (ulul qurba), (2) perbedaan antara dzawil arham dan mawali. Perbedaan lain antara Syafi'i di satu sisi dengan KHI dan Hazairin di sisi yang lain adalah Syafi'i mengenal asabah ma'al ghairi, namun tidak dikenal dalam teori KHI dan Hazairin.

- c. Besarnya hak waris laki-laki dan perempuan, ketiga teori sama-sama mempertahankan porsi bagian kewarisan dua berbanding satu, yakni dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.
- d. Arti kalalah Surat an Nisa ayat 12 dan 176, dari segi keadaan pewaris, KHI dan Syafi'i mengartikan ayat 12 pewaris tidak mempunyai ayah dan anak, ayat 176 pewaris mempunyai anak namun ayah tidak disebut. Hazairin mengartikan ayat 12 pewaris masih mempunyai ayah, ayat 176 pewaris tidak lagi mempunyai ayah. Dari sisi peruntukannya, KHI dan Syafi'i, ayat 12 diperuntukkan bagi saudara seibu, ayat 176 bagi saudara sekandung, dan atau seayah. Hazairin, ayat 12 dan 176 untuk semua saudara (sekandung, seayah, seibu).
- e. Hijab, ketiga teori sama-sama mengenal hijab. Bedanya, (1) menurut teori Syafi'i anak laki-laki menghibab cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris yang lain, dalam teori KHI dan Hazairin itu tidak mungkin karena cucu adalah ahli waris pengganti atau mawali bagi mendiang orang tuanya, (2) menurut teori Syafi'i, dua anak perempuan menghibab cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, dalam teori KHI dan Hazairin itu tidak mungkin karena cucu perempuan tersebut adalah ahli waris pengganti atau mawali bagi mendiang orang tuanya, (3) menurut teori KHI dan Hazairin anak perempuan menghibab saudara pewaris, dalam teori Syafi'i itu tidak mungkin, (4) menurut KHI dan Hazairin cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan selaku ahli

waris pengganti atau mawali menghijab saudara pewaris, dalam teori Syafi'i itu tidak mungkin, (5) menurut teori Hazairin, anak atau saudara pewaris menghijab kakek dan nenek pewaris, dalam teori Syafi'i itu tidak mungkin karena kakek hanya terhijab oleh ayah dan nenek hanya terhijab oleh ibu. Dalam KHI tidak ada penjelasan.

- f. Tentang aul, KHI dan Syafi'i tetap memberikan hak waris kepada ayah dengan menggunakan aul sebagai solusi dalam hal terjadi jumlah faraidl melebihi angka satu. Hazairin hanya menggunakan aul dalam hal ayah berkedudukan sebagai dzawul faraidl pada keutamaan pertama, tidak dalam hal ayah berkedudukan sebagai dzawul qarabat pada keutamaan kedua dan ketiga.
- g. Tentang rad, KHI memberikan rad kepada semua ahli waris dzawil furudl, berbeda dengan Syafi'i dan Hazairin yang tidak memberikan rad kepada duda atau janda. Di luar konteks duda atau janda, perbedaan antara Hazairin di satu sisi dengan KHI dan Syafi'i di sisi yang lain adalah, (1) untuk keutamaan pertama, seorang anak perempuan dan ibu akan memperoleh rad dalam hal mewaris bersama ayah, dalam teori KHI dan Syafi'i itu tidak mungkin karena ayah berkedudukan ganda (dzawil furudl sekaligus asabah), (2) untuk keutamaan kedua menurut Hazairin hanya ibu yang memperoleh rad jika mewaris bersama saudara perempuan karena kedudukan ibu lebih utama, dalam teori KHI dan Syafi'i, ibu dan saudara sama-sama berhak atas rad dan mereka akan berbagi secara berimbang.

- h. Tentang gharawain, KHI dan Syafi'i sama-sama memberikan kepada ibu  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta setelah dikurangi bagian duda atau janda. Hazairin tetap memberikan kepada ibu  $\frac{1}{3}$  dari harta.
- i. Tentang al Musyarakah, Syafi'i dan Hazairin sama-sama memberikan hak waris kepada saudara sekandung. Bedanya adalah Syafi'i (1) melakukannya dengan cara menyimpang dari penafsirannya sendiri, dan (2) menggunakan an Nisa ayat 11 sebagai dasarnya, sedangkan Hazairin (1) sejalan dengan penafsirannya, dan (2) menggunakan an Nisa ayat 176 sebagai dasarnya. Dalam KHI hal tersebut tidak diatur atau tidak ada penjelasannya.
- j. Tentang kakek dan saudara, Dalam KHI, kakek adalah ahli waris langsung, namun tidak disebutkan kedudukan dan hak warisnya, sedangkan Syafi'i memberikan kedudukan yang lebih utama (prioritas) kepada kakek jika mewaris bersama saudara pewaris. Dalam teori Hazairin, kakek justru terhibah oleh saudara.
- k. Nenek, Dalam KHI, nenek adalah ahli waris langsung namun tidak disebutkan kedudukan dan hak warisnya, namun Syafi'i menempatkannya sebagai dzawil furudl memperoleh  $\frac{1}{6}$  harta, sedangkan Hazairin menempatkannya sebagai ahli waris langsung dengan memperoleh bagian sebagai mawali bagi ayah dan ibu pewaris.

- l. Bibi, dalam teori Syafi'i bibi tidak berhak mewaris selama ada baitulmal, dalam KHI tidak disebut, dan dalam teori Hazairin dimungkinkan mendapat warisan dalam kedudukan sebagai mawali.
  - m. Paman, KHI dan Syafi'i menempatkannya sebagai asabah, dan Hazairin menempatkannya sebagai mawali.
  - n. Wasiat, oleh ketiga teori diperuntukkan kepada kerabat yang tidak mempunyai hak waris, atau mempunyai hak waris tetapi terhibah atau tersisih karena semua harta telah terbagi habis, dan maksimal  $\frac{1}{3}$  harta. Perbedaan antara KHI di satu sisi dengan Syafi'i dan Hazairin di sisi yang lain terletak pada wasiat wajibah untuk anak dan orang tua angkat yang tidak dikenal oleh Syafi'i dan Hazairin. Perbedaan antara KHI dan Syafi'i di satu sisi dengan Hazairin di sisi yang lain terletak pada nasikh dan mansukh pada ayat-ayat kewarisan yang dikenal oleh KHI dan Syafi'i namun tidak dikenal oleh Hazairin.
  - o. Hibah, Syafi'i dan Hazairin tidak membatasi besarnya hibah yang diberikan. Bedanya dengan KHI (1) membatasi besarnya hibah maksimal  $\frac{1}{3}$  harta, dan (2) hibah orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan.
5. Keunggulan dan kelemahan teori KHI, Syafi'i, Hazairin adalah:
- a. KHI, keunggulannya antara lain adalah:
    - 1) Khusus dalam hal penggantian, (a) telah sesuai dengan prinsip persamaan dan keadilan menurut an Nisa ayat 7 dan 33, al Ahzab ayat

6 dan al Anfal ayat 75, (b) sesuai dengan kecenderungan al Qur'an yang hendak membangun sistem kekeluargaan yang bilateral, (c) sesuai dengan logika.

- 2) Menetapkan garis hukum yang tegas untuk ayah dalam hal pewaris tidak mempunyai anak atau saudara yaitu sebagai dzawil furudl dan memperoleh 1/3 harta.
- 3) Tentang hijab, anak perempuan dan cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti menghijab saudara..
- 4) Berlaku adil terhadap duda atau janda dalam pembagian rad.
- 5) Dalam gharawain konsisten terhadap ketentuan 2:1 Antara ayah (ahli waris laki-laki) dan ibu (ahli waris perempuan).
- 6) Memberikan bagian kepada anak dan orang tua angkat atas harta warisan.
- 7) Tentang hibah, (a) adanya pembatasan terhadap besarnya hibah sebagai perlindungan terhadap hak para kerabat yang kelak bakal menjadi ahli waris, (2) adanya ketentuan tentang hibah orang tua terhadap anak yang diperhitungkan sebagai warisan dalam rangka pemerataan manfaat warisan orang tua terhadap anak-anaknya.

Sedangkan kelemahannya antara lain adalah:

- 1) Dalam penentuan ahli waris masih mengandung sifat diskriminasi karena tidak mencantumkan bibi sebagai ahli waris.
- 2) Waris pengganti, (a) pengaturannya terlalu simpel, (b) ragu-ragu atau setengah hati dalam menentukan besarnya bagian ahli waris pengganti,

(c) ada kemungkinan bagian cucu dari anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan pewaris.

- 3) Tidak mengatur masalah musyarakah.
  - 4) Tidak mengatur secara tegas tentang kakek dan nenek.
  - 5) Wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada anak dan orang tua angkat tidak kepada kerabat yang tidak mempunyai hak waris seperti bibi dan keturunannya.
- b. Syafi'i, keunggulannya antara lain:
- 1) Dalam penentuan ahli waris (a) berorientasi pada sistem kekeluargaan masyarakat Arab yang berlaku saat itu, (b) lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kerabat sejalan dengan kaedah figh yang berlaku.
  - 2) Tentang kalalah (a) ada perbedaan yang tegas antara saudara sekandung, seayah, dan seibu, dan memberikan prioritas kepada saudara sekandung di atas saudara seayah, (b) lebih mengutamakan ayah daripada saudara, (c) sejalan dengan hadits janda Saad bin Rabi.
  - 3) Dalam perolehan rad memberikan keadilan dan persamaan hak kepada ibu dan saudara.
  - 4) Dalam hal gharawain konsisten pada pendirian 2:1 untuk ayah (laki-laki) dan ibu (perempuan).

sedangkan kelemahannya antara lain adalah:

- 1) Dalam penentuan ahli waris (a) bertentangan dengan prinsip persamaan dan keadilan sesuai jiwa al Qur'an Surat an Nisa ayat 7 dan 33, al Ahzab ayat 6 dan al Anfal ayat 75, (b) tidak sejalan dengan kecenderungan al Qur'an yang hendak membangun sistem kekeluargaan yang bilateral, dan (c) bertentangan dengan logika.
  - 2) Tentang kalalah, (a) tidak sesuai dengan arti hakiki kalalah yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat an Nisa ayat 176, (b) tidak ada kesesuaian antara keperluan masyarakat akan hukum dengan realitas pengaturan hukum yang ada, (c) tidak sejalan dengan asbabun nuzulnya, (d) janggal, pincang dan tidak adil karena saudara seibu dapat menyisihkan saudara sekandung dalam perolehan warisan, (e) tidak ada konsistensi antara penafsiran dengan penerapannya.
  - 3) Dalam hal pewaris tidak mempunyai anak atau saudara, ayah tidak mempunyai kedudukan yang tetap dalam perolehan hak waris.
  - 4) Tidak berlaku adil terhadap janda atau duda dalam perolehan rad.
  - 5) Tidak konsisten terhadap ketentuan an Nisa ayat 11 dan 12 dalam hal gharawain.
- c. Hazairin, keunggulannya antara lain:
- 1) Dalam penentuan ahli waris, (a) sejalan dengan prinsip persamaan dan keadilan sesuai al Qur'an surat An Nisa ayat 7 dan 33, al Ahzab ayat 6 dan al Anfal ayat 75, (b) sesuai dengan kecenderungan al Qur'an yang hendak membangun sistem kekeluargaan yang bilateral, (c) sesuai dengan logika.



2) Tentang kalalah, (a) tidak ada kemungkinan saudara sekandung tersisih oleh saudara seibu dalam perolehan warisan, (b) konsisten antara penafsiran dengan penerapannya, (c) sesuai dengan realitas masyarakat dan kebutuhan hukumnya, (d) sesuai dengan asbabun nuzulnya.

3) Anak perempuan dan cucu perempuan menghijab saudara.

4) Dalam gharawain konsisten terhadap ketentuan an Nisa ayat 11 dan 12.

Sedangkan kelemahannya antara lain adalah:

1) Dalam penentuan ahli waris, (a) agak bersifat individualis, (b) tidak sejalan dengan sistem kekeluargaan masyarakat Arab yang berlaku saat itu.

2) Waris pengganti, ada kemungkinan bagian cucu dari anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan pewaris.

3) Tentang kalalah, (a) tidak ada pembedaan antara ketiga jenis saudara, (b) bertentangan dengan hadist janda Saad bin Rabi dan hadits Abdurrahman, (c) tidak sesuai dengan arti hakiki an Nisa ayat 12, (d) tidak sejalan dengan Ijma, (e) lebih mengutamakan saudara daripada ayah apalagi kakek, (f) wasiat yang digunakan sebagai solusi seringkali diabaikan oleh pewaris semasa hidupnya.

4) Tidak ada jaminan kepastian tentang hak waris bagi ayah

5) Tidak berlaku adil terhadap duda atau janda dalam hal pembagian rad.

6) Dalam gharawain tidak konsisten terhadap ketentuan 2:1 antara ayah (ahli waris laki-laki) dan ibu (ahli waris perempuan).

## 5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menghapus diskriminasi secara keseluruhan, teori KHI seyogyanya mencantumkan bibi sebagai ahli waris. Itu dapat dilakukan dengan cara merubah ketentuan Pasal 174 ayat (1). Jika alternatif ini tidak dapat diterima, maka ketentuan Pasal 209 tentang wasiat wajibah sebaiknya diubah dan diperluas, yakni peruntukannya tidak hanya terbatas pada anak dan orang tua angkat tetapi juga kepada kerabat pewaris yang tidak mendapat bagian warisan.
2. Perlu ada penegasan pengertian tentang ahli waris pengganti Pasal 185 KHI. Itu dapat dilakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. agar dapat dijadikan pedoman terutama oleh kalangan praktisi di lingkungan Peradilan Agama, sehingga diperoleh keseragaman pemahaman dan penafsiran, dengan demikian dapat dicegah lahirnya putusan yang saling berdisparitas.
3. Istilah berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KHI yang dipergunakan dalam Buku Pintar Hakim, Panitera, Juru Sita Pengadilan Agama PTA Sulawesi Selatan saat memberikan bagian sama besar (1:1) kepada cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan pewaris seyogyanya diganti dengan istilah “tidak menyalahi ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI”, karena tindakan tersebut pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap garis hukum, bukan penerapan Pasal 185 (2) KHI, sehingga tidak menimbulkan akibat berupa kekacauan dan ketidak-konsistenan dalam penerapannya.

4. Persamaan yang terdapat antara teori KHI, Syafi'i, dan Hazairin hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan acuan utama dalam rangka penyusunan Undang-Undang tentang KHI, sedangkan perbedaannya jika tidak dapat dikompromikan, dapat pula dijadikan sebagai bahan pelengkap berupa doktrin-doktrin yang dapat dipilih guna mengisi kekosongan, mengingat KHI tidak mungkin mampu memberikan penyelesaian tuntas dalam arti menyusun secara lengkap terhadap semua masalah hukum kewarisan Islam di Indonesia.
5. Keunggulan dari masing-masing teori hendaknya dapat diberi catatan tersendiri, sehingga oleh kalangan praktisi dapat dijadikan sebagai prioritas dalam menyelesaikan masalah kewarisan untuk hal-hal yang oleh KHI tidak diatur secara khusus. Sedangkan sisi-sisi lemah dari ketiga teori tersebut dapat dijadikan sebagai perbendaharaan guna memperkaya wawasan keilmuan bidang hukum kewarisan Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- A. Djazuli dan I Nurol Aen, **Ushul Figh Metodologi Hukum Islam**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- A. Djazuli, **Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam**, Prenada Media, Jakarta, 2005
- A. Hasan, **Al Fara'id**, Tintamas, Jakarta, 1964
- A. Rachmad Budiono, **Pembahasan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- A. Sukris Sarmadi, **Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997
- Abdoeraoef, **Al Qur'an dan Ilmu Hukum**, Bulan Bintang, Jakarta, 1970
- Abdul Wahab Khalaf, **Usul Figh**, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, 1994
- Abdullah Siddik, **Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam**, Widjaya, Jakarta, 1984
- Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Waris Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Ahmad Hanafi, **Pengantar dan Sejarah Hukum Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, 1970
- Ahmad Rafiq, **Fiqh Mawaris**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Al Qur'an dan Terjemahannya**, Proyek Pengadaan Kitab Suci al Qur'an, Departemen Agama RI, 1979
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, **Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam**, UII Press Indonesia, Yogyakarta, 2001
- ....., **Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi**, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1997
- Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2004

- Amir Syarifuddin, **Hukum Kewarisan Islam**, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Anwar Haryono, **Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya**, Bulan Bintang, Jakarta, 1968
- Anwar Sitompul, **Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam**, Armiko, Bandung, 1984
- Asjmuni Abdurrahman, **Pengantar' Kepada Ijtihad**, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- , **Qawa'id Fiqhiyyah, Arti, Sejarah dan Beberapa Qaidah Kulliyah**, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2003
- Asy Syafi'i, **Al Umm** (Kitab Induk) terjemahan Ismail Yakub, CV. Faizan, Jakarta, 1962
- , **Ringkasan Kitab Al Umm, Buku I dan II**, Penerjemah Muhammad Yasir Abd. Muthalib dan Andi Arlin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005
- Asyhari Abta dan Djunaedi Abd. Syakur, **Ilmu Waris Al-Faraidl**, Pustaka Hikmah Perdana, 2005
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Simposium Hukum Waris Nasional**, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1963
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit bUniversitas Diponegoro Semarang, 1994
- Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru Sita, **Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan**, 1998
- Cik Hasan Bisri, **Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000

- Endang Sumiarni, **Kajian Hukum Perekonomian yang Berkeadilan Jender**, Wondrifful Publishing Company, Yogyakarta, 2004
- Fatchur Rahman, **Ilmu Waris**, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1981
- Gemala Dewi, et al, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia**, Predana Media dan BPUI, Jakarta, 2005
- Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003
- Hazairin, **Hukum Baru di Indonesia**, Bulan Bintang, Jakarta
- ....., **Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits**, Tintamas, Jakarta, 1982
- ....., **Hukum Kekeluargaan Nasional**, Tintamas, Jakarta, 1962
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, **Kompilasi Hukum Kewarisan Islam**, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995
- Ikbāl Abdurrauf Saimima, **Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam**, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988
- Imad Zaki Al-Barudi, **Tafsir Wanita**, Penerjemah Samson Rahman, Pustaka al Kausar, Jakarta, 2004
- J. Satrio, **Hukum Waris**, Alumni, Bandung, 1992
- Jaih Mubarak, **Metodologi Ijtihad Hukum Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2002
- KN. Sofyan Hasan, **Hukum Islam**, Literata Lintas Media, Jakarta, 2004
- M. Ali Hasan, **Hukum Kewarisan dalam Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, 1979
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, **Fiqh Mawaris**, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999
- ....., **Gerak Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, 1975
- M. Yahya Harahap, **Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Mahfud MD, et al, **Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 1993

- Mahmud Yunus, **Hukum Warisan Dalam Islam**, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989
- M. Nashiruddin al Albani, **Ringkasan Shahih Muslim**, Penerjemah Elly Lathifah, Gema Insani, Jakarta, 2005.
- Moh. Anwar, **Faraidl Hukum Waris Islam dan Masalah-Masalahnya**, Al-Ikhlash, Surabaya, 1982
- Moh. Nurhakim, **Metodologi Studi Islam**, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004
- Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Muhammad Ali As Shabuni, **Hukum Waris Dalam Syare'at Islam (Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Waris)**, Diponegoro, Bandung, 1988
- ....., **Pembagian Waris Menurut Islam**, diterjemahkan oleh A.M. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal 19
- Muhammad Amir Suma, **Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam**, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, **Falsafah Hukum Islam**, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001
- M. Quraish Shihab, **Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an**, Lentera Hati, Jakarta, 2000
- Mujiono Abdillah, **Dialektika Hukum dan Islam Perubahan Sosial**, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2003
- Nahdlatul Ulama, **Solusi Problematika Hukum Islam**, LTN dan Diantama, Surabaya, 2004
- Nasir Makarim Syirazi, **Keadilan Ilahi**, Yapi, Jakarta, 1991
- Noqarsyah Moedi Gayo, **Kamus Istilah Agama Islam**, Progres, Jakarta, 2004
- Roihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Safiudin Shidik, **Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer**, Inti Media Cipta Nusantara, 2004

- Sajuti Thalib, **Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Satria Effendi M. Zein, **Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer**, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Sayyid Quthb, **Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan al Qur'an, Jilid 4 dan 5**, Penerjemah As'ad Yasin, et al, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Sobhi Rahmassuni, **Filsafat Hukum dalam Islam**, terjemahan Ahmad Sujiono, Al Ma'arif, Bandung, 1977
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Sudarwan Dariri, **Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Sudikno Mertokusuma dan A. Pitto, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Sulaiman Abdullah, **Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Sulaiman Rasyid, **Fiqh Islam**, Attahiriyyah, Jakarta, 1976
- Sumadi Suryabrata, **Metodologi Hukum Islam Kontemporer**, Penerjemah Yushadi, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20**, Alumni, Bandung, 1994
- Taha Jabir al Alwani, **Metodologi Hukum Islam Kontemporer**, Penerjemah Yushadi, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Tim Ditbinbapera, **Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam**, Al Hikmah, Jakarta, 1993
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- W.J.S. Poerwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Wirdjono Prodjodikoro, **Hukum Waris di Indonesia**, Sumur, Bandung, 1983



## 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Keputusan MA Nomor 86K/AG/1994 Tanggal 20 Juli 1995

Keputusan MA Nomor 184K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996

## 3. Makalah dan Jurnal

Abdullah Kelib, *Hukum Waris Islam dan Masalahnya*, Sultan Agung No 44 Tahun II Nopember, Unissula, Semarang, 1990

....., *Beberapa Catatan Efektifitas Kompilasi Hukum Islam*, dikutip dari Mahfud MD et al, UII Press Indonesia, Yogyakarta, 1993

Ahmad Azhar Basyir, *Reaktualisasi Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan*, dikutip dari Iqbal Abdurrauf Saimima, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988

Add. Salam dan Suhartono Notohardjo, *Aktualisasi Hukum Islam Dalam Masalah Perkawinan dan Kewarisan di Indonesia*, dikutip dari *Mimbar Hukum* Nomor 54 Tahun XII 2001

Afdal, *Pilihan Hukum dalam Perkara Warisan Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, dikutip dari *Mimbar Hukum* Nomor 40 Tahun IX 1998

Alizar Jas, *Pengertian Kata Walad dalam Surat An Nisa Ayat 176*, dikutip dari *Mimbar Hukum* Nomor IX 1998

Amul Syarkowi, *Kompilasi Hukum Islam dan Upaya Pemberlakuannya Sebagai Hukum (Terapan) Tertulis Pada Peradilan Agama*, dikutip dari *Mimbar Hukum* Nomor 62 Tahun XIV 2003

- A. Nurul, **Menggagas Hukum Kewarisan Nasional di dalam Perspektif Bilateral**, dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 58 Tahun XIII 2002
- Baidlowi, **Ketentuan Hukum Waris Saudara dalam Konteks Hukum Islam**, dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 41 Tahun X 1999
- Dagar, **Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan**, dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 54 Tahun XII 2001
- Dja'far Abdul Muchith, **Problematisa Kakek dan Tantangan Bagi Kompilasi Hukum Islam**, dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 58 Tahun XIII 2002
- ....., **Keadilan dan Keluasan Hukum Waris Islam yang Unik**. Dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 54 Tahun XII 2001
- Hajier, **Legitimasi Ahli Waris di Pengadilan Agama dalam Perspektif Fiqh**, dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 40 Tahun IX 1998
- Husnaini A, **Telaah Kritis Terhadap KHI Dari Sudut Kesetaraan Jender**, dikutip dari Mimbar Islam 62 Tahun XIV 2003
- Ichtijanto SA, **Percikan Pemikiran Pembaharuan Hukum Kewarisan oleh al Qur'an**, dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 59 Tahun XIV 2003
- ....., **Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam di Masa Mendatang**, dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 27 Tahun VII 1996
- Imran AM, **Mempersempit Ruang Lingkup Penafsiran Pasal 185 KHI**, dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 54 Tahun XII 2001
- Ismail Suni, **Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia**, dikutip dari Tim Ditbinbapera, Al Hikmah, Jakarta, 1993
- Kamaluddin Marzuki, **Jangan Sampai Energi Terbuang Percuma**, dikutip dari Iqbal Abdurrauf Saimima, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988
- Karimatul Ummah, **Pengembangan Konstruksi Metodologi Hukum Islam bagi Perubahan Masyarakat Islam Indonesia**, dikutip dari Jurnal Hukum Nomor 25 Vol II, UII, Yogyakarta, 2004
- Kasroni, **Kalalah**, dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 44 Tahun X 1999

- M. Nur Yasin, **Mencermati Usul revisi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**, dikutip dari *Mimbar Hukum Islam* 60 Tahun XIV 2003
- M. Tahir Azhari, **Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam**, dikutip dari *Tim Ditbinbapera, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Al Hikmah, Jakarta, 1993
- M. Yahya Harahap, **Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi**, dikutip dari Iqbal Abdurrauf Saimima, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983
- ....., **Materi Kompilasi Hukum Islam, Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia**, dikutip dari Mahfud MD, et al, UII Press, Yogyakarta, 1993
- Mahmud Yunus, **Pembahasan Umum Atas Makalah Azas-azas Tata Hukum Waris Nasional**, dikutip dari BPHN, *Simposium Hukum Waris Nasional*, 1963
- Munawir Sadzali, **Reaktualisasi Ajaran Islam**, dikutip dari Iqbal Abdurrauf Saimima, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983
- Rachmat Syaff'i, **Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Kewarisan Saudara Kandung Dengan Anak Perempuan**, dikutip dari *Mimbar Hukum* Nomor 44 Tahun X 1999
- Roihan A. Rasjid, **Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah**, dikutip dari *Mimbar Hukum* Nomor 23 Tahun VI 1995
- Satria Effendi, M Zein dan Zain Badjeber, **Analisa Yurisprudensi tentang Kewarisan**, dikutip dari *Mimbar Hukum* Nomor 37 Tahun IX 1998
- , **Analisa Yuridis tentang Perkara Kewarisan**, dikutip dari *Mimbar Hukum* Nomor 30 Tahun XIII 1997
- , **Analisa Yurisprudensi Tentang Hak Opsi**, dikutip dari *Mimbar Hukum Islam* 45 Tahun 1999
- , **Analisa Yurisprudensi Tentang Kewarisan**, dikutip dari *Mimbar Islam* Nomor 58 Tahun XIII 2002

**Suhartono Notohardjo, Egalitarianisme dalam Perspektif Hukum Islam (Refleksi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Kesetaraan Gender), dikutip dari Mimbar Hukum 62 Tahun XIV 2003**

**Syaifuddin, Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 58 Tahun XIII 2002**

**Wahyu Widiana, Aktualisasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-Undang, dikutip dari Mimbar Hukum Nomor 58 Tahun XIII 2002**

Mimbar Hukum Nomor 30 Tahun VII 1997

Mimbar Hukum Nomor 37 Tahun XI 1998

Mimbar Hukum Nomor 40 Tahun XI 1998

Mimbar Hukum Nomor 44 Tahun X 1999

Mimbar Hukum Nomor 44 Tahun X 1999

Mimbar Hukum Nomor 46 Tahun XI 2000

Mimbar Hukum Nomor 58 Tahun XII 2002

Mimbar Hukum Nomor 59 Tahun XIV 2003

Mimbar Hukum Nomor 60 Tahun XIV 2003

Jurnal Hukum (iusquia iustum), Nomor 25 Vol II, UII, 2004